



# TOP 99

INOVASI  
PELAYANAN  
PUBLIK  
TAHUN 2017  
*PUBLIC SERVICE  
INNOVATION 2017*





# TOP 99

INOVASI  
PELAYANAN  
PUBLIK  
TAHUN 2017  
*PUBLIC SERVICE  
INNOVATION 2017*



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
*MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRACY REFORM REPUBLIC OF INDONESIA*

---

**Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 2017**  
***Top 99 Indonesia Public Service Innovations 2017***

Copyright:  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ISBN : 978-602-71510-7-9

Diterbitkan oleh:  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta 12190

---

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

# TOP 99

INOVASI  
PELAYANAN  
PUBLIK  
TAHUN 2017  
*PUBLIC SERVICE  
INNOVATION 2017*



## Deputi Bidang Pelayanan Publik

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menerbitkan Buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Penerbitan buku ini merupakan bagian dari penghargaan terhadap Inovasi Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN yang terpilih menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

Penerbitan buku ini merupakan bagian dari perjalanan yang cukup panjang dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Mereka yang terpilih menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi yang terpilih dari 3.054 yang mendaftar secara online dalam registrasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diproses melalui seleksi administrasi, evaluasi proposal Tim Evaluasi dan reviu dari Tim Panel Independen.

Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas arahan dan kebijakan beliau, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dalam berlangsung dan dipertahankan dari tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah bekerja keras memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Terima kasih ingin kami sampaikan kepada teman-teman jajaran Deputi Bidang Pelayanan Publik yang tidak kenal lelah menyiapkan dan menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat sebagaimana arahan Bapak Menteri sebagai bahan *transfer of knowledge* dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan baru mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia.

Deputi Bidang Pelayanan Publik,

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA

# Deputy of Public Services

*By saying Thanks to Almighty God, we can publish the Top 99 Public Service Innovation Book. The publication of this book is part of the appreciation of the Public Service Innovation of Ministries / Agencies, Local Governments and SOEs selected to be the Top 99 Public Service Innovations in the Public Service Innovation Competition of 2017.*

*The publication of this book is part of a long journey in the event of the Public Service Innovation Competition 2017. Those elected to the Top 99 Public Service Innovations are the selected innovations of 3,054 who enroll in the online registration of the Public Service Innovation Information System (Sinovik) processed through selection Administration, evaluation of the evaluation team's proposal and review from the Independent Panel Team.*

*On this good occasion, we would like to thank the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform for his direction and policy, the Public Service Innovation Competition in progress and maintained from 2014, 2015, 2016 and 2017. We also thank The Evaluation Team and the Independent Panel Team had worked hard to select the Top 99 Public Service Innovations. We would like to express our gratitude to our friends of the Deputy Ministry of Public Service who tirelessly prepare and publish this book.*

*Hopefully this book is useful as the direction of Mr. Minister as the material of transfer of knowledge and become reference material for the parties who need new knowledge about the development of innovation of public service in Indonesia.*

**Deputy of Public Service**

**Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA**



## Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Inovasi pelayanan publik berperan sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas publik. Oleh karena itu kebaruan inovasi, manfaat, dan keberlanjutan yang teruji dari suatu instansi atau unit kerja diharapkan dapat menjadi praktik terbaik untuk direplikasi oleh instansi atau unit kerja yang lain. Dengan cara demikian kita mengharapkan pelayanan publik di Indonesia menjadi semakin maju.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan bagian dari strategi mendapatkan inovasi Pelayanan Publik yang terbaik, karena inovasi yang terpilih merupakan hasil penilaian yang objektif terhadap keandalan inovasi tersebut. Disamping itu dengan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik akan mendorong persaingan yang produktif antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam melahirkan inovasi pelayanan publik.

Saya menyambut baik penerbitan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2017. Harapan saya buku ini menjadi sumber inspirasi bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang akan melakukan *transfer of knowledge*. Disamping itu buku ini diharapkan sekaligus menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan baru mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Terima kasih saya sampaikan kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik dan seluruh Jajaran yang telah bekerja keras menyiapkan dan menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,**

**Dr. Asman Abnur, SE M.Si.**

# *The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform*

*Public service innovation serves as a means of accelerating public quality improvement. Therefore, the innovative innovation, benefits, and sustainability tested from an agency or work unit is expected to be the best practice to be replicated by other agencies or work units. In this way we expect public services in Indonesia to become more advanced.*

*The Public Service Innovation Competition is part of the best Public Service innovation strategy, because the chosen innovation is the result of an objective assessment of the reliability of the innovation. In addition, the Public Service Innovation Competition will encourage productive competition among Ministries / Institutions, Local Governments and SOEs in generating public service innovation.*

*I welcome the publication of the Top 99 Public Service Innovations Indonesia Year 2017. My hope this book is a source of inspiration for the Ministry / Institution, Local Government, and BUMN (State Owned Enterprises) will transfer the knowledge. In addition, this book is expected to be a reference for those who need new knowledge about the development of innovation of public services in Indonesia.*

*On this occasion I would like to thank the Evaluation Team and the Independent Panel Team who have done their job well so that they can choose Top 99 Public Service Innovation. I would like to thank the Deputy of the Ministry of Public Services and the whole range who have worked hard to prepare and publish this book. Hopefully, It may be useful.*

***Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform,***

***Dr. Asman Abnur, SE M.Si.***

Kata Pengantar Deputi Bidang Pelayanan Publik	vi
Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	viii
Daftar Isi	x
<b>A. KEMENTERIAN</b>	
1. <b>119 – Kolaborasi Nasional Layanan Emergensi Medik di Indonesia</b>	2
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan	
2. <b>3 In 1 Kariadi Peduli</b>	4
RSUP dr. Kariadi Semarang, Kementerian Kesehatan	
3. <b>AKOEPUNTUR (Aplikasi Kompetensi Turunan) CPO <i>Mini Plant</i></b>	6
SMK - SMTI Banda Aceh, Kementerian Perindustrian	
4. <b>Aplikasi Laporan Diri WNI Terintegrasi Secara <i>Online</i> pada Perwakilan RI se-Jerman</b>	8
Kedutaan Besar RI Berlin, Kementerian Luar Negeri	
5. <b>Aplikasi Sistem Informasi <i>Database</i> Bantuan Hukum (SIDBANKUM)</b>	10
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
6. <b>Hemat 60 % Biaya Energi Dengan Alat Pembuat Gas Batubara Bersih di Industri Kecil</b>	12
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
7. <b>Ini Mobil SIANI – Sahabat Setia Petani</b>	14
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	
8. <b>INTI (Inovasi Terintegrasi) Layanan Pertanahan Pemalang #SemakinCepatdanMudah</b>	16
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Badan Pertanahan Nasional	
9. <b>KAKAP Untuk Layanan Administrasi Pertanahan Terpadu</b>	18
Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Badan Pertanahan Nasional	
10. <b>KIARKOD: <i>Tracking Order</i> Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T</b>	20
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Kementerian Perindustrian	

<i>Foreward Deputy of Public Service</i>	<i>vi</i>
<i>Greetings the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform</i>	<i>viii</i>
<i>Table of Content</i>	<i>x</i>
<b>A. MINISTRY</b>	
1. <b>119 - National Collaboration of Medical Emergency Services in Indonesia</b> <i>Directorate of Referral Health Services, Directorate General of Health Efforts, Ministry of Health</i>	<b>2</b>
2. <b>3 In 1 Kariadi Peduli</b> <i>dr. Kariadi Semarang Central Public Hospital, Ministry of Health</i>	<b>4</b>
3. <b>AKOEPUNTUR (Application of Derived Competence) CPO Mini Plant</b> <i>SMK - SMTI Banda Aceh, Ministry of Industry</i>	<b>6</b>
4. <b>Integrated self-report application online at delegation of Indonesia in Germany</b> <i>Embassy of the Republic of Indonesia in Berlin, Ministry of Foreign</i>	<b>8</b>
5. <b>Application of Legal Aid Database Information System (SIDBANKUM)</b> <i>National Legal Development Agency, Ministry of Law and Human Rights</i>	<b>10</b>
6. <b>Save 60% Energy Cost With Clean Coal Gas Generator Tool in Small Industry</b> <i>Center for Research and Development of Mineral and Coal Technology, Ministry of Energy and Mineral Resources</i>	<b>12</b>
7. <b>This Car SIANI - Loyal Friend Farmer</b> <i>Center for Seed Germination and Plantation Protection Surabaya, Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture</i>	<b>14</b>
8. <b>INTI (Integrated Innovation) Pernalang Land Service #SemakinCepatDanMudah</b> <i>Land Affairs Office of Pernalang Regency, National Land Agency</i>	<b>16</b>
9. <b>KAKAP For Integrated Land Administration Services</b> <i>Land Affairs Office of Gresik Regency, National Land Agency</i>	<b>18</b>
10. <b>KIARKOD: Tracking Order of Service Information System of B4T</b> <i>Central for Material and Technical Products, Ministry of Industry</i>	<b>20</b>

11. Laboratorium Manajemen Data	22
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
12. MAGMA ( <i>Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment</i> ) Indonesia	24
Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
13. Pemanfaatan Serat Eceng Gondok dalam Pembuatan Soket Kaki dan Tangan Palsu (Prostesis)	26
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I, Kementerian Kesehatan	
14. PRIOQ KLIK	28
Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Kementerian Pertanian	
15. Ratu Bestari (Kerapihan, Keteraturan, Kebersihan, Kelestarian, dan Kedisiplinan) untuk Tata Kerja yang Lebih Efisien dan Efektif	30
Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian	
16. RISOL GEPENG MAS	32
Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi, Kementerian Sosial	
17. SIBIMA KONSTRUKSI (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi)	34
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	
18. SINERGI Desa (Sistem Informasi Energi Desa)	36
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
19. SIPUHH: Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan	38
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Kehutanan	
20. Teknologi <i>E-Filing Renewal Trademark</i> di Indonesia	40
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
<b>B. LEMBAGA</b>	
21. BPKB <i>Delivery</i>	42
Kepolisian Resor Brebes, Kepolisian Negara Republik Indonesia	

<b>11. Data Management Laboratory</b>	<b>22</b>
<i>Agency for Health Research and Development</i>	
<b>12. MAGMA (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment) Indonesia</b>	<b>24</b>
<i>Geological Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources</i>	
<b>13. Utilization of Water Hyacinth Fiber in the Making of Foot Sockets and Artificial hands (Prosthesis)</b>	<b>26</b>
<i>Health Polytechnic Ministry of Health Jakarta I, Ministry of Health</i>	
<b>14. PRIOQ CLICK</b>	<b>28</b>
<i>Tanjung Priok Agriculture Quarantine Center, Ministry of Agriculture</i>	
<b>15. Queen Bestari (Tidiness, Orderliness, Hygiene, Sustainability, and Discipline) for More Efficient and Effective Work Procedures</b>	<b>30</b>
<i>Legal and Organization Bureau of the Secretariat General, Ministry of Industry</i>	
<b>16. RISOL GEPENG MAS</b>	<b>32</b>
<i>Bina Karya Pangudi Luhur Social House Bekasi, Ministry of Social</i>	
<b>17. SIBIMA KONSTRUKSI (Self Management Intensive Learning Information System of Construction)</b>	<b>34</b>
<i>Implementation of Construction Technology Hall, Directorate General of Construction, Ministry of Public Works</i>	
<b>18. SINERGI Desa (Village Energy Information System)</b>	<b>36</b>
<i>Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources</i>	
<b>19. SIPUHH: Realizing Forestry Governance</b>	<b>38</b>
<i>Directorate of Contribution and Distribution of Forest Products, Directorate General of Sustainable Production Forest Management, Ministry of Forestry</i>	
<b>20. Technology of E-Filing Renewal Trademark in Indonesia</b>	<b>40</b>
<i>Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights</i>	
<b>B. INSTITUTIONS</b>	
<b>21. BPKB Delivery</b>	<b>42</b>
<i>Brebes Resort Police, The Indonesian National Police</i>	

22. <i>E-Lelang Cepat</i>	44
Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
23. Tombol "BISA" ( <i>Brilliant, Innovative, Speed, Accountable</i> )	46
Kepolisian Resor Sukabumi Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia	
<b>C. PROVINSI</b>	
24. BANG ELIS HADIR, Kampung Kami Jadi Terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari di Daerah Pedalaman Kalbar)	48
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
25. HP Solusi Anak Berkebutuhan Khusus	50
RSJ Menur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
26. Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu	52
Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	
27. Kader Peduli Luka dan Perawatan Luka Diabet Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo	54
Dinas Kesehatan, Pemerintah DKI Jakarta	
28. Layanan Judes Samsat Jombang, <i>tagline</i> (Layanan Jujur Desa Yang Ramah)	56
UPT Badan Pendapatan Daerah Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
29. Layanan Terpadu Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan SIM	58
UPT Samsat Medan Selatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	
30. Layanan WARAS (Wisata Arsip Untuk Anak Sekolah)	60
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
31. Mencegah Perdarahan Tali Pusat Dengan Kalisat (Karet Tali Pusat)	62
RSUD dr. Saiful Anwar – Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
32. Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas	64
SMA Negeri Bali Mandara, Pemerintah Provinsi Bali	

22. <i>E-Auction Fast</i>	44
<i>Directorate of SPSE Development, National Public Procurement Agency</i>	
23. <i>"BISA" Button (Brilliant, Innovative, Speed, Accountable)</i>	46
<i>Sukabumi Resort Police Department, The Indonesian National Police</i>	
<b>C. PROVINCE</b>	
24. <i>BANG ELIS HADIR, Our Village Become Bright (Solar Power Station in the countryside of West Kalimantan)</i>	48
<i>Department of Energy and Mineral Resources, West Kalimantan Province</i>	
25. <i>HP Solutions for Children with Special Needs</i>	50
<i>RSJ Menur, East Java Province</i>	
26. <i>Integrated Health Insurance for Disabled Persons</i>	52
<i>Implementing Agency of Social Health Insurance, Special Region of Yogyakarta Province</i>	
27. <i>Cadre of Care About Injuries and Treatment of Diabet Pasar Rebo Districts Public Health Center</i>	54
<i>public health Office, Special Region of Jakarta Province</i>	
28. <i>Judes Samsat Jombang Service, tagline (Friendly Village Jujung Service)</i>	56
<i>UPT Regional Revenue Agency Jombang, East Java Province</i>	
29. <i>Integrated Service of Motor Vehicle Tax Payment Service and SIM Extension</i>	58
<i>UPT Samsat South Medan, Regional Tax and Retribution Agency, North Sumatra Province</i>	
30. <i>WARAS Service (Archive Tour For School Children)</i>	60
<i>Library and Filing Service, East Java Province</i>	
31. <i>Preventing Cord Bleeding With Kalisat (umbilical Rubber)</i>	62
<i>RSUD dr. Saiful Anwar - Malang, East Java Province</i>	
32. <i>Introducing the Poor into the Golden Generation</i>	64
<i>SMA Negeri Bali Mandara, Bali Province</i>	

33. MR SAHDU (Manajemen Risiko Sanggahan dan Pengaduan) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	66
34. PAPERDA MEGANG (Peningkatan Kapasitas Melalui Magang ASN Asli Papua) Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat	68
35. PELUK MY DARLING (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh Dengan <i>Garden Healing</i> ) RSUD Kelet Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	70
36. PENA BERKARIB ( <a href="http://petabencana.id">petabencana.id</a> ) Bersama Kurangi Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	72
37. Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran Melalui "SI BINA CANTIK" (Sistem <i>Bridging</i> SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG's Menuju Akuntabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	74
38. PLANET KAKAO: Pengelolaan dan Edukasi Terpadu Kakao Melalui Kebun Rakyat Demi Indonesia Daulat Coklat Dinas Perkebunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76
39. Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) Biro Humas Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Bali	78
40. Si Dukun 3 <i>in</i> 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	80
41. SIMANTRI: Bali <i>Go Green</i> , Petani Sejahtera Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Pemerintah Provinsi Bali	82
42. SIMAS-LH <i>Online</i> (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Berbasis <i>Online</i> ) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	84
43. SIMPONI ASN BAHTERAMAS Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	86

33. <i>MR SAHDU (Risk Management Oppose and Complaint) Procurement Services of Government Goods/Services</i>	66
<i>UPT Service Procurement Goods/Services, Office of Investment and Integrated Services One Door, East Java Province</i>	
34. <i>PAPEDA MEGANG (Capacity Building Through Internship Original ASN Papua)</i>	68
<i>Organization Bureau of the Regional Secretariat, West Papua Province</i>	
35. <i>PELUK MY DARLING (Whole Leprosy Treatment With Garden Healing)</i>	70
<i>RSUD Kelet Jepara Regency, Central Java Province</i>	
36. <i>PENA BERKARIB (petabencana.id) Together Reduce Disaster Risk</i>	72
<i>Regional Disaster Management Agency, Special Region of Jakarta Province</i>	
37. <i>Simplification of Admission Procedure Through the "SI BINA CANTIK" (Bridging SIM RSMS, BPJS, and INA-CBG's Systems Into the JKN Accountability, Transparency and Efficiency of JKN Health Services In Plenary)</i>	74
<i>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Central Java Province</i>	
38. <i>PLANET KAKAO: Integrated Management and Education of Cocoa Through People's Garden For Indonesia Chocolate Daulat</i>	76
<i>Department of Plantation, East Java Province</i>	
39. <i>Any Balinese Podium Talk Anything (PB3AS)</i>	78
<i>Public Relations Bureau of the Regional Secretariat, Bali Province</i>	
40. <i>The Shaman 3 in 1</i>	80
<i>Department of Population and Civil Registration, Special Region of Jakarta Province</i>	
41. <i>SIMANTRY: Bali Go Green, Prosperous Farmer</i>	82
<i>Department of Food Crops, Horticulture, and Plantation, Bali Province</i>	
42. <i>SIMAS-LH Online (Online Based Environmental Information System)</i>	84
<i>Department of Environmental Management, South Sulawesi Province</i>	
43. <i>SIMPONI ASN BAHTERAMAS</i>	86
<i>Local Employment Agency, Southeast Sulawesi Province</i>	

44. Terpangkasnya Waktu Tunggu Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan Melalui "PENETRASI <i>ONLINE</i> " (Pengembangan Sistem SMS <i>Gateway Menuju Registrasi Online</i> )	88
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
<b>D. KABUPATEN</b>	
45. <i>2H2 Center Kerabat Ibu Dan Bayi</i>	90
Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur	
46. <i>Akselerasi Pelayanan Kepegawaian Dengan Mobile SI-CAKEP</i>	92
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Wajo	
47. <i>Alarm Persalinan</i>	94
UPTD Puskesmas Kecamatan Kerinci Kanan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Siak	
48. <i>Antrean Regol</i>	96
UPTD Puskesmas Kemusu II, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Boyolali	
49. <i>AYUNDA SI MENIK (Ayo Tunda Usia Menikah)</i>	98
UPTD Puskesmas Gedangsari II Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	
50. <i>BANG MUDA (Bangka Mudah Dapat Akta) - Solusi Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian</i>	100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Bangka	
51. <i>CSR Untuk Rakyat</i>	102
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	
52. <i>Family Gathering Terpadu SEMAR PATRI (Strategi Menurunkan Angka Readmisi Pasien Psikiatri) Wujudkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna di Ruang Rawat Inap Jiwa</i>	104
RSUD dr. Loekmono Hadi, Pemerintah Kabupaten Kudus	
53. <i>Implementasi E-VB di Banyuwangi</i>	106
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	

44. <i>Reducing of Waiting Time Outpatient Registration Services Through "ONLINE PENETRATION" (Development of SMS Gateway System Towards Online Registration)</i>	88
<i>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo – Purwokerto, Central Java Provinc</i>	
<b>D. DISTRICT</b>	
45. <i>2H2 Center of Mother and Infant Relatives</i>	90
<i>public health Office, East Flores Regency</i>	
46. <i>Accelerated Staffing Service With Mobile SI-CAKEP</i>	92
<i>Employee and Human Resource Development Agency, Wajo Regency</i>	
47. <i>Alarm Birth</i>	94
<i>UPTD Community Health Center of Kerinci Kanan District Health Office, Siak Regency</i>	
48. <i>Regol Queue</i>	96
<i>UPTD Community Health Center of Kemusu II Health Office, Boyolali Regency</i>	
49. <i>AYUNDA SI MENIK (Come On, Delay Age Married)</i>	98
<i>UPTD Community Health Center of Gedangsari II Health Office, Gunung Kidul Regency</i>	
50. <i>BANG MUDA (Bangka can easily be deed) - Birth Certificate Service Solution and Death Deed</i>	100
<i>Department of Population and Civil Registration, Bangka Regency</i>	
51. <i>CSR for the People</i>	102
<i>Regional Planning and Development Agency, West Aceh Regency</i>	
52. <i>Integrated Family Gathering SEMAR PATRI (Strategy to Reduce Psychiatric Patient Readmission Rate) Achieve Solid Mental Health Service in Inpatient Soul Room</i>	104
<i>RSUD dr. Loekmono Hadi, Kudus Regency</i>	
53. <i>Implementation of E-VB in Banyuwangi</i>	106
<i>Community and Village Empowerment Office, Banyuwangi Regency</i>	

<b>54. eDOTEL &amp; TRAVEL</b>	<b>108</b>
SMK Negeri 2, Pemerintah Kabupaten Pinrang	
<b>55. LASITER AMB (Layanan Transportasi Terpadu Angkutan Masyarakat Bintuni)</b>	<b>110</b>
UPT Angkutan Masyarakat Bintuni, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Bintuni	
<b>56. Layanan Perizinan Secara <i>Online</i> dan Layanan Izin 3 Jam</b>	<b>112</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kebumen	
<b>57. Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Melalui Sistem Elektronik Voting Yang Menggunakan KTP Elektronik, KK, dan Akta Berbasis NIK</b>	<b>114</b>
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Batanghari	
<b>58. MP – TGR (Majelis Pertimbangan - Tuntutan Ganti Rugi)</b>	<b>116</b>
Badan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo	
<b>59. Ngrumpi Sehat Berkarya Bersama Saudaraku</b>	<b>118</b>
UPTD Puskesmas Tongas Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo	
<b>60. OASE Sahabat Hati, "<i>Online Anywhere Service</i>, Satu Hari Banyak Tempat, Harapan Terpenuhi"</b>	<b>120</b>
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	
<b>61. Opung Sari Basah Bang: Mewujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Deli Serdang Berseri (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, Indah)</b>	<b>122</b>
Dinas Pendidikan Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	
<b>62. Paha Sylpi Bangkitkan Gairah Peternak Pinggir Hutan</b>	<b>124</b>
Dinas Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	
<b>63. PANTASI MART (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat)</b>	<b>126</b>
Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang	
<b>64. PATUH SELAM (Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Selat Dalam)</b>	<b>128</b>
Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Pemerintah Kabupaten Kapuas	
<b>65. PRO MASTER GO SEHATI</b>	<b>130</b>
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	

<b>54. eDOTEL &amp; TRAVEL</b>	<b>108</b>
<i>RSUD dr. Loekmono Hadi, Kudus Regency</i>	
<b>55. LASITER AMB (Integrated Transportation Service of Bintuni People's Transportation)</b>	<b>110</b>
<i>UPT Public Transport Bintuni, Department of Transportation, Bintuni Regency</i>	
<b>56. Online Licensing Service and 3 Hour License Service</b>	<b>112</b>
<i>Department of Investment and One Stop Integrated Service, Kebumen Regency</i>	
<b>57. Model of Village Head Selection (PILKADES) Through Voting Electronic System Using Electronic Identity Card, Family Card, and NIK Based Certificate</b>	<b>114</b>
<i>Department of Population and Civil Registration, Batanghari Regency</i>	
<b>58. MP - TGR (Assembly Considerations of Indemnification)</b>	<b>116</b>
<i>Regional Government Finance Agency, Gorontalo Regency</i>	
<b>59. Healthy Chit Chat Working With My Brother</b>	<b>118</b>
<i>UPTD Community Health Center Tongas Health Office, Probolinggo Regency</i>	
<b>60. OASE Friends Heart, "Online Anywhere Service, One Day Many Places, Expectations Fulfilled"</b>	<b>120</b>
<i>Department of Population and Civil Registratio, Tanah Datar Regency</i>	
<b>61. Opung Sari Wet Bang: Realizing Environmental School and Deli Serdang Berseri (Clean, Neat, Cool, Umbrageous, Beautiful)</b>	<b>122</b>
<i>Deliserdang Education Agendy, Deli Serdang Regency</i>	
<b>62. Sylpi's Thighs Awaken the Passion of Forest-Edge Breeders</b>	<b>124</b>
<i>Agency of Animal Husbandry and Fisheries, Bojonegoro Regency</i>	
<b>63. PARTNERS MART (Community Sanitation Facilities Procurement Center)</b>	<b>126</b>
<i>Water and Sanitation Working Group, Regional Planning and Development Agency, Sumedang Regency</i>	
<b>64. PATUH SELAM</b>	<b>128</b>
<i>Selat Dalam sub-districts, Selat Districts, Kapuas Regency</i>	
<b>65. PRO MASTER GO SEHATI</b>	<b>130</b>
<i>Social Service, Labor, and Transmigration, Hulu Sungai Selatan Regency</i>	

66. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) BAHARI Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sinjai	132
67. SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan	134
68. SELEMPANG MERA (Selamatkan Pasien Pasung Melalui Tim Samurai ODGJ) UPTD Puskesmas Omben Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sampang	136
69. Si Jempol (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien <i>Online</i> ) RSUD Balaraja, Pemerintah Kabupaten Tangerang	138
70. SIGAP SRATUS 369 PLUS (Aksi Tanggap Pada Sapi Madura Bunting dan Partus) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan	140
71. SIPEKAT: Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	142
72. Siswa Asuh Sebaya (SAS) Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	144
73. SUNMOR SEMBADA MINGGU PAHINGAN "Sekali Kayuh, Dua Tiga Permasalahan Sleman Teratasi" Kecamatan Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman	146
74. SURYA MAS JELITA (Sehat Untuk Berkarya, Mandiri Bersama Kelompok Jelang Eliminasi Kusta) UPTD Puskesmas Grati Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan	148
75. <i>Tax Shopping</i> Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang	150
76. TELAT BERKEMAS (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat) Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	152
77. Toko Modern Datang, TOMIRA Solusinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	154

<b>66. Birth Waiting House (RTK) BAHARI</b>	<b>132</b>
<i>Public Health Agency, Sinjai Regency</i>	
<b>67. JEMPOL SAKERA (Be aware of the Violence of Women and Children)</b>	<b>134</b>
<i>Family Planning Service and Women Empowerment, Pasuruan Regency</i>	
<b>68. SELEMPANG MERA (Save Patient Through ODGJ Samurai Team)</b>	<b>136</b>
<i>UPTD Public Health Center Omben Health Office, Sampang Regency</i>	
<b>69. The Thumb (Electronic Patient Medical Network Information System)</b>	<b>138</b>
<i>RSUD Balaraja, Tangerang Regency</i>	
<b>70. SIGAP SRATUS 369 PLUS (Action Response to Madura Pregnant and Partus Cattle)</b>	<b>140</b>
<i>Department of Food and Livestock Sustainability, Pamekasan Regency</i>	
<b>71. SIPEKAT: Advancement Management System</b>	<b>142</b>
<i>Regional Personnel Agency, Sidoarjo Regency</i>	
<b>72. Siswa Asuh Sebaya (SAS)</b>	<b>144</b>
<i>education authorities, Banyuwangi Regency</i>	
<b>73. SUNMOR SEMBADA MINGGU PAHINGAN " Once paddled, Two Three Sleman Problems Resolved"</b>	<b>146</b>
<i>Sleman District, Sleman Regency</i>	
<b>74. SURYA MAS JELITA (Healthy To Work, Independent With Late Leprosy Elimination Group)</b>	<b>148</b>
<i>UPTD Public Health Center Grati Health Office, Pasuruan Regency</i>	
<b>75. Tax Shopping</b>	<b>150</b>
<i>Regional Revenue Agency, Tangerang Regency</i>	
<b>76. TELAT BERKEMAS</b>	<b>152</b>
<i>Department of Fisheries and Animal Husbandry, Hulu Sungai Selatan Regency</i>	
<b>77. Modern Stores Coming, TOMIRA The Solution</b>	<b>154</b>
<i>Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Kulonprogo Regency</i>	

78. TUA KELADI (Santun Lansia, Kesehatannya Layak Diperhatikan)	156
UPTD Puskesmas Gamping I Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sleman	
<b>E. KOTA</b>	
79. 112	158
Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Surabaya	
80. BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar) Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas Melalui <i>Smartphone</i>	160
Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Pontianak	
81. CETEK (Cukup E-KTP Serahkan Kartu Keluarga)	162
RSUD Al Mulk, Pemerintah Kota Sukabumi	
82. Direkam Di Sekolahku, <i>Sweet Seventeen</i> , KTP-El Ku Datang	164
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Surakarta	
83. Dongkel <i>With Mobile Library</i>	166
Dinas Perpustakaan, Pemerintah Kota Makassar	
84. Gema Madani Simpati	168
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya	
85. iJUS MELON (Ijin Usaha Mikro melalui <i>Online</i> )	170
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kota Semarang	
86. "KELUAR BERSAMA" Daftar 1 Dapat 5: Sebuah Model Pelayanan Terpadu Dokumen Anak	172
Kecamatan Danurejan, Pemerintah Kota Yogyakarta	
87. Klinik Berhenti Merokok	174
UPTD Puskesmas Padang Karambia Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Payakumbuh	
88. Lapo BRA (Layanan Pojok <i>Braille</i> )	176
Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Pemerintah Kota Malang	
89. Longset (Lorong Sehat)	178
Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Makassar	

**78. TUA KELADI (Elderly, Health Care Worthy of Attention)**  
*UPTD Public Health Center Gamping I Health Office, Sleman Regency*

**E. CITY**

**79. 112**  
*Department of Communications and Informatics, Surabaya City*

**80. BCL (Business Good Current Traffic) Arrangement and Control of Traffic Through Smartphones**  
*Department of Transportation, Pontianak City*

**81. CETEK (Simply E-ID Card Submit a Family Card)**  
*RSUD Al Mulk, Sukabumi City*

**82. Recorded In My School, Sweet Seventeen, My KTP-El is Coming**  
*Department of Population and Civil Registration, Surakarta City*

**83. Dongkel With Mobile Library**  
*Library Agency, Makassar City*

**84. Gema Madani Sympathy**  
*The People's Welfare Division of the Regional Secretariat, Tasikmalaya City*

**85. iJUS MELON (Micro Business License through Online)**  
*Cooperatives and Micro Enterprises Agency, Semarang City*

**86. "OUT TOGETHER" List 1 Get 5: An Integrated Service Model of Child Documents**  
*Danurejan District, Yogyakarta City*

**87. Stop Smoking Clinic**  
*UPTD Public Health Center Padang Karambia Health Office, Payakumbuh City*

**88. Lapo BRA (Braille Corner Service)**  
*Public Library Service and Regional Archives, Malang City*

**89. Longset (Healthy Alley)**  
*public health Office, Makassar City*

90. Sampah Menjadi Gas, Berkah Bagi Warga	180
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh	
91. "SI INOL AJA" (Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban) Kikis Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	182
UPTD Puskesmas Wonoasih Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Probolinggo	
92. "SODA MOLEK" K 5-1	184
Kelurahan Naikoten II, Pemerintah Kota Kupang	
93. Taman Anak Cerdas: Papan Sarana Wasis Bocahe, Waras Ragane Lan Mapan Budi Pekertine	186
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta	
<b>F. BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>	
94. SAHABAT LATANRO - Sejahtera Berkat Layanan Taspen Persero	188
Divisi Layanan dan Manfaat, PT Taspen (Persero)	
95. SIMGAJI ASN	190
Divisi Kepesertaan, PT Taspen (Persero)	
<b>G. BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>	
96. Air Disuntik, Resahpun Terobati	192
Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Kota Palopo	
97. Kue Lumpur Dari AETRA	194
Perusahaan Daerah Air Minum Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
98. Media <i>WhatsApp</i> dan SMS sebagai Solusi Pelanggan Tidak Bisa Diakses	196
Perusahaan Daerah Air Minum Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
99. Sistem <i>Autodebet</i> Retribusi PKL: <i>No Bocor, No Pungli, No Jual Beli Lapak</i>	198
Bank DKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	

90. <i>Rubbish into Gas, Blessing for the People</i>	180
<i>Department of Environment, Hygiene and the Beauty of the City, Banda Aceh City</i>	
91. <i>"SI INOL AJA" (System of Service Innovation regular social gathering/ water closet Instalation) Reducing Behavior BABS (Defecate indiscriminately)</i>	182
<i>UPTD Public Health Center Wonoasih Health Office, Probolinggo City</i>	
92. <i>"SODA MOLEK" K 5-1</i>	184
<i>Naikoten II Sub-Districts, Kupang City</i>	
93. <i>Smart Child Park: Bocahe Wasis Facility Board, Waras Ragane Lan Mapan Budi Pekertine</i>	186
<i>Department of Women Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment, Surakarta City</i>	
<b>F. STATE OWNED ENTERPRISES</b>	
94. <i>SAHABAT LATANRO - Prosperous Thanks to Taspen Persero Service</i>	188
<i>Services and Benefits Division, PT Taspen (Persero)</i>	
95. <i>SIMGAJI ASN</i>	190
<i>Division of Membership, PT Taspen (Persero)</i>	
<b>G. Government-Owned Corporations</b>	
96. <i>Water Injected, Restless Treated</i>	192
<i>Local water company, Palopo City</i>	
97. <i>Mud Pastry From AETRA</i>	194
<i>Jaya Local water company, Special Region of Jakarta Province</i>	
98. <i>WhatsApp Media and SMS as an Inaccessible Customer Solution</i>	196
<i>Jaya Local water company, Special Region of Jakarta Province</i>	
99. <i>Autodebet System PKL Retribution: No Leak, No Illegal charges, No Sale and Purchase Stall</i>	198
<i>Bank DKI, Special Region of Jakarta Province</i>	



# TOP 99

INOVASI  
PELAYANAN  
PUBLIK  
TAHUN 2017  
*PUBLIC SERVICE  
INNOVATION 2017*

## 119 - KOLABORASI NASIONAL LAYANAN EMERGENSI MEDIK DI INDONESIA

### 119 - NATIONAL COLLABORATION OF MEDICAL EMERGENCY SERVICES IN INDONESIA

01

Direktorat Pelayanan Kesehatan  
Rujukan, Direktorat Jenderal  
Pelayanan Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan

*Directorate of Referral Health  
Services, Directorate General  
of Health Services, Ministry  
of Health*

**I** Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit *cerebrovascular*, kecelakaan lalu lintas dan penyakit jantung iskemik, tingginya proporsi kematian yang terjadi di rumah (jika dibandingkan dengan yang terjadi di RS), kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan ambulans dan ruang perawatan khususnya perawatan intensif, mendasari inovasi Layanan Emergensi Medik 119.

Layanan ini merupakan kolaborasi nasional antara pusat dan daerah dalam pelayanan kegawatdaruratan medik yang terdiri dari NCC (*National Command Center*) 119 yang ada di Kementerian Kesehatan dan PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menggunakan teknologi informasi, aplikasi dan nomor panggilan darurat tunggal 119 yang bebas pulsa (GRATIS) sehingga mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia selama 24 jam sehari.

Layanan ini juga melibatkan RS, Puskesmas, Klinik, dan lintas sektor terkait antara lain Kepolisian, Pemadam Kebakaran serta BNPB. Antara NCC 119 dan PSC 119 saling terhubung dalam 1 (satu) sistem dan

**B** *The high death rates caused by cerebrovascular diseases, traffic accidents and ischemic heart disease, the high proportion of deaths occurring at home (when compared to those occurring in hospitals), and the difficulty of public to obtain ambulance services and treatment rooms, especially intensive care, underlie 119-Emergency Medical Service innovation.*

*This service is a national collaboration between center government and local government in emergency medical service, which consist of National Command Center (NCC) 119 in Ministry of Health and PSC (Public Safety Center) 119, using information technology, applications and a single emergency number 119 which is toll free, so that easily accessible to all Indonesian people for 24 hours a day.*

*This service involves hospitals, Primary Health Care, Clinics, and also related sectors such as Police, Firefighter Department and National Disaster Management Authority (BNPB). Between NCC 119 and PSC 119 are connected in 1 (one) system and use similar applications. This system also connects between PSCs which were already integrated with 119. This facilitates the*



menggunakan aplikasi yang seragam, sistem ini juga menghubungkan antar PSC yang sudah terintegrasi dengan 119, sehingga memudahkan proses rujukan antar kabupaten maupun provinsi.

Dengan adanya Layanan Emergensi Medik 119, masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan darurat tanpa membedakan kelas sosial, dan memudahkan proses rujukan antar kabupaten/kota maupun provinsi karena tergabung dalam satu sistem secara nasional.

Inovasi layanan ini akan terus dikembangkan dan dilanjutkan, dengan dukungan pembiayaan baik APBN, APBD maupun sumber-sumber lain, serta dukungan peraturan baik Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, maupun peraturan daerah.

*referral process between districts and provinces.*

*119 - Emergency Medical Service will simplify people to get emergency services without differentiating social class, and facilitate the referral process between districts and provinces because of this system integrated nationally.*

*This innovation will be developed and continued, with financial support from APBN, APBD or other sources, as well as regulatory support either Presidential Instruction, Ministerial Regulation, or local regulations.*

## 3 IN 1 KARIADI PEDULI

### 3 IN 1 KARIADI PEDULI

02

RSUP dr. Kariadi Semarang,  
Kementerian Kesehatan

RSUP dr. Kariadi Semarang,  
Ministry of Health

1 Sejak peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah tahun 2014, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan layanan kesehatan, namun masyarakat dari golongan tidak mampu memiliki kesulitan dalam hal pembiayaan penunjang pelayanan, seperti biaya transportasi, biaya sehari-hari meliputi: makan, minum dan penginapan selama menunggu mendapatkan proses pelayanan di rumah sakit. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah sakit, Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit, pasien tidak mampu terkendala pada biaya transport, baik dalam keadaan sehat maupun meninggal dunia.

Kondisi geografis RSUP Dr. Kariadi yang memiliki luas lahan 193.410 m<sup>2</sup> dan Unit layanan kesehatan tersebar luas di RSUP Dr. Kariadi, masyarakat memerlukan waktu dan tenaga guna mendapatkan pelayanan antar unit layanan.

Berdasarkan beberapa persoalan di atas, maka RSUP Dr. Kariadi mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain ;

2 Since the launching of National Health Security by the government in 2014, the citizen has got easy access to health financial support, however, the unfortunate citizens still has problem to pay for some additional healthcare services, such as transportation cost, daily cost for food, drink and accommodation for the caretaker while waiting for the patient to get health service at the hospital. After getting the treatment at the hospital, the patient does not have enough money for the transport cost after they are released, either alive or dead.

The geological situation of RSUP Dr. Kariadi which stands on a land of 193,410 m<sup>2</sup> and health service units spread on the vast area the people need time and energy to get services between different units.

Considering the above situations, RSUP Dr. Kariadi issues some policies:

1. FREE LAYOVER TREATMENT which provides 100 beds for unfortunate patients
2. Three units of FREE HEARSE for unfortunate patients
3. Two units of FREE TRANSPORT

1. RUMAH SINGGAH GRATIS sebanyak 100 tempat tidur bagi pasien tidak mampu.
2. AMBULAN JENASAH GRATIS sebanyak 3 unit bagi pasien tidak mampu.
3. MOBIL ANGKUTAN GRATIS sebanyak 2 unit mobil.

Program 3 In 1 Kariadi Peduli merupakan program yang unik karena ini merupakan program pertama yang dilakukan oleh BLU rumah sakit, ditengah-tengah rumah sakit lain sibuk dengan mencari 'keuntungan' semata, RSUP Dr. Kariadi menggratiskan beberapa fasilitas untuk masyarakat kurang mampu.

Program 3 In 1 Kariadi Peduli selama 3 tahun terdapat dampak atau manfaat bagi masyarakat, organisasi dan stakeholder lainnya, meliputi: Pembiayaan pelayanan penunjang pasien tidak mampu dapat terbantu, mengurangi beban biaya keluarga pasien meninggal yang tidak mampu dalam pemulangan jenazah, mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan di RSUP Dr. Kariadi (konektivitas pelayanan), Hal tersebut berdampak pada Kepuasan Masyarakat Meningkat, Produktivitas meningkat, menjadikan organisasi BLU dengan pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia.

Program ini dimulai pada tahun 2014 dan berlanjut hingga saat ini dilandasi dengan SK, Program 3 in 1 Kariadi Peduli sangat sederhana, sarana prasarana yang digunakan dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, namun untuk terlaksananya diperlukan komitmen stakeholder rumah sakit. Program ini dapat dilakukan oleh institusi lain serta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang tidak mampu.

*The 3 in 1 Kariadi Care Programme is a unique service because it is the first programme which is conducted by the Community Services Agency Hospital (BLU). When other hospitals are busy pursuing profits, RSUP Dr. Kariadi offers some free facilities for the unfortunate patients.*

*It has been running for 3 years and has given tremendous impact to both the society and other stakeholders, like: The unfortunate patients get help to obtain healthcare services, and it reduces the dead patient's family burden who cannot afford to pay to bring home their passed away family member, service connection eases the patients to get healthcare services at RSUP Dr. Kariadi. It increases the customers satisfaction. In addition, Improved productivity, makes RSUP Dr. Kariadi as Community Service Agency (BLU) organisation with the best financial management in Indonesia.*

*The programme which was started in 2014 and supported with a decree is very simple and utilises the existing assets. Nevertheless, to maintain the good services, it takes strong commitment from all stakeholders. The beneficial programme can also be applied by other institutions and the people can get the advantage immediately, especially the less fortunate ones.*

# AKOEPUNTUR (APLIKASI KOMPETENSI TURUNAN) CPO MINIPLANT

## AKOEPUNTUR (APPLICATION OF DERIVED COMPETENCE) CPO MINI PLANT

03

SMK - SMTI Banda Aceh,  
Kementerian Perindustrian

SMK - SMTI Banda Aceh,  
Ministry of Industry

**I** Akupunktur sudah biasa dipakai untuk penyembuhan. Beda halnya dengan yang satu ini, Akoepuntur buatan SMK-SMTI Banda Aceh di bawah Kementerian Perindustrian ini tak ada manfaat untuk kesehatan. Justru bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kok bisa? Ya, karena Akoepuntur yang satu ini bukan jenis pengobatan dari China, tetapi singkatan dari Aplikasi Kompetensi Turunan.

Akoepuntur lahir dari kreasi SMK – SMTI Banda Aceh, yang berusaha membuat sekolah *Link and Match dengan industry*. Artinya, pendidikan di SMK-SMTI Banda Aceh dibuat program yang sesuai dengan kebutuhan langsung industri di daerah itu. Karena di Banda Aceh ada beberapa industri pengolahan sawit, maka dibuatlah Akoepuntur (Aplikasi Kompetensi Turunan) Crude Palm Oil (CPO) Miniplant.

Program pengembangan dan pemanfaatan *Miniplant CPO* ini untuk pelayanan masyarakat industri, merupakan program dan terobosan pendidikan yang baru dilaksanakan SMK-SMTI Banda Aceh di bawah Kementerian Perindustrian, hingga saat ini satu-satunya SMK di Indonesia yang memiliki fasilitas pabrik skala kecil (miniplant) pengolahan CPO. Program

**B** *Acupuncture has been widely known as an effective way to treat illnesses and health problems. Although it has the same sound as the previous word, Akoepuntur, a program developed by the Banda Aceh Vocational School (SMK) – Industrial Technology School (SMTI) under the assistance of the Industry Ministry, offers no health benefits at all. Akoepuntur has benefits to boost labor force absorption in Indonesia. How can it happen?*

*Akoepuntur is not a Chinese medical practice. Akoepuntur is an abbreviation of "Aplikasi Kompetensi Turunan" (Derivative Competence Application). Akoepuntur is the creative work of SMK-SMTI Banda Aceh, which aims to link and match the school with industrial players. Under this initiative, SMK-SMTI Banda Aceh is striving to build programs that are in line with direct needs of industrial companies in the area. One of the programs developed is Akoepuntur Crude Palm Oil (CPO) Miniplant, given Banda Aceh is home to several palm oil processing industries.*

*The CPO Miniplant program is an education innovation, which aims to serve industrial communities. SMK-SMTI Banda Aceh is the only vocational school in Indonesia that has a CPO processing miniplant. This program involves relevant parties, which include the Industry Ministry, the Manpower and Transmigration Ministry,*

ini melibatkan berbagai pihak dari Kementerian Perindustrian dan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perusahaan industri wilayah Sumatera, asosiasi kelapa sawit, Pendidikan Vokasional dan Perguruan Tinggi.

Ada dua pelayanan yang diterapkan. Pertama, pelayanan siswa, meliputi Pelayanan Tempat Uji Kompetensi (sertifikasi), Pembelajaran berbasis kompetensi (CBT), Pendidikan dan Latihan (Diklat Penguatan Industri industri) serta Unit Produksi/ *Teaching Factory* (produk-produk turunan). Kedua, pelayanan masyarakat, meliputi : fasilitas magang dan penelitian, Wisata pendidikan (Diseminasi Edukasi), Industri mudah memperoleh tenaga kerja siap pakai, Pengembangan kurikulum implementatif untuk di replikasi SMK Kimia Industri.

**Dampak (Sebelum dan Sesudah)**

Manfaat utama novasi pelayanan publik AKOEPUNTUR CPO Miniplant dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Keterangan
		Sebelum			Sesudah			
		10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	
1	Penyerapan Lulusan di Industri	29%	31%	21%	81%	91%	93%	Lulusan
2	Wisata Pendidikan	-	-	3433	4678	5028	5553	Kunjungan

**Keberlanjutan**

Program ini akan terus berlanjut, karena program ini sudah mendapat pengakuan dari industri pengolahan CPO, yakni dengan penyerapan tenaga kerja dari lulusan yang mengikuti program Akoopuntur ini. Selain itu, juga mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, bahkan telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai *Role Model* untuk SMK yang *Link and Match* dengan industri. Tak hanya itu, pola pendidikan *miniplant* dapat direplikasikan pada SMK lainnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

*industrial companies from areas across Sumatra, the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), vocational education institutions and universities.*

*The Akoopuntur CPO Miniplant program offers two services. First, services for students, which comprise services at locations of competency tests (certification), competency-based trainings (CBT), education and training centers (to empower industries), and in production units/teaching factory (derivative products). Second, services for the community, which comprise research and internship facilities, education tourism programs (education dissemination), activities, which aim to make it easier for industrial players to get skilled workers, and the development of curriculums replicable for vocational school SMK Kimia Industri in areas across Indonesia.*

**Impacts (Before and After)**

*The prime benefits of public service delivery innovations Akoopuntur CPO Miniplant can be described as follows:*

No	Activities	Implementation						Explanation
		Before			After			
		10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	
1	Percentage of graduates absorbed by industrial companies	29%	31%	21%	81%	91%	93%	Graduates
2	Education tourism	-	-	3433	4678	5028	5553	Visits

**Continuity:**

*Akoopuntur will continue to run because its effectiveness has been acknowledged by CPO processing industries, marked with a high absorption of the program's graduates by industrial companies in the palm oil sector. This program has been supported by the Industry Ministry. President Joko "Jokowi" Widodo has even determined the Akoopuntur program as a role model for vocational schools applying a Link and Match concept. The CPO Miniplant can be replicated in other vocational schools, along with potentials in their respective areas.*



## **APLIKASI LAPOR DIRI WNI TERINTEGRASI SECARA ONLINE PADA PERWAKILAN RI SE-JERMAN**

### **INTEGRATED SELF-REPORT APPLICATION ONLINE AT DELEGATION OF INDONESIA IN GERMANY**

# 04

Kedutaan Besar RI Berlin,  
Kementerian Luar Negeri

*Embassy of the Republic of  
Indonesia, Berlin, Ministry  
of Foreign Affairs*

- i** Masalah pendataan WNI masih merupakan persoalan yang banyak dihadapi oleh Perwakilan RI di luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah minimnya jumlah WNI yang melakukan lapor diri pada Perwakilan dan akibatnya Perwakilan tidak memiliki database yang akurat mengenai keberadaan seluruh WNI di luar Negeri. Sebenarnya, UU no.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mewajibkan seluruh WNI yang berdomisili di luar negeri untuk melapor diri pada Perwakilan RI namun ke-engganannya WNI untuk melaporkan dirinya ke Perwakilan disebabkan antara lain hambatan waktu, jarak, tempat atau pun kendala birokrasi dan tidak nyaman sehingga lapor diri menjadi suatu beban yang dianggap tidak memiliki manfaat. Di lain sisi penyebab lemahnya pendataan WNI adalah juga dapat disebabkan kurang optimalnya upaya pelayanan yang dilakukan oleh Perwakilan karena berbagai kendala dan keterbatasannya, atau masih melihat bahwa lapor diri merupakan kewajiban WNI semata dan tidak terkait dengan pelayanan. Permasalahan pendataan WNI menjadi semakin kompleks apabila di suatu negara terdapat lebih dari satu Perwakilan RI seperti
- ii** *The collection of data on Indonesian nationals still constitutes an issue faced by Indonesian missions abroad. One of the reasons is the minimum number of Indonesian national who registers at the Indonesian missions, which, as a result, leaves the missions with inaccurate database to record the number of Indonesian nationals abroad. In fact, Law No. 23/2006 concerning the administration of residency obliges all Indonesian nationals domiciled abroad to register themselves at the Indonesian missions. However, factors such as time, distance and location or bureaucratic obstacles as well as the notion that registration is not necessarily useful keep the number of self-registration low. On the other hand, the sluggish registration is also attributable to the sub-optimal services provided by the Indonesian missions due to several barriers and limitations as well as the rigid perception that self-registration is an obligation of the Indonesian nationals and is not part of the services. The issue of collecting data on Indonesian nationals has become more complex, in particular in a country where there is more than one mission like the Federal Republic of Germany. Three missions, the Embassy in Berlin and Consulates General in Frankfurt and*

di Republik Federal Jerman, dimana terdapat 3 (tiga) Perwakilan yaitu KBRI Berlin, KJRI Frankfurt dan KJRI Hamburg dengan jumlah total WNI 19.449 jiwa yang tersebar di 16 negara bagian, sehingga dibutuhkan suatu database yang terintegrasi, akurat dan *realtime*.

KBRI Berlin pada bulan November 2015 lalu meluncurkan inovasi *Sistem Aplikasi Laporan Diri secara on-line se Jerman* atau yang disebut sebagai LaDi, suatu bentuk aplikasi sederhana yang dapat mensinergikan antara kewajiban laporan diri di satu sisi dan pelayanan WNI di lain sisi atau dengan kata lain kewajiban yang dikemas dalam bentuk pelayanan (pelayanan laporan diri). Pengelolaan database WNI tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik tetapi tersimpan secara digital dikelola oleh WNI secara mandiri (*self uploading dan updating system*). Salah satu manfaat LaDi adalah *Reminder System* yang sangat berguna bagi WNI untuk selalu *update* kondisi dokumen keimigrasian dan kekonsulerannya agar terhindar dari masalah keimigrasian di Jerman, seperti masa berlaku pasport, masa ijin tinggal, masalah kewarganegaraan (kawin campur dan anak berkewarganegaraan agenda), dan notifikasi serta informasi berguna lainnya dari Perwakilan untuk kepentingan WNI di Jerman. Bagi WNI yang sedang berdomisili di Jerman dengan berbagai status dan profesinya, kehadiran LaDi merupakan bentuk nyata dari Kehadiran Negara, sehingga bagi WNI Laporan Diri menjadi penting dan bermanfaat dari pada beban kewajiban berkat adanya LaDi. Di lain pihak, bagi Perwakilan dapat secara optimal dan tertib dapat melaksanakan pelayanan dan perlindungan WNI dengan cepat, dimana saja, kapan saja dan dalam situasi apa saja dan memiliki database WNI yang akurat dan handal.

*Hamburg, covering a total number of 19.449 nationals spread out in 16 federal states, require a database which is integrated, accurate and real-time.*

*The Embassy of the Republic of Indonesia in Berlin has launched in November 2015 an innovative INTEGRATED ONLINE REGISTRATION SYSTEM, called LaDi after the Indonesian acronym, a simplified application which brings together the obligation for self-registration on the one hand and the services provided to Indonesian nationals on the other hand. In other words, the obligation is merged into services (registration services). The management of the database is no longer done in a physical document, but filed digitally which can be managed by the Indonesian national (self uploading and updating system). Another feature of the LaDi is the Reminder System which is very useful for the Indonesian national to constantly update the status of his immigration and consular documents to avoid immigration issues in Germany like the validity of the passport, validity of residence permit, citizenship issues (mixed marriages and children of dual citizenship). It also serves the provision of notification and other useful information by the missions to Indonesian nationals in Germany. For Indonesian nationals who are residing in Germany with different status and profession, the presence of LaDi is regarded as returning the state to its task of protecting all citizens and providing a safe environment (negara hadir), leading to perceive self-registration as important and useful and not a burdensome obligation. On the other hand, it permits the Indonesian mission to conduct its services and protection in an effective and orderly manner rapidly, anywhere, whenever and in any situation and will assure accurate and reliable database on its nationals.*



# APLIKASI SISTEM INFORMASI DATABASE BANTUAN HUKUM (SIDBANKUM)

## APPLICATION OF LEGAL AID DATABASE INFORMATION SYSTEM (SIDBANKUM)

# 05

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

National Legal Development Agency, Ministry of Justice and Human Rights

1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan instansi Penyelenggara Bantuan Hukum.

Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) merupakan aplikasi online berbasis web guna mempermudah permohonan Bantuan Hukum (Bankum) masyarakat miskin kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), proses *reimbursement* oleh OBH dan pelaporan pelaksanaan. Sistem ini sekaligus menjadi Sistem manajemen Kasus (*Case Management System*) yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan bankum dan dapat dijadikan input capaian reformasi hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Pada tahun pertama dan kedua, permasalahan terbesar ialah Organisasi Bantuan Hukum yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat Sipil sangat buruk dalam pendokumentasian kegiatan dan belum terbiasa dengan sistem pelaporan keuangan Negara, 33 Panitia Pengawas Daerah tidak

2 Based on Act No. 16 Year 2011 on Legal Aid, The Ministry of Law and Human Rights of RI c.q. National Law Development Agency is the Administrator of Legal Aid.

*Legal Aid Database Information System (Sidbankum) is an web-based online application to simplify legal aid request of poor people, reimbursement process of Legal Aid Provider and report. This is also a case management system which is important in legal aid administration and becomes an input for legal reform, especially for integrated criminal justice system*

*In the first two years, the biggest problems were the poor administration and documentation in most of legal aid providers which were not familiar with state budget accountability; 33 province supervisory board did not have the same interpretation on reimbursement; there was no database system; and verification/accreditation was manual and high cost. The reimbursement process had long burocracy requesting very thick documents. Those resulted in the low budget spent which were 12 % (2013) and 34 % (2014) SIDBANKUM Online can solve all problems in the same time with new paradigm: paperless,*

memiliki keseragaman interpretasi atas regulasi yang menyangkut reimbursement. Belum ada sistem database, Verifikasi/Akreditasi OBH secara manual sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Proses Reimbursement memiliki rantai birokrasi yang panjang dengan dokumen yang sangat tebal dan Penyerapan Anggaran sangat minim, yakni 12 % (tahun 2013) dan 34 % (tahun 2014)

Aplikasi SIDBANKUM Online mampu menyelesaikan semua permasalahan sekaligus dengan paradigma baru yakni paperless, Sederhana, transparan, dan akuntabel. Aplikasi Sidbankum juga terintegrasi dengan aplikasi lain yakni: Aplikasi Android/IOS dan Web Streaming *Legal Smart Channel* dan Peta Akses Keadilan untuk mengajak partisipasi publik dalam memudahkan pengawasan dan penyebarluasan informasi mengenai Bantuan Hukum.

Proses reimbursement efektif, efisien, transparan dan paperless dengan standard terjamin. Verifikasi/Akreditasi OBH tahun 2015 terlaksana secara online sehingga menghemat biaya milyaran rupiah. Masyarakat dapat ikut mengawasi Pelaksanaan Bantuan Hukum. Penyerapan anggaran hampir maksimal (95,13%)

Pengembangan aplikasi tahun 2017 meliputi antara lain: Pos Bantuan Hukum Rutan Online (integrasi dengan Sistem Database Pemasarakatan), Integrasi dengan Database Mahkamah Agung, Monitoring Online (Indeks Kinerja OBH), Fitur APBD (agar sidbankum dapat digunakan pula oleh Pemda yang menganggarkan program Bankum sesuai Pasal 19 UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum).

*simple, transparent and accountable. This application is also integrated with other applications: Android/IOS and Web Streaming Legal Smart Channel and Access to Justice Maps to open public participation in monitoring and disseminating legal aid information.*

*Effective, efficient, transparent, accountable and paperless reimbursement and Online Verification/accreditation of Legal Aid Provider 2015 which saved billions rupiahs. Public can monitor the legal aid implementation. Budget spent was almost maximum in 2016 (95,13%).*

*Development 2017 including Online Detention House Legal Aid Post (integration with Directorate General of Correction Database), integration with Supreme Court Database, Online Monitoring, Local Budget so the application can be used also by local government which allocates legal aid budget according to Article 19 Act 16/2011 on Legal Aid.*



## HEMAT 60 % BIAYA ENERGI DENGAN ALAT PEMBUAT GAS BATUBARA BERSIH DI INDUSTRI KECIL

### SAVE 60% ENERGY COST WITH CLEAN COAL GAS GENERATOR TOOL IN SMALL INDUSTRY

06

Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral

Research and Development Agency  
Ministry of Energy and Mineral  
Resources

1 Tahun 1993 hingga 2006 pemerintah menggulirkan program sosialisasi briket batubara khususnya sebagai bahan bakar di industri kecil. Walaupun penggunaan briket batubara terbukti dapat menghemat biaya energi, ternyata masih menyisakan permasalahan lingkungan. Dari sisi teknis, bahan bakar batubara/briket batubara dinilai masih kurang praktis dan masih mengalami kendala dalam pengoperasian secara terus menerus. Dilain pihak kebutuhan BBM nasional 50% masih impor. Oleh karena itu diperlukan pengembangan teknologi pembakaran batubara/briket batubara yang mudah dioperasikan dan ramah lingkungan.

Teknologi pemanfaatan batubara yang dinilai ramah lingkungan adalah gasifikasi. Sulitnya teknologi gasifikasi diterapkan di industri kecil karena dibutuhkan energi listrik yang cukup besar, sementara kapasitas listrik di industri kecil terbatas. Keunikan teknologi gasifikasi (GasMin), digerakan secara manual (less electricity), sehingga industri kecil dimungkinkan dapat menikmati teknologi batubara bersih dan murah. Selain itu masyarakat Indonesia dapat menikmati

2 In 1993 s / d 2006 the government rolled out the socialization program of coal briquettes, especially for small industries. Although the use of coal briquettes proved to save energy costs, it still leaves environmental problems. From the technical side, coal fuel / coal briquettes are considered still less practical and still experiencing obstacles in continuous operation. On the other hand the national fuel requirement of 50% is still imported. Therefore it is necessary to develop coal combustion technology / coal briquette that is easy to operate and environmentally friendly.

Coal utilization technology that is considered environmentally friendly is gasification. The difficulty of gasification technology is applied in small industry because of the need of big electric energy, while the electricity capacity in small industry is limited. The uniqueness of gasification technology (GasMin), manually driven (less electricity), so that small industries could use clean and cheap coal technology. also can use their own natural wealth directly without any environmental problems.

kekayaan alamnya sendiri secara langsung tanpa ada kekhawatiran masalah lingkungan.

Manfaat utama yang dihasilkan inovasi pelayanan publik ini antara lain: (1) dari sisi peningkatan konsumsi batubara. Di DIY terdapat hampir 5000 IKM yang dalam proses produksinya menggunakan bahan bakar, maka ada peluang dan solusi bagi dunia pertambangan batubara Indonesia dengan adanya penerapan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation). Dengan adanya peluang penggunaan gas batubara, maka akan ada penghematan BBM di DIY sebesar 10.000 Barel per tahun; (2) Keuntungan industri. Dari pengalaman selama GasMin dioperasikan di 3 IKM, beberapa hal yang menguntungkan produsen adalah dari sisi kesehatan operator, terhindar dari risiko terpapar asap yang berbahaya dan keuntungan IKM, biaya bahan bakar jauh berkurang dibandingkan dengan bahan bakar yang digunakan sebelumnya.

Keberhasilan rancang bangun GasMin batubara tidak terlepas dari peran serta kepemimpinan Kepala Badan Litbang ESDM maupun Kepala Pusat tekMIRA yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan perbaikan kelitbangan sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Inisiatif ini tidak akan berhasil tanpa dukungan satuan kerja pengampu program. Kemitraan dengan Lembaga Swasta terutama Dunia Usaha sangat penting, khususnya dalam pendanaan yang selama ini bergantung pada APBN. Diharapkan untuk pengembangan implementasi diluar DIY dapat bantuan dari dana CSR BUMN atau perusahaan-perusahaan besar terkait.

*What are the main benefits of this innovation of public service?(1) In terms of increased consumption of coal. In DIY there are almost 5000 IKM that using fuel in the process of production, then there are opportunities and solutions for coal mining industries in Indonesia with the implementation of DMO policy (Domestic Market Obligation). By using the opportunity of coal gas usage, there will be fuel savings in DIY of 10,000 barrels per year. (2) Industrial profits. From experience during GasMin operated in 3 IKM, some things that benefit the manufacturer are as follows: Benefits from the health side of the operator, avoiding the risk of exposure to hazardous fumes and the advantage of SMEs, the cost of fuel is much reduced compared to the fuel used previously.*

*The success of GasMin Coal's design can not be separated from the role of leadership of Head of ESDM Research Agency and Head of TekMIRA Center who has a strong commitment to carry out improvements in the development as a form of community service. This initiative will not occurred without the support of the Partnerships programs with Private sectors, especially in funding which has been dependent on the state budget. It is expected that implementation development outside of DIY can be supported by CSR funds of BUMN or related companies.*



## INI MOBIL SIANI – SAHABAT SETIA PETANI

### *THIS CAR SIANI - LOYAL FRIEND FARMER*

07

Balai Besar Perbenihan dan  
Proteksi Tanaman Perkebunan  
(BBPPTP) Surabaya, Direktorat  
Jenderal Perkebunan Kementerian  
Pertanian,

*Seeding and Protection Center for  
Estate Crops Surabaya Directorate  
General of Estate Crops, Ministry  
of Agriculture*

1 Benih merupakan cikal bakal dari pembangunan perkebunan yang harus memiliki mutu genetik, fisiologis, dan fisik yang baik. Kondisi saat ini masyarakat masih menggunakan benih kurang bermutu dan tidak bersertifikat sehingga produktivitasnya hanya 60 %. Selain itu, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah satu faktor penting yang menghambat pencapaian sasaran produksi dan mutu hasil perkebunan bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera dikendalikan. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan pestisida berdampak terhadap produk hasil pertanian dan lingkungan. Sementara, berkembangnya pola pikir masyarakat saat ini menuntut adanya keamanan produk hasil pertanian yang dikonsumsi dengan nilai residu produk hasil pertanian di bawah standar Batas Maksimal Residu (BMR) yang telah ditetapkan.

Pendekatan Strategis yang dilakukan pada bulan Januari 2016 pada rapat internal di pimpin oleh : Ardi Praptono, SP (Kepala Balai) beserta staf menghasilkan solusi pemecahan masalah melalui Sistem "Jemput Bola" yaitu Layanan Mobil SIANI yang memberikan

2 *Seed is the forerunner of plantation development that should have a quality of genetic, physiological, and physical as well. Nowadays, society still uses seeds due to below quality and no certified which gives low-productivity for about 60%. Beside that, Plant Pest Organism attacks are an important factor that hinders the achievement of production targets and the quality of plantation products even can cause death if not controlled quickly. Control of pests to pesticides is not wise this will affect the agricultural products and the environment. Meanwhile, the development of the mindset of today's society demands safety of agricultural products consumed by the residual value of agricultural products under the standard of Maximum Residue Limits (MRL) has been determined.*

*Strategic approaches conducted in January 2016 at an internal meeting chaired by Mr. Ardi Praptono, SP. (head of the Center) and staff resulted the problems solving through The "Proactive System" that is Mobil SIANI Service provides convenience and proximity to the farmers and stakeholders which apply the principle whereby accessibility and profitability*

kemudahan dan kedekatan kepada petani/ pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip aksesibilitas dan profitabilitas dimana pelayanan yang diberikan kepada petani/ masyarakat dapat dijangkau secara mudah, berjalan secara efektif dan efisien sehingga memberikan keuntungan ekonomis dan sosial. Pola layanan Mobil SIANI bersifat langsung dan tanpa biaya. Pendampingan kepada petani dilaksanakan sampai dengan petani mampu menyelesaikan permasalahannya.

Strategi Inovasi layanan melalui Mobil SIANI meliputi kemudahan petani dalam menyampaikan permasalahan Organisme Pengganggu Tumbuhan kepada Dokter Tanaman melalui Sistem Layanan Dokter Tanaman (SINANDA) yang salah satunya dengan sistem pengendalian hama terpadu dengan memanfaatkan Agens Pengendali Hayati sebagai komponennya mampu menurunkan tingkat serangan kumbang kelapa sampai dibawah ambang ekonomi dari 4,9 Milyar dapat diturunkan menjadi 2,5 Milyar di Provinsi Jawa Timur. Informasi Perbenihan merupakan sistem layanan kepada petani tentang penggunaan benih varietas unggul yang bermutu dan bersertifikat serta informasi sumber benih untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Penggunaan benih unggul 6 tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) dapat meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan seperti tebu, tembakau, kopi dan kakao dari 2,37 % menjadi 4 %, terutama tebu dapat mencapai sasaran produktivitas dari 80 ton/ha menjadi 100 ton/ha. Melalui uji cepat pengujian residu pestisida dan logam berat, petani dapat mengetahui kandungan residu pestisida dan logam berat pada produk pertaniannya.



*of service provided to farmers or community easily accessible location and run effectively and efficiently so as to provide economic and social benefit. This Mobil SIANI pattern service is directly and free of charge. Assistance to farmers implemented until the farmers are able to resolve the problem.*

*The strategy of the innovation Mobil SIANI, include the farmer can convey the Plant Pest Organism problems to Plant Service Doctor system (SINANDA) the only with the system Integrated Pest Management if used Biological Control Agents can reduce the attack level of Coconut Rhinoceros Beetle below under economic threshold of 4,9 Billion can reduced to 2,5 Billion in East Java Province. Seed information is a service system that can provide information to farmers on the use of quality seed varieties and certified seed and information resources to improve the production and productivity of crops. Proper use of improved seed by 6 correct ways (type, quantity, price, place, time, and quality) can increase crops productivity such as sugar cane, tobacco, coffee, and cocoa from 2,37% to 4%, mainly sugar cane productivity achievable target of 80 tons/ ha 100 tons/ ha. Through rapid test pesticide residues and heavy metal, farmers can find out the content of pesticide residues and heavy metals in agricultural products.*



## **INTI (INOVASI TERINTEGRASI) LAYANAN PERTANAHAN PEMALANG #SEMAKINCEPATDANMUDAH**

### **INTI (INTEGRATED INNOVATION) PEMALANG LAND SERVICE #SEMAKINCEPATDANMUDAH**

08

Kantor Pertanahan Kabupaten  
Pemalang, Kementerian  
Agraria dan Tata Ruang / Badan  
Pertanahan Nasional

*Pemalang Local Land Service,  
Ministry of Agrarian and  
Spatial Planning / National  
Land Agency*

**1** Berangkat dari pemikiran dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima, KaKantah Pemalang mencetuskan inovasi pelayanan pertanahan yang diberi nama INTI (Inovasi TerIntegrasi) Layanan Pertanahan Pemalang #SemakinCepat&Mudah. KaKantah menetapkan kebijakan teknis pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dengan alternatif pemecahan masalah utama dan isu yang muncul tersebut melalui pendekatan ICT (Information & Communications Technology).

Inovasi INTI bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Pemalang bagi masyarakat tidak mampu, berpenghasilan rendah, UMKM, petani, peternak, dan pekebun, termasuk golongan masyarakat tertentu yaitu veteran, pensiunan pns/polri/tri termasuk jandanya, lansia dan kaum difabel. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan akses layanan, jangkauan pemberian layanan, dan keterjangkauan terhadap pelayanan pertanahan kepada seluruh elemen masyarakat Pemalang baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan terpencil.

**1** *The idea and commitment to provide excellent service, Head of Pemalang local land office initiated the innovation in land service called INTI (Inovasi Terintegrasi) or Integrated Innovation of Pemalang Land Service #SemakinCepat&Mudah. It applies service policies which enhance speed, ease and transparency of the system with main problem solving and potential issues by making the most of Information and Communication Technology (ICT) approach.*

*INTI program is primarily purposed to improve the service of land service administration. It also plays important role in accelerating land registration in Pemalang. The improvement is extremely beneficial for the needy, including farmers, veterans, retirements, widows and disabled people. One of other objectives this innovation designed includes the development of the access, extension and affordability of land services for urban, suburban and rural community.*

*The innovation of INTI implements better methods than previous system in which the service was performed only in front of the*



INTI menerapkan cara baru dan berbeda dari mekanisme terdahulu, dimana pelayanan hanya dilakukan di depan loket. INTI menjadi layanan terintegrasi antara loket, layanan bergerak (proaktif) dan layanan via sms yang memadukan 5 komponen layanan dalam satu sistem penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Lingkup inovasi INTI, yaitu layanan pengaduan dan layanan informasi umum via SMS, layanan analisis spasial berbasis internet, layanan proaktif LAJU PEMALANG, STAR dan Ayo Wakaf.

Dampak positif dari implementasi INTI Jumlah permohonan layanan pertanahan menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja kami tahun 2016 (38.188 permohonan) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 27% dari 2014 (30.069 permohonan) dengan peningkatan pendapatan dari pelayanan sebesar 14,4 % untuk tahun 2016 sebesar Rp.4.818.416.045 dari 2014 Rp.4.212.556.053. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun. Prosentase pengaduan masyarakat pada tahun 2013 terhitung hanya 1,3% dan tahun 2014 menurun menjadi 1,1%, terakhir tahun 2016 menurun menjadi 0,1%. Meningkatnya nilai tanggungan sebesar 35,15% sebagai indikasi dari kemudahan akses modal di sejumlah perbankan. Meningkatnya sertifikat tanah wakaf 29 % dari tahun 2014 dan sampai saat ini sudah diselesaikan 240 permohonan dari layanan Ayo Wakaf.

*counter. It establishes integration of counter service, mobile service and SMS service in which it combines five main services in one system of land service delivery. The scope of this innovation is formed into report service, general information service via SMS, internet-based spatial analyze service, LAJU PEMALANG proactive service, STAR and Ayo Wakaf.*

*The implementation of INTI has proven to give significant effect in the number of service being performed. Pemalang Land Service had accomplished 38.188 applications in 2016; it was significantly improved by 27% from 2014 data, 30.069 applications. This is in line with the institution's revenue; the data shows that the improvement had reached 14.4% from Rp. 4.212.556.053 in 2014 to Rp. 4.818.416.045 in 2016. In addition, community complaint had successfully reduced, from 1.3% in 2013 to only 0.1% in 2016. The speed and ease of access to benefit from land administration service can be seen from the increase of dependant value in a number of banks; the improvement was recorded as much as 35% in 2016. Ayo Wakaf improved the number of land certificate by 29% from 2014 data. The program has finished accomplishing 240 applications.*



## KAKAP UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TERPADU

### KAKAP FOR INTEGRATED LAND ADMINISTRATION SERVICES

09

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik,  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional

Gresik Local Land Service,  
Ministry of Agrarian and Spatial  
Planning / National Land Agency

1 Administrasi pertanahan selama ini dipahami oleh masyarakat sangat sempit dan bersifat parsial dalam praktek tata kelola pemerintahan yaitu kegiatan persertipikatan tanah yang dikelola oleh Kantor Pertanahan atau BPN (Badan Pertanahan Nasional), padahal secara teori administrasi pertanahan itu terdiri dari *Land Tenure, Land Value, Land Use* dan *Land Development*.

Keempat pilar atau komponen dasar administrasi pertanahan ini dalam tataran praktis dikelola atau dilaksanakan oleh beberapa lembaga/institusi di daerah kabupaten/kota.

Sebelum inovasi KAKAP (KADASTER LENGKAP), keempat komponen atau pilar administrasi pertanahan tersebut berjalan sendiri-sendiri dengan basis data ataupun peta masing-masing instansi. Misalnya, Kantor Pertanahan menggunakan beragam Peta Pendaftaran Tanah bahkan Peta Desa pun bisa menjadi media pendaftaran tanah. BPPKAD menggunakan Peta Blok dalam pelayanan PBB, harus survei lapangan untuk menetapkan besaran nilai BPHTB, begitu pula dengan

2 *In the governance practice Land administration has been understood to be very narrow and partial, ie land titling activities managed by the Land Office or BPN (National Land Agency), whereas in theory the land administration consists of Land Tenure, Land Value, Land Use And Land Development.*

*These four pillars or basic components of land administration are practically managed or implemented by several institutions / institutions in the district / city.*

*Before the innovation KAKAP (COMPREHENSIVE KADASTER), the four components or pillars of land administration are running individually of each institution with data base or map. For example, the Land Office uses a variety of Land Registration Maps and even a Village Map can be a land registration means. BPPKAD uses Block Map in property tax services, compulsory field survey to determine the value of BPHTB, as well as KPP Pratama in determining Ssp Pph of land sale and purchase transaction only based on the amount stated on the deed.*

KPP Pratama dalam penentuan nilai Ssp Pph transaksi jual beli tanah hanya berpedoman PADA besarnya nilai yang tercantum pada akta.

Sejauh ini belum ada lembaga/instansi yang menginisiasi untuk mewadahi tata kelola administrasi pertanahan secara sistemik, terintegrasi dan terpadu. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik hadir dengan Kadaster Lengkap (KAKAP) dapat menjadi *Wadah Tata Kelola Pemerintahan dan Katalisator Pelayanan Administrasi Pertanahan Kepada Masyarakat* dengan cara melibatkan seluruh komponen Tata Kelola Pemerintahan. Unsur akademisi, organisasi profesi, kader penggerak masyarakat, sektor swasta lainnya (dunia usaha dan perbankan) bersama-sama turut berperan aktif, bahu membahu menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif dengan tujuan sama yakni mewujudkan KAKAP sebagai model *One Map Policy* di mulai dari Desa.

KAKAP dirancang dengan konsep seluruh bidang tanah (baik tanah sudah bersertipikat dan yang belum bersertipikat, tanah negara, tanah adat bahkan tanah kehutanan) wajib teridentifikasi dan terpetakan dalam satu peta dasar dengan skala besar yang *georeferenced*. Selanjutnya tiap bidang tanah diberi identitas tunggal dan unik yaitu Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), ditautkan dengan data Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pendukung lainnya.

KAKAP secara operasional dapat direplikasi di seluruh wilayah NKRI karena didukung aplikasi KKP berbasis web dan dipakai di seluruh Kantor Pertanahan Se-Indonesia

*So far there is no institutions / agencies have initiated to accommodate land administration systemically, integrated and integrated. Gresik Regency Land Office delivers Comprehensive Land Information System (KAKAP) which could become Governance Association and Catalyst of Land Administration Service by involving all Governance components, Academic elements, professional organizations, Community frameworks, other private sector (business and banking) together play an active role, shoulder to shoulder to carry out Participatory Mapping activities with the same goal that is to realize KAKAP as a model of One Map Policy starting from the Village.*

*KAKAP is designed with the concept of all plots of land (both certified and undocumented land, state lands, customary lands and even forest lands) shall be identified and mapped in a georeferenced large-scale base map. Furthermore, each plot of land is given a single and unique identity of Land Identification Number (NIB), linked with Tax Object Number (NOP), ID Number (NIK) and other supporting data.*

*KAKAP is operationally replicable throughout the NKRI area as it is supported by the web-based Computerization of Land Activities (KKP) application and is used throughout the Land Office of Indonesia.*

# KIARKOD: TRACKING ORDER SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA B4T

## KIARKOD: TRACKING ORDER OF SERVICE INFORMATION SYSTEM OF B4T

10

Balai Besar Bahan dan  
Barang Teknik, Kementerian  
Perindustrian

Central for Material  
and Technical Products,  
Ministry of Industry

1 Pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik B4T dimulai dari tahun 2004 sejak lahir Sistem Informasi Laboratorium (SIL) sebagai tonggak dimulainya transformasi sistem pelayanan yang merubah administrasi secara manual menjadi digital dengan tujuan membangun basis data yang mudah, efektif dan efisien, transparan dalam pelayanan publik B4T. Namun informasi dan transparansi pelayanan yang diberikan belum dapat dirasakan secara langsung oleh pelanggan, dan rekap data belum terintegrasi secara online dan real time. SIL kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T (SIPEJAB4T) yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik serta penerapan SNI ISO 9001:2008, dimana klausul Pengendalian Rekaman, Sasaran Mutu dan Fokus pada Pelanggan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.

Beberapa hal yang terjadi sebelum pemanfaatan QRCode pada SIPEJAB4T diantaranya : waktu penelusuran informasi

2 *The utilization of information technology in B4T public service started from 2004 since the birth of Laboratory Information System (SIL) as a milestone in the commencement of service system transformation which changed the administration manually to digital with the aim of building easy, effective and efficient database, transparent in B4T public service. However, the information and transparency of the services provided can not be felt directly by the customers, and the data recap has not been integrated online and real time. SIL is then refined into B4T Service Information System (SIPEJAB4T) based on Undang-undang No 25 Tahun 2009 regarding Public Service and Peraturan Menteri Perindustrian No 55 Tahun 2011 concerning Public Service Unit and application of SNI ISO 9001: 2008, where clause of Record Control, Quality Goals and Customer Focus are requirements that must be met.*

*Some of the things that happened before the use of QRCode on SIPEJAB4T were: the ordering time of customer order information for 30 minutes or more; The cost incurred by the customer by calling for Local Connection an average of Rp 3,750 per access and an average*

order oleh pelanggan rata-rata 30 menit bahkan lebih; biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dengan menelepon untuk Sambungan lokal rata-rata Rp 3,750 sekali akses dan Sambungan interlokal rata-rata Rp 30.000 sekali akses; Informasi kepada pelanggan bersifat pasif dan terbatas pada permintaan pelanggan. Beberapa permasalahan tersebut memberikan dampak inefisiensi dan pemborosan terhadap waktu, biaya dan informasi serta kepuasan pelanggan.

KIARKOD - SIPEJAB4T ini dinilai inovatif dan kreatif karena diantaranya upaya pendekatan yang berbeda dengan sistem informasi pelayanan publik lainnya; sebagai tanda unik disetiap bukti pembayaran yang menandakan bahwa bukti pembayaran yang ber-QRCode adalah yang dianggap valid sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan trust pelanggan ; tidak hanya menunjukkan keabsahan namun juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi detail pengujian dan kalibrasi ; fungsi mampu telusur sehingga memudahkan bagi peminta jasa untuk mengetahui status pekerjaan dari order yang mereka daftarkan.

Beberapa peningkatan signifikan sejak KIARKOD diimplementasikan diantaranya waktu penelusuran informasi order oleh pelanggan rata-rata berkurang dari 30 menit menjadi hanya 2 detik ; Biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan hanya menghabiskan 50 kb kuota internet setara dengan Rp. 50 dari sebelumnya rata-rata Rp 3000 melalui sambungan telepon lokal serta Informasi yang diterima Pelanggan lebih transparan, detail dan akuntabel.

*long distance connection Rp 30,000 per access; Information to customers is passive and limited to customer demand. Some of these problems have an inefficient and wasteful impact on time, cost and information and customer satisfaction.*

*KIARKOD - SIPEJAB4T is considered innovative and creative because of the different approaches to other public service information systems; As a unique sign of each payment receipt indicating that the proof of payment that QR has been considered valid so as to enhance the customer's sense of security and trust; Not only*



*shows validity but can also be used to display detailed test and calibration information; A function capable of searching making it easier for service requesters to know the job status of the order they register.*

*Some significant improvements since KIARKOD is implemented include the average customer order search time retrieval from 30 minutes to just 2 seconds; Costs incurred by customers only spend 50 kb internet quota equivalent to Rp. 50 from the previous average of Rp 3000 through local landlines as well as Information received by Customer is more transparent, detailed and accountable.*

# LABORATORIUM MANAJEMEN DATA

## DATA MANAGEMENT LABORATORY

11

Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan

*National Institute of Health  
Research and Development,  
Ministry of Health*

1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) merupakan unit penunjang, dengan level eselon 1, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan dilakukan melalui 15 satuan kerja di Badan Litbangkes. Hasil kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan tersebut merupakan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku menyusun suatu kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Karena penyelenggara penelitian di Badan Litbangkes berada di berbagai satuan kerja maka data penelitian terdistribusi pada masing-masing peneliti dan tidak dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan tidak dapat diketahui seberapa besar pemanfaatan data hasil penelitian oleh masyarakat dan diseminasi hasil penelitian hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Kondisi ini mendorong Badan Litbangkes untuk melakukan peningkatan tata kelola terhadap data dan informasi hasil penelitian secara profesional.

2 *National Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a supporting unit, as an eselon 1 level, which has the main duty to conduct research and development in health. The implementation of health research and development is through 15 working units at NIHRD. The results of the health research and development activities are data and information that can be applied as a tool to develop a policy and scientific development.*

*Because of NIHRD researchers are located in various working units, so the data research is spread in every researcher and not well managed. This cause's public utilization of data research cannot be identified and dissemination of data research only acknowledge by limited access. This condition encouraged NIHRD to improve the control of the data and information from the research professionally. Head of NIHRD in 2011 decide to initiate a special unit that is Laboratory of Data Management. The function of this unit is to provide management and services including the storage of data research of NIHRD. The accessibility of data research is organized and protected as 'a state documents' with an aim to avoid the risk of data misuse and*

Kepala Badan Litbang Kesehatan pada tahun 2011 menetapkan pembentukan unit khusus yaitu Laboratorium Manajemen Data. Fungsi unit ini adalah memberikan pelayanan dan pengelolaan termasuk penyimpanan data hasil penelitian Badan Litbang Kesehatan. Aksesibilitas data hasil penelitian ditata dan dilindungi seperti layaknya 'dokumen negara' dengan tujuan untuk menghindari risiko penyalahgunaan data dan kontrol hasil analisis supaya tidak memberikan informasi yang salah.

Pelaksana di Laboratorium Manajemen Data adalah pegawai Badan Litbangkes dengan berbagai disiplin ilmu dan berasal dari seluruh satuan kerja di Badan Litbangkes. Variasi disiplin ilmu tersebut menjadi kelebihan dalam penerapan teknologi informasi untuk pengelolaan hasil penelitian, sehingga output Badan Litbangkes dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat (klien). Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini sesuai dengan kebutuhan mengenai keterbukaan informasi publik melalui aplikasi teknologi informasi berbasis web yaitu: 1) Database penelitian Badan Litbang Kesehatan melalui tautan <http://labdata.litbang.depkes.go.id/riset-badan-litbangkes>; masyarakat dapat mengetahui data/informasi yang dapat diakses; 2) Aplikasi informasi indikator kesehatan berdasarkan hasil Litbangkes melalui tautan: <http://devinfo.litbang.depkes.go.id>; 3) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penelitian, yang dapat diakses melalui tautan <http://eriset.litbang.kemkes.go.id>; informasi seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes mulai tahun 2015; 5) Dokumentasi pemanfaatan data hasil litbangkes dapat diketahui melalui tautan <http://labdata.litbang.depkes.go.id/menu-layan/rekap-permintaan-data>.



*control the results of the analysis that will not give misleading information.*

*The member at the Data Management Laboratory is an employee at NIHRD with various disciplines and comes from all working units at NIHRD. Variations of these disciplines become an advantage in the application of information technology to manage the results of the study, so that the output of NIHRD can be accessed easily and quickly by the community (the client). Benefits derived from this innovation in accordance with the needs of public information openness through the application of web-based information technology that is: 1) Research database of NIHRD through link <http://labdata.litbang.depkes.go.id/riset-badan-litbangkes>; The public be informed of the data/information that can be accessed; 2) Application of health information indicator based on NIHRD result through link: <http://devinfo.litbang.depkes.go.id>; 3) Application of Information System of Management Research, which can be accessed via link <http://eriset.litbang.kemkes.go.id>; the information of all research conducted by the National Institute of Health Research and Development since 2015; 5) Documentation of data utilization of NIHRD can be found through link <http://labdata.litbang.depkes.go.id/menu-layan/rekap-permintaan-data>.*



## MAGMA (MULTIPLATFORM APPLICATION FOR GEOHAZARD MITIGATION AND ASSESSMENT) INDONESIA

### MAGMA (MULTIPLATFORM APPLICATION FOR GEOHAZARD MITIGATION AND ASSESSMENT) INDONESIA

12

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi  
Bencana Geologi  
Kementerian Energi Dan Sumber  
Daya Mineral

Center for Volcanology and  
Geological Hazard Mitigation  
Ministry of Energy and Mineral  
Resources

**I** MAGMA Indonesia (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia) adalah aplikasi multiplatform (web & mobile) dalam jaringan berisikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi (gunungapi, gempabumi, tsunami, dan gerakan tanah) yang disajikan kepada masyarakat secara kuasi-realtime dan interaktif.

Sistem ini dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh PNS Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sejak tahun 2015 dengan menggunakan teknologi terkini berbasis *open-source*. MAGMA Indonesia meliputi aplikasi yang digunakan secara internal/pegawai (analisis data dan pelaporan) maupun eksternal/publik (informasi dan rekomendasi). Prinsip utama MAGMA Indonesia adalah mengubah data menjadi informasi dan rekomendasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Pelayanan publik yang disajikan MAGMA Indonesia PVMBG saat ini terdiri dari: *Pertama* Gunungapi: (a) Informasi data pengamatan visual dan instrumental, tingkat aktivitas

**E** MAGMA Indonesia (Multiplatform Application for Geo-hazard Mitigation and Assessment in Indonesia) is a multiplatform (web & mobile) application in a network of integrated geological disaster information and recommendations (volcanoes, earthquakes, tsunamis and land movements) presented to the community in quasi-real time and Interactive.

*The system was built and developed independently by the PNS Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG) since 2015 using the latest open source based technology. MAGMA Indonesia includes internally-used applications (data analysis and reporting) or external / public (information and recommendations). The main principle of MAGMA Indonesia is to transform data into information and recommendations that are easily understood by the general public.*

*The public services presented by MAGMA Indonesia PVMBG currently consist of: First Volcano: (a) Information of visual and instrumental observation data, activity level (status), and volcanic activity (VAR), (b) KRB) Volcano, or (c) Volcanic ash volcanic information for aviation safety*

(status), dan rekomendasi gunungapi (Volcanic Activity Report/VAR), (b) Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi, maupun (c) Informasi abu vulkanik gunungapi untuk keselamatan penerbangan (Volcano Observatory Notice for Aviation/VONA).

*Kedua* Gempabumi dan Tsunami: (a) Informasi kejadian dan tanggapan gempabumi beserta analisis dan rekomendasinya dan (b) Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempabumi. *Ketiga* Gerakan Tanah: (a) Informasi kejadian dan tanggapan gempabumi beserta analisis dan rekomendasinya, dan (b) Peta Potensi maupun Zona Kerentanan Gerakan Tanah. Selain ketiga poin tersebut, ada juga Informasi Periodik mengenai kejadian spesifik maupun kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan mitigasi bencana geologi lainnya serta Laporan Bencana, yakni media pelaporan kejadian bencana geologi bagi masyarakat, pemda, maupun lainnya di sekitar wilayah bencana (Society Reporting System/SRS).

Hadirnya MAGMA Indonesia memberikan manfaat terbangunnya database kebencanaan geologi terintegrasi. Selain itu, *update* informasi cepat karena berbasis aplikasi dan mempersingkat alur komunikasi sistem peringatan dini untuk keselamatan dunia penerbangan telah dibuat MAGMA-VONA; *Update* informasi dan berita kebencanaan dapat diakses dengan mudah dan *realtime*; terbangunnya media pelaporan bencana secara online; dan kemudahan akses peta kawasan rawan bencana geologi.

(VONA).

*Both Earthquake and Tsunami: (a) Earthquake event information and response along with its analysis and recommendations and (b) Disaster Prone Area Map (KRB) of Earthquake. Third Movement of Soil: (a) Earthquake event information and response along with its analysis and recommendations, and (b) Potential Map or Land Vulnerability Zone. In addition to these three points, there are also Periodic Information on specific events and coordination activities, socialization, and other geological disaster mitigation and Disaster Reports, i.e. media reporting of geological disaster events for communities, local governments, and others around the disaster area (Society Reporting System / SRS ).*

*The presence of MAGMA Indonesia provides the benefits of the establishment of integrated geological disaster databases. In addition, information updates are fast due to application-based and shorten the communication flow of early warning systems for the safety of the aviation world have been created MAGMA-VONA; Update information and disaster news can be accessed easily and real time; The establishment of online disaster reporting media; And ease of access to geological disaster prone areas map.*

## PEMANFAATAN SERAT ECENG GONDOK DALAM PEMBUATAN SOKET KAKI DAN TANGAN PALSU (PROSTESIS)

### UTILIZATION OF WATER HYACINTH FIBER IN THE MAKING OF FOOT SOCKETS AND ARTIFICIAL HANDS (PROSTHESIS)

13

Politeknik Kesehatan Jakarta I,  
Kementerian Kesehatan

Health Polytechnic Jakarta  
I, Ministry of Health

1 Tanaman eceng gondok sering kali dianggap sebagai gulma perairan, mengganggu komoditas perikanan dan terjadinya penguapan air yang sangat cepat pada perairan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar waduk, danau ataupun aliran sungai. Saat ini masyarakat sudah mulai menggunakan serat eceng gondok di dalam industri kecil, kerajinan rumah tangga karena mudah didapat dan ketersediaan yang melimpah, tidak membahayakan kesehatan, dapat diurai oleh alam dan memiliki nilai ekonomis yang baik.

Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I bekerjasama dengan pusat biomaterial LIPI meneliti sifat dan karakteristik serat eceng gondok ini dan dibuktikan bahwa pada serat yang telah dilaminasi dengan *acrylic resin* menghasilkan material yang cukup kuat, dengan dilakukannya uji tarik dan uji kelenturan. Kekuatan serat ini setara dengan material serat kaca/fiberglass yang biasa digunakan di teknologi orthopaedi.

Pemanfaatan serat eceng gondok ini merupakan alternatif pilihan bagi tenaga

2 *Water hyacinth plants are often mentioned as a water weed, disrupting fishery commodity and causing water evaporation which is very fast on water and this is one of the environmental problems complained by people around reservoirs, lakes or streams. Nowadays people have started using water hyacinth fibers in small industry, handicraft household because it is easily obtained and is available, it is not dangerous for health, can be decomposed by nature and also have a good economic value.*

*Department Prosthetics Orthotics Polytechnic of Health Science Jakarta I of the Ministry of Health collaborate with Biomaterials LIPI (Indonesian Institute of Science) examine the nature and characteristics of the hyacinth fiber and prove that the fibers which are laminated with acrylic resin produces a strong material, by doing tensile and flexibility tests. The strength of water hyacinth fiber material is similar to glass fiber which is commonly used in orthopedic technology.*

*Utilization of water hyacinth fiber is an alternative option for prosthetist orthotist in choosing raw materials in the manufacture of assistive device*

ortotis prostetis dalam memilih bahan baku dalam pembuatan alat bantu kaki dan tangan palsu (prosthesis). Proses produksi yang mudah dan ekonomis berdampak secara keseluruhan menurunkan biaya produksi dalam pembuatan alat bantu (prosthesis) sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan yang paling penting adalah tanpa mengorbankan kekuatan dan keselamatan penggunaanya.

Dengan didukung oleh kebijakan Kementerian Kesehatan dan tersedianya standar prosedur operasional maka keberlanjutan dalam hal pemanfaatan serat eceng gondok dalam pembuatan soket kaki dan tangan palsu (prosthesis) dapat berjalan berkesinambungan. Melalui diseminasi dan pelatihan untuk tenaga ortotis prostetis di seluruh Indonesia maka pemanfaatan serat eceng gondok ini dapat lebih dikenal. Dilakukannya penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar danau, waduk ataupun aliran sungai untuk mendayagunakan tanaman eceng gondok menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Pada akhirnya penyandang disabilitas dapat menjangkau alat bantu (prosthesis) yang ramah lingkungan, ramah kantong dan berfungsi sesuai kebutuhannya.

*(prosthesis). The production process is easy and economical impact on the overall lower production costs in the manufacture. Affordable by all levels of society and most importantly without sacrificing strength and safety the users.*

*Supported by Ministry of Health policies and availability of the standard operating procedure the sustainability of utilization of water hyacinth fiber socket in the manufacture of assistive device (prosthesis) can be run continuously. Through dissemination and training of Prosthetics Orthotics throughout Indonesia the utilization of this fiber will be widely spread. By doing outreach to communities living around lakes, reservoirs or streams to utilize water hyacinth plants into products that have economical value. At the end people with disabilities can afford the assistive device (prosthesis) which environmentally friendly, pocket friendly and meets to their individual needs.*



## PRIQQ KLIK

### PRIQQ CLICK

14

Balai Besar Karantina Pertanian  
Tanjung Priok, Badan Karantina  
Pertanian | Kementerian  
Pertanian

Central Agriculture  
Quarantine of Tanjung Priok,  
Quarantine Agency | Ministry  
of Agriculture

1 Pelayanan di BBKP Tanjung Priok telah mengacu ke *Service Level Agreement (SLA)* sesuai kesepakatan bersama. Namun informasi proses yang disampaikan secara manual menjadi kurang efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun logistik (*cost*). Pengguna jasa harus ke kantor menanyakan proses karantinanya, begitu juga jika ada masalah. Hasil verifikasi, tarif PNBP, nomor dokumen, status upload ke *Indonesia National Single Windows (INSW)* dan analisis reject masih belum transparan.

PRIQQ KLIK adalah transparansi yang *real time*. Menjawab masalah sekaligus memecahkannya dengan cara baru yang belum pernah diaplikasikan sebelumnya. Pendekatan strategis atas kendala tersebut adalah dengan membuka semua informasi yang selama ini belum terbuka (*open access*) pada pengguna jasa, secara mudah tanpa instal aplikasi bahkan disajikan secara *real time*.

Dampak dari penerapan inovasi ini, pertama, transparansi proses karantina dan biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) secara online dan *real time* akan **menghindari**

2 *Services given in BBKP Tanjung Priok had been referred to the Service Level Agreement (SLA) as a collective agreement. However, information on ongoing process given manually was felt less effective and efficient on time and cost (logistic) basis. Customers were required to visit the office to ask for progress on quarantine process and also when problems occur. Verification results, PNBP costs, document numbers, upload status to the Indonesia National Single Windows (INSW) and rejection analysis were not transparent.*

*PRIQQ KLIK is a real time transparency. Responded to the problems and at the same time solving it using a new way that never before applied. Strategic approach for the difficulties by opening all the essential information for the customers, easily, without the necessity of application installation, and served real time.*

*Impact of PRIQQ KLIK, first, transparency on quarantine process and PNBP costs online and real time basis would suppress extortion (under desk payment) up to 100%. Second, progress on quarantine process from verification up to document transfer to INSW portal can be checked anywhere, anytime, without have to*

**pungli** sampai dengan 100%. Kedua, proses verifikasi sampai transfer ke INSW dapat dicek dimanapun dan kapanpun, tanpa harus menunggu atau menanyakan ke petugas, hal ini meningkatkan **efisiensi pengurusan dan logistik** hingga 100%. Ketiga, layanan karantina menjadi **informatif**, kejelasan proses dan biaya, nomor dokumen dan status transfer ke INSW, serta analisis reject INSW tersaji hanya dengan satu klik. Keempat, memberikan **kepastian waktu** layanan, karena dengan sistem online *real time*, pengguna jasa tidak perlu khawatir tentang status proses permohonan pemeriksaan karantina yang diajukan, terbukti dengan penurunan komplain hingga 60%. Kelima, manajemen dapat **mengevaluasi kinerja SLA secara online** kapanpun dan dimanapun.

PRIQQ KLIK adalah perwujudan dari komitmen manajemen dalam memberikan pelayanan yang simpatik, cepat, efektif, profesional, objektif dan transparan (SICEPOT) dan bagian dari sistem layanan kepada pengguna jasa. Penambahan fasilitas dalam PRIQQ KLIK yang sedang dikembangkan berikutnya diantaranya PRIQQ.NET, Draft Phyto, Transparansi Pemeriksaan Fisik, Paperless System dan RHQR (Pelayanan Jalur Khusus).

Setiap tahun BBKP Tanjung Priok selalu menyiapkan ketersediaan anggaran dalam DIPA untuk pengembangan layanan PRIQQ KLIK agar makin efektif sesuai kebutuhan pengguna jasa. Tidak sulit untuk melakukan replikasi, krena biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem pelayanan ini juga tergolong mudah dan murah.

*wait for or ask to quarantine officer. These would increase arrangement and logistics efficiency up to 100%. Third, quarantine service becoming informative, transparency on process and costs, document number and upload status to INSW portal, and INSW rejection analysis will be served by only one click. Fourth, providing accurate service time. With online and real time basis, costumer should not be worried about quarantine inspection application process. These had been proved by the decrease of complaint by 60%. Fifth, BBKP Tanjung Priok management could evaluate the SLA performance online, anytime, anywhere.*

*PRIQQ KLIK is a representation of BBKP Tanjung Priok management's commitment in giving a sympathetic, fast, effective, professional, objective and transparent (simpatik, cepat, efektif, profesional, objektif, transparan / SICEPOT) services and part of service system for the costumers. Addition of facility within PRIQQ KLIK on further development including PRIQQ.NET, Draft Phyto, Physical Examination Transparency, Paperless System and Rush Handling Quarantine Release (RHQR) which is a special line service.*

*BBKP Tanjung Priok has provide a budget within its DIPA (annual budget) every year for the improvement of PRIQQ KLIK service to be more effectively corresponding to costumers needs. Replication would not be difficult, because to create/develop this service system is easy and cheap.*

## **RATU BESTARI (KERAPIHAN, KETERATURAN, KEBERSIHAN, KELESTARIAN, DAN KEDISIPLINAN) UNTUK TATA KERJA YANG LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF**

### **QUEEN BESTARI (TIDINESS, ORDERLINESS, HYGIENE, SUSTAINABILITY, AND DISCIPLINE) FOR MORE EFFICIENT AND EFFECTIVE WORK PROCEDURES**

Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Perindustrian

Legal and Organization Bureau  
of the Secretariat General,  
Ministry of Industry

15

1 Untuk memenuhi tuntutan dunia industri yang ingin dilayani dengan lebih cepat, Kementerian Perindustrian banyak menciptakan inovasi, mulai dari yang bersifat tradisional yaitu memperbaiki proses kerja hingga inovasi yang memanfaatkan teknologi.

Ratu Bestari atau 5K (Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, dan Kedisiplinan) merupakan salah satu inovasi yang ditempuh Kementerian Perindustrian sejak 2009 dengan cara menerapkan metode "Just In Time Manufacturing" dari Jepang (5S) untuk memperbaiki proses kerja. Penerapan Ratu Bestari ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 23/M-IND/PER/2/2009.

Fokus penerapan Ratu Bestari pada awalnya adalah untuk menata ruang kerja dengan memperhitungkan aspek-aspek ergonomi. Tahapan selanjutnya adalah menciptakan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kerja, seperti pemakaian listrik, kampanye 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk ATK, perabot furniture, dll.

2 In the purpose of fulfilling industrial world challenge for fast service, Ministry of Industry has created innovations, from traditionally base in improving work process to technology utilization innovation.

Ratu Bestari or 5K (Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, and Kedisiplinan)/ (sort, set in order, shine, standardize, and sustain) is an innovation taken by Ministry of Industry since 2009 with implementing "Just In Time Manufacturing" method from Japan (5S) in order to improve work process. The implementation of Ratu Bestari is strengthened with Regulation of Ministry of Industry of Republic of Indonesia Number 23/M-IND/PER/2/2009.

At the beginning, ergonomics aspects calculation base in setting up working room became the implementation focus of Ratu Bestari. The advance step was creating working infrastructures utilization efficiency, for examples electric usage, 3R (Reduce, Reuse, Recycle) campaign for working stationery, furnitures, etc.

Since 2014, the implementation focus of Ratu Bestari has sharpened to improve service through

Pada tahun 2014 fokus penerapannya dipertajam untuk meningkatkan pelayanan melalui pengurangan pemborosan (waste) dan menanamkan disiplin di kalangan pegawainya. Pengurangan pemborosan tersebut meliputi faktor waktu kerja, pembelian alat kerja dan bahan, serta pemanfaatan luas ruangan secara optimal. Seluruh pegawai terlibat aktif untuk selalu disiplin sambil menciptakan berbagai improvement baru.

Melalui penerapan Ratu Bestari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun

*the waste reducing and discipline embedding for Ministry of Industry public servants. The waste reducing is including factors in working time, material and working tool purchasing, and optimally room's wide utilization. All public servants are actively involving to be always discipline as well as creating many new improvements.*

*By the way of Ratu Bestari implementation, from evaluation result conducted in 2016 had showed significantly service improvement, in the aspects of Technical Service Unit's time efficiency from*



2016 menunjukkan terjadinya peningkatan pelayanan yang signifikan, antara lain efisiensi waktu pelayanan di Unit Pelayanan Teknis yang semula 28 hari menjadi 18-25 hari; waktu untuk mencari dokumen yang semula 20 menit menjadi 5 menit; penghematan dalam pembelian alat tulis kantor maksimal 30% karena masa pakainya bertambah dan jarang hilang; serta terciptanya rasa nyaman, bersih, teratur di tempat kerja, baik untuk pegawai maupun pengguna jasa.

*28 days to 18-25 days; document searching time reduce from 20 minutes to 5 minutes; office stationery purchasing economization up to 30% maximally as a result of optimally utilization and lost infrequency; and comfortability, cleanliness, regularity creation atmosphere in working place, for both public servants and service users.*



## RISOL GEPENG MAS

### RISOL GEPENG MAS

16

Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur", Bekasi, Kementerian Sosial Republik Indonesia

*Social Rehabilitation Institution Bina Karya "Pangudi Luhur", Bekasi, Ministry of Social*

1 Kementerian Sosial RI mengembangkan model layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Gelandangan Pengemis Berbasis Masyarakat, model ini merupakan alternatif jawaban yang relevan dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis, karena dilakukan melalui penjangkauan (*outreach*) ke wilayah kantong-kantong pengemis, melibatkan unsur pemerintah daerah setempat dan masyarakat

Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Gelandangan Pengemis Berbasis Masyarakat merupakan pengembangan model pelayanan yang bersifat partisipatif, efisiensi, orientasi pelayanan pada pemberdayaan, perluasan wilayah jangkauan pelayanan, berkelanjutan dan dapat di replikasi di seluruh daerah.

Dampak setelah mengikuti kegiatan ini, Gepeng sebagai Penerima Manfaat, memiliki kepercayaan dirinya yang lebih baik, etos kerja meningkat dan tidak malas lagi. Dengan keterampilan yang didapat setelah mengikuti kegiatan ini, mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan, tidak menggelandang dan mengemis lagi.

1 The Ministry of Social Affairs has developed a model for Overseas Social Rehabilitation services for the Community Based Homeless and Beggars, this model is an alternative answer that is relevant in dealing with homeless and beggars, as it is done through outreach to the main area of beggars, involving local government elements and Community

*Social Rehabilitation of External Reforms for Homeless and Beggars in the community Based is a development of participatory service model, efficiency, service orientation on empowerment, expansion of service coverage area, sustainability and replication in all regions.*

*The impact after following this activity, Gepeng as Beneficiary, has a better confidence, work ethic is improved and no longer lazy again. With the skills gained after attending these activities, they have jobs and income, no staggering and begging again.*

*PSBK Pangudi Luhur becomes "Trendsetter" in Handling Gepeng in Indonesia and become Pilot for Province / Regency / other Town. The regulations and policies of the Ministry of Social*

PSBK Pangudi Luhur menjadi "Trendsetter" dalam Penanganan Gepeng di Indonesia dan menjadi Percontohan untuk Provinsi/ Kab/Kota lain. Regulasi dan kebijakan dari Kementerian Sosial RI mendorong terlaksananya pengembangan model ini, sehingga akan dilaksanakan secara kesinambungan walaupun ada perubahan manajemen/ pergantian pimpinan.

Model layanan ini dilakukan dengan pola sederhana, aplikatif dan biaya lebih murah (efisiensi), tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang besar (gedung, peralatan, dan sebagainya) daripada pelayanan institusional, sangat terbuka untuk diterapkan dan dikembangkan diberbagai daerah. Melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sehingga tanggung jawab untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis bisa dilakukan secara lebih optimal.

*Affairs encourage the implementation of the development of this model, so that it will be implemented continuously despite any change of management / change of leadership.*

*This service model is done with simple pattern, applicative and cheaper cost (efficiency), does not require big facilities and infrastructure (building, equipment, etc.) than institutional service, very open to applied and developed in various area. It involves various elements of the government, Social Welfare Institution (LKS) of Social Workers of Kecamatan (TKSK) Social Workers (PSM), so the responsibility to handle the problems of homeless and beggars can be done more optimally.*



## **SIBIMA KONSTRUKSI (SISTEM INFORMASI BELAJAR INTENSIF MANDIRI BIDANG KONSTRUKSI)**

### ***SIBIMA KONSTRUKSI (SELF MANAGEMENT INTENSIVE LEARNING INFORMATION SYSTEM OF CONSTRUCTION)***

Balai Penerapan Teknologi  
Konstruksi, Direktorat Jenderal  
Bina Konstruksi, Kementerian  
Pekerjaan Umum & Perumahan  
Rakyat

*Technical Application Unit for  
Construction Technology, Directorate  
General of Construction Development,  
Ministry of Public Works and Housing*

17

1 Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 pemerintah menargetkan terlaksananya pelatihan bagi 750.000 orang tenaga kerja konstruksi. Hal ini didasarkan atas amanat UU 18/1999 bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja dalam sektor konstruksi harus bersertifikat. Di sisi lain, UU 23/2014 juga mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban melaksanakan pelatihan tenaga ahli dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pelatihan tenaga terampil. Total kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelatihan konvensional adalah 60.000 orang/tahun, sedangkan Kementerian PUPR dapat melatih 30.000-40.000 orang/tahun. Artinya masih ada sebesar 50.000-60.000 orang/tahun yang harus dilatih.

Untuk itu Kementerian PUPR melakukan inovasi pelayanan pelatihan berbasis teknologi informasi dengan metoda pelatihan jarak jauh yang diberi nama SIBIMA KONSTRUKSI. SIBIMA merupakan sistem pembelajaran mandiri, bersifat inklusif, mudah diakses, murah, cepat dan berkualitas dengan kapasitas pelatihan maksimal dan menjangkau seluruh pelosok tanah air.

2 *Based on the RPJMN 2015-2019, the government targets the training of 750,000 construction workers. This is based on the mandate of Law 18/1999 that every worker working in the construction sector must be certified. On the other hand, Law 23/2014 also mandates that the provincial government is obliged to undertake training of experts and the district/city government is obliged to undertake training of skilled workers. Total capacity of the local government to carry out conventional training is 60,000 persons/year, while the PUPR Ministry can train 30,000-40,000 persons/year. That means there are still 50,000-60,000 people/year who must be trained.*

*Therefore, Ministry of Public Works & Housing innovate an information technology-based training services with a distance learning method called SIBIMA KONSTRUKSI. SIBIMA is a self-learning system, inclusive, accessible, inexpensive, speedy and quality with maximum training capacity and reach all corners of the country.*

*From 2015 to 2017, the presence of SIBIMA KONSTRUKSI has reduced training costs*

Sejak tahun 2015 hingga 2017, kehadiran SIBIMA KONSTRUKSI telah menekan biaya pelatihan dari Rp.4,8-11,6 juta/orang menjadi Rp.150-500 ribu/orang (menghemat hingga 70%). SIBIMA merupakan pelatihan jarak jauh bidang konstruksi pertama di Indonesia dengan modul pembelajaran mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SIBIMA juga dilengkapi dengan spesifikasi teknis bidang PUPR terlengkap. Untuk menambah pengetahuan para pengguna, SIBIMA juga dilengkapi dengan *knowledge management* yang dikemas secara menarik dan menghadirkan informasi perkembangan teknologi terapan bidang konstruksi terkini.

Pelaksanaan pelatihan jarak jauh dengan SIBIMA KONSTRUKSI melibatkan banyak pihak, al: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), perguruan tinggi, asosiasi profesi. Peserta yang telah lulus pelatihan ini akan mendapatkan Sertifikat Pelatihan dengan waktu pembelajaran setara 50 jam. Bagi *fresh graduate* S1/D4, Sertifikat Pelatihan ini dapat digunakan untuk mengikuti uji sertifikasi tanpa harus magang 1 tahun. Bagi pemilik Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Sertifikat Pelatihan ini memiliki nilai Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) sebesar 25 *point* untuk *Continuing Professional Development* (CPD) bidang jasa konstruksi.

*from Rp.4,8-11,6 million/person to Rp.150-500 thousand/person (saving up to 70%). SIBIMA is the first construction filed distance learning in Indonesia with learning module referring to Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI). SIBIMA also comes with the most complete technical specification in public works and housing field. To increase the knowledge of the users, SIBIMA also comes with knowledge management that is attractively packaged interesting and deliver information on the current development of applied technology in construction field.*

*Implementation of distance learning with SIBIMA KONSTRUKSi involves many parties, such as: Construction Service Development Institution (LPJK), universities, professional associations. Participants who have passed this training will receive a training certificate with a 50-hour learning time. For S1/D4 fresh graduates, this training certificate can be used to follow the certification test without having 1 year internship. For the owner of a Certificate of Young Expertise, this training certificate has the value of Profession Development Credit Units by 25 points for Continuing Professional Development (CPD) for construction services area.*



## SINERGI DESA (SISTEM INFORMASI ENERGI DESA)

### SINERGI DESA (VILLAGE ENERGY INFORMATION SYSTEM)

18

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

*Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources*

1 Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini baru mencapai 91%, masih terdapat 2500 desa yang belum dapat terlistriki, kebanyakan desa ini merupakan desa di pulau kecil dan terluar di Indonesia sehingga belum terjangkau listrik PLN. Dengan alasan tersebut, Ditjen EBTKE sejak tahun 2011-2016 berinisiatif untuk membantu masyarakat Indonesia di desa-desa yang belum mendapatkan listrik agar mendapatkan hak yang sama yaitu dengan membangun infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pembangunan Infrastruktur EBT di beberapa lokasi ini berdasarkan usulan proposal dari Pemerintah Daerah (Pemda) (sesuai dengan Permen ESDM No 10 Tahun 2012).

Selama masa perencanaan pembangunan, masa pembangunan dan pemeliharaan, Ditjen EBTKE mendapatkan beberapa tantangan dan kendala diantaranya, pengajuan usulan pembangunan infrastruktur EBT dari Pemda masih bersifat kompleks dan konvensional, Sumber Daya Manusia di Ditjen EBTKE yang

2 *Electrification ratio in Indonesia has reached 91%, whereas the remaining non-electrified area spread in more than 2,500 villages. Most of them are located in the small and outer islands of Indonesia which are hardly connected by the National Utility Company (PLN). Considering the aforementioned challenges, since 2011 Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation (DitJen EBTKE) has initiated to provide equal electricity access to the villages where electricity access is absent. DitJen EBTKE has been constructing various renewable energy based power plants which later called the rural mini-grid, particularly for photovoltaic (PV) mini-grids and micro-hydro power (MHP) plants. The rural mini-grd development had been proposed by provincial governments, based on Ministerial Energy Decree No. 10/ 2012.*

*During the program phase, which comprises of planning, construction and maintenance, DitJen EBTKE has been dealing with various challenges and setbacks, such as proposal submission processes are complex and conventional, limited number of staffs who are able to conduct proposal evaluation. The rural mini-grids are located in the remote and geographically*

bertugas sebagai evaluator masih terbatas, beberapa lokasi pembangunan infrastruktur PLT EBT memiliki akses lokasi yang cukup bahkan sangat sulit untuk dijangkau, operator PLT EBT pedesaan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan keterlibatan Pemda dan Masyarakat desa masih minim serta belum terkoordinasi.

Dari beberapa kendala dan tantangan itu latar belakang dibuatnya sebuah aplikasi yang dapat membantu memberikan solusi yang membantu menyelesaikan kendala tersebut, yaitu dibuatnya aplikasi bernama "Sinergi Desa" atau Sistem Informasi Energi Desa, sistem aplikasi ini bukan hanya merupakan aplikasi layanan publik biasa, Sinergi Desa memiliki 3 (tiga) Aplikasi penting yang sampai saat ini masih akan terus dikembangkan guna membantu pelayanan publik dan juga menjaga kualitas layanan listrik dari PLT EBT yang sudah dibangun. Tiga Aplikasi tersebut diantaranya, *E-Proposal* (Proposal Elektronik), Sistem Akuisisi Data, dan Sistem Informasi dan Komunikasi dua arah melalui dan aplikasi ponsel (berbasis Web dan Android).

Beberapa Dampak Positif setelah adanya Aplikasi Sinergi Desa ini di antaranya, pemda dapat mengajukan proposal usulan pembangunan PLT EBT kapanpun dimanapun, tanpa terkendala Jarak dan Waktu, Pemerintah merasa terbantu dalam berkoordinasi dengan masyarakat, karena dalam Sinergi Desa terdapat Komunitas Energi Desa yang didalamnya terdapat para ahli yang membantu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai cara pengelolaan dan pemeliharaan PLT EBT.

*challenging area, operators of the rural mini-grids are coming from elementary to middle-level education backgrounds, and participation of local government officials (village to provincial level) and the rural communities in the rural mini-grids are low and uncoordinated.*

*Aiming to overcome the identified challenges and hindrances, a solution has been developed by using information technology (IT). It is called SINERGI DESA that stands for Information System for Rural Energy which aims to improve public services and maintaining the electricity quality from the rural mini-grids. It comprises of three essential applications, namely E-proposal, Data acquisition system, and A knowledge platform using two-way communication method (web and android-based system).*

*SINERGI DESA has created positive impacts during its implementation, such as provincial governments can submit proposal of the rural mini-grids development in their area regardless of their places and time, opening the communication gap between DitJen EBTKE and the relevant communities both from RE practitioners and experts as well as the benefited communities.*



## SIPUHH: MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEHUTANAN

### SIPUHH: REALIZING FORESTRY GOVERNANCE

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Directorate of Contribution and Distribution of Forest Products, Directorate General of Sustainable Production Forest Management, Ministry of Environment and Forestry*

# 19

1 Selama bertahun-tahun penatausahaan hasil hutan dilaksanakan secara *official assessment*. Di setiap tahapan proses ditempatkan aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengesahan untuk memastikan proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan. Penatausahaan yang demikian dalam prakteknya telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sebagai akibat rantai birokrasi yang panjang dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menyadari hal tersebut, pemerintah melakukan perubahan yang bersifat mendasar dari *official assessment* menjadi *self assessment* melalui penerapan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau SIPUHH. Dengan SIPUHH, seluruh proses penatausahaan dilakukan melalui transaksi elektronik oleh pelaku usaha secara mandiri, dan fungsi aparat pemerintah dalam pemeriksaan dan pengesahan digantikan oleh otomasi sistem.

Dengan SIPUHH, maka pelayanan menjadi optimal. Hal ini mengingat pengesahan produksi, pembayaran PNBP, penerbitan dokumen angkutan dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, sehingga dapat

2 *For years, the forest products administration has been conducted by the official assessment. At every stage of process, a government officer is deployed to serve a verification and validation to ensure the processes are conducted in accordance to the regulation. Such forest product administration had generated high cost economy, as a result of a long bureaucratic chain and, of course, does not reflect the principals of a good governance.*

*Based on the condition, the government makes a fundamental changing in the forest product administration, from the official assessment to become a self-assessment through the application of Information System on Forest Product Administration named as SIPUHH. Through SIPUHH, the entire process of the forest product administration is carried out through an electronic transactions by business actor itself while the function of the government officials in verification and validation is replaced by system automation.*

*By the application of SIPUHH, the public service becomes optimal. Due to the verification and validation, PNBP payment and the issuance of*

memangkas birokrasi dan waktu proses. Melalui SIPUHH, pengesahan produksi sampai pembayaran PNBP bahkan pengangkutan dapat dilakukan pada hari yang sama, sehingga menurunkan biaya produksi dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk kayu di pasar.

Dari sisi pemerintah, SIPUHH telah membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sebab transaksi data yang dilakukan secara elektronik dapat menyediakan informasi yang utuh, lengkap, akurat dan tepat waktu. Hal ini sangat membantu sebagai dasar pengambilan keputusan baik terkait dengan perizinan, target penerimaan PNBP termasuk dana bagi hasil dari PNBP antara pemerintah pusat dan daerah, maupun tindakan hukum atas pelanggaran di bidang pemanfaatan hasil hutan.

Sejak diberlakukan mulai 1 Januari 2016, SIPUHH telah memberikan harapan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi pelaku usaha, SIPUHH telah menjadikan usaha kehutanan lebih efisien, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk tertib dan taat terhadap aturan. Di sisi pemerintah, penerapan SIPUHH telah mengangkat citra sekaligus membuktikan kepada publik bahwa pemerintah mampu membangun dan mengelola sebuah sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel berbasis transaksi elektronik yang diberlakukan secara massal dan massif terhadap seluruh pelaku usaha di bidang kehutanan.

*transport document is carried out by business actor itself independently, eventually cut the bureaucracy chain and process time. By using SIPUHH, from the validation, the payment of PNBP and even up to product transportation can be carried out within the same day, thus reducing the production cost and eventually enhance the competitiveness of forest products in the market.*

*From the government point of view, SIPUHH has assisted in decision making rapidly and accurately due to the electronically data transaction is able to provide an intact, complete and accurate data and information, especially in controlling the permission, determination revenue (PNBP) target and revenue sharing fund between the central and local government, and also as a reference in law enforcement in forest product utilization sector.*

*Since coming into force on January 1<sup>st</sup> 2016, SIPUHH has provided hope in strengthening good forestry governance. From the business actor side, SIPUHH have made business in the forestry sector more efficient, as well as encourages the entrepreneurs to be orderly and obedient against the regulation. From the government side, the implementation of SIPUHH has raised the image as well as proving to the public that the government is able to build and manage a transparent and accountable system applied to all business actors in the forestry sector.*



# TEKNOLOGI E-FILING RENEWAL TRADEMARK DI INDONESIA

## TECHNOLOGY OF E-FILING RENEWAL TRADEMARK IN INDONESIA

# 20

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

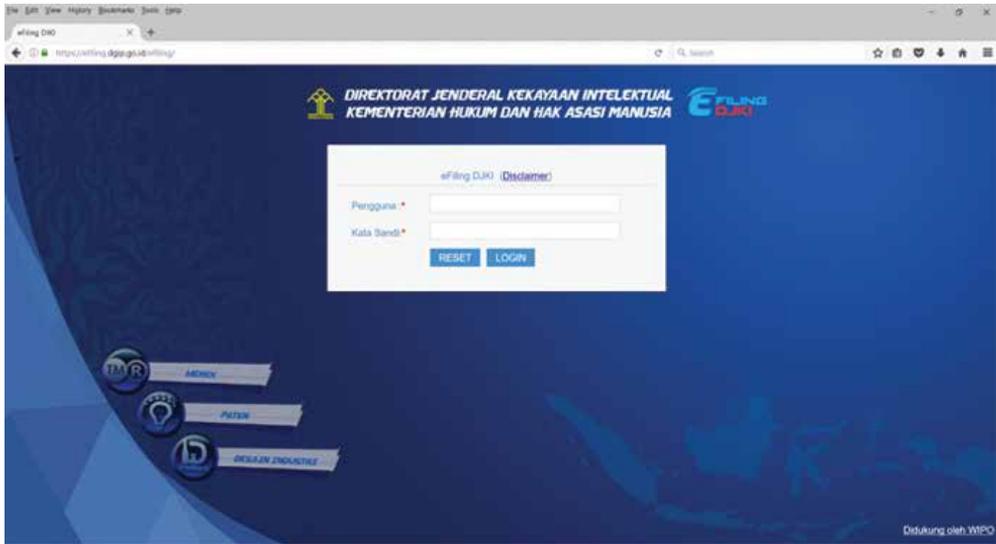
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Justice and Human Rights

1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Pasal 1 ayat 1). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Masa perlindungan hak atas merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang apabila melakukan pengajuan pendaftaran perpanjangan hak atas merek 6(enam) bulan sebelum habis masa berlakunya dan 6(enam) bulan setelah habis masa berlakunya. (Pasal 35 Ayat 3 dan 4). Sebelum Tahun 2015 DJKI sering menerima keluhan dari masyarakat terkait administrasi perpanjangan masa perlindungan Merek. Permasalahan utama yang dihadapi oleh DJKI yaitu (1) pengajuan perpanjangan merek diajukan lebih dari satu kali pengajuan perpanjangan, (2) lamanya penyelesaian perpanjangan merek kurang lebih 2 tahun yang menyebabkan status permohonan tidak jelas,

2 Regulation Number. 20 Year 2016 about Trademark (article 1 paragraph 1). Trademark is a sign that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, the arrangement of the color, in the two dimensional and/or three (3) dimensions, sound, hologram, or a combination of two or more elements to distinguish goods and/or services produced by persons or legal entities in the activities of trade in goods and/or services.

The period of protection of the rights using the trademark for 10 years and can be extended when doing the filing of registration renewal of trademark extension of 6 months before it expires and 6 months after it expires. (Article 35 paragraph 3 and 4). Before the year 2015 Directorate General Of Intellectual Property (DGIP) often receive complaints from the public administration related extension of Trademark protection. The main problem faced by DGIP such as (1) Filing of a Renewal Trademark is filed more than one applicant, (2) The length of the completion of the renewal of the trademark more or less 2 years which caused the application status is not clear, (3) A big budgeting in terms of digitizing documents application, availability



(3) anggaran yang besar dalam hal digitalisasi dokumen permohonan, ketersediaan tempat penyimpanan (menggunungnya arsip), logistik (Map, kertas formulir, tinta), (4) *Human error* (salah validasi, salah *entry*), (5) berkas permohonan perpanjangan yang tercecer.

E-filing *Renewal Trademark*, adalah salah satu program yang diprakarsai oleh Direktorat Teknologi Informasi KI DJKI bersama dengan WIPO sebagai wujud dari permintaan publik untuk mendapatkan pelayanan publik yang PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif). Dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35 ayat 3 memperbolehkan pengajuan permohonan perpanjangan Merek secara Online, merupakan salah satu tonggak baru negara Indonesia dalam pelayanan Kekayaan Intelektual di ASEAN. Yang mana, sistem administrasinya di atur dalam Peraturan Menteri Kemenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI Secara Elektronik.

*of storage (stacking archive), logistics (folders, paper, ink-form), (4) Human error (miss validation, miss entry), (5) the application for the renewal is missing.*

*E-filing Renewal Trademark is one of the programs initiated by the Directorate of information technology DGIP together with WIPO as a manifestation of the public's demand to get a definite public service (Professional, Accountable, Transparent, Synergy, and innovative). In the regulation on Trademark and geographical indications Article 35 paragraph 3 allows the filing of a petition for the renewal trademark by Online, is one of the milestones of the new country of Indonesia in the service of intellectual property in the ASEAN. Its administrative system, which is set in the Ministry Of Law And Human Rights Regulation Number 42 2016 about Service Pleas Intellectual Property Electronically.*



## BPKB DELIVERY

### *BPKB DELIVERY*

# 21

Kepolisian Resor Brebes  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

*Brebes Police Resort  
The Indonesian National Police*

1 Pelaksanaan inovasi pelayanan publik BPKB Delivery Polres Brebes dilaksanakan sebagai solusi bagi perkembangan dinamika masyarakat khususnya di Kabupaten Brebes dalam hal layanan penerbitan BPKB. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah permohonan BPKB yang dihadapkan dengan adanya keterbatasan dalam proses distribusi BPKB akibat faktor geografis wilayah Kabupaten Brebes. Selain itu adanya proses yang tidak efisien dalam pendistribusian BPKB, belum adanya sistem informasi penerbitan serta lamanya proses penerbitan juga menjadi faktor pendorong lainnya. AKBP Luthfie Sulistiawan, SIK, MH, M.Si selaku Kapolres Brebes berharap melalui program ini masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan Polri khususnya dalam hal penerbitan BPKB.

Beberapa poin yang menjadi unggulan dan keunikan BPKB Delivery antara lain berkaitan dengan petugas yang mengantar langsung kepada pemohon BPKB khususnya BPKB BBN2. Selain itu tersedia sistem informasi penerbitan BPKB yang menunjang akses pemohon, tidak adanya biaya tambahan untuk

2 *Public service innovation which known as "BPKB Delivery Polres Brebes" had been implemented as a solution for the dynamic of Brebes community, especially in obtaining BPKB services. Polri can always be updated to community through this innovation. This innovation is motivated by the high number of BPKB applicants which are faced with the limitations of distribution process due to the geographical factor of Brebes Regency. Other motivations are the existence of inefficient processes in BPKB distribution, the lack of information system and the lengthy publishing process. AKBP Luthfie Sulistiawan, SIK, MH, Msi as Chief of Brebes Police hopes that people may access Polri's services in an easier way through this program, especially in terms of BPKB issuance.*

*There are several advantages and uniqueness of BPKB Delivery which differentiate it among others. First, BPKBs are delivered directly to its applicants, especially for BPKB BBN2. In addition, there is a BPKB publishing information system which supports applicant to access the latest status of his/her BPKB process, no additional costs to obtain BPKB Delivery services and the optimization of BPKB personnel for BPKB*

mendapatkan pelayanan BPKB Delivery serta adanya optimalisasi personel BPKB untuk proses pengantaran BPKB BBN1 dan personel Samsat untuk proses pengantaran BPKB BBN2. Keunikan lain adalah berkaitan sarana dan prasarana yang merupakan dukungan langsung masyarakat melalui perjanjian pinjam pakai dan kecepatan proses penerbitan BPKB melalui tanda tangan elektronik.

Dampak dari dilaksanakannya inovasi BPKB Delivery ini terhadap masyarakat terlihat dari kemudahan yang diterima masyarakat untuk menerima BPKB yang telah terbit, proses penerbitan BPKB yang lebih efisien, tersedianya sarana informasi penerbitan BPKB, proses BPKB cepat dan terdapat kepastian jangka waktu penerbitan BPKB sehingga BPKB dapat terdistribusi dengan cepat, tepat dan aman.

Keberlanjutan dalam inovasi BPKB Delivery didukung melalui adanya peraturan Kapolres Brebes Nomor 2 Tahun 2016 tentang BPKB Delivery beserta Standar Operasional Prosedurnya. Selain itu perjanjian pinjam pakai dukungan sarana prasarana dan BBM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang serta tanda tangan elektronik BPKB yang telah diizinkan langsung oleh Mabes Polri.

Program inovasi ini mudah direplikasi oleh instansi maupun satuan Polres lain. Dukungan sarana dan prasarana dapat didukung melalui sponsorship budgeting sehingga inovasi tetap dapat dilakukan walau tanpa didukung anggaran. Selain itu, metode kerja serta sistem yang mudah mempermudah instansi lain untuk dapat mereplikasi inovasi BPKB Delivery Polres Brebes yang dilaksanakan sejak 2012.

*BBN1 delivery and Samsat personnel for BPKB BBN2 delivery. Other uniqueness are related to facilities and infrastructure which is supported directly by community through agreements and the speedier process of BPKB issuance through electronic signatures.*

*Several impacts of BPKB Delivery innovation to public are visible from the convenience process for BPKB applicants to receive their published BPKBs, the process of BPKB publishing is now more efficient, a BPKB publishing information system is now available, BPKB publishing process run quickly. Those advantages become factors where BPKB can be distributed quickly, precisely and safely.*

*BPKB Delivery is a sustainable innovation because it is supported through the regulation of Brebes Police Chief Number 2 in 2016 about BPKB Delivery along with its Standard Operational Procedure. In addition, the agreements from community for infrastructure and fuel facilities support are valid for five years and may be extended. Its BPKB electronic signatures also have been approved directly by Polri Headquarters.*

*This innovation can be easily replicated by other Polres and agencies. Supporting facilities and infrastructure can be supported through community sponsorship budgeting, so it may run even without any special budget supported. In addition, its systems and working methods are easy for other agencies to replicate because this innovation have been implemented by Polres Brebes since 2012.*

## E-LELANG CEPAT

### E-AUCTION FAST

22

Direktorat Pengembangan SPSE,  
Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

*Directorate of Development of  
SPSE, Institute for Procurement of  
Goods / Services of Government*

1 Pengadaan merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Upaya pemerintah melaksanakan pembangunan, tidak terpisahkan dari peran strategis pengadaan. Berdasarkan laporan tahunan KPK, pengadaan masih mendominasi jumlah perkara yang ditangani, sehingga aspek governance pengadaan masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain lambatnya penyerapan belanja pemerintah menjadi masalah berulang setiap tahun, dimana pengadaan yang rumit, lama, dan beresiko ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu inovasi e-Tendering cepat, atau e-Lelang cepat atau inovasi lelang cepat diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tetap mempertahankan aspek transparansi dan akuntabilitasnya.

Inovasi lelang cepat dilaksanakan dengan cara menyederhanakan mekanisme lelang, menyiapkan modul lelang cepat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik versi 4 (SPSE 4), pengelolaan data penyedia dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), pelatihan kepada Kelompok Kerja (Pokja)/Panitia lelang dan Penyedia,

2 *Procurement is the most important thing in national development. Government's effort in implementing development, cannot be separated from the strategic role of procurement. Based on annual KPK (Corruption Eradication Committee) report, procurement is still dominating the number of handled cases, therefore governance aspect in procurement still needs to be increased. On the other hand, the overdue government purchasing absorption is becoming repeated problem every year, where a complicated, long, and risk procurement is considered to be one of the causes. Therefore, a fast e-Tendering innovation or fast e-Auction innovation is expected to be able to fasten the implementation of procurement/government service by maintaining the transparency and accountability aspects.*

*Fast Auction innovation can be implemented in fast way by simplifying auction mechanism, preparing the fast auction module on application of Electronically Procurement System version 4/ Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4), development of provider data in application of Information System of Provider Performance/ Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP),*

kerjasama dengan K/L/Pemerintah Daerah, dan pendampingan serta pemberian layanan dukungan pengguna dalam pelaksanaan lelang cepat. Lelang Cepat merupakan inovasi yang kreatif dan inovatif karena menggunakan pendekatan yang berbeda dan mampu menjawab dua kutub pengadaan yang biasanya saling bertentangan, yaitu akuntabilitas dan fleksibilitas. Gagasan ini relatif baru dalam praktek pengadaan publik di seluruh dunia, yang berupaya menghasilkan pengadaan yang simpel namun tetap akuntabel, fleksibel sekaligus juga tetap kredibel.

Implementasi lelang cepat berhasil menyederhanakan pengadaan secara signifikan sehingga waktu penyelesaian pengadaan menjadi lebih singkat. Apabila menggunakan metode terdahulu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lelang adalah 21 hari, penggunaan lelang cepat memangkasnya menjadi 7 hari. Bahkan beberapa paket berhasil dilaksanakan dalam waktu 3 hari. Efisiensi yang dihasilkan dapat meningkat sampai 50% dibanding lelang konvensional.

Inovasi ini sudah diimplementasi di 56 instansi, senilai 3,7 Triliun dengan efisiensi total sebesar 413 Miliar. Pada ujungnya, pengadaan yang cepat dan kredibel ini diharapkan akan memperbaiki kualitas pengadaan, berkurangnya anggaran pengadaan yang gagal terserap, sehingga mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

*training for Working Group (Kelompok Kerja/ Pokja) /Auction Committee and Provider, in cooperation with K/L of Local Government, and guidance, also support service giving for user in implementing the fast auction. The fast auction is a creative and innovative innovation because of using a different approach and able to answer two poles of procurement which usually in contrary, which are accountability and flexibility. This idea is relatively new in public procurement practice all over the world, which has effort in resulting a simple yet accountable, flexible yet credible procurement.*

*Implementation of fast auction is succeeded in simplifying the procurement significantly therefore the time of the completion of the procurement can be shorten. If using the old method, the average time needed to finish the bidding is 21 days, the use of fast auction cut the time into 7 days. Even few packages were successfully implemented in three days. Resulted efficiency can be increased until 50% compare to conventional auction.*

*This innovation is already implemented in 56 institutions, with amount 3.7 trillion with total efficiency 413 billion. At the end, this fast and credible procurement is expected can fix the quality of procurement, reduce the procurement budget which is failed to be absorbed, therefore it can optimize the development and public service which can improve the society's welfare and increase the economic growth of Indonesia.*



## **TOMBOL “BISA” (BRILLIANT, INNOVATIVE, SPEED, ACCOUNTABLE)**

### **“BISA” BUTTON (BRILLIANT, INNOVATIVE, SPEED, ACCOUNTABLE)**

# 23

Kepolisian Resor Sukabumi Kota,  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

*Sukabumi City Resort Police,  
The Indonesian National  
Police*

1 Wilayah hukum Polres Sukabumi Kota yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 95 Kelurahan, yang terbagi dalam 2 Wilayah administratif Kota dan Kabupaten dengan total luas wilayah Kota dan Kabupaten : 27.340,101 Km<sup>2</sup>, Jumlah Penduduk Kota Sukabumi : 349.360 Jiwa dan Wilayah Kabupaten Sukabumi : 464.034 Jiwa sedangkan jumlah Personil Polres Sukabumi Kota Sebanyak 858 Personil terdiri dari 815 Personil Polri dan 43 PNS Polri.

Yang menjadi latar belakang dibuatnya Layanan Publik berbasis IT berupa “Tombol BISA” yaitu Kurang efektif waktu masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat, banyaknya Objek Vital di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, Kota Sukabumi menjadi tujuan wisata dan tempat hiburan masyarakat dari luar daerah dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan yang memerlukan kehadiran aparat kepolisian secara cepat.

Yang menjadi ciri khas Layanan “Tombol BISA” ini yaitu Quick Respon / Cepat menanggapi laporan masyarakat, Mudah dioperasikan, listrik mati masih beroperasi, responsive pada alat, tersedia perangkat yang bisa dibawa dan

2 Legal area of Sukabumi City Police consisting of 15 Sub-districts and 95 Sub-districts, divided into 2 Municipal and Regency administrative territories with total area of City and Regency: 27,340.101 Km<sup>2</sup>. Population of Sukabumi City: 349,360 Soul and Regency of Sukabumi: 464.034 Soul While the number of Personnel of Resort Police Sukabumi City As many as 858 Personnel consists of 815 Police Personnel and 43 civil servants.

*The background of the creation of IT-based Public Services in the form of “Tombol BISA” is Less effective when the community reporting emergency events, the number of Vital Objects in the jurisdiction of Resort Police Sukabumi City, Sukabumi City became a tourist destination and entertainment venues from outside the region and increasing quantity and The quality of crime that requires the presence of police officers quickly.*

*What is characteristic of the “Tombol BISA” service is Quick Response / Quick response to community reports, Easy to operate, power failure still operational, responsive to tools, available devices that can be brought and also*

juga terkoneksi dengan Handphone Kapolres, PJU Polres dan pengguna.

Dengan adanya "Tombol BISA" ini menimbulkan dampak pada efisiensi waktu dalam pelaporan, kejahatan yang terjadi bisa segera ditindak lanjuti dengan cepat, pemberdayaan pengguna "Tombol BISA" sekaligus sebagai informan Kepolisian, kesiap siagaan dan respon anggota Polres semakin meningkat dan menurunnya angka kriminalitas.

Tombol BISA ini terus berjalan secara berkesinambungan dengan adanya dukungan dari Pimpinan, dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk PERDA, adanya Komitmen dari Personil Kepolisian dan mengusulkan anggaran dari DIPA tahun 2018.

*connected with Mobile Police Chief, The main official Resort Police and users.*

*With the "Tombol BISA" effect on time efficiency in reporting, the crime can be quickly followed up, the empowerment of the "Tombol BISA" user as well as the Police informant, the alertness and response of Resort Police members increases and the crime rate decreases.*

*This "Tombol BISA" continues to run on an ongoing basis with support from the Leader, support from Local Government in the form of Regional Regulation, the Commitment of Police Personnel and proposing budget from List of budget usage year 2018.*



Sistem Teknologi Informasi yang digunakan "Tombol BISA" ini tergolong sangat sederhana terdiri dari sebuah server, sms gateway, aplikasi dan tombol itu sendiri, sehingga dapat diterapkan pada daerah – daerah lainnya di seluruh Nusantara.

*Information Technology System used "Tombol BISA" is quite simple consists of a server, sms gateway, application and the button itself, so it can be applied to other areas throughout the archipelago.*



## **BANG ELIS HADIR, KAMPUNG KAMI JADI TERANG (PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK TENAGA MATAHARI DI DAERAH PEDALAMAN KALBAR)**

### ***BANG ELIS HADIR***

24

Dinas Energi dan  
Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kalimantan Barat

*Energy and  
Mineral Resources Agency  
West Kalimantan Province*

**I** Sejak Indonesia merdeka, masih terdapat daerah yang belum terjamah listrik, terutama di daerah pedalaman. Diperlukan solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik di daerah pedalaman dengan memanfaatkan energi alternatif baru terbarukan dengan biaya yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan jawaban. Pembangunannya dapat dilakukan tanpa harus menunggu infrastruktur dari PLN.

PLN selaku penyedia tenaga listrik negara belum optimal memenuhi kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat pedalaman di Provinsi Kalbar. Secara keseluruhan, Kalbar memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 594 megawatt (MW) dengan beban puncak 471 MW. Sebagian besar pembangkit berada di ibukota provinsi dan ibukota kabupaten.

Dari 2109 desa yang ada di Provinsi Kalbar, sebanyak 729 desa belum terlayani aliran listrik dari PLN sehingga menyebabkan masyarakat desa yang berada di pedalaman belum pernah merasakan infrastruktur listrik. Hal ini menyebabkan rasio desa berlistrik di Kalbar baru mencapai 65,43% serta rasio elektrifikasi

**E** *Since Indonesia's independence decreed, there are still unspoiled areas of electricity, especially in rural areas. It's require solutions to meet basic electricity needs in the hinterland by utilizing renewable alternative energy at a relatively affordable cost for the society. Solar Power Generation (PLTS) is the answer. Construction can be done without having to wait for infrastructure from PLN.*

*PLN as a provider of state electricity has not been optimally meet the basic needs of electricity for rural communities in West Kalimantan Province. Overall, Kalbar has a power plant with an installed capacity of 594 megawatts (MW) with a peak load of 471 MW. Most of the power plants are in the capital of the province and district capitals.*

*Over the 2109 villages in West Kalimantan Province, 729 villages have not been served by electricity from PLN, causing the interior villagers have never experienced electricity infrastructure. This situation caused the ratio 65.43% of electrified villages in West Kalimantan, and the Kalbar electrification ratio reached 77.76%, still below the national average of 87%.*

Kalbar baru mencapai 77,76%, masih dibawah rata-rata nasional 87 %.

Secara geografis wilayah Kalbar dilintasi garis Khatulistiwa, pancaran sinar matahari cukup terik dan tetap setiap harinya sepanjang tahun sehingga merupakan sumber energi yang potensial. PLTS menggunakan energi alternatif baru terbarukan dengan teknologi terkini yang ramah lingkungan.

Pengembangan PLTS (Bang Elis Hadir) merupakan salah satu bentuk diversifikasi energi yang tidak menyebabkan efek gas rumah kaca maupun pemanasan global karena tidak menggunakan energi fosil. Warga juga akan lebih hemat. Cukup membayar iuran pemeliharaan sebesar Rp30-50 ribu per bulan. Lebih hemat dibanding membeli BBM untuk pelita, sebesar Rp100-200 ribu per bulan.

Tak hanya itu, dengan hadirnya PLTS banyak manfaat yang dinikmati masyarakat. di antaranya adalah adanya penerangan jalan umum membuat warga dapat beraktifitas di dalam & luar rumah; Warga dapat melakukan beragam aktivitas dan anak-anak juga dapat belajar pada malam hari padahal sebelumnya sangat terbatas; semakin mudah mengakses informasi yang berasal dari luar lingkungan; dan geliat kehidupan masyarakat pedalaman mulai tumbuh berkembang serta kenyamanan dan keamanan masyarakat juga lebih terjaga.

*Geographically the Kalbar region is crossed by the Equator line, the sun beam is quite hot and constant everyday throughout the year so it is a potential source of energy. PLTS uses new renewable alternative energy with the latest environmentally friendly technology.*

*Development of PLTS (Bang Elis Hadir) is one form of energy diversification that does not cause greenhouse effect or global warming because it does not use fossil energy. Residents will also be more efficient. Simply pay maintenance fee of Rp30-50 thousands per month. More efficient than buying fuel for lamps, averagely Rp100-200 thousands per month.*

*Other than that, the society would gained many benefits with the presence of PLTS. The existence of public road lighting is among them to make the people can move inside & outside the house; Residents can perform various activities and children can also study at night when previously very limited; Easier information access from outside the environment; And stretching the life of rural communities began to grow and the comfort and security of the community are also more awake.*



## HP SOLUSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

### HP SOLUTIONS FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

# 25

RSJ Menur, Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur

RSJ Menur,  
East Java Province

1 Salah satu terobosan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya terkait pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat adalah inovasi pelayanan publik yang diberi nama "HP-Solusi Anak Berkebutuhan Khusus". Inovasi ini berupaya mengubah paradigam pelayanan kesehatan pada anak berkebutuhan khusus dari "hospital based" menjadi "family based" sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi kesenjangan antara meningkatnya kunjungan ABK yang berobat dengan keterbatasan SDM dan sarana yang dibutuhkan.

Prinsip inovasi ini adalah memberdayakan potensi dan kemampuan keluarga untuk terlibat aktif melanjutkan program terapi yang diberikan oleh pihak Poliklinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja RSJ Menur di rumah dan kemudian dievaluasi perkembangannya.

Keluaran yang paling berrhasil dari inovasi ini adalah tumbuhnya kompetensi pengetahuan dan ketrampilan keluarga ABK dalam melatih anaknya di rumah, sedangkan dari pihak RS pelayanan ABK di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja tetap dilaksanakan secara optimal walaupun tenaga dan sarana terbatas.

2 One break trough of Menur Mental Hospital related to the community mental health service is a public service innovation which is named HP-Solution of Special Needs Children. This innovation try to change health service paradigm for special need children from hospital based to family based as an effective and efficient solution to overcome the gap between the special need children visitation and limited of human resources and the required facilities.

The principle of the innovation is to empower the family's ability and potential to be involved actively in continuing the therapy program which given by the Children and Teenager Growth and Development Clinic in the Menur Mental Hospital, at home then evaluated its development.

The most succesfull out put of this innovation is growth of skill competence and knowledge of special needs children's family in training their children at home, while family will keep doing optimally although the Children's and Teenager Growth and Development Clinic has the limited facilities and manpower.

The HP innovation has established positive



Sedangkan manfaat yang dirasakan adalah pengetahuan dan ketrampilan keluarga meningkat, penghematan biaya, dan tingkat keberhasilan terapi meningkat. Sementara dampak pada *stake holder* yaitu kemudahan menjangkau layanan ABK.

*impacts, which are the improvement of family's knowledge and skill, cost effective therapy, and the increasing succesful therapy rate. Moreover, there is positive impact to the stake holder especially the society that they get easier to reach out services of special need children.*

Demi menjamin keberlanjutan inovasi tersebut maka Direktur RS Jiwa Menur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4/365/305/2015 tentang pemberlakuan Inovasi HP-Solusi Anak Berkebutuhan Khusus.

*In order to guaranty the sustainability of the innovation, the Director of Menur Mental Hospital has published the decree number 188.4/365/305/2015 about enforcement of the innovation HP-Solution of Special Need Children.*





# JAMINAN KESEHATAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS TERPADU

## INTEGRATED HEALTH INSURANCE FOR DISABLED PERSONS

# 26

Badan Pelaksana Jaminan  
Kesehatan Sosial, Pemerintah  
Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta

*Implementing Bureau of Social  
Health Insurance, Special  
Region of Yogyakarta Province*

1 Penyandang disabilitas berisiko menghadapi masalah kesehatan yang lebih berat karena keterbatasan yang dimiliki, salah satunya terkait dengan akses. Dalam hal ini di DIY telah ditetapkan berbagai regulasi untuk pemenuhan hak difabel salah satunya adalah Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Disabilitas. Hasil evaluasi tahun 2013 – 2015 menunjukkan, akses Jamkesus masih jauh dari harapan. Panjangnya prosedur dan jauhnya jarak antar tempat pelayanan, menjadi penghambat akses.

Bulan November 2015 Pemda DIY menggagas program Jamkesus Disabilitas Terpadu dengan mengintegrasikan (1) Pemetaan kebutuhan dan antar jemput pasien (2) Pendaftaran dan assesment sosial (3) Rekomendasi jaminan dan pemutakhiran data (4) Verifikasi jaminan (5) Pemeriksaan kesehatan dasar (6) Pemeriksaan kesehatan spesialis (7) Rujukan medik spesialis lainnya jika diperlukan (8) Pengukuran dan pemberian alat bantu (9) Assesment rehabilitasi sosial dan vokasional.

Jamkesus Disabilitas Terpadu mampu menyatukan dan memberikan terobosan baru

2 *Persons with disabilities are at risk of more severe health problems because of the limitations they have, one of which is related to the access. Yogyakarta provincial government has set various regulations to fulfill the rights of people with disability, which one of them is Special Health Insurance for Persons with Disability (Jamkesus Disabilitas). The evaluation results of 2013-2015 show that the access of Jamkesus is still far from the expectations. The length of the procedures and the distance between the service sites really become a big obstacle for persons with disability.*

*In November 2015 the provincial government of DIY Yogyakarta initiated the integrated Jamkesus Disabilitas service program by integrating (1) the mapping of service needs and mobilization of patients. (2) Registration and Recommendation of Social Service (Social Department Volunteers, Dukcapil), (3) Verification of Jamkesus financing (Bapel Jamkesos), (4) Basic health examination (Family Doctor, Puskesmas), (5) Basic health examination, (6) Other specialist medical references if needed (various hospitals), (7) Measurement and provision of assistive devices (various providers), (8) Social and vocational*

dalam setiap unsur layanannya. Terobosan baru tersebut ditujukan untuk menjawab permasalahan dan hambatan akses dengan cara mempermudah, mendekatkan, memfasilitasi dan memberikan jaminan pembiayaan. Terobosan juga merupakan langkah baru dalam membangun peran berbagai elemen masyarakat serta mendorong upaya inklusi pemenuhan hak difabel di segala aspek.

Hasil evaluasi satu tahun paska implementasi menunjukkan rogram ini telah mampu meningkatkan akses dari semula <100 pasien menjadi 3.412 pasien. Secara lebih luas program ini juga telah berdampak lanjutan kepada lonjakan akses layanan dalam sistem layanan regular. Terobosan ini telah mampu mendorong akses bantuan alat bantu dari 6 menjadi 876, penyerapan anggaran jaminan dari <200 juta menjadi hampir 2,5 M, menyerap dukungan anggaran di luar Pemerintah, mampu menyatukan hingga 48 stakeholder serta berimbas kepada dukungan perbaikan berbagai regulasi.

Sejak munculnya gagasan telah dilaksanakan 20 kegiatan dan telah mulai direplikasi oleh beberapa lembaga. Replikasi tersebut berwujud pembiayaan dan pengelolaan yang terintegrasi dalam sistem layanan yang berlaku. Perkembangan replikasi selanjutnya diperlihatkan dari Pemda Kabupaten/ kota yang telah menetapkan rencana penyelenggaraan ddi tahun 2017.

*rehabilitation assessments (BRTPD DinasSosial). In the service implementation, all service providers are presented together in one place and the activities are carried out on the site based on schedule.*

*JamkesusTerpadu Disabilitas is able to unite and provide new breakthroughs in every element of its service. The new breakthrough is aimed at addressing the problems and access barriers by simplifying, approaching, facilitating and providing financing security. The breakthroughis also a new step in building the roles of various elements of society and encouraging inclusion efforts to fulfill the rights of disability in all aspects.*

*The evaluation result after one year implementation showed that the program has been able to improve access from <100 patients to 3,412 patients. More broadly, the program has also had a further impact incrediblythat people with disabilitiesaccess the services through the regular service system. This breakthrough has been able to encourage the access to assisitive devices from 6 to 876, to absorb budget from <200 million to almost 2.5 M, to earnfund support from outside the Government, to be able to bring together up to 48 stakeholders as well as to give impact in supportingthe improvement of various regulations.*

*Since the beginning, this program has carried out 20 activities and has begun to be replicated even in the first year, by some other institutions. The replication is the integration of financing and management within the service system. Further replication is carried out by the District / City Government which has set their budget for the events. The role of regional health insurance in various places becomes the pillar of the complement of National Health Insurance program.*



## KADER PEDULI LUKA DAN PERAWATAN LUKA DIABET PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO

### *CADRE OF CARE ABOUT INJURIES AND TREATMENT OF DIABET PASAR REBO DISTRICTS PUBLIC HEALTH CENTER*

# 27

Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Agency of Health,  
Special Region of Jakarta  
Province

1 Diabetes Melitus (Diabet) atau yang dikenal dengan Penyakit Kencing Manis merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin/ tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Salah satu komplikasi dari penyakit ini adalah Luka Diabet yang memiliki dampak jangka panjang dan besar pada angka kesakitan, kematian dan kualitas hidup pasien Diabet.

Permasalahan di Puskesmas Pasar Rebo adalah tenaga kesehatan melakukan perawatan luka diabet dengan metode konvensional (menggunakan bethadine, revanol) penggantian balutan yang sering (sehari dua kali) metode ini menimbulkan keluhan nyeri hebat saat balutan diganti, pemborosan biaya, peningkatan keparahan luka dan lamanya waktu penyembuhan luka diabet.

Masalah lainnya adalah tidak tersedianya poli perawatan luka diabet yang terjangkau oleh masyarakat baik dari segi biaya maupun akses terhadap pelayanan, belum dilibatkannya masyarakat dalam penemuan kasus luka diabet sehingga penjangkauan kasus kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan

2 *Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disease disorder due to the malfunctioning pancreas to produce insulin, causing the body cannot effectively produce the insulin. Among those effects of this is that wound would need longer time to heal that will also lead to the higher suffering of pain, higher number of death, and reducing life quality of Diabetic patients.*

*The problem at Puskesmas Pasar Rebo, East Jakarta, is that health workers perform diabetic wound care with conventional methods (using bethadine, revanol) including frequent dressing changes (twice daily). This method causes severe pain complaints when wound dressing is replaced, cost wastage, increased wound severity and longer healing time.*

*Another problem is the unavailability of diabetic wound treatment chamber that is affordable to the community both in terms of cost and access to services. The public has not been involved in the discovery of diabetic injury cases so that the selection of cases become less than the maximum.*

*To overcome these problems, Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo innovates the "KPK*

tersebut maka Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo melakukan inovasi dengan gerakan "KPK PELUK KEBO" selain dari namanya yang lucu, inovasi ini juga terbilang UNIK karena SATU SATUNYA Puskesmas yang memiliki poli perawatan luka diabet di Indonesia yang Holistik karena melibatkan multi disiplin ilmu dan peran serta masyarakat dengan Slogan "CEGAH SEJAK DINI STOP AMPUTASI".

Prinsip dasar KPK PELUK KEBO ini adalah melakukan perawatan luka diabet modern, membuka poli perawatan luka, melakukan sosialisasi keseluruh warga se kecamatan Pasar Rebo, membentuk Kader Peduli luKa (KPK), kunjungan rumah, dan melakukan pencegahan luka diabet dengan cara senam kaki.

Dampak keberlanjutan dari pelaksanaan inovasi KPK PELUK KEBO yaitu berhasil meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dalam merawat luka diabet dengan metode modern, frekuensi penggantian balutan lebih sedikit, mengurangi rasa nyeri, menekan biaya perawatan pasien, menghemat waktu perawatan, meningkatnya kesadaran pasien dan keluarga untuk merawat lukanya serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam penjangkaran pasien luka diabet.

Dengan gerakan KPK PELUK KEBO, mampu menurunkan angka rujukan, dan menyembuhkan 119 orang pasien diabet yang beresiko diamputasi, 8 orang diantaranya yang sudah divonis amputasi, Terselamatkan Dari Amputasi.

Replikasi KPK PELUK KEBO dilakukan di Puskesmas Kelurahan wilayah Pasar Rebo dengan memberikan pelatihan, penyediaan alat dan bahan perawatan luka untuk Puskesmas Kelurahan.

*PELUK KEBO" movement. Apart from its funny name, this innovation is also unique as it is the only Public Health Center in Indonesia that own a holistic diabetic wound treatment chamber, involved multi scientific approaches and public participation with the slogan 'CEGAH SEJAK DINI STOP AMPUTASI' (Early Prevention to Stop Amputation).*

*The basic principle of KPK PELUK KEBO movement is to perform modern diabetic wound treatment, to establish wound treatment chamber, to socialize to all residents of Pasar Rebo district, to form Wound Care Cadre, home visit, and to prevent diabetic wound by foot exercises.*

*The impact of sustainability of the implementation of innovation of KPK PELUK KEBO innovative has succeeded in increasing the competence of health care workers in treating diabetics wounds with modern methods, less frequency of wound dressing, reducing pain, reducing costs, saving times, increasing awareness of patients and families to treat the wound and increasing community participation in the selection of diabetic wound patients.*

*The KPK PELUK KEBO movement is able to reduce the referral numbers, and cure 119 diabetic patients who are at risk of amputation, 8 people of whom have been convicted of amputation, has been saved from amputation.*

*Replication of KPK PELUK KEBO is done at Five Puskesmas Kelurahan Pasar Rebo area by giving training, provision of equipment and materials of wound care for Puskesmas Kelurahan.*



## LAYANAN JUDES SAMSAT JOMBANG, TAGLINE (LAYANAN JUJUG DESA YANG RAMAH)

### JUDES SAMSAT JOMBANG SERVICE, TAGLINE (FRIENDLY VILLAGE JUJUG SERVICE)

28

UPT Badan Pendapatan Daerah  
- Jombang, Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur

UPT Regional Revenue  
Agency - Jombang, East  
Java Province

1 SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan publik dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah berkiprah melayani masyarakat sejak era orde baru dan terus bertransformasi sampai era reformasi saat ini.

Kantor Bersama SAMSAT Jombang merupakan salah satu dari Kantor Bersama SAMSAT yang ada wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara administratif terdiri dari 21 kecamatan dan 306 desa. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah ini tahun 2015 tercatat 530.491 dengan proporsi roda-2 (88,43%) dan roda-4 (11,56%), serta dengan penyebaran, daerah pedesaan (85%) dan perkotaan (15%). Sementara, tempat pelayanan yang tersedia berjumlah 6, yaitu : 1 Kantor Bersama Samsat, 2 Samsat Payment Point, 2 Samsat Keliling, dan 1 Samsat Drive Thru.

Fakta di atas memberikan informasi bahwa

2 SAMSAT (Sistem Admnistrasi Manunggal Satu Atap / Single One roof Administration System) is a provider of public service in the field of registration and identification of motor vehicles, payment of Motor Vehicle Tax, Motor vehicle name recondition, Non-Tax State Revenue and Mandatory Donation of Traffic Accident and Road Transport which has been serving since the New Orde era and continues to transform until the present reform era.

SAMSAT Jombang Joint Office is one of the SAMSAT Joint Offices in East Java Province which administratively consists of 21 districts and 306 villages. The number of registered motor vehicles in this region was 530.491 with the proportion of wheels 2 (88.43%) and wheels 4 (11.56%) as well as with the spreading, rural (85%) and urban areas (15%). Meanwhile, the service provided is 6, namely: 1. The head Samsat Joint Office , 2 Samsat Payment Point, 2 Samsat Roving /around, and 1 Samsat Drive Thru.

The above facts give information that there is a gap between the number of vehicles served by the available service places, and between urban and rural service places. Since service places

terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan bermotor yang dilayani dengan tempat pelayanan yang tersedia, dan antara tempat pelayanan di perkotaan dengan di pedesaan, karena tempat pelayanan Samsat pada umumnya berada di daerah perkotaan. Permasalahan ini menyebabkan masih tingginya ketidakpatuhan masyarakat membayar pajak mencapai ± 26% per tahun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketiga pimpinan Samsat Jombang bersinergi dan berkomitmen melakukan terobosan atau inovasi yang dinamakan "Pelayanan SAMSAT Jujur Desa (JUDES)".

Pelaksanaan pelayanan ini dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai sekarang, sehingga dapat diidentifikasi unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. **Kebaruan/keunikan** : (a) merubah paradigma pelayanan yang sebelumnya masyarakat yang mendatangi tempat pelayanan yang berada di perkotaan, berubah menjadi petugas pelayanan yang mendatangi masyarakat di pedesaan, (b) memastikan kehadiran negara dalam melayani masyarakat sampai ke pelosok desa, sekaligus upaya penerapan revolusi mental ASN dibidang pelayanan publik, dan (c) menjamin hak-hak masyarakat dan memenuhi rasa keadilan/kesetaraan.
- b. **Dampak** : (a) meringankan beban biaya, waktu dan tenaga bagi masyarakat yang berada di pedesaan, (b) meningkatnya kepatuhan membayar pajak dari 73,98% tahun 2015 menjadi 84,63% tahun 2016, (c) meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, (d) menghemat APBD 76,92%, khususnya dalam pengadaan kendaraan.

*are located in urban areas. This problem causes the high non-compliance of the public to pay taxes and it reaches + 26% per year.*

*To solve these problems, three leaders of Samsat Jombang synergize and commit to a breakthrough or innovation which is called " SAMSAT Jujur Desa (JUDES)" Service.*

*The implementation of this service was started from October 12th, 2015 until now, so that it can be identified elements, as follows :*

- a. **Novelty / Uniqueness**, (a). *Changing the paradigm of the previous service, people who came to the service place in urban areas turned into Service Officers came to the community in the countryside, (b). Ensuring the presence of state in serving the community up to the village, as well as efforts to implement the mental revolutions ASN in the field of public services, and (c). Guaranteeing the right of the people and fulfilling the sense of justice / equality.*
- b. **Impact**, (a). *Ease the burden of cost, time and energy for people in rural areas, (b).Tax compliance increase from 73.98% in 2015 to 84.63% in 2016, (c). Increase in taxes on motor taxes, d. Saving 76.92% of APBD, especially in vehicle procurement.*



## LAYANAN TERPADU PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PERPANJANGAN SIM

### INTEGRATED SERVICE OF MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT SERVICE AND SIM EXTENSION

29

UPT. Samsat Medan Selatan  
BPPRDSU, Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Pemerintah Provinsi Sumatera  
Utara

UPT. Samsat Medan Selatan  
BPPRDSU, North Sumatra  
Province

1 Pelayanan inovasi ini baru pertama kali dilakukan pada tahun 2009 dan merupakan inovasi asli dan pertama kali dilakukan di Indonesia, dimana layanan ini memadukan pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi. Dianggap inovatif dan unik karena dilaksanakan pada satu gedung yang strategis, nyaman, aman dan memiliki akses yang mudah.

Sebelum adanya inovasi pelayanan publik pada Kantor Samsat dan SIM Corner Sun Plaza masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak harus melakukan pembayaran di Kantor Induk Samsat sehingga masyarakat mengeluhkan jauhnya jarak dan tidak adanya kepastian waktu terhadap pelayanan publik sehingga membuat masyarakat enggan membayar pajak kendaraan bermotor dan lebih senang melakukan pembayaran melalui calo ataupun biro jasa.

Untuk melakukan perpanjangan SIM masyarakat mengeluhkan jauhnya Kantor dan banyaknya calo-calo sehingga enggan memperpanjang SIM baik itu SIM A maupun

2 *This innovation service was first conducted in 2009 and is the original innovation and was first performed in Indonesia, where the service combines the service of Motor Vehicle Tax Payment and Renewal Service of Driver License. Considered innovative and unique because it is implemented in one building which is strategic, comfortable, safe and has easy access.*

*Before the existence of public service innovation at Samsat Office and SIM Corner Sun Plaza people who want to make tax payments have to make payment at Samsat Main Office so that the community complained about the distance and the lack of certainty of time to public service so that make people reluctant to pay motor vehicle tax and more happy make payments through brokers or service bureaus.*

*To renew the driver license, the public complained about the distance of the office and the number of brokers so that they were reluctant to renew the license either Driver License Group A or Group C and also the payment service process in the main office is very long.*

SIM C dan juga proses pelayanan pembayaran yang terdapat di kantor induk sangat panjang dan lama.

Sesudah adanya inovasi pelayanan publik berupa layanan terpadu pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam waktu 1-2 menit dan Perpanjangan SIM dilaksanakan dalam waktu  $\pm$  10 menit.

Inovasi pada kantor Samsat dan Sim Corner Sun Plaza sepenuhnya dilaksanakan dengan berkelanjutan, dimana dengan adanya perencanaan setiap tahun serta ditampung dalam anggaran. Perencanaan penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di kantor tersebut ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara.

Untuk kegiatan pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sistem kegiatan ini telah direplika oleh kantor induk UPT. Samsat Medan Selatan pada Tahun 2013 dengan membuat sistem cluster dan proses kegiatan pengesahan 1 tahun dilaksanakan dalam satu loket, dan selesai dalam waktu 5 menit (sebelumnya minimal 30 menit). Selanjutnya untuk kegiatan perpanjangan SIM pihak kepolisian juga melakukan inovasi dengan adanya bus-bus SIM Keliling yang semakin dekat dengan masyarakat tanpa melalui calo dengan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

*After the existence of public service innovation in the form of integrated service of Tax Payment Service of Motor Vehicle implemented within 1-2 minutes and Renewal Service of Driver License implemented in  $\pm$  10 minute.*

*Innovation at the Samsat and Sim Corner Sun Plaza offices is fully implemented in a sustainable manner, with annual planning being accommodated in the budget. Planning supporting the implementation of public service activities in the office is accommodated in the Regional Expenditure Budget of North Sumatra Province.*



*For Vehicle Tax Payment Service activities, this activity system has been replicated by the head office of Technical Implementation Unit Samsat South Medan in 2013 by making cluster system and 1 year validation process process conducted in one counter, and finished in 5 minutes (previously at least 30 minutes). Furthermore, for the extension of Renewal Driver License, the police are also innovating with the buses that get closer to the community without going through brokers with integrity and professional human resources.*



## LAYANAN WARAS (WISATA ARSIP UNTUK ANAK SEKOLAH)

### WARAS SERVICE (ARCHIVE TOUR FOR SCHOOL CHILDREN)

30

Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan, Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur

Library and Archives  
Agence Service,  
East Java Province

1 Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.154 km<sup>2</sup> dengan topografi wilayahnya dataran rendah, pegunungan, pesisir dan kepulauan yang subur. Wilayah administrasinya terdiri 29 kabupaten dan 9 kota merupakan terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan data BPS tahun 2015 ada 30.847.561 jiwa. Masyarakatnya dikenal heterogen yang terbagi dalam wilayah Mataraman, Arek, Madura dan Pedalungan. Kemudian dalam *tlatah* yang lebih kecil ada masyarakat Osing, Tengger, Bawean, Kangean dan Samin (Sedulur Sikep)

1 East Java province has an area of 47.154 km<sup>2</sup> with the lowland territory topography, mountains, coast and the fertile Islands. It's administrative area consists of 29 Regencies and 9 city is the largest in Indonesia. East Java population based on the BPS ( Centre Statistic Bureau )2015 are 30,847,561 inhabitants. The communities are known heterogeneous and divided into area of Mataraman, Arek, Madura and Pedalungan. Then in smaller *tlatah* ( Region) there is, Tengger, Osing Bawean, Kangean and Samin society (Sedulur Sikep-local wisdom of traditional people).

Pada bagian lain, urusan kearsipan adalah urusan wajib pemerintahan daerah yang dilaksanakan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). LKD harus hadir memberikan layanan prima kepada masyarakat. Sebelum inovasi layanan dijalankan, eksistensi LKD Provinsi tidak banyak diketahui, kecuali oleh kalangan akademisi, dosen, mahasiswa dan peneliti. Masyarakat belum paham bahwa lembaga kearsipanpun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tidak banyak pelajar yang memanfaatkan keberadaan LKD Provinsi Jawa Timur, padahal mereka adalah kelompok

On the other part, the archival affairs are the mandatory affairs of Local Government which is done by the Regional Regencies and Cities Archives Services or "Lembaga Kearsipan Daerah" (LKD). LKD must present itself to provide excellent service to the community. Before the innovation of the services are performed, the existence of the LKD Province are not much known, except by the academist, professors, students and researchers. The community has yet to understand that the archival institute can be used by the wider community. Not a lot of students that utilize the presence of LKD in East

petensial yang perlu penanaman kesadaran sejarah dan dimunculkan rasa nasionalismenya sebagaimana diharapkan Presiden RI.

Sebagai solusi masalah utama dan implementasi dari Nawacita Presiden RI, LKD Provinsi Jawa Timur membuat inovasi Layanan "WARAS" (Wisata Arsip untuk Anak-anak Sekolah). Inovasi layanan WARAS dikemas dengan mengedepankan unsur edukatif, inspiratif, dan rekreatif dan tidak menarik biaya kepada peserta. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, jejak perjuangan bangsa masa lalu, nasionalisme, membangun jati diri dan karakter bangsa melalui sumber arsip. Layanan WARAS dimulai tahun 2014 dilakukan dengan mengedukasi pelajar melalui pemutaran arsip film perjuangan, melihat galeri arsip, mengunjungi tempat jejak bersejarah yang bernuansa kearsipan dan didukung 1 (satu) fasilitas bus "Archive Heritage Track". Sasaran utamanya adalah siswa dan guru pendamping mulai SD, SMP dan SMA/SMK.

Dampak utama WARAS adalah makin terbukanya akses masyarakat ke LKD Provinsi Jawa Timur, terjalinnya kerjasama kearsipan dengan banyak pemangku kepentingan, dan makin dikenalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di lingkungan pelajar dan sekolah serta tertanamnya pendidikan karakter anak-anak sejak usia dini.

*Java province, even though they are a potential group that need awareness planting of history and raised sense of nationalism as expected of the President Indonesia.*

*As the solutions of the main problems from the implementation of Nawacita President of Indonesia, LKD East Java province make innovation called "SANE" or "WARAS" (Archival Heritage Tour for Student). Innovation service of WARAS is packed and put forward the educative, inspirational, and recreative elements without any charges to the participants. This innovation aims to improve the historical insights, nationalism, building the identity and the nation character through the archival sources. WARAS service is starting in 2014, carried out by educating the students through the screenings of archival film about struggle, visiting the Archive's Gallery, visiting the historical places with archival feeling and supported by 1 (one) bus facility "Archive Heritage Track". Its main goal are the students and teachers starting in elementary grade, Junior High and Senior High School/SMK.*

*The main impact of WARAS is more access the people are getting to the LKD East Java province, the establishment of archives cooperation with many stake holders, and more of the Officer of libraries and Archives are known in the neighborhood of students and schools. It's established of character building early childhood education to the student.*



## MENCEGAH PERDARAHAN TALI PUSAT DENGAN KALISAT (KARET TALI PUSAT)

### PREVENTING CORD BLEEDING WITH KALISAT (UMBILICAL RUBBER)

31

RSUD dr. Saiful Anwar - Malang,  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

RSUD dr. Saiful Anwar -  
Malang,  
East Java Province

1 RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) adalah rumah sakit yang sudah terakreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan hasil Paripurna. Dalam pelayanannya RSSA selalu menjaga mutu pelayanan dengan menciptakan beberapa program yang bertujuan memberikan pelayanan paripurna (Preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif) untuk mencapai kepuasan dan keselamatan pasien, melalui salah satu program rumah sakit khusus untuk ibu dan anak yang disebut Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) untuk menyelenggarakan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.

Data tahun 2015 di RSSA menunjukkan bahwa rata-rata bayi baru lahir adalah 4 bayi perhari. Selama ini bayi baru lahir di kamar bersalin RSSA menggunakan benang wol sebagai alat pengikat tali pusat bayi baru lahir sesuai dengan Modul Asuhan Persalinan Normal. Tindakan pengikatan tali pusat dengan benang wol mengakibatkan perdarahan tali pusat sebesar 18 bayi dari 452 bayi yang lahir pada tahun 2015 atau sebesar 3,9 %. Perdarahan tidak boleh terjadi, karena akan mengakibatkan terjadinya infeksi tali

2 General hospital Dr. Saiful Anwar (RSSA) is an accredited hospital by Hospital Accreditation Committee (KARS) with result of Plenary. In its care RSSA always maintain care quality by creating several programs aimed to provide total care (Preventive, Promotive, Curative and Rehabilitative) to achieve patient satisfaction and safety, through one of hospital program especially designed for mother and child called Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) to promote mother and child protection in integrated and plenary manner.

2015 data in RSSA showed that on average there was 4 newborn per day. To date new born in delivery room in RSSA used wool yarn to tie neonates' umbilical in accordance with Normal Delivery Care Module. Tying umbilical using wool yarn caused umbilical bleeding in 18 of 452 neonates birthed in 2015 or as much as 3.9%. Bleeding supposedly should not happen, since this could cause umbilical infection (omphalitis), causing more severe consequence such as sepsis. Based on this problem, RSSA innovated to solve this issue to achieve patient safety and satisfaction.

pusat (*omphalitis*), yang akan menimbulkan dampak yang lebih berat yaitu infeksi pada seluruh tubuh (*sepsis*). Berdasarkan masalah tersebut RSSA melakukan suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi tercapainya keselamatan dan kepuasan pasien.

Strategi pelaksanaan inovasi meliputi membuat rencana perbaikan yaitu mencari alat yang lentur dan elastis yang sesuai dengan kontur tali pusat bayi baru lahir, kemudian menentukan jenis alat pengikat tali pusat terbaik dengan melakukan uji coba dengan tiga jenis alat yaitu karet gelang, karet infus, dan karet infus set untuk bayi. Dari ketiga jenis alat tersebut ditemukan bahwa karet infus set untuk bayi adalah yang terbaik sebagai alat pengikat tali pusat yang tidak menimbulkan perdarahan pada bayi baru lahir. Selanjutnya merancang alat pengikat yang diberi nama Kalisat.

Keunikan kalisat adalah alat mencegah perdarahan tali pusat yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, biaya pembuatan murah karena 1 set karet infus biasa untuk 15 bayi, bahan mudah diperoleh, mudah direplikasi, mudah cara pemasangannya, dan efektif untuk mencegah perdarahan tali pusat.

*Innovation implementation strategy involved planning an improvement by finding inelastic and flexible tool suitable for neonates' umbilical, then deciding the best type of umbilical clamp by conducting trials using three types of tools, i.e. rubber band, infusion transfusion rubber, infusion set rubber for baby. Of three types of tools, it was found that infusion set rubber for baby was the best tool for umbilical clamp that did not cause bleeding in newborn. The next step was designing binding tool named Kalisat.*

*The unique aspect of **Kalisat** is that this tool was the first to prevent umbilical bleeding and the only one in Indonesia, the cost was low since 1 infusion set rubber could be used for 15 babies, material was easy to find, easy to replicate, easy to be used, and effective to prevent umbilical bleeding.*



## MENCERDASKAN SI MISKIN MENJADI GENERASI EMAS

### INTRODUCING THE POOR INTO THE GOLDEN GENERATION

# 32

SMA Negeri Bali Mandara,  
Pemerintah Provinsi Bali

SMA Negeri Bali  
Mandara, Bali Province

1 Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Bali masih tinggi sebesar 4,88% (BPS Provinsi Bali 2011). Akses pendidikan untuk penduduk miskin masih rendah. Pada tahun pelajaran 2009/2010 data BPS menunjukkan jumlah peserta didik pada jenjang SMP yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA sebanyak 493 orang. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka mulai tahun 2011 dilakukan inovasi dengan mendirikan SMA Negeri Bali Mandara. Akses ini khusus diberikan kepada peserta didik lulusan SMP/MTs di Provinsi Bali yang berasal dari keluarga miskin.

Keunikan/kebaruan inovasi ini adalah: 1) memberikan kepastian kepada siswa miskin terhadap akses pendidikan yang berkualitas, dengan mencari siswa miskin sampai ke pelosok-pelosok desa di Bali, sehingga input siswanya 100% siswa miskin, 2) mampu mengurangi angka putus sekolah (APS) bagi siswa miskin di Bali, 3) memberikan bantuan pendidikan penuh bagi siswa miskin seperti biaya makan, minum, tas, sepatu, buku, alat-alat kebersihan dengan kualitas sekolah berasrama, 4) penerapan Sistem Kredit Semester (SKS), 5) menyelenggarakan kegiatan *Pathway to*

2 *In 2009, the statistic showed that the number of poor people in Bali was considered high, about 4.88% (BPS Bali Province, 2011). Meanwhile, the education access for the poor was still low. In the academic year 2009/2010, BPS data showed that the number of school dropouts who could not continue to SMA were 493 students. To overcome the problem stated above, in 2011 an innovation had been made to establish SMA Negeri Bali Mandara. This particular access is a full educational assistance program, given to the SMP/MTs graduates in Bali who have the underprivileged economy background.*

*The uniqueness/novelty of this innovation are: 1) to give surety to the underprivileged students for high quality education access, by recruiting them who mostly live in remote villages in Bali, so that the student inputs are 100% poor students 2) able to reduce the school dropout rate for the underprivileged students in Bali, 3) giving full educational assistance for the underprivileged students such as coverage for meals, school bags, shoes, books, and cleaning tools expenses, within a boarding school quality, 4) the implementation of Credit Semester System, 5) conducting Pathway to Leadership*

### *Leadership dan Mental Empowering.*

Dampak yang muncul dari inovasi ini adalah: 1) angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMA Provinsi Bali meningkat dari tahun 2011-2015 yaitu dari 92,22% menjadi 97,41%, 2) tersedia fasilitas pendidikan menengah yang lebih berkualitas bagi siswa miskin, 3) prestasi sekolah semakin meningkat dari tahun ke tahun, total prestasi selama ini diperoleh sebanyak 418 untuk bidang akademik, dan 349 untuk bidang non akademik, dan 3) terjadinya *multiplier effect* terhadap program terhadap keluarga miskin.

Inovasi ini akan berkelanjutan karena: 1) terjadi sinergi yang positif antar pemangku kepentingan (Gubernur, DPRD, Bupati/Wali Kota, dan Swasta), 2) adanya regulasi yang menaungi inovasi ini melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2013 tentang Pengelolaan SMA/SMK Negeri Bali Mandara.



Inovasi ini bisa dan mudah direplikasi, terbukti dengan sudah, sedang dan akan dilakukan replikasi seperti: 1) mulai tahun pelajaran 2015/2016 Pemerintah Provinsi Bali telah mendirikan SMK Negeri Bali Mandara, 2) adanya studi replikasi ke SMAN Bali Mandara telah dilakukan oleh pihak eksekutif, legislatif, dan sekolah lain baik dalam maupun luar negeri.

### *and Mental Empowering.*

*The impacts of the innovation are: 1) the school participation rate for SMA level in Bali Province has increased from 92.22% into 97.41% from 2011 to 2015, 2) the availability of higher quality services of secondary education for poor students, 3) the school performances continue to increase each year, in which the total are 418 achievements in academic and 349 achievements in non-academic, and 3) the occurrence of multiplier effect towards the poor family program.*

*This innovation will be sustainable due as: 1) there has been a positive synergy among the stakeholders (Governor, DPRD, Head of Regency/Mayor, and Private parties), 2) there is a regulation underlying this innovation, that is the Governor Decree number 43 Year 2013 about the School Management System for State Senior High School/Vocational School Bali Mandara.*



*The innovation is easily can be replicated, proven by having some replications done and will be carried out, which can be listed as follows: 1) in the academic year 2015/2016 the Bali Province Government has established SMK Negeri Bali Mandara, 2) replication studies to SMAN Bali Mandara has been carried out by the executives, legislatives, and other school from Indonesia as well as other country.*



## MR SAHDU (MANAJEMEN RISIKO SANGGAHAN DAN PENGADUAN) PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

### MR SAHDU (RISK MANAGEMENT OPPOSE AND COMPLAINT) PROCUREMENT SERVICES OF GOVERNMENT GOODS/ SERVICES

UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

UPT Service of Goods / Services Procurement, Investment and One Stop Integrated Service, East Java Province

33

1 Pelayanan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan secara terpusat melalui UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pelaksanaan pengadaan terdapat risiko sanggahan dan pengaduan baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan yaitu:

2 Pelayanan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan secara terpusat melalui UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pelaksanaan pengadaan terdapat risiko sanggahan dan pengaduan baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan yaitu:

Tabel Data Sanggahan dan Pengaduan Tahun 2014, 2015 dan 2016

No	Tahun	Jumlah Paket	Jumlah Sanggahan	Jumlah Pengaduan
1	2014	1.300	63	42
2	2015	1.528	51	32
3	2016	1.010	21	18

Permasalahan yang juga dihadapi dalam manajemen risiko sanggahan dan pengaduan antara lain belum tersedia fasilitas untuk menyampaikan ketidakpuasan; Pelayanan pengadaan belum terstandarisasi; Belum tersedia mekanisme yang humanis, responsif, dan solutif untuk menjawab dan menyelesaikan sanggahan dan pengaduan; Pengaduan dan sanggahan yang disampaikan secara tertulis dan lisan belum terdokumentasi

The procurement service of goods/services in East Java Provincial Government is implemented centrally through UPT Procurement Service of Service/Investment Service Department One Stop Service. In the procurement implementation there are risks of rebuttal and complaints both submitted in writing and orally, namely:

Table of Disclaimer and Complaint Year of 2014, 2015 and 2016

No	Year	Total Package	Number of Disclaimer	Number of Complaints
1	2014	1,300	63	42
2	2015	1,528	51	32
3	2016	1,010	21	18

Problems faced in risk management of complaints and disclaimer, among others,

dengan baik; Belum ada kepastian waktu; dan meningkatnya risiko sanggahan dan pengaduan.

Mr. Sahdu (Manajemen Risiko Sanggahan dan Pengaduan) merupakan gagasan orisinal dan pertama kali diterapkan di Indonesia dan memiliki keunikan di antaranya: (a) Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam pelayanan pengadaan pemerintah; (b) Sanggahan dan pengaduan didistribusikan dalam satu hari kerja dan dijawab maksimal tiga hari kerja; (c) Menerapkan strategi penanganan ketidakpuasan pelanggan dengan metode yang humanis, responsif, dan solutif; (d) Kolaborasi dengan aparat penegak hukum; (e) Pendamping panitia lelang; (f) Tim Gelar membantu review hasil evaluasi panitia untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya; (g) Pelayanan berpedoman pada ISO 9001:2015 tentang Pelayanan Publik dan ISO 27001:2013 tentang Keamanan Informasi.

Keberadaan MR Sahdu juga berdampak positif. Bagi instansi misalnya, membentuk budaya kerja melayani dengan sepenuh hati; Peningkatan kualitas pelayanan pengadaan; dan adanya kepastian waktu pemberian pelayanan. Sementara bagi rekanan/penyedia barang/jasa, pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan transparan, bersaing, adil dan akuntabel; Terjadi persaingan usaha yang sehat; Media kontrol apabila terdapat kecurangan.

*facilities to express dissatisfaction are not yet available; Procurement services have not been standardized; There is no humanist, responsive, and solutive mechanism available to answer and resolve complaints and disclaimer; Complaints and refusals submitted in writing and oral are not well documented; There is no certainty of time; And increased risks of rebuttal and complaints.*

*Mr. Sahdu (Risk and Complaints Risk Management) is an original idea and was first applied in Indonesia and has its own uniqueness; among them are: (a) Using information technology to increase customer trust in government procurement services; (B) Disclaimers and complaints are distributed within one business day and answered within a maximum of three business days; (C) Implementing a strategy of handling customer dissatisfaction with humanistic, responsive, and solutive methods; (D) Collaboration with law enforcement officials; (E) Tender committee companionship; (F) The Degree Team assists the review of the evaluation results of the committee for construction works, miscellaneous; (G) Services based on standard ISO 9001: 2015 on Public Service and ISO 27001: 2013 Information Security.*

*The existence of MR Sahdu also has positive impact. Agencies for instance, forming a work culture serve wholeheartedly; Improving the quality of procurement services; And the certainty of service delivery time. As for suppliers / providers of goods / services, the procurement of goods / services is carried out in a transparent, competitive, fair and accountable manner; Sound business competition occurs; Control media in case of fraud.*



## PAPEDA MEGANG (PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI MAGANG ASN ASLI PAPUA)

### PAPEDA MEGANG (CAPACITY BUILDING THROUGH INTERNSHIP ORIGINAL ASN PAPUA)

# 34

Biro Organisasi Setda  
Papua Barat, Pemerintah  
Provinsi Papua Barat

Organisation Bureau of  
West Papua, West Papua  
Province

1 Papua Barat adalah provinsi ke 31 yang terletak di Indonesia bagian timur dan mulai aktif sejak Inpres No 1 tahun 2003. Sebagai Provinsi yang baru dimekarkan, maka untuk mengejar keteringgalan dalam tata kelola pemerintahan perlu meningkatkan kompetensi ASN dan kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat. Khususnya Putra Putri Asli Papua yang umumnya mengalami kendala pada peningkatan kreatifitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya komitmen pimpinan dan pola pikir (mindset) yang masih terbawa akan unsur budaya yang berpengaruh pada kurangnya kesadaran akan budaya kerja yang baik. Kecenderungan untuk tidak melaksanakan tugas tepat waktu, kurangnya disiplin, malas, kurang peduli, tidak peka terhadap tugas, tanggungjawab, kurang koordinasi pimpinan dan bawahan yang secara tidak langsung berdampak pada capaian kinerja yang tidak maksimal dan pelayanan publik langsung pada masyarakat maupun pelayanan publik internal. Untuk itu di perlukan pendekatan baru dalam metoda peningkatan sumber daya aparatur bukan hanya melalui pelatihan tetapi

2 *West Papua is the province to 31 located in the eastern Indonesia which was active since the Inpres no. 1 2003 was issued. As a new province, it has to catch up the lag in governance management by improving the ASN and the performance of the government of West Papua Province especially for the indigenous Papuan youths which generally face obstacle in developing their creativity and the quality of human resources. It is caused by the lack of supporting facilities, low commitment of leaders, and old mindsets that still strongly influenced by values that lack the awareness of healthy working culture. Examples of these bad habits are tendency to procrastinate, no discipline, laziness, ignorance, no sense of responsibility doing tasks, bad coordination between leaders and employers which can cause the public service to the society and also internally will not be maximized. Therefore it needs a new approach and method to improve the apparatus resource not only through workshops but also through internship programs.*

*The implementation strategy is to do ASN internship for indigenous Papuan youths for the Ministry of Empowerment of State Apparatus*

pembelajaran melalui eraktek kerja magang.

Strategi pelaksanaan yaitu melaksanakan magang kerja ASN bagi putra/putri asli Papua sebanyak 18 orang pada Kementerian PAN&RB kurang lebih secara selama 3 bulan. Dengan proses/metode terdiri dari beberapa tahapan :

1. Penjaringan ASN dilakukan dengan seleksi berkas melalui OPD sesuai dengan persyaratan dan rekomendasi pimpinan OPD (Seleski Adminstrasi)
2. ASN yang lolos tahap seleksi adminstrasi selanjutnya tes kemampuan dasar (seleksi tertulis)
3. Wawancara
4. Tes kesehatan

Keluaran *PAPEDA MEGANG* dapat terlihat dari beberapa hal antara lain SDM ASN Pemda Papua Barat meningkat dan diharapkan 18 orang tersebut dapat menularkan semangat perubahan dan budaya kerja serta kedisipinan ditempat mereka bekerja, meningkatnya kompetensi dalam hal reformasi birokrasi, revolusi mental, perencanaan, penyusunan SOP,SPM, SP, SKP, Penyusunan Dan Evaluasi LAKIP pemerintah, metode anjab, perbaikan layanan pubik, terbentuknya jaringan kerja antar instusi KEMENPAN RB dan Pemda Papua Barat, Biro Organisasi,dan instansi peserta magang, meningkatnya pengalaman kerja adanya on the job traing, terbentuknya perpustakaan yang belokasi di Biro Organisasi dan dikelola peserta magang dan bertambahnya personal agen perubahan .

Dampak Inovasi *PAPEDA MEGANG* adalah investasi jangka panjang yaitu perubahan pada pola pikir dan budaya kerja serta penularan akan semangat dan budaya kerja yang bekinerja tinggi.

*and Bureaucracy Reform for 3 months. The number of people involved is 18. The steps done are:*

1. *Selecton of ASN is done by document screening through local government agencies according to criteria and recommendation from the head of local government agencies (Administration selection )*
2. *ASN who succeeds the administration selection will sit for basic competence test (written test).*
3. *Interview*
4. *Medical check up*

*The output of PAPEDA MEGANG is hoped that the the human resource of ASN in West Papua will increase and it is hoped that the 18 persons can impact their spirit of change and the culture of work as well as their discipline in the place where they work. They also can influence the enhancement the reform of bureaucracy, mental revolution, planning, making SOP, SPN, SP, SKP, making and evaluating government LAKIP, ANJAB methods, making better the public service, the making of working network among the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform and the government of West Papua, organization bureau, and internship institution, developing woking experience, job training, establishing a library located in organization bureau and managed by the person doing the internship, and lastly adding the number of people who as agents of change.*

*The impact of this PAPEDA MEGANG innovation is long term investation which is the change of mindset and working culture and also influencing others with the spirit and culture of high standard target.*



## PELUK MY DARLING (PERAWATAN LUKA KUSTA MENYELURUH DENGAN GARDEN HEALING)

### PELUK MY DARLING (WHOLE LEPROSY TREATMENT WITH GARDEN HEALING)

35

RSUD Kelet – Jepara,  
Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah

RSUD Kelet Jepara  
Central Java Province

1 RSUD Kelet merupakan Rumah Sakit milik pemerintah provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Jepara. Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet merupakan pusat rujukan kusta Provinsi Jawa Tengah. Aset lahan yang dimiliki ±200 hektar dalam bentuk bangunan rumah sakit, hutan konservasi, sawah, kebun, pantai, dan area wisata.

Beberapa permasalahan dalam pelayanan kusta antara lain: lama rawat pasien kusta yang cukup panjang dan menggunakan metode konvensional, tingginya dampak psikologis pasien kusta, rendahnya kualitas hidup dan tingginya stigma kusta. Tahun 2015, RSUD Kelet melakukan inovasi pelayanan untuk mengatasi masalah tersebut. Pelayanan kesehatan dilakukan secara kolaborasi meliputi dokter, perawat, fisioterapi, psikolog, ahli NLP (*Neuro-Linguistic Programming*), dan *vocational training* mengungkap prinsip *Patient Centre Care* dan dilaksanakan ditaman perawatan. Taman perawatan yang digunakan meliputi Griya dan Pendopo Peluk My Darling, Taman Perawatan di Guamanik Pecatu Park, Kawasan Wisata Putri Mandalika dan Garden Healing Hutan Konservasi. Pelayanan kesehatan

2 *Kelet hospital is a hospital owned by the provincial government of Central Java located in Jepara regency. Leprosy Rehabilitation Unit of Kelet Hospital is the center of leprosy referral of Central Java Province. Assets of land owned ± 200 hectares in the form of hospital buildings, conservation forests, rice fields, gardens, beaches, and tourist areas.*

*Some problems in leprosy services include: long treatment of leprosy patients long enough and using conventional methods, high psychological impact of leprosy patients, low quality of life and high stigma leprosy. In 2015, Kelet hospital to innovate services to solve the problem. Health services are carried out in collaboration including doctors, nurses, physiotherapists, psychologists, NLP (*Neuro-Linguistic Programming*) experts, and vocational training carrying the patient center care principles and are carried out in the care park. Treatment gardens used include Griya and Pendopo Peluk My Darling, Nursing Park in Guamanik Pecatu Park, Putri Mandalika and Garden Healing Forest Conservation Area. Holistic health services are in accordance with the concept of Healthy 4.0 (*biopsikososiospiritual*). This innovation program*



holistik tersebut sesuai dengan konsep Sehat 4.0 (biopsikososiospiritual). Program inovasi ini diberi nama PELUK MY DARLING (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh dengan Garden Healing).

Program ini telah dilaksanakan selama dua tahun dengan memberikan manfaat antara lain: lama rawat luka menjadi lebih pendek dengan menggunakan standar CWCCA (Certified Wound Care Clinician Associate), kondisi psikologis semakin baik, pengetahuan dan ketrampilan pasien semakin bertambah. Program PELUK MY DARLING di Unit Rehabilitasi Kusta akan direplikasikan pada pelayanan pasien umum di RSUD Kelet. Puskesmas Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Puskesmas Kunduran Kabupaten Blora telah menyatakan dukungan replikasi program PELUK MY DARLING dalam pelayanan kusta di Puskesmas tersebut.

*is named PELUK MY DARLING (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh Dengan Garden Healing).*

*This program has been implemented for two years with benefits such as: shorter wound care by using CWCCA (Certified Wound Care Clinician Associate) standards, better psychological conditions, increasing patient knowledge and skills. The PELUK MY DARLING program in Leprosy Rehabilitation Unit will be replicated in general patient service at Kelet hospital, Kalinyamatan Health Clinic of Jepara Regency and Kunduran Health Clinic of Blora Regency has stated support for replication of PELUK MY DARLING program in leprosy service at Puskesmas.*



## **PENA BERKARIB (PETABENCANA.ID) BERSAMA KURANGI RISIKO BENCANA**

### ***PENA BERKARIB (PETABENCANA.ID) TOGETHER REDUCE DISASTER RISK***

# 36

Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah,  
Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta

*Regional Disaster  
Management Agency, Special  
Region of Jakarta Province*

1 Kejadian banjir besar tahun 2013 akibat jebolnya tanggul Latuharhari yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas sepanjang jalan Jend. Sudirman -Thamrin. Kerugian banjir tahun 2013 mencapai 20 triliun. Lambatnya informasi yang didapatkan masyarakat dan informasi tentang bencana banjir belum dilakukan secara optimal (hanya menggunakan media elektronik). Belum ada aplikasi yang menghubungkan informasi kebencanaan dari masyarakat ke pemerintah melalui media sosial begitupun sebaliknya.

Melalui platform ini menampilkan *crowdsourc*e, validasi dari pemerintah terkait laporan, tinggi muka air sungai, dan sebaran lokasi yang tergenang banjir secara *realtime*. Masyarakat juga bisa berpartisipasi secara langsung melalui media sosial (Twitter, Qlue, Telegram, Pasangmata.com). Adanya kartu laporan dan peta banjir dipetakan secara otomatis.

Keberlanjutan dari platform ini sangat bergantung pada antusiasme warga terhadap perkembangan sosial media yang berarti juga bergantung pada teknologi informasi. Di masa mendatang warga masyarakat akan semakin lekat dengan sosial media untuk mendapat

2 *The great flood that occurred in 2013 was caused by broken Latuharhari dike and affecting activity along Jend.Sudirman - Thamrin road. Flood losses in 2013 reached 20 trillion. Flood information is not realtime. At that time, information of flood disaster has not been done optimally (using electronic media only).There is no application linking disaster information from the public to the government through social media as well as vice versa.*

*PETABENCANA.ID shows a real time crowdsourc*e, government validation about the report, River Water Level, and flood location distribution. Citizen can participate directly in giving reports through Twitter, Qlue, Telegram and Pasangmata.com. Also available of a report card and flood map mapped automatically.

*The sustainability of this platform relies heavily on the enthusiasm of citizens towards the development of social media which also means relying on information technology. In the future citizens will be more closely associated with social media to get information in real-time. Information in real time is needed to build resilience of citizens against the disaster that*

informasi secara *real-time*. Informasi secara *real time* tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun ketahanan warga terhadap bencana yang terjadi.

Dengan keberhasilan inovasi kami, BNPB menjadikan PENA BERKARIB sebagai model untuk tingkat nasional yang dimulai dari kota Surabaya dan Kota Bandung.

*occurred.*

*With the success of our innovation, BNPB makes PENA BERKARIB as a model for national level starting from Surabaya and Bandung city.*



KETERANGAN	SEBELUM INOVASI	SETELAH INOVASI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI RISIKO BENCANA BANJIR	TIDAK ADA PARTISIPASI Tidak dilibatkan karena laporan berasal dari aparat pemerintah di wilayah banjir secara manual	ADA PARTISIPASI dengan melaporkan banjir menggunakan inovasi PENA BERKARIB
WAKTU PELAPORAN BANJIR	TIDAK REAL-TIME DAN LAMBAT Karena menunggu laporan dari aparat pemerintah di wilayah banjir	REAL-TIME DAN CEPAT Karena laporan masyarakat yang berada di lokasi banjir langsung masuk di PENA BERKARIB
RESPON TIME DALAM PENANGANAN BENCANA BANJIR	LAMBAT Laporan yang lambat dan tidak real-time menghambat proses penanganan bencana banjir	CEPAT Laporan yang cepat dan secara real-time membantu proses penanganan bencana banjir
EFISIENSI	TIDAK EFISIEN Menggunakan pulsa, menghabiskan kertas karena laporan manual dan memakan waktu lama	EFISIEN platform gratis tanpa biaya yang diperlukan hanya jaringan internet, digital dan otomatis.
RISIKO BENCANA BANJIR (berdasarkan data korban jiwa)	BANYAKNYA KORBAN JIWA	BERKURANGNYA KORBAN JIWA
DOKUMENTASI/FOTO BUKTI KEJADIAN BANJIR	TIDAK VALID Foto lama/tidak realtime dapat dilaporkan sehingga informasi bohong/hoax	VALID Foto yang dilaporkan harus diambil secara realtime karena menggunakan fitur kartu laporan dan diverifikasi BPBD dengan fitur REM



## PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENDAFTARAN MELALUI “SI BINA CANTIK”

### **SIMPLIFYING OUT PATIENT REGISTRATION PROCESS THROUGH A SYSTEM CALLED “SI BINA CANTIK”**

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

*Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital  
Central Java Province*

37

1 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo merupakan RS milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah Klas B Pendidikan yang berada di Purwokerto dengan jangkauan wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menjadi rumah sakit rujukan regional / tersier dengan cakupan rumah sakit perujuk yang terdiri dari 78 rumah sakit dan 289 Puskesmas.

Masalah yang dihadapi antara lain Pelanggan (peserta BPJS) menunggu lama dalam input data pendaftaran rawat jalan karena input data berulang 3 kali di sistem SIMRS, BPJS dan INA-CBG's, gawat darurat maupun rawat jalan (15 menit), Informasi mengenai tambahan iur biaya lama (60 menit), data yang tersimpan di tiga sistem memungkinkan ada perbedaan antar sistem, Proses alur klaim panjang karena harus melakukan cek data secara manual di tiga sistem, Sulit melakukan evaluasi karena data tersebar di ketiga sistem.

Inovasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pembuatan sistem *bridging* yang menghubungkan antara SIM RSMS, BPJS dan INA-CBG's.

2 *Margono Soekarjo Hospital is a regional tertiary hospital under the responsible the Government of Central Java which is located in the city of Purwokerto that covers an area of south west of Central Java Province. The Margono Soekarjo Hospital provides a referral healthcare service to 78 hospitals & 289 health centres surrounding area.*

*The challenges that are faced by the hospital is that customers (National Health Insurance members) need to wait for a quite long during the outpatient registration services. Registration desk staff have to input patients' data subsequently in 3 different systems (SIMRS, BPJS & INA CBG's, emergency & inpatient system (up to 15 minutes) as a consequence, patients need to wait for more than 60 minutes to approve information on additional cost incurred to the services they receive. The other complicated things are that the data in those 3 systems may be slightly different, lengthy claim process due to a manual need to input data in those 3 systems and the difficulty to conduct an evaluation as the data spread over those systems. This complicated situation needs to be solve immediately.*

Sistem *bridging* merupakan penggunaan fasilitas teknologi informasi *web service* yang memungkinkan beberapa sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan beberapa proses tanpa adanya intervensi satu sistem kepada sistem lainnya secara langsung, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga.

Hasil penerapan inovasi "SI BINA CANTIK" (SISTEM BRIDGING SIM RSMS, BPJS dan INA-CBG's Menuju AkuNtabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna) antara lain penyederhanaan prosedur pendaftaran dengan input data hanya sekali yaitu di SIMRS sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan akurat, waktu untuk input data pendaftaran pasien BPJS lebih singkat (kurang dari 1 menit), informasi mengenai tambahan iur biaya dapat dilihat lebih cepat semula 60 menit menjadi kurang dari 1 menit, proses alur klaim lebih singkat karena cukup melihat di 1 sistem, dan lebih mudah melakukan evaluasi karena komunikasi data dapat dilakukan antar sistem.

*An innovative bridging system is to connect 3 different systems SIM RS, BPJS & INA CBG's are proposed to solve this problems. Bridging system is web based informational technology which allows some different systems concurrently working without interfering one another directly. Thus, the security & confidentiality of each system is kept securely.*

*The implementation of an innovative system called "SI BINA CANTIK" (SISTEM BRIDGING SIM RSMS, BPJS dan INA-CBG's Menuju AkuNtabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna) includes simplifying "once instead of three" data input in registration process in SIM RS that results in a more valid & accurate data, shorter time (less than 1 minute) for data inputting in registration process, and also quicker information on additional cost of the received service from 60 minutes to 1 minute. On top of these, claim flow process has been*

*successfully reduced to only 1 system and easier evaluation may be performed as data communication can be done among inter-system.*





## PLANET KAKAO

### PLANET KAKAO

38

Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Timur

Agency of Plantation  
East Java Province

1 Awalnya kebun kakao di Jawa Timur hanya milik perkebunan besar. Namun seiring waktu, terus mengalami penurunan. Hal ini mendorong Ir Moch Samsul Arifien, MMA, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mengembangkan kakao rakyat. Melalui dukungan APBD Provinsi Jawa Timur, lahirlah Program Planet Kakao (Pengelolaan dan Edukasi Terpadu Kakao), yaitu pembinaan kakao mulai dari *on farm* (kebun) hingga *off farm* (pengolahan hasil).

Diawali dengan melakukan kajian potensi dan kesesuaian lahan dan bekerja sama dengan PUSLITKOKA Jember. Hasil kajian terdapat potensi lahan di zona pantai selatan seluas 50 ribu hektare. kemudian dilakukan pengembangan kakao dengan "Pola Mandiri". Melalui pola ini, petani anya difasilitasi benih, polibag, pupuk dan bantuan upah pendederan. Setiap tahunnya dilakukan pengembangan rata-rata seluas 5.000 hektare yang didukung fasilitas sarana pengolahan hasil.

Secara paralel dilakukan proses edukasi melalui pelatihan, studi banding, sekolah lapang dan lain-lain. Para petani kakao

2 Initially cocoa farms in East Java belonged only to large estates. But over time, continues to decline. This prompted Ir Moch Samsul Arifien, MMA, Head of East Java Provincial Plantation Office to develop cocoa society. Through the support of East Java Provincial APBD, Cocoa Plantation (Cocoa Integrated Management and Education Program) was established, namely cocoa development from on farm to off farm.

It began with the study of potential and suitability of land in cooperation with PUSLITKOKA Jember. The results of the study there is a potential land in the southern coastal zone of 50 thousand hectares. Then carried out cocoa development with "Pola Mandiri". Through this pattern, farmers are facilitated with seeds, polybags, fertilizers and the aid of wage nursery. Each year the average development of 5,000 hectares is supported by the facility of processing facilities.

Educational process through training, comparative study, field school and others conducted simultaneously. The cocoa farmers including Cholid Mustofa founder of Kampung Cokelat were included in comparative studies on cultivation to South Sulawesi and West Sumatra.

termasuk Cholid Mustofa pendiri Kampung Cokelat diikutkan studi banding tentang budidaya ke Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Studi banding juga dilakukan ke Yogyakarta (Cokelat Monggo) dan Bandung (PT Ceres) untuk belajar industri makanan cokelat. Selain itu, juga secara simultan dilakukan pendekatan kelembagaan yaitu dengan membentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan sebagainya.

Setelah enam tahun dilaksanakan, program Planet Kakao menampilkan hasil, di antaranya, berhasil membangun kebun rakyat seluas 33 ribu hektare, kualitas biji kaka meningkat, berdiri industri makanan cokelat berskala UMKM (Kampung Cokelat di Blitar) menjadi agro wisata edukasi berbasis kakao, produksi kakao mencapai 20 ribu ton senilai Rp500 miliar. Pendapatan ini jauh melebihi dana APBD yang digunakan sebesar Rp63 miliar

Program Planet Kakao bisa direplikasi baik dari sisi *on farm* maupun *off farm*. Replikasi *on farm* adalah berkembangnya kakao rakyat secara swadaya dengan biaya sendiri, tanpa fasilitasi anggaran pemerintah. Sedangkan replikasi *off farm* adalah berkembangnya Rumah Cokelat di Trenggalek dan Warung Cokelat di Kediri sebagai replikasi dari Kampung Cokelat di Blitar. Program ini juga bisa berkelanjutan karena agribisnis kakao memiliki daya saing yang kuat karena nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding komoditi lainnya.

*Comparative studies were also conducted to Yogyakarta (Cokelat Monggo) and Bandung (PT Ceres) to learn the chocolate food industry. In addition, institutional approach is done by forming farmer groups, combined farmer groups, and some other efforts simultaneously being performed.*

*After six years of implementation, the Cocoa Planet program showed results, among others, succeeded in establishing 33,000 hectares of community gardens, improved cocoa seed quality, brown chocolate industry established (Kampung Cokelat in Blitar) into cocoa-based education agro, cocoa production reached 20 thousand tons worth Rp500 billion. This revenue far exceeds the APBD funds used by Rp63 billion.*

*The Cocoa Planet Program can be replicated from both on farm and off farm side. Replication on farm is the development of people's cocoa self-help at their own expense, without facilitation of government budget. While off farm replication is the development of Chocolate House in Trenggalek and Warung Cokelat in Kediri as replication from Kampung Cokelat in Blitar. This program can also be sustainable because cocoa agribusiness has a strong competitiveness because its economic value is higher than other commodities.*



## PODIUM BALI BEBAS BICARA APA SAJA (PB3AS)

### ANY BALINESE PODIUM TALK ANYTHING (PB3AS)

# 39

Biro Humas Sekretariat  
Daerah, Pemerintah  
Provinsi Bali

Public Relations Bureau of  
the Regional Secretariat, Bali  
Province

1 Panjangnya jalur birokrasi dan penuh aturan protokoler, terkadang mempersulit akses masyarakat untuk bertemu dan menyampaikan saran dan masukan kepada pucuk pimpinan tertinggi di Provinsi yaitu Gubernur. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa mereka berhak tahu dan ikut berperan dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan publik.

Gubernur Bali berinisiatif untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mau dan berani berbicara, menyuarakan isi hatinya dan menyampaikan saran kepada Pemerintah Provinsi Bali. Inisiatif ini diberi judul "Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja". Inisiatif ini dilakukan dengan pendekatan "one institution one innovation". Podium ini dibuka untuk pertama kalinya oleh Gubernur Bali pada hari Minggu, 2 Nopember 2014.

Sasaran kegiatan adalah semua lapisan masyarakat (krama Bali), tanpa persyaratan bisa menyatakan pandangan politik, ekonomi, adat, budaya, dan pandangan lainnya, termasuk

2 *The length of the bureaucratic path and full of protocol rules, sometimes make it difficult for people to meet and give suggestions and inputs to the highest commanders in the Province, namely the Governor. The enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness gives fresh air to the public that they have the right to know and take part in providing input in the formulation of public policy.*

*The Governor of Bali took the initiative to open the widest space to the public to want and dare to speak, voiced their heart and conveyed his advice to the Bali Provincial Government. The initiative is entitled "Bali Free Speech Podium". This initiative is conducted with the "one institution one innovation" approach. This podium was opened for the first time by the Governor of Bali on Sunday, November 2, 2014.*

*The activity targets are all levels of society, without any requirement for those who want to express political, economic, custom, cultural, and other views on the podium, including personal matters.*

masalah pribadi. Tujuan utama pengembangan inisiatif ini adalah untuk mengakomodasi gairah masyarakat dalam mengekspresikan aspirasinya tanpa mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dan mencegah kemacetan lalu lintas bila dilakukan dengan aksi demo di jalanan.

Ada beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya keterbukaan informasi, terkait penerapan inisiatif ini, seperti: meningkatkan kepedulian masyarakat, menumbuhkan peran serta aktif masyarakat, mau dan berani berbicara, serta bahan evaluasi bagi instansi terkait.



*The main objective of that initiative is to accommodate the public's passion in expressing its aspirations without disturbing public order and public comfort and preventing traffic connection by community demonstrations on the street.*

*There are some changes in the implementation of public services as the implications of the implementation of PB3AS in Bali, especially information disclosure such as increasing public awareness, fostering active participation of the community, willing and courageous speaking, and evaluation materials for related institutions.*

Keberlanjutan program sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini program tetap dilanjutkan bahkan dilakukan perbaikan dengan mengundang pejabat secara langsung untuk menjawab keluhan masyarakat dan telah dibuatkan website untuk memantau perkembangan PB3AS. Bahkan diharapkan inisiatif ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Bali.

Pada tahun 2016 ini, sudah ada inisiatif dari beberapa pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat program serupa, diantaranya di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.

*The sustainability of the program has become the commitment of the Provincial Government of Bali, in this case the program should be continued even improvements by inviting officials directly to answer the public complaints and also has made a website to monitor the development of PB3AS. It is even expected that this initiative will be followed by the Regency and City Government in Bali.*

*By 2016, there have been initiatives from several regency / city governments to create similar programs, including in Klungkung and Karangasem regencies.*



## SIDUKUN 3 IN 1

### THE SHAMAN 3 IN 1

# 40

Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil, Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta

*Agency of Population and Civil  
Registration, Special Region of  
Jakarta Province*

1 Dokumen kependudukan NIK, KK, dan akta kelahiran menjadi kunci akses setiap bayi untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan NIK, KK, dan Akta Kelahiran itu sulit dan mahal, menyebabkan penduduk tidak segera mengurusnya. Hal ini berdampak terhambatnya bayi memperoleh jaminan kesehatan dan tidak terpenuhinya hak bayi mendapatkan dokumen kependudukan, dan cakupan pelayanan akta kelahiran bayi tidak mencapai 100%.

Selama ini pengurusan NIK, KK, Akta Kelahiran, dan Kartu BPJS bagi bayi yang lahir di RSUD masih belum terintegrasi, sehingga masyarakat yang mengalami persalinan, harus (1) mengurus Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD; (2) ke Kelurahan untuk mengurus NIK dan KK; (3) ke Kecamatan untuk mengurus Akta Kelahiran; dan (4) ke BPJS untuk mengurus kartu BPJS. Ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang memberatkan bagi penduduk apalagi yang kurang mampu.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2 *Documents like Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) and birth certificate are the keys to access for each baby to get health insurance (BPJS). There is still a perception, all those documunts are difficult and expensive causing many people not immediately try to get it. That impact make infant has obstacle in obtaining health insurance. So the accomplishment coverage of birth certificate does not get reach of 100%.*

*Government administration services before SIDUKUN 3 in 1 was not integrated. People first must had Birth Certificate from Regional Hospital (RSUD), obtained Nomor Induk Kependudukan (NIK) and Kartu Keluarga from Kelurahan and went to Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil with all the requirment to get Birth Certificate and finally go to BPJS to get BPJS card*

*The Provincial Government of DKI Jakarta and BPJS Health DIVRE IV commited to manifest Tertib Administrasi Kependudukan to improve the welfare of the population and infant from health is realized byh SIDUKUN 3 IN 1 service in RSUD, which is integrated service system*

bersama dengan BPJS Kesehatan DIVRE IV untuk mewujudkan tertib adminduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk dan kesehatan bayi diwujudkan dengan "Pelayanan SIDUKUN 3 In 1 di RSUD," yakni sistem pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan dengan persalinan dan kepesertaan BPJS. Data/biodata bayi yang diinput di Loker Pelayanan Persalinan RSUD melalui webdesk akan langsung terkirim ke database kependudukan untuk proses NIK, KK, Akta Kelahiran, dan KIS. Selanjutnya NIK yang diterbitkan oleh Disdukcapil melalui webdesk/webservice akan terkirim ke database BPJS untuk proses Kartu kepesertaan BPJS non mandiri. Kini penduduk yang mengalami persalinan di RSUD cukup dengan membawa persyaratan KK, copy KTP suami-isteri, akta perkawinan dan copy KTP 2 orang saksi pada saat pendaftaran persalinan di RSUD, akan mendapatkan pelayanan terintegrasi, yakni pelayanan persalinan Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD, NIK, KK, Akta Kelahiran, dan KIA (Sudin Dukcapil), dan Kartu BPJS.

Dengan Pelayanan SIDUKUN 3 In1 ini akan memudahkan dan mempercepat masyarakat mencatatkan kelahiran anak, mendapatkan NIK, KK, dan kepesertaan BPJS, sehingga kesejahteraan bayi/keluarga meningkat. Selain itu, cakupan akta kelahiran dan akurasi data penduduk juga meningkat, karena data kelahiran bayi di RSUD akan langsung terkirim secara online ke dalam database kependudukan

Di Tahun 2017 ini Pelayanan SIDUKUN 3 In 1 akan direplikasikan pada pelayanan kelahiran penduduk di 17 RSUDK dan RS Swasta.

*of population documents with the birth and membership of BPJS. Data / biodata baby inputted at birth conuter service in RSUD through webdesk will be directly sent to the Kependudukan database for the process of NIK, KK, Birth Certificate, and KIS. Further NIK issued by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) via webdesk/webservice will be submitted to the BPJS database for BPJS Card membership process. Now, people who have birth in RSUD simply bring the requirements such as Kartu Keluarga, copies of KTP of both Parents, Marriage certificate and the copy of Identity Card (KTP) from 2 witnesses at the time of registration of childbirth in RSUD, People will get integrated services, namely birth service Birth Certificate from RSUD, NIK, KK, Birth Certificate, and KIA (from Suku Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), and BPJS Card. With this SIDUKUN 3 IN 1 service will facilitate and accelerate the community to register the birth of children, get NIK, KK, and BPJS membership, so that the welfare of baby and family increases. In addition, coverage of birth certificates and accuracy of population data also increased.*

*In the Year 2017 this SIDUKUN 3 In 1 Service will be replicated on the birth service of the population in 17 district Hospital (RSUDK) and Private Hospital.*



## **SIMANTRI: BALI GO GREEN, PETANI SEJAHTERA**

### ***SIMANTRY: BALI GO GREEN, PROSPEROUS FARMER***

41

Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura, dan  
Perkebunan, Pemerintah  
Provinsi Bali

*Department of Food Crops,  
Horticulture, and Plantation,  
Bali Province*

1 Masalah sebelum dilaksanakan inovasi adalah sebagai berikut :

1. Petani bertani secara tradisional.
2. Peternak, pertanian dan perkebunan bersifat sektoral.
3. Pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan daerah terhadap produksi pertanian.
4. Daya beli masyarakat petani rendah, kesejahteraan masyarakat petani rendah.
5. Limbah pertanian menjadi masalah karena tidak terkelola.
6. Ekonomi produktif perdesaan tidak berkembang karena belum berkorelasi dengan pertanian.

Program Simantri telah memberikan manfaat yang cukup besar dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dampak Program Simantri tahun 2009 s/d 2015 terhadap pengembangan komoditas (pangan), penyediaan pupuk, biogas dan lain-lain.

Manfaat langsung keberhasilan pelaksanaan

2 *Challenges hampered agricultural development in Bali before an innovative program called "Simantri" was introduced to solve problems in the province's farming society. What have been considered as challenges are facts that:*

1. *Farmers still used traditional farming methods.*
2. *Animal husbandry, agriculture and plantation were still considered three different sectors.*
3. *Farming activities were unable to meet local demands on agricultural products.*
4. *Farmers had low purchasing power. Farmers were living in poverty.*
5. *Farming waste disposal became a great problem because it was not managed well.*
6. *Rural economy did not develop productively because it was not yet connected with agriculture.*

*The Simantri program has offered benefits considered significant enough to accelerate economic growth, ensuring that any improvement in Bali's economy can be directly felt by its people.*

*Conducted in the period of 2009-2015, the Simantri program has effectively brought impacts to the development of commodities (staple food), the supplying of fertilizers, and the development of biogas, among others things, in the province.*

program Simantri yang dirasakan masyarakat dari hasil evaluasi terakhir tahun 2015 berupa 7 ekor anak sapi tiap unit/th atau 3,843 ekor dari 549 unit dengan nilai Rp. 23.058.000.000. Pupuk kandang yang dihasilkan tiap kandang koloni 39.600 kg /th dari 549 unit dihasilkan 21.740.400 kg dengan nilai Rp. 10.870.200.000 /th. Bio urine tiap koloni 7,920 ltr. atau 4.348.080 ltr untuk 549 unit dengan nilai Rp. 21.740.400.000 /th. Bio gas yang dihasilkan tiap unit simantri per tahun 1.800 ltr atau 988.200 ltr untuk 549 unit dengan nilai Rp. 494.100.000/th. Nilai manfaat dari kegiatan utama Simantri (kandang koloni sapi Bali) tiap tahunnya mencapai rata-rata Rp. 80.573.700.000 /th belum termasuk nilai jual indukan sapi yang kedaluwarsa.

Dampak lain adalah berkembangnya lembaga usaha ekonomi pedesaan, meningkatnya insentif berusaha tani melalui peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani (pupuk, pakan, biogas, bio urine dan pestisida diproduksi sendiri) dan peningkatan pendapatan petani minimal 2 kali lipat.

Disamping itu keberhasilan program Simantri di Provinsi Bali juga dapat dilihat dari terbangun unit degister biogas sebanyak 549 unit dari 549 Simantri yang dinikmati oleh rumah tangga adalah sebanyak 1.647 KK yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota.

*Results of Simantri's latest evaluation in 2015 show that among benefits directly felt by the program's beneficiaries were increases in cow-calf production, in which seven calves were born in each unit per year, or 3,843 calves from 549 Simantri units, with a total economic value amounting to Rp 23.06 billion (US\$1.72 million). The production of manure in Bali also increased sharply, thanks to the Simantri program. During the period, each cow stall produced 39,600 kilograms of manure per year, or 21.74 million kg from 549 units, with an economic value of Rp 10.87 billion per year. Bio urine produced in each colony amounted to 7,920 liters, or 4.35 million liters from 549 units, with an economic value worth Rp 21.74 billion per year. Meanwhile, biogas produced by each Simantri unit amounted to 1,800 liters per year, or 988,200 liters from 549 units, with an economic value of Rp 494.10 million per year. In total, economic benefits generated from Simantri's main activities (the development of colonies of Bali cow stalls) amounted to around Rp 80.57 billion per year. This figure had not yet included profits gained from the selling of unproductive cattle.*

*Another significant impact of the Simantri program is the development of rural economic business institutions and increased farming incentives achieved through production improvements and more efficient farming activities, in which farmers produce fertilizers, cattle food, biogas, bio urine and pesticides by themselves. Simantri has helped the farmers to boost their revenues by two folds at minimum.*

*Another success story of the Simantri program in Bali can be seen from the development of 549 biogas digesters in 549 Simantri units. The biogas digesters have been benefitted by 1,647 households in nine regencies and municipalities across the province.*



## **SIMAS-LH ONLINE (SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS ONLINE)**

### ***SIMAS-LH ONLINE (ONLINE BASED ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEM)***

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Provinsi Sulawesi Selatan

*Environmental Management Agency, South Sulawesi Province*

42

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Pelayanan informasi lingkungan hidup yang dilakukan selama ini secara manual menghadapi permasalahan, antara lain, terbatasnya kemampuan pelayanan dan ases informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh publik. Pelayanan informasi secara manual juga menyebabkan kesulitan dalam sistem dokumentasi data dan informasi. Sistem manual juga menyebabkan pelaporan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa tidak efektif dan tidak efisien, serta memboroskan sumberdaya. Selain itu, tumpukan kertas laporan menyulitkan proses evaluasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas

2 *Constitution Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management mandates the government and local governments to develop the Environmental Information Systems to support the implementation and development of environmental protection and management policies. The information system should be implemented in an integrated and coordinated way, and must be published and accessible by the public.*

*Environmental information services that have been done so far face many problems, among other things, limited service capability, and limited access to the information of protection and environmental management by the public. Manual information services also cause difficulties in data and information documentation systems. The manual system also causes the reporting of data and information on environmental management by the initiators ineffective and inefficient, and waste of resources. In addition, the report papers caused the difficulty in the evaluation process.*

*To overcome this problem, the Environmental Management Agency implemented a new*

Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan inovasi baru berupa "Sistem Informasi Lingkungan Hidup Berbasis Online" (SIMAS-LH Online). Inovasi ini memungkinkan publik mengakses layanan informasi lingkungan hidup online secara real time. Inovasi ini memungkinkan pemrakarsa atau pengelola lingkungan hidup untuk menyampaikan laporannya dengan mudah.

Strategi pengembangan Inovasi ini melalui beberapa tahapan. Pertama adalah identifikasi masalah; kedua adalah penelusuran data dan informasi yang dihasilkan oleh Instansi lingkungan hidup, serta penelusuran data dan informasi yang dibutuhkan oleh publik; ketiga adalah penyusunan grand desain sistem informasi yang akan dibangun; keempat adalah penyusunan alokasi anggaran; kelima adalah pembuatan model sistem informasi; keenam adalah implementasi sistem aplikasi, serta pengembangan dan uji coba sistem. Peluncuran inovasi sistem informasi telah dilakukan pada Mei 2016 oleh Gubernur Sulawesi Selatan; dan ketujuh adalah pengawasan dan pengembangan berkelanjutan.

Sebelum implementasi sistem inovasi baru ini, pelayanan yang dilakukan secara manual oleh Dinas Lingkungan Hidup berlangsung lambat. Namun setelah implementasi dilakukan pelayanan menjadi secara online dan realtime. Website dari sistem pelayanan data dan informasi lingkungan hidup ini dapat diakses pada <http://silhdsulsel.com>. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dan penyampaian data dan informasi secara on line sehingga pelayanan manual tidak diperlukan lagi. Sistem ini menyebabkan penghematan dalam pemanfaatan sumberdaya karena berbasis paperless.

*innovation in the form of "Online Based Information System of the Environment" (SIMAS-LH Online). This innovation allows the public to access online environmental information services in real time. This innovation allows the Initiator or environmental manager to deliver his report easily.*

*Innovation development strategy is through several stages. First is the identification of the problem; Second is the tracking of data and information produced by the environmental agency, as well as tracking of data and information needed by the public; Third is the preparation of grand design of information systems to be built; Fourth is the preparation of budget allocations; The fifth is the modeling of information systems; The sixth is the implementation of application systems, as well as system development and testing. The Governor of South Sulawesi conducted the launch of an information system innovation in May 2016; and the seventh is continuous monitoring and development.*

*Prior to the implementation of this innovation system, the services handled manually by the Environment Department were slow. However, after the implementation of the service to be online and real-time. Website of this data service system and environmental information can be accessed at <http://silhdsulsel.com>. This system allows the management and delivery of data and information on line so manual service is no longer needed. This system leads to savings in resource utilization because it is paperless based.*



## SIMPONI ASN BAHTERAMAS

### SIMPONI ASN BAHTERAMAS

43

Badan Kepegawaian Daerah,  
Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Tenggara

*Local Employment  
Agency, Southeast  
Sulawesi Province*

1 Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengembangan jaringan informasi berbasis teknologi dan adanya Permasalahan pengelolaan data kepegawaian yang belum terintegrasi ke dalam sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi sehingga melahirkan gagasan yang dianggap inovatif yang diberi nama Simponi ASN Bahteramas pada tahun 2015.

Simponi ASN Bahteramas adalah sebuah sistem pengelolaan data Aparatur Sipil Negara yang disusun dan dikembangkan oleh pegawai BKD Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa melibatkan *software development* dari pihak luar yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan memberdayakan pengelola kepegawaian di setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ikut serta dalam pengelolaan sistem informasi ini. Simponi ASN Bahteramas memberikan beberapa layanan kepegawaian yang dapat diakses oleh *stakeholder* melalui situs <http://simponi-asn.info> sehingga menciptakan sebuah proses *open service* yang dapat dinilai transparansinya.

2 *In order to support the implementation of the vision and mission of the Regional Personnel Board of Southeast Sulawesi Province on the development of technology-based information network and the existence of personnel data management problems that have not been integrated into an information system based on information technology to create innovative idea that are called Simponi ASN Bahteramas in 2015.*

*Simponi ASN Bahteramas is a Civil State Apparatus data management system developed and arranged by BKD staff of Southeast Sulawesi Province without involving external development software which customized to the needs of the organization and empowering civil service managers in each SKPD scope of the Provincial Government of Southeast Sulawesi to participate in the management of the information system. Simponi ASN Bahteramas provides several personnel services that can be accessed to stakeholders through <http://simponi-asn.info> site so as to create an open service process that can be assessed transparency.*

Inovasi pelayanan kepegawaian melalui simponi ASN Bahteramas adalah Pelayanan kepegawaian yang terintegrasi ke dalam sistem informasi yang berbasis *e-government* sehingga bermanfaat sesuai kebutuhan *stakeholder* serta adanya pemberdayaan unit pengelola kepegawaian dimasing-masing SKPD (*admin agency*) dalam menjaga kevalidan data.

Manfaat utama yaitu: (1) terwujudnya sistem pengelolaan database pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis web dengan database pegawai yang akurat (2) Pelayanan kepegawaian menjadi lebih mudah dan mekanisme pelayanan data kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi (4) Menjadi media penyampaian informasi secara online sehingga meningkatkan kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tenggara dan (5) Sistem ini dapat direplikasi untuk digunakan di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

*Staffing service innovation through ASN Bahteramas symphony is an employment service integrated into the information system based on e-Government so that it is beneficial to the needs of stakeholders as well as empowering the personnel management unit in each SKPD (admin agency) in maintaining the validity of the data.*

The main benefits are: (1) realization of database management system of Provincial Government of Southeast Sulawesi based web with accurate employee database (2) Employment service becomes easier and employee data service mechanism become more effective and efficient (3) Improve the quality of human resources specially Knowledge of the utilization of information technology (4) Being a medium of online information delivery so as to improve the performance of BKD Southeast Sulawesi Province and (5) This system can be replicated for use in some districts / cities in Southeast Sulawesi.



## “PENETRASI ONLINE” DONGKRAK KUALITAS PELAYANAN

### ONLINE PENETRATION BOOSTING QUALITY OF SERVICE

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Central Java Province

1 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo merupakan RS milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah rujukan Klas B Pendidikan yang berada di Purwokerto dengan jangkauan wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Ciamis, Banjar Patroman, Pangandaran.

Ada beberapa persoalan yang dihadapi di antaranya, waktu tunggu pendaftaran 2 jam, waktu pelayanan pendaftaran tidak pasti, ruang tunggu tidak nyaman, komplain pelayanan pendaftaran tinggi, kepuasan pasien rendah.

Berangkat dari masalah inilah inovasi Penetrasi Online (Pengembangan Sistem SMS Gateway Menuju Registrasi Online) diterapkan untuk seluruh penjamin (Umum, BPJS, JAMKESDA, BUMN, LPSK dan asuransi lainnya). Sistem ini *user friendly* sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, dengan hasil efisiensi waktu tunggu pendaftaran menjadi 15 menit, ada kepastian waktu pelayanan pendaftaran, ruang tunggu menjadi nyaman baik kondisi fisik maupun keamanan pasien /

2 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo merupakan RS milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah rujukan Klas B Pendidikan yang berada di Purwokerto dengan jangkauan wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Ciamis, Banjar Patroman, Pangandaran.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo is a government hospital of Central Java Province of Class B reference of Education located in Purwokerto with coverage of Central Java Region of South West including Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Ciamis, Banjar Patroman, Pangandaran.

There are several problems such as two hours waiting time of registration, uncertain registration time, uncomfortable waiting room, complaint of high registration service, poor patient satisfaction.

Departing from this problem Penetration Online innovation (Development of SMS Gateway System Towards Online Registration) applied to all guarantor (General, BPJS, JAMKESDA, BUMN, LPSK and other insurance). The system is user

pengunjung, komplain pelanggan menurun dari 25,6% menjadi 2,4% dan kepuasan masyarakat meningkat dari 61,65% menjadi 82,13%.

Penetrasi Online ini berbasis online. Tidak berhenti pada SMS Gateway tetapi dilanjutkan dengan Registrasi Online. Bahkan ke depannya akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis android, serta membuat bridging dengan aplikasi lainnya seperti dengan sistem rujukan puskesmas dan dinkes sesuai prinsip rujukan layanan kesehatan.

Inovasi ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pedesaan dalam penggunaan teknologi informasi secara mandiri. Penggunaan barcode berdasar nomor rekam medik dan tanggal lahir juga memberikan keamanan data bagi pasien. Barcode diberikan kepada masing-masing pendaftar yang telah melakukan pendaftaran dan hanya dapat digunakan satu kali. Pendaftar cukup menunjukkan barcode di layar handphone sesuai print out pada saat mendaftar sehingga mempercepat waktu pendaftaran dan menghindari kesalahan verifikasi data. Dengan kemudahan ini, calon pasien dapat memilih satu sampai tujuh hari sebelum tanggal pemeriksaan yang diinginkan.

Sistem ini dapat direplikasi oleh instansi lainnya khususnya rumah sakit. Terbukti, inovasi ini telah menjadi rujukan beberapa rumah sakit di berbagai daerah. Dengan berbagai manfaat di atas kualitas pelayanan masyarakat meningkat, sehingga 'brand image' RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di mata masyarakat semakin bersinar.

*friendly so that it can be used by all walks of life, with the results of the registration time waiting time to 15 minutes, there is a certain time of registration service, the waiting room becomes comfortable both physical condition and patient/visitor safety, customer complaints decrease from 25.6% 2.4% and public satisfaction increased from 61.65% to 82.13%.*

*Online Penetration is online based. Do not stop at SMS Gateway but proceed with Online Registration. Even in the future will be developed into android-based applications, as well as making bridging with other applications such as with referral system health centers and health centers according to the principle of health care referral.*

*This innovation is also a means of education for rural communities in the use of information technology independently. Barcode usage based on medical record number and date of birth also provide data security for patients. Barcode is given to each registrant who has registered and can only be used once. The registrant simply shows the barcode on the phone screen according to the print out at the time of registration so that it speeds up the registration time and avoids data verification errors. With this convenience, prospective patients can choose one to seven days before the desired date of examination.*

*This system can be replicated by other agencies, especially hospitals. Evidently, this innovation has become the reference of several hospitals in various regions. With various benefits above the quality of public services increased, so 'brand image' RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo in the eyes of society increasingly shines.*



## 2H2 CENTER KERABAT IBU DAN BAYI

### 2H2 CENTER OF MOTHER AND INFANT RELATIVES

45

Dinas Kesehatan,  
Pemerintah Kabupaten Flores  
Timur

Agency of Health,  
East Flores Regency

1 Flores Timur adalah kabupaten kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melaksanakan inovasi 2H2 Center kerabat dan ibu dan bayi sejak 13 september 2010. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2007-2010, yang diakibatkan masih tingginya kehamilan dengan risiko, akses ke fasilitas rujukan sulit, tidak tersedianya data sasaran riil ibu hamil, dan rendahnya kepedulian keluarga dan masyarakat. Roh dari pekerjaan ini adalah melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat baik tokoh agama, aparat desa, maupun keluarga dan masyarakat untuk peduli pada ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir, dengan cara melaporkan data ibu hamil, ibu melahirkan ke 2H2 Center.

Strategi *out of box nya* adalah : mendata sasaran ibu hamil by name, by adress, by case, memasang bendera Revolusi Kesehatan Ibu dan anak berwarna pink di rumah setiap ibu hamil, dipantau setiap saat sampai waktunya melahirkan, jika ada kegawatdaruratan obstetri dan neonatal maka langsung berkonsultasi dengan para dokter obstetri dan kandungan dan dokter anak di RS, tentang penanganan

2 *East Flores is an archipelago districts in East Nusa Tenggara Province (NTT), implementing innovative 2H2 Center relatives and mother and infant since 13 September 2010. This innovation is motivated by the high maternal and infant mortality rate in Kabupaten Flores Timur in the period 2007-2010, which Due to high risk pregnancies, access to difficult reference facilities, unavailability of data on real targets of pregnant women, and low awareness of families and communities. The spirit of this work involves all elements in the community, both religious leaders, village officials, and families and communities to care for pregnant women, mothers and newborns, by reporting data on pregnant women, giving birth to 2H2 centers.*

*The out-of-box strategy is to record pregnant women by name, by adress, by case, putting up a pink and pink child's Revolutionary Health flag at home every pregnant mother, monitored at any time until the time of delivery, if there is an obstetric and neonatal emergency, Consult with obstetricians and obstetricians and peditricians in hospitals, on initial treatment before referral, by phone and or sms, 24-hour consultation service.*

awal sebelum dirujuk, by telepon dan atau sms, layanan konsultasi 24 jam.

Sejak diluncurkan tahun 2010, inovasi ini sudah memantau 24.879 ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir, sebanyak 8.240 kasus rujukan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang dilakukan rujukan secara terencana dan sistematis; jumlah rumah yang terpasang bendera sebanyak 24.879 rumah; memiliki jejaring peduli ibu dan bayi sebanyak 1450 orang.

Keluaran 2H2 Center yang paling berhasil adalah:

1. Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu: 3350 dari 5200 persalinan (64,4%) pada tahun 2009 menjadi 4175 dari 4236 (98,5%) pada tahun 2016;
2. Meningkatnya cakupan penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yaitu: 430 kasus dari 735 kasus (59,1%) pada tahun 2009 menjadi 896 kasus dari 896 kasus (100 %) pada tahun 2016;
3. Menurunnya angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan yaitu: 14 kasus kematian pada tahun 2009 menjadi 5 kasus kematian pada tahun 2016

Point krusial dari inovasi ini adalah: 1) Sistem yang sederhana dan mudah, menggunakan apa yang dimiliki; 2) bahwa program ini pada awalnya dijalankan tidak melalui pendekatan proyek sebagaimana program pemerintah lainnya (semua dihitung berdasarkan biaya, selesai proyek, program berakhir), akan tetapi melalui sebuah pendekatan nilai yang mengangkat harkat dan martabat seorang wanita hamil.

*Since its launch in 2010, this innovation has monitored 24,879 pregnant women, maternal and newborn mothers, as many as 8,240 cases of referral emergency obstetri and neonatal planned referral in a planned and systematic; The number of houses with flags of 24,879 houses; Has a network of care for mothers and babies as many as 1450 people*

*The most successful 2H2 Center outputs are:*

1. *Increased coverage of deliveries at adequate and assisted health facilities  
By competent health personnel: 3350 from 5200 deliveries (64.4%) in 2009 to 4175 from 4236 (98.5%) by 2016;*
2. *Increased coverage of emergency obstetric and neonatal obstetric cases  
Namely: 430 cases from 735 cases (59.1%) in 2009 to 896 cases from 896 cases (100%) by 2016;*
3. *Decrease of maternal mortality rate, mother give birth that is: 14 cases of death in 2009 to 5 death cases in 2016*

*The crucial point of this innovation is :; 1) Simple and easy system, using what is owned; 2) that the program was initially run not through a project approach as other government programs (all calculated on the basis of cost, completion of the project, program ends), but through a value approach that elevates the dignity and prestige of a pregnant woman.*



## AKSELERASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DENGAN MOBILE SI-CAKEP

### ACCELERATED STAFFING SERVICE WITH MOBILE SI-CAKEP

46

Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan SDM,  
Pemerintah Kabupaten Wajo

Civil Service and Human  
Resource Development  
Agency (BKPSDM), Wajo  
Regency

1 Tuntutan dan keinginan masyarakat saat ini adalah kualitas pelayanan ASN sebagai aparatur negara yang lebih optimal dengan kinerja tinggi serta kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam manajemen kepegawaian di Kabupaten Wajo sebelum adanya inovasi ini adalah : (1) Lambatnya pelayanan kepegawaian, (2) Kurangnya akurasi data dan informasi kepegawaian, (3) Belum adanya Sistem Penilaian Kompetensi PNS (4), Belum adanya arsip digital kepegawaian, (5) Belum adanya website dan sistem aplikasi, (6) PNS sering meninggalkan tempat tugas untuk urusan kepegawaian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka hadirilah inovasi di bidang manajemen kepegawaian berupa "Akselerasi Pelayanan Kepegawaian dengan MOBILE SI-CAKEP di Kabupaten Wajo".

Keunikan/kebaruan pada inovasi ini melalui penyampaian naskah-naskah kepegawaian (SK kenaikan pangkat, Surat KGB, Surat Izin/Tugas Belajar, Surat Cuti, dan SK mutasi kepegawaian lainnya) yang diproses secara *online* langsung diantarkan ke tempat kerja PNS. Oleh karena itu inovasi ini telah memberikan nilai positif

2 *Trends and desires of the community today is the quality of ASN (State Civil Apparatus) service as a state apparatus that is more optimal with high performance and awareness towards the improvement of welfare society. Problems faced in personnel management in Wajo Regency before this innovation are: (1) Slow employment service, (2) Lack of accuracy of data and employment information, (3) The absence of Competency Assessment System of civil servants (4), Not yet a digital personnel file, (5) The absence of websites and application systems, (6) Civil servants often leave the place of duty for personnel affairs. To answer the problem, then present the innovation in the field of personnel management in the form of "Acceleration of Employment Services with MOBILE SI-CAKEP in Wajo Regency".*

*The uniqueness of this innovation through the submission of personnel texts (decree of promotion, Salary Increases Letter, License/ Task of Learning, Letter of Leave, and other employment mutation decisions) are processed online directly delivered to the workplace of civil servants. Therefore, this innovation has given positive value in the service of personnel through two approaches, namely: (1) Value Approach,*

dalam pelayanan kepegawaian melalui dua pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan nilai, dengan membangun budaya kinerja melayani ASN dengan baik, supaya ASN tersebut dapat pula memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara berkelanjutan, (2) Pendekatan sistem, dengan membangun *website* dan beberapa aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi sebagai pendukung akselerasi pelayanan kepegawaian dengan penerapan pelayanan *less paper*.

Dampak dari inovasi ini adalah : meningkatnya kinerja pemerintahan yang ditandai pelayanan publik kepada masyarakat lebih baik sebagai akibat dari kepuasan para ASN terhadap pemenuhan hak-hak kepegawaian melalui peningkatan kualitas dan akurasi data kepegawaian, peningkatan semangat kerja melayani dan lebih profesional

dengan komitmen dan integritas yang tinggi, pengaplikasian sistem pelayanan kepegawaian terintegrasi yang berorientasi kepada kemudahan prosedur layanan, peningkatan kepercayaan ASN dalam penerapan *merit system* melalui uji kompetensi promosi jabatan berbasis komputer (*Computerize Based Competency Test*). Dengan inovasi ini Kabupaten Wajo telah menerima penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik II Nasional pada tahun 2015 dari BKN, pada tahun 2016 sebagai BKD Pengelola CAT Terbaik III Tingkat Nasional dan sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik I Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

*by building a performance culture to serve ASN well, so ASN can also provide good service to society continuously, (2) Approach system, by building website and some application of service personnel integrated as supporting acceleration of service personnel with application of less paper service.*

*The impact of this innovation is: improved government performance marked public service to the community better as a result of the satisfaction of the ASN to the fulfillment of employment rights through improving the quality and accuracy of employment data, increasing morale and more professional work with high*



*commitment and integrity, Deployment of integrated personnel service system oriented to the ease of service procedures, increasing the confidence of ASN in the application of merit system through computerized based competency test (CBCT). With this innovation, Wajo Regency has received the second best of Human Resources Officer award in 2015 from BKN, in 2016 as BKD best CAT (Computer Assisted Test) manager three national level and as the first Best Civil Service Manager of South Sulawesi Province Level.*



## ALARM PERSALINAN

### ALARM BIRTH

47

UPTD Puskesmas Kerinci Kanan, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Siak

UPTD Community Health Center of Kerinci Kanan, Agency of Health Siak Regency

1 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak merupakan wilayah kerja UPTD Puskesmas Kerinci Kanan dengan luas wilayah 128,66 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari atas 12 desa dengan jumlah penduduk 22.047 jiwa tahun 2016 yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Tingkat kunjungan ibu hamil setiap tahun cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 yaitu 359/100.000 KH.

Angka kematian ibu di Provinsi Riau tahun 2014 sebanyak 124,5/100.000KH (profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2014).

Angka kematian ibu di Kabupaten Siak tahun 2016 sebanyak 77/100.000KH, AKB Kabupaten Siak 2016 5/1000 KH (profil Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2016)

Jumlah kematian ibu dan bayi karena persalinan di UPTD Puskesmas Kerinci Kanan pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak ditemukan kematian ibu, jumlah kematian bayi

2 Kerinci Kanan Sub-district in Siak District is a working area of Technical Implementation Unit (UPTD) of Kerinci Kanan Community Health Centre which is 128,66 KM<sup>2</sup> wide that consisted of 12 villages and the total population was 22.047 people in 2016, the majority of people work as farmers. The visits of pregnant women tends to increase as the population of people grow in every year.

Based on a Health Demography Survey in 2012, Indonesia's maternal mortality rate is still high. It showed 359/100.000 KH.

Maternal mortality rate in Riau Province in 2014 was 124,5/100.000 KH (Riau Province Health Department's profile, 2014).

Maternal mortality rate in Siak District in 2016 was 77/100.000 KH, AKB Siak District 2016 5/1000 KH (Siak District Health Department, 2016).

There was no maternal mortality that occurred during labor found in UPTD of Community Health Centre of Kerinci Kanan Sub-district in 2014, 2015, and 2016. Neonatal mortality rate

pada tahun 2014 berjumlah 8 orang, tahun 2015 berjumlah 7 orang dan tahun 2016 berjumlah 4 orang dimana jumlah kematian ini masih dibawah angka nasional yaitu 32/1.000 AKH. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu 3 T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat merujuk, Terlambat mendapatkan tindakan di pelayanan) dan 4 TERLALU (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu sering dan Terlalu rapat). Beberapa program telah dilaksanakan seperti MDG'S dan SDG'S namun belum dapat menurunkan kematian ibu dan bayi secara signifikan hal ini disebabkan belum ada sistem yang baik.

Sebelum program inovasi Alarm Persalinan diterapkan masih ada ibu hamil yang luput dari pemantauan bidan desa sehingga terjadi berbagai macam komplikasi dan penanganan yang tidak tepat yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi karena persalinan.

Setelah program inovasi Alarm Persalinan diterapkan cara kerja petugas kesehatan menjadi terarah dan sistematis sehingga seluruh ibu hamil terpantau secara optimal melalui aplikasi ini.

Dengan inovasi Alarm Persalinan jumlah kasus kematian ibu dan bayi dapat ditekan sehingga terjadi penurunan AKI dan AKB di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Disamping itu kasus-kasus ibu bersalin dapat terhindar dari keterlambatan penanganan persalinan. Inovasi ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil dan bersalin.

*in 2014 was 8 people, neonatal mortality rate in 2015 rate was 7 people and neonatal mortality rate in 2016 was 4 people, in which this number of death is still under national number, that is 32/1.000 KH. It is occurred because of 3T (Terlambat mengambil keputusan/ Too late in making decisions, Terlambat merujuk/Too late to come to the healthcare facilities, Terlambat mendapatkan tindakan di pelayanan/Too late in getting healthcare services) and 4T (Terlalu muda/Too young, Terlalu tua/Too old, Terlalu Sering/Too often and Terlalu rapat/Too close). Some programs have been implemented such as MDG'S and SDG'S but the maternal and neonatal mortality rate doesn't show a decline significantly yet. It's because there's no system that could cover this problem.*

*Before the innovation applied, there was pregnant mothers who out of midwife monitoring, so there was so many complications and improper treatments occurred which causes maternal and neonatal mortality due to childbirth.*

*After the innovation applied, the way officers work be directed and systematic and all pregnant woman are monitored optimally.*

*Through the innovation of alarm of childbirth, maternal and neonatal mortality rate can be reduced in Kerinci Kanan Sub-district, the quality of services of pregnant woman and maternity will be improving as the problems associated with them can be prevented.*



## ANTREAN REGOL

### REGOL QUEUE

UPTD Puskesmas Kemusu II  
Dinas Kesehatan, Pemerintah  
Kabupaten Boyolali

UPTD Community Health  
Center of Kemusu II  
Agency of Health,  
Boyolali Regency

48

1 Pelayanan prima, bermutu dan paripurna adalah visi dari Puskesmas Kemusu II Kabupaten Boyolali. Dalam hal peningkatan pelayanan usaha kesehatan perorangan, titik tolak pertama adalah pelayanan di loket pendaftaran. Meskipun pelayanan loket pendaftaran di Puskesmas Kemusu II masih dalam penilaian baik menurut SPM (Standart Pelayanan Minimal) Kabupaten Boyolali, namun kadang terjadi juga penumpukan antrian pasien pada keadaan tertentu. Misalnya : Jam sibuk (08.00-10.00), Pasaran (Wage dan Legi), setelah libur, dan lain-lain.

Kelompok pasien dengan disabilitas, Lanjut usia, ibu hamil, maupun pasien dengan kondisi fisik yang lemah menjadi subyek yang paling terdampak merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Hal ini terjadi karena Puskesmas Kemusu II hanya mempunyai 1 orang staf yang bertugas di loket pendaftaran. Letak geografis wilayah kerja yang cukup luas dengan infrastruktur jalan yang kebanyakan rusak, jauh dari perkotaan, jauh dari rumah sakit rujukan menjadi faktor lain yang harus dihadapi.

2 *First rate service, plenary and certifiable are visions of Puskesmas Kemusu II regency of Boyolali. In the case of improve the service of individual health effort, first starting point is serve in registration counter. Though the service of registration counter in Puskesmas kemusu II still in assessment of SPM good according (Minimum Standart Service) regency of boyolali, but sometime also happened pill up of patient queue in the certain situation. For example : Busy hours (08.00-10.00), Market day in java days (Wage and Legi), after holiday, and others.*

*Group of patients with disabilities, elderly, Pregnant mother, as well as patients with weak body being the most affected subjects that feel uncomfortable with the condition. This matter happened because Kemusu II Public Health Center ( puskesmas) has only 1 staff on duty at registration counter. The geographical location of the working area is large enough with most broken road infrastructure, far from urban areas, away from referral hospitals to be another factor to be faced.*

*Online registration in Kemusu II Public Health Center is different from others due to some of*

Pendaftaran online di Puskesmas Kemusu II berbeda dengan yang lain karena beberapa hal berikut :

Pendaftaran dapat dilakukan dari perangkat apapun (PC, Laptop, Android, ios) yang terkoneksi internet tanpa harus download program apapun terlebih dahulu, karena fitur pendaftaran online ada di website resmi puskesmas.

Selain dapat mendaftar secara online, pasien juga dapat melihat dan memantau antrian yang ada di semua pelayanan puskesmas pada hari tersebut real time

Fasilitas ini dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja, baik pasien yang sudah terdaftar dalam database puskesmas maupun yang belum. Dapat dilakukan dari mana saja yang sudah ada jaringan internetnya.

Khususnya untuk pendaftar, inovasi ini dapat dipakai dan dimanfaatkan sebagai acuan perkiraan kedatangan ke puskesmas sehingga pasien tidak akan lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan karena sudah mengetahui antrian pasien di pelayanan kesehatan.

Sistem regulasi ini terintegrasi didalam simpus yang sudah bridging dengan Pcare BPJS yang memungkinkan kedepan bisa diintegrasikan dengan rumah sakit sehingga rujukan dapat langsung terintegrasi juga.

*the following:*

*Registration can be done from any devices (PC, Laptop, Android, ios) that connected to the internet without downloading any program first, because the online registration feature is on the official website of puskesmas.*

*Besides being able to register online, patients can also see and monitor the queue at all public health center services on that day in real time.*

*This facility can be accessed and used by anyone, whether the patient has been registered in the data base of the puskesmas or not. it can be taken from whichever the internet network.*

*Especially for applicants, this innovation can be used and used as a reference for the expected arrival of the puskesmas so that patients will not wait so long to get service because they already know the queue of patients in health services.*

*This regul /gate system is integrated in the brushing sync with Pcare BPJS which allows the future to be integrated with the hospital so that the referral can be directly integrated as well.*



## AYUNDA SI MENIK (AYO TUNDA USIA MENIKAH)

### AYUNDA SI MENIK (COME ON, DELAY AGE MARRIED)

# 49

UPTD Puskesmas Gedangsari  
II, Dinas Kesehatan  
Pemerintah Kabupaten  
Gunungkidul

UPTD Community Health  
Center of Gedangsari II,  
Agency of Health, Gunungkidul  
Regency

1 Perkawinan pada usia anak menjadi salah satu permasalahan di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Kasus ini menjadi mata rantai permasalahan yang berkepanjangan dan bisa mengakibatkan *loss generation* atau hilangnya generasi yang berkualitas.

Pernikahan pada usia anak tersebut dipicu oleh beberapa hal di antaranya:

- 90% dari kasus pernikahan pada usia anak disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan. Perkembangan teknologi komunikasi dan pergaulan bebas yang tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman anak terkait reproduksi sehat menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus kehamilan tidak diinginkan;
- Kondisi sosial budaya (masyarakat merasa bangga bila anaknya cepat menikah) serta keterbatasan ekonomi; dan
- Kurangnya komitmen bersama antara pemangku kepentingan.

Adanya pernikahan pada usia anak memicu kerentanan ibu hamil dan bayi (resiko tinggi).

Upaya yang dilakukan untuk memutus rantai permasalahan tersebut meliputi:

2 *Marriage at the early age becomes one of the problems in Gedangsari Sub District, Gunungkidul Regency. This case becomes a long-term chain of problem and can lead to loss of quality generation.*

*Marriage at the early age is triggered by several things, including:*

- *90% early marriage case is caused by unwanted pregnancies. The development of communication technology and transgressive social interactions that is not accompanied by the improvement of children's understanding of healthy reproduction becomes one of the triggers of unwanted pregnancy cases;*
- *Socio-cultural conditions (people feel proud if their children get married quickly) and economic limitations; and*
- *Lack of shared commitment among stakeholders.*

*The existence of marriage at the early age triggers the vulnerability of pregnant women and infants (high risk).*

*Efforts made to break the chain of issues include:*

1. *There are mutual agreements (MOUs) and*

1. Ada kesepakatan bersama (MOU) dan kerjasama lintas sektor untuk menangani masalah sosial yang ada di Kecamatan Gedangsari yang diperkuat dengan deklarasi dukuh.
2. Peningkatkan pemahaman reproduksi sehat dilaksanakan dengan: pembelajaran siswa melalui game interaktif; pembentukan *peer conselor* PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) di sekolah, konsultasi kesehatan remaja melalui media sosial; klinik konsultasi kesehatan remaja di Puskesmas; peningkatan pemahaman masyarakat melalui para kader.
3. Membuat ajang *Gedangsari Award* untuk memberi penghargaan bagi Desa yang angka pernikahan pada usia anak 0 (nol).
4. Meningkatkan kapasitas remaja melalui: peningkatan keterampilan di antaranya pendirian SMK jurusan batik dan lab batik di setiap SD/SMP (bekerja sama dengan PT ASTRA); pemberdayaan pemuda dalam mengelola potensi pariwisata, seni, dan budaya serta usaha ekonomi produktif.
5. Menginisiasi adanya regulasi pada Pemerintah Kabupaten tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
6. Kampanye melalui lagu khusus yang diciptakan berjudul "AYUNDA SI MENIK".

*cross-sector cooperation to deal with social issues in Gedangsari sub-district, reinforced by dukuh declarations.*

2. *Improving understanding of healthy reproduction implemented by: learning of students through interactive games; The establishment of peer counselors PKPR (Youth Health Care Service) in schools; consultation of adolescent health through social media; Teenage health consultation clinic at Puskesmas; Increasing understanding of the society through the health cadres.*
3. *Create a Gedangsari Award to reward the Village that having 0 (zero) number of early marriages.*
4. *Increasing the capacity of adolescents through: skills improvement including the establishment of SMK batik majors and batik lab in each elementary / junior high school (in cooperation with PT ASTRA); Empowerment of youth in managing tourism, artistic, and cultural potential as well as productive economic enterprises.*
5. *Initiate the existence of regulation on the Government of Gunungkidul Regency about Prevention of Early Marriage.*
6. *Campaign through a special song created entitled "AYUNDA SI MENIK".*





## **BANG MUDA (BANGKA MUDAH DAPAT AKTA) SOLUSI LAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN**

### **BANG MUDA (BANGKA MUDAH DAPAT AKTA) SOLUTION FOR BIRTH AND DEATH CERTIFICATES**

# 50

Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Pemerintah Kabupaten Bangka

*Population and Civil  
Registration (Dukcapil) Office  
Bangka Regency*

**I** Jarak wilayah merupakan faktor penting dalam pembuatan akta. Bagi penduduk pedalaman jarak jauh untuk mengurus akta sangat menjadi kendala. Permasalahan yang sama juga dialami mayoritas masyarakat Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka terdiri 8 kecamatan, 60 desa dan 9 kelurahan, luas wilayah 2.950,68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 305.158 jiwa dengan persebaran penduduk 68,49% berada di 7 kecamatan diluar ibukota Kabupaten Bangka.

Untuk mengatasi permasalahan, Dinas Dukcapil menyusun strategi dengan menerapkan asas Stelsel Aktif, muncullah inovasi "BANG MUDA" (Bangka Mudah Dapat Akta) yaitu Layanan pro aktif jangkau warga berbasis kombinasi Informasi Teknologi (IT) dalam penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sinergi bersama Bidan Desa/Kelurahan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Kantor Camat se Kabupaten Bangka.

Keunikan inovasi ini adalah Jangkau warga secara berkala dari petugas dinas, kombinasi sistem layanan online dan offline, adanya pembagian zona wilayah serta sistem rute

**E** *Territory distance constitutes as essential factor in getting a certificate. For a distant countryside residents to get a certificate is a big problem. This problem is experienced by the majority Bangka Regency's residents. The Regency of Bangka consists of 8 districts, 9 sub-districts and 60 villages. The total area is 2,950.68 km<sup>2</sup> and the total population is 305,158 peoples, 68.9 % of which reside in 7 districts outside the capital of the regency.*

*To solve the problem, the Population and Civil Registration (Dukcapil) Office of the Regency arranges a strategy by applying principle of active scheme that leads to the creation of "BANG MUDA", acronym of Bangka Mudah Dapat Akta, meaning in Bangka it is easy to get certificate. The BANG MUDA is pro-active service to reach out the residents based on combined Technology Information in the publication of birth certificate citation, death certificate and Family Card in cooperation with sub-district/village midwives, community health centres (Puskesmas), Hospitals and Sub-district Offices in Bangka Regency.*

menuju jaringan loket pelayanan akta. Selain memudahkan penduduk, layanan ini juga mempercepat ketersediaan data penduduk yang akurat. BANG MUDA ikut berkontribusi dalam kinerja Dinas Dukcapil yaitu berupa peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, meningkatkan index kepuasan masyarakat, mendapatkan Zona Hijau Komisi Ombudsman RI serta Juara I Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Inovasi ini telah mendapat dukungan Kelembagaan, Pemanfaatan, Pendanaan, SOP dan Juknis. BANG MUDA sangat mudah direplikasi di seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di Indonesia bahkan dapat diterapkan di berbagai penjuru dunia terutama bagi negara-negara yang mengalami masalah dengan kondisi jarak geografis, keterbatasan anggaran bahkan negara yang mengalami bencana atau krisis.

*The uniqueness of the BANG MUDA innovation is to reach out the residents periodically by officers of the Office, combination of online and offline service systems, zoning of the territory and route system to the certificate service counter network. In addition to facilitating the residents, this service also accelerates the availability of accurate population data. The BANG MUDA also contributes to performance of Dukcapil Office in the form of increasing the coverage of birth and death certificates, the community satisfactory index, obtaining the Green Zone of the Republic of Indonesia's Ombudsman Commission, and the Champion of Performance Evaluation of Population Administration of Bangka Belitung Islands Provincial level Year 2016.*

*This innovation has obtained Institutional, Utilization, Finance, Standar Operating Procedure, and Technical Guidance supports. The BANG MUDA can be easily replicated by Regency/City Dukcapils in Indonesian and even can be implemented in other parts of the world, particularly in countries which have problem with geographical distance condition, budget limitation, and even in countries which are experiencing disasters or crisis.*



## CSR UNTUK RAKYAT

### CSR FOR THE PEOPLE

# 51

BAPPEDA, Pemerintah  
Kabupaten Aceh Barat

District Panning Agency,  
West Aceh Regency

1 Kabupaten Aceh Barat dengan ibukota Meulaboh merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Terdiri atas 12 Kecamatan, 322 Desa dan dihuni 193.791 Jiwa Penduduk. Aceh Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya di sektor Pertambangan.

Sebelumnya banyak perusahaan di Kabupaten Aceh Barat yang belum mau melaksanakan program CSR dengan berbagai alasan. Hal ini berdampak pada penggunaan dana perusahaan menjadi tidak jelas dan sering terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Akibatnya Pelaksanaan program/ kegiatan menjadi tidak terarah dan terpadu serta tidak transparan. Ditambah lagi belum terbangunnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Menetapkan Qanun/Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tentang Peran dan Fungsi masing-masing pihak. Qanun ini dijadikan sebagai solusi dan aturan main Pelaksanaan CSR sehingga

2 West Aceh District with the capital Meulaboh is one of 23 districts/cities in Aceh. Consisting of 12 Sub-districts, 322 villages and 193,791 population. West Aceh District has abundant with natural resources, one of them is in mining sector.

Previously many companies in West Aceh District have not been willing to implement CSR programs for various reasons. This impacts on the use of corporate funds becomes unidentifiable and there is often a conflict between community and the company. As a result, the implementation of the program / activity becomes not directional, integrated and transparent. In addition, coordination and synergy between local governments, companies and other stakeholders has not been established.

Establish Qanun / Regional Regulation No. 10 Year 2015 on Corporate Social and Environmental Responsibility regulates the Roles and Functions of each party. The Qanun used as a solution and the rules of CSR Implementation.

Issuing Bupati's Regulation on Corporate Social and Environmental Responsibility.



mudah ditiru.

Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dibentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) layaknya "DPR" CSR yang berfungsi membahas kegiatan *Corporate Forum for Community Development (CFCD)*.

Sebelum inovasi, jumlah dan pemanfaatan dana CSR tidak jelas, masyarakat tidak percaya kepada perusahaan dan pemerintah daerah, dan hasil penggunaan dana CSR tidak dirasakan. Sesudah inovasi, pencatatan dana jelas dan rencana pemanfaatannya melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lokal lainnya.

*The establishment of a Corporate Social Responsibility and Environment Forum (CSREF) aims to oversee the Corporate Forum for Community Development (CFCD) activities.*

*Before innovation, the number and utilization of CSR funds was unidentifiable, community did not have trust in companies and local governments, and the results of CSR funds were not perceived. After innovation, utilization of CSR funds involved local governments, universities, NGOs, and other local stakeholders.*



## **FAMILY GATHERING TERPADU “SEMAR PATRI” (STRATEGI MENURUNKAN ANGKA READMISI PASIEN PSIKIATRI)**

### **INTEGRATED FAMILY GATHERING ”SEMAR PATRI” (STRATEGI MENURUNKAN ANGKA READMISI PASIEN PSIKIATRI)**

# 52

RSUD dr Loekmono Hadi  
Pemerintah Kabupaten Kudus

RSUD dr. Loekmono Hadi,  
Kudus Regency

**I** Tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per mil atau 1.728 orang. Gangguan jiwa berat terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. (Riset Kesehatan Dasar, 2013).

Data RSUD dr Loekmono Hadi Kudus pada 2014-2015 menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan yang sangat signifikan, (7.028 menjadi 9.102). Dari data itu, pasien mengalami readmission sebesar 25% yang 90%-nya akibat putus obat. Salah satu faktornya kurangnya peran keluarga dalam memberikan perawatan di rumah pasca rawat inap di rumah sakit.

Keterlibatan keluarga terus diberdayakan lewat kegiatan bersama antara Layanan Rawat Inap RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Keluarga melalui Family Gathering Terpadu. Kegiatan tersebut dapat mengetahui masalah atau kesulitan keluarga dalam merawat ODGJ yang berujung penghentian minum obat sepihak baik oleh pasien maupun keluarga.

Untuk mendukung keberhasilan program

**E** *In 2013, the prevalence of severe mental disorders in Indonesia's population is 1.7 per mile or 1.728 people. Severe major mental disorders are in DI Yogyakarta, Aceh, South Sulawesi, Bali, and Central Java. (Basic Health Research, 2013).*

*Data of RSUD dr Loekmono Hadi Kudus in 2014-2015 showed a very significant increase in number of visits, (7,028 to 9,102). From that data, patients experience a 25% readmission of 90% of them due to drug break. One factor is the lack of a family role in providing home care after inpatient at the hospital.*

*Family involvement continues to be empowered through joint activities between RSUD Dr Loekmono Hadi Kudus, People with Mental Disorders (ODGJ) and Families through Integrated Family Gathering. These activities can identify the problem or difficulty of the family in treating ODGJ which cessation of unilateral drug stop by both patient and family.*

*To support the success of the family gathering program in decreasing the rate of readmission, it is necessary compliance of post-hospitalized control, as the basis of information that the pa-*

family gathering dalam penurunan angka readmisi, diperlukan ketaatan kontrol paska rawat inap, sebagai dasar informasi bahwa pasien taat minum obat. Itu bisa dilakukan lewat aplikasi dengan nama eKoTri.

Aplikasi eKoTri (elektronik Kontrol psikiaTri paska rawat inap) menyatu dengan billing system rumah sakit. Mekanisme kerja aplikasi eKoTri adalah: Pasien yang dipulangkan akan diberikan jadwal kontrol rawat jalan, apabila pada jadwal yang telah ditentukan tidak datang kontrol maka aplikasi "eKoTri" akan memberikan informasi kepada Tim Pelayanan Jiwa melalui SMS. SMS yang masuk akan difollow up dengan mengkonfirmasi pada keluarga melalui telepon untuk pemberian edukasi dan motivasi serta alternatif pemecahan masalah akibat tidak kontrol.

Manfaat program Family Gathering terpadu bagi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus antara lain: Angka readmisi pasien menurun; menurunkan pembiayaan yang dikeluarkan rumah sakit; Paradigma rumah sakit yang peduli dengan pasien dan keluarga; Pandangan positif masyarakat bahwa RSUD dr Loekmno Hadi Kudus sangat peduli terhadap pasien dan keluarga.

Sementara itu, benefit yang bisa dirasakan pasien/keluarga adalah pasien mendapatkan pelayanan yang paripurna dan memuaskan; keluarga mendapatkan penghargaan yang tinggi dari rumah sakit, karena ikut dilibatkannya dalam setiap keputusan pelayanan; dan adanya hubungan yang erat dan dekat antara tim pemberi asuhan di bangsal rawat inap jiwa RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan pasien dan keluarga.

*tient is obedient to take medicine. It can be done through an application called eKoTri (elektronik Kontrol psikiaTri paska rawat inap).*

*The eKoTri application (electronic psychiatric control after inpatient care) blends with the hospital's billing system. The working mechanism of eKoTri application is: Patients who are discharged will be given an outpatient control schedule, if on a predetermined schedule does not come control then the application "eKoTri" will provide information to the Mental Services Team via SMS. Incoming SMS will be followed up by confirming to the family over the phone for education and motivation as well as alternative troubleshooting due to no control.*

*The benefit of integrated Family Gathering program for dr. Loekmono Hadi Kudus, among others: Patient readmission numbers decreased; Reduce the cost of the hospital; Hospital paradigms that care about patients and families; The positive view of society that RSUD dr Loekmno Hadi Kudus very care for patient and family.*

*Meanwhile, the benefit that can be felt by the patient / family is the patient gets the full and satisfactory service; Families receive high esteem from hospitals, because they are involved in every service decision; And the close and close relationship between the caregiver team in the inpatient wards of RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus with patient and family*



## IMPLEMENTASI E-VB DI BANYUWANGI

### IMPLEMENTATION OF E-VB IN BANYUWANGI

# 53

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

*Department of Community and Village Empowerment,  
Banyuwangi Regency*

1 Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya juga harus dilakukan secara *comprehensive* didalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Kondisi ini hanya dapat diwujudkan apabila pola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan benar.

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain;

1. Pola perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara parsial;
2. Keterbatasan SDM aparatur pemerintah desa;
3. Administrasi dan tata kelola manajemen keuangan desa yang tidak tertib;
4. Keterlambatan dalam penyusunan laporan.

Hal ini akan sangat berdampak apabila alokasi dana dari Pemerintah Pusat/Daerah berupa dana desa dan Alokasi Dana Desa jumlahnya semakin besar.

Inisiatif pembangunan aplikasi *E-Village Budgeting* sebagai salah upaya untuk membantu memecahkan permasalahan yang

2 *In organizing good village governance, it needs comprehensive steps from many aspects to overcome problems. That condition can be achieved if the organization of planning, budgeting and the accountability report is conducted properly.*

*The main problem that commonly exists in the village governments at Banyuwangi Regency are:*

1. *The arrangement of development plan is still done partially which means the village government arrange the development plan only to overcome the problems at main time (short term). They don't have goal to be achieved in the future;*
2. *The low capability of village officers' skill;*
3. *The financial administration management which is arranged manually and disorderly;*
4. *The lateness on delivering financial accountability report*

*If those problems don't be handled seriously, they will affect to the acceleration of the village development especially nowadays when the village become one of national development priority that receive huge financial budget for villages's development. If the village government cannot manage well, that will cause many problems.*

ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara substantive EVB adalah merupakan sarana untuk membantu desa dalam pengadministrasian hasil perencanaan, penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa yang berkelanjutan dan disisi lain memudahkan Pembina desa di atasnya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan keuangan desa.

Penerapan aplikasi EVB ini, dalam upaya juga untuk menyederhanakan proses mulai dari perencanaan desa sampai kepada proses pelaporan oleh pemerintah desa, karena efektivitas, efisiensi dan tertib anggaran pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang didasarkan pada hasil musyawarah desa serta penyederhanaan berbagai program kegiatan di desa dapat diarahkan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Manfaat lain yang ingin dibangun dengan adanya aplikasi EVB, terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, yang berdampak pada kemauan yang besar masyarakat untuk berperan aktif dalam pemanfaatan anggaran desa semaksimal mungkin. Yang paling penting adalah sistem E-VB ini merupakan sistem terbuka (*open source*) yang bisa direduklipikasi oleh daerah lain sehingga sistem ini bisa diaplikasikan pada desa-desa di seluruh Indonesia, tidak hanya desa-desa di Kabupaten Banyuwangi

*Based on the problems above, the community development and village service build an application that is called E-Village Budgeting (E-VB). E-VB is a system that manage the arrangement of development plan, the financial administration and the accountability report which can be seen online. This system also simplify the programmes and activities which are directed to support the achievement of Regency's development goal and also national. By using this system, the arrangement of development plan, the financial budget administration and the accountability report can be done efficient and effectively. This system also help the head of district (Camat) as the adviser of villages in monitoring and controlling the use of village budget.*



*However, the main goal of building E-Village Budgeting System is the transparency and the accountability of village budgeting management so that it can increase the trust of villagers to the village government and in the end can make the society play a role in building their villages to be more prosperous and independent. The most important is the E-VB system is based on open source system which means this system can be reduplicated so that it can be applied to village all over Indonesia not only Banyuwangi Regency.*



## INOVASI EDUCATION HOTEL AND TRAVEL (EDOTEL & TRAVEL)

### EDUCATION OF HOTEL AND TRAVEL (EDOTEL & TRAVEL)

# 54

SMKN 2 Pinrang  
Dinas Pendidikan  
Pemerintah Kabupaten Pinrang

SMKN 2 Pinrang  
Agency of Education  
Pinrang Regency

**I** Meski kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Pinrang semakin meningkat, banyak tempat wisata yang tidak dibarengi dengan fasilitas menginap (hotel). Selain itu, permintaan jasa perjalanan wisata (travelling) belum dikelola dengan baik.

Dari latar belakang itu, SMKN 2 Pinrang memiliki ide untuk membangun dan membentuk usaha Akomodasi dan Tiket Perjalanan. Tujuannya membantu warga masyarakat dalam masalah penyiapan jasa penginapan dan jasa tiket perjalanan.

Konsep interior kamaryang baik dan lingkungan yang kondusif membuat pengunjung sangat menikmati, sehingga umumnya pengunjung sangat menginginkan konsep Edotel and Travel SMKN 2 Pinrang direplikasi di daerah mereka.

Pada tahun 2014 kepala sekolah SMKN 2 Pinrang menetapkan pendirian Edotel & Travel sebagai satu unit usaha produksi. Itu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang susunan pengurus unit produksi No. 412/042/SMKN2/2014 Tanggal

**E** *Although tourism activities in Pinrang District is increasing, many tourist attractions are not accompanied by hotel facilities. In addition, the demand for travel services (traveling) has not been properly managed.*

*From that background, SMKN 2 Pinrang has the idea to build and form the business of Accommodation and Travel Ticket. The goal is to help citizens in the preparation of lodging and travel ticket services.*

*The concept of a good room interiors and environment is conducive make visitors really enjoy, so that generally visitors really want the concept of Edotel and Travel SMKN 2 Pinrang replicated in their area.*

*In 2014 the principal of SMKN 2 Pinrang established the establishment of Edotel & Travel as a production business unit. It was followed up by Principal Decree on the composition of the management of the production unit. 412/042 / SMKN2 / 2014 dated February 5, 2014. While the establishment of its own production unit based on Government Regulation No.29 of 1990 article 2, paragraph 2, in which the vocational second-*

5 Februari 2014. Sedangkan pembentukan unit produksi sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 1990 pasal 2 ayat 2 yang di dalamnya mengatur sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja.

Sebelum adanya inovasi Edotel, siswa melakukan praktek di hotel lain dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Selain itu, untuk melakukan pelatihan reservasi dan tiketing sebelumnya siswa harus mencari travel yang memiliki fasilitas memadai dan baik untuk digunakan sesuai tuntutan materi pembelajaran. Mereka juga perlu menyewa tempat lain dan penggunaan ruangan kelas dengan kapasitas terbatas untuk mengadakan acara atau pelatihan. Dan yang penting, sangat sulit mendapatkan informasi akurat mengenai tempat dan informasi harga menyangkut penginapan dan daerah kunjungan objek wisata.

Tentu saja, dengan pengembangan inovasai Edotel and Travel SMK Negeri 2 Pinrang, berbagai kendala tersebut bisa diatasi dan bahkan peserta didik bisa mengembangkan kompetensi lainnya seperti layanan relaksasi (Massage) sebagai daya tarik khususnya bagi guru yang secara tidak langsung meningkatkan layanan jasa di Edotel and travel SMK Negeri 2 Pinrang.

*ary schools become the workforce.*

*Prior to the innovation of Edotel, students practice at other hotels by traveling far enough. In addition, to conduct training reservations and ticketing before students should find a travel that has adequate facilities and good to use according to the demands of learning materials. They also need to rent another place and use the classroom with limited capacity to hold events or training. And importantly, it is very difficult to get accurate information about the place and price information concerning lodging and tourist visit areas.*

*Of course, with the development of Edotel and Travel Innovation SMK Negeri 2 Pinrang, the various obstacles can be overcome and even learners can develop other competencies such as relaxation services (Massage) as an attraction especially for teachers who indirectly improve services in Edotel and travel SMK Negeri 2 Pinrang.*



## LASITER AMB (LAYANAN TRANSPORTASI TERPADU ANGKUTAN MASYARAKAT BINTUNI)

### LASITER AMB (INTEGRATED TRANSPORTATION SERVICE OF BINTUNI PEOPLE'S TRANSPORTATION)

# 55

UPT Angkutan Masyarakat Bintuni, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

UPT Public Transport Bintuni, Department of Transportation, Teluk Bintuni Regency

1 Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat terbentuk sejak tahun 2003 memiliki luas wilayah 18.637 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 24 Distrik dan 265 Kampung. Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah terbuka, karena dapat diakses melalui jalur darat (dari Kabupaten Manokwari), laut (dari Kota Sorong) dan udara (dari Sorong dan Manokwari). Selain itu Teluk Bintuni juga terkenal sebagai daerah yang paling aman di Provinsi Papua Barat serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kondisi inilah yang mendorong tingginya laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2003 tercatat sekitar 38 ribu jiwa. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 59.167 jiwa atau meningkat sekitar 55,7 %. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, maka ketersediaan alat transportasi menjadi kebutuhan vital.

Sejak tahun 2003 hingga 2014, alat transportasi alternatif yang masih menjadi andalan

2 *Bintuni Bay Regency of West Papua Province was formed since 2003 has an area of 18 637 km<sup>2</sup> which consists of 24 districts and 265 villages. Bintuni Bay is one of the open areas, because it can be accessed by land (from Manokwari District), sea (from Sorong City) and air (from Sorong and Manokwari). In addition, Bintuni Bay is also known as the safest area in West Papua Province and has abundant natural resources potential. This condition encourages the high rate of economic growth and population growth.*

*Based on data from the Central Bureau of Statistics, the population of Bintuni Bay Regency in 2003 was recorded at 38.000. But by 2015 the number of people in Bintuni Bay Regency reaches 59.167 people or increase about 55.7%. With the increasing number of population and economic activity, the availability of transportation becomes vital requirement.*

*Since 2003 to 2014, the main alternative transportation that mostly use is motorcycle taxi. But this kind of transportation is considered inefficient. Beside limited capacity, motorcycle taxi also charge expensive tariff. For*



masyarakat pada saat itu adalah ojek. Namun alat transportasi alternatif tersebut dinilai tidak efisien. Selain daya muat yang terbatas, ojek juga menerapkan tarif yang mahal. Untuk rute Pasar sentral Bintuni ke kantor Bupati dengan jarak sekitar 30 Km, tarif ojek yang dikenakan sebesar Rp. 100.000,- per penumpang. Sementara untuk rute Pasar Sentral ke KOMPI E dengan jarak sekitar 15 Km, tarif ojek yang dikenakan sebesar Rp. 50.000,- per penumpang. Sementara dari sisi keamanan, angkutan ojek dinilai kurang aman, karena rawan terjadi kecelakaan apalagi jika dikendarai dengan cara ugal-ugalan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah mulai menggagas alat transportasi publik yang murah, aman dan nyaman untuk masyarakat. Alat transportasi tersebut diberi nama Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) dan mulai resmi beroperasi pada pertengahan Maret tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, Transportasi Publik AMB dikelola langsung oleh UPT (unit pelaksana teknis) AMB yang berada dibawah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk saat ini layanan transportasi terpadu AMB melayani dua Distrik, yaitu Distrik Bintuni dan Manimeri yang merupakan kawasan pemerintahan dan perdagangan (bisnis).

*Bintuni Central Market to the Regent's Office Route with distance about 30 Km, motorcycle taxi will be charged at Rp. 100.000,- per passenger. As for Bintuni Central Market to KOMPI E Route with a distance about 15 Km, motorcycle taxi will be charged at Rp. 50.000,- per passenger. While in terms of security, motorcycle taxi is considered less safe, because prone to accidents especially if driven recklessly.*

*Seeing these conditions, local governments began to initiate public transportation that is affordable, safe and comfortable for the people. The transportation is named Bintuni People Transportation (BPT) and officially operated in mid-March 2015. In its implementation, BPT Public Transportation is directly managed by TIU (Technical Implementation Unit) of BPT under the Department of Transportation, Informatics and Communications of Bintuni Bay Regency.*

*To date, BPT Integrated Transportation Service serves two districts, Bintuni and Manimeri districts, which are government and trade (business) areas.*



## LAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE DAN LAYANAN IZIN 3 JAM

### ONLINE LICENSING SERVICE AND 3 HOUR LICENSE SERVICE

56

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pemerintah Kabupaten  
Kebumen

Department of Investment and  
One Stop Integrated Service  
Kebumen Regency

1 Kabupaten Kebumen terus berbenah dalam menyelenggarakan perizinan dengan komitmen *Kebumen pro Investasi*. Proses pelayanan 42 jenis izin yang didelegasikan pada DPMTSP Kabupaten Kebumen masih kurang optimal dengan masalah utama: (1) Pelayanan perizinan masih manual belum secara elektronik/online; (2) Proses perizinan dengan waktu lama (sampai dengan 15 hari); (3) Formulir permohonan perizinan yang masih rumit dan sulit diakses; (4) Pelayanan perizinan yang masih rawan "pungutan" tidak resmi; (5) Prosedur penerbitan izin yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

Kebijakan Ekonomi Tahap II Presiden Jokowi untuk memberikan Layanan Izin Investasi dalam waktu 3 jam, membuat DPMTSP Kabupaten Kebumen ikut berbenah, dengan berinovasi dengan pelayanan izin secara online dan layanan izin secara 3 jam. Dalam hal ini secara kreatif, merupakan bagian dari pembenahan pelayanan perizinan, pemangkasan waktu 14 jenis izin yang semula sampai 15 hari penyelesaian, sekarang dapat dilayani secara 3 jam. Dalam penerapannya, dalam jaringan/ daring (*online*) melalui sistem

2 *Kebumen regency continues to improve its licensing practices with Kebumen pro Investasi commitment. The service process of 42 types of permits delegated to DPMTSP of Kebumen Regency is still less than optimal with the main problems: (1) Licensing service is still manual not electronic / online; (2) Licensing process with long time (up to 15 days); (3) Application forms for licenses that are still complicate and difficult to access; (4) licensing services that are still prone to unofficial "levies"; (5) Procedures for issuing permits that have not fully met the standards.*

*The Economic Policy Phase II of President Jokowi which is to provide Investment Permit Service within 3 hours, make DPMTSP of Kebumen Regency to clean up, by innovating with online permission service and permit service in 3 hours. In this case, creatively, part of revamping the licensing service, cutting down the 14 types of permits originally to 15 days of completion, now can be serviced by 3 hours. In its application, in the network / online (online) through the licensing information system "SIPERI" on the website namely: [perizinan.kebumenkab.go.id](http://perizinan.kebumenkab.go.id).*

*The Impact of The 3-hour Licensing Services*

informasi perizinan "SIPERI" pada *website* yaitu: [perizinan.kebumenkab.go.id](http://perizinan.kebumenkab.go.id).

Dampak Layanan Perizinan 3 jam antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan; (2) Aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat yang mengajukan Layanan Perizinan 3 jam mendapat kepastian akan besarnya biaya, singkatnya waktu dan mudahnya prosedur; (3) sumberdaya pelayanan (menghemat biaya operasional perkantoran, tenaga, waktu, dokumen).

Jumlah pemohon izin di DPMPSTSP Kab. Kebumen pada tahun 2015 adalah 5,371 pemohon, sedangkan untuk Tahun 2016 mencapai 7,034 pemohon izin. Realisasi Investasi yang tercapai yaitu pada Tahun 2015 mencapai Rp 324.436.112.069,00 dan Tahun 2016 mencapai Rp 406.971.636.52400.

Pembelajaran yang dapat diperoleh dari inovasi ini adalah (1) Perubahan Sistem dan budaya pelayanan, bahwa apapun bentuk pelayanan tetap berorientasi pada kepuasan masyarakat; (2) Perubahan Komitmen dan sinergitas, adanya semangat untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan; (3) Publikasi dan sosialisasi, diperlukanya publikasi melalui berbagai media baik dalam bentuk massal, per-kelompok masyarakat maupun personal.

Layanan Perizinan 3 Jam saat ini sedang direplikasikan secara luas dan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen dan segenap lapisan masyarakat melalui berbagai media desminasi baik media massa (cetak maupun elektronik) serta pertemuan langsung dalam berbagai sosialisasi dan pengarahan terkait materi pelayanan perizinan.

*include: (1) Improving the quality and quantity of services; (2) Accessibility of services for the people who apply for the 3-hour Licensing Service have certainty of the cost, the shortness of time and the easy procedure; (3) service resources (saving the operating costs of offices, personnel, time, documents).*

*The Number of permit applicants in DPMPSTSP of Kebumen Regency in 2015 was 5,371 applicants, while for the Year of 2016 reached 7,034 applicants permit. The realization of investment in the year of 2015 reached Rp 324.436.112.069,00 and in 2016 reached Rp 406.971.636.52400.*

*The Lessons to be gained from this innovation are (1) System and service culture changes, that any form of service remains oriented towards community satisfaction; (2) Changes in Commitment and Synergy, the spirit to improve the quality of licensing services; (3) Publication and socialization, publication required through various media either in bulk form, per-community or personal group.*

*The 3-Hour Licensing Service is currently being replicated widely and simultaneously throughout Kebumen Regency and all levels of society through various media desminasi both mass media (print and electronic) and direct meetings in various socialization and direction related to licensing service materials*



## MODEL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) MELALUI SISTEM ELEKTRONIK VOTING YANG MENGGUNAKAN KTP ELEKTRONIK, KK, DAN AKTA BERBASIS NIK

### MODEL OF VILLAGE HEAD SELECTION (PILKADES) THROUGH VOTING ELECTRONIC SYSTEM USING ELECTRONIC IDENTITY CARD, FAMILY CARD, AND NIK BASED CERTIFICATE

57

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pemerintah Kabupaten  
Batang Hari

Population Service and Civil  
Registration  
Batang Hari Regency

1 Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Telah Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sebanyak 32 Desa Di Delapan Kecamatan Dengan Cara e-Voting Yang Menggunakan KTP-Elektronik, KK, dan Akta Capil Berbasis NIK yang Dimulai Prosesnya Tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 28 Juli 2017. hal ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan dinilai berhasil dan sukses oleh banyak kalangan mulai dari Kemendagri, BPPT, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Batang Hari, LSM, Media dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. hal ini sebagai bentuk solusi inovasi pelayanan publik untuk mengatasi dan memudahkan kehidupan berdemokrasi dalam memilih pemimpin Kepala Desa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari secara teknis yang melatar belakangi diterapkannya pemilihan kepala desa melalui sistem e-Voting dengan menggunakan KTP-elektronik, KK, Akta Berbasis NIK yang mempunyai keunikan tersendiri, dan baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, seiring berjalannya penerapan di berlakukannya kebijakan Nasional KTP-elektronik, KK SIAK, dan Akta Kelahiran SIAK berbasis NIK yang telah

2 The government of Batang Hari Regency of Jambi Province did Village Head Elections simultaneously as much 33 villages in eight subdistricts by e-Voting systems using ID Cards-electronic, KK and Deeds of Civil Registration based on Family Parent Numbers which implemented the process on February 2<sup>nd</sup> 2017 to July 28<sup>th</sup> 2017. This is the first time implemented in Indonesia and considered successful by many circles from The Ministry of Internal Affairs, BPPT, Member of People's Legislative Assembly, Regional Legislative Assembly, Civil Society Organization, Media and Public figures. It is as a form of public service innovation solution to overcome and facilitated democratic life in choosing Village Head.

Population Service and Civil Registration Batang Hari Regency technically the background has applied Village Head Elections through e-Voting systems using ID Cards-electronic, KK and Deeds based on Family Parent Numbers have its own uniqueness, and the first time implemented in Indonesia, as the implementation of national policies applies ID Cards-electronic, KK SIAK, and Birth Certificate SIAK based on Family Parent Numbers which

melahirkan Database kependudukan yang lebih akurat sehingga daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) berbasis NIK yang unik bagi setiap penduduk wajib KTP yang dikenal dengan Single Identity number (SIN) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

Teknik pemilihan Kepala Desa e-Voting dengan menggunakan KTP-elektronik merupakan pertemuan tiga aspek yaitu aspek hukum, Aspek Efisiensi, dan aspek demokrasi artinya kepastian hukumnya terpenuhi disamping menjalkan kehidupan berdemokrasi, teknik e-Voting yang menggunakan KTP-elektronik sangat efisien dari segi biaya dan waktu, hemat biaya hingga mencapai 70% hemat waktu hanya beberapa menit pada saat penutupan TPS sudah dapat diketahui hasilnya siapa yang jadi pemenang, hitungan suara secara otomatis. Dampak teknik e-Voting menggunakan KTP-elektronik juga dapat dirasakan yaitu menghindarkan dari konflik para pendukung pasangan calon kepala desa sehingga lebih terjamin keamanannya.

Dengan penerapan teknologi pemilihan kepala desa sistem e-Voting dengan menggunakan KTP-elektronik akan terus dilanjutkan dalam pemilihan kepala desa berikutnya di Kabupaten Batang Hari. Yang saat ini telah diberlakukan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa. dari Peraturan Bupati Tentang Pemilihan Kepala Desa e-Voting yang menggunakan KTP-elektronik

*has spawned a population database is more accurate so that the list of temporary elections and electoral lists remain based on Family Parent Numbers which is uniqueness for each resident shall be ID Cards which is known Single Identity Number that has been mandated in Constitution Number : 23 in 2006 is About Population Administration and Number : 24 in 2013 is About Changes to Constitution number : 23 in 2006 is About Population Administration.*

*Village Head Elections through e-Voting systems using ID Cards-electronic technique is meeting the two poles are democraton pole and efficiency pole its means beside running democraton life, e-voting systems using ID Cards-electronic technique is very efficient in terms of cost and time, cost effective to reach 70% and saves only a few minutes at the time of voting place closing can already be known results who be the winner, counting votes automaticcaly. Impact of Village Head Elections through e-voting systems using ID Cards-electronic technique is also can be felt to avoiding conflict from supporters of candidate pairs so it is more assured.*

*With the application of Village Head Election technology e-Voting systems using ID Cards-electronic will continue in the next Village Head Elections inBatangHari Regency. Which is currently from regent regulation about Village Head Elections through e-voting systems using ID Cards-elektronik is being completed in draft local regulations in PROLEKDA Batang Hari Regency.*



## MP-TGR (Majelis Pertimbangan - Tuntutan Ganti Rugi)

### MP-TGR (Assembly Considerations of Indemnification)

58

Badan Keuangan,  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Financial Agency,  
Gorontalo Regency

**I** Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MP-TGR) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dilatarbelakangi oleh tiga masalah mendasar yang sudah membentuk siklus khas, yakni; *Pertama*, tidak jelasnya regulasi penyelesaian kerugian negara/daerah; *Kedua*, belum optimalnya format penyelesaian kerugian negara/daerah; dan *Ketiga*, meningkatnya jumlah temuan BPK-RI setiap tahunnya.

Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah oleh MP-TGR dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, sedangkan Pelaksanaan sidang MP-TGR diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

MP-TGR merupakan para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka menyelesaikan kerugian Negara/daerah. MP-TGR berwenang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap

**E** *The establishment of Consideration Assembly of Compensation (MP-TGR) at Gorontalo District Government is motivated by three fundamental problems that have formed a typical cycle, that is: Firstly, the unclear regulations on the settlement of state/regional losses; Secondly, the format of state/regional loss settlement is not yet optimal; And Third, the increasing number of BPK RI (The Audit Board of The Republic of Indonesia) findings annually.*

*From these three problems MP-TGR was conceived and formed. Implementation of State/Regional Completion Settlements by MP-TGR was established through the Regent Regulation No. 54 of 2009 on the Procedure for the Compensation of Regional Losses against Non-Treasury Officials, while the Execution of the MP-TGR session is regulated through the Regent Regulation Number 29 of 2013 concerning Procedural Law of Assembly Consideration Compensation Claims on Finance and Regional Goods.*

*MP-TGR or Assembly Consideration of Indemnification is officers and/or officials appointed and determined by the Regional Head*

saksi-saksi, bukti-bukti dan tertuntut, menghitung jumlah kerugian negara/daerah, memberikan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan pengambilan keputusan/memutuskan atas pengenaan atau pembebasan atas ganti kerugian.

Prosesi persidangan dimulai dengan pembacaan surat tuntutan, penyampaian keterangan tertuntut, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti, pengambilan keputusan/putusan MP-TGR, dan penerbitan Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan/pembebasan ganti kerugian Negara/daerah hingga pengembalian/pembayaran kerugian Negara/daerah oleh tertuntut.

Bagi Pemerintah Daerah, adanya MP-TGR terbukti berhasil mengurangi jumlah temuan BPK-RI sekaligus menaikkan jumlah pengembalian kerugian daerah.

MP-TGR secara tidak langsung juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Gorontalo, khususnya dari sektor jasa perhotelan, restoran, transportasi serta perdagangan secara umum, yang tentunya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sebuah inovasi, saat ini MP-TGR juga direplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Implementasi MP-TGR berkelanjutan terus-menerus. Sejak dirintis pada 2009 di era Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib hingga sekarang di era kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo, MP-TGR selalu mendapat dukungan penuh dari Forum Komunikasi Pimpinan daerah mulai dari Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua DPRD.

*in order to settle losses of the state/region. MP-TGR is authorized to conduct an examination of witnesses, evidence and prosecution, calculate the amount of loss of state/region, and give consideration to the head of region as decision-making materials/decision on the imposition or discharge of compensation.*

*The trial process begins with the reading of demand letters, the submission of statements by the prosecuted, the examination of witnesses and evidence, decision-making/decision of the MP-TGR, and the issuance of a Decree of the Head of Region on the imposition/redress of damages to the state/region by the prosecuted.*

*For the Gorontalo District Government, the trial process of MP-TGR has provided many significant benefits. For the prosecuted, the existence of the hearing can provide legal certainty over the intended demands.*

*MP-TGR is also able to give positive impact to the people's economy of Gorontalo Regency, especially from hospitality service sector, restaurant service, transportation service and general trading, which can increase the region original income. As an innovation, MP-TGR is currently being replicated by other regions in Indonesia.*

*The implementation of MP-TGR is continuously sustainable. Since pioneered in 2009 in the era of David Bobihoe Akib until now in the era of the leadership of Nelson Pomalingo, MP-TGR has getting full support from the Regional Leaders/ FORKOPIMDA (Head of District Court, Chief District Attorney, and Chairman of DPRD).(\*)*



## NGRUMPI SEHAT BERKARYA BERSAMA SAUDARAKU

### HEALTHY CHIT CHAT WORKING WITH MY BROTHER

# 59

UPTD Puskesmas  
Tongas Dinas Kesehatan,  
Pemerintah Kabupaten  
Probolinggo

UPTD Community Health  
Center of Tongas Agency of  
Health, Probolinggo Regency

**I** Bertahun-tahun, kesehatan jiwa belum menjadi focus pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk Puskesmas Tongas, Probolinggo. Kegiatan ngrumpi sehat berkarya bersama saudaraku pada awalnya dilatarbelakangi dari penemuan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang jumlahnya sangat kecil, yaitu 0,18 %, padahal realitanya banyak penderita ODGJ di wilayah Puskesmas Tongas yang belum tertangani dengan baik, dikarenakan ODGJ belum teridentifikasi, petugas kurang kompeten, dan cenderung langsung merujuk pasien ODGJ ke rumah sakit jiwa, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ODGJ dan stigma masyarakat beranggapan ODGJ tidak bisa disembuhkan secara medis dan hanya bisa diobati oleh dukun.

Setelah menerima pelatihan penanganan ODGJ dari Dinas Kesehatan pada tahun 2014 dalam rangka Program Indonesia Bebas Pasung, Kepala Puskesmas Tongas mulai merubah sistem kinerja yang sebelumnya pengobatan ODGJ hanya ditangani di Puskesmas, diubah dengan pengobatan yang dilaksanakan di 8 Desa dengan melibatkan

**B** *For years, mental health has not been a focus in health development in Indonesia yet, including Puskesmas Tongas, Probolinggo. The activity of : Spreading Good Rumors to Drive A More Productive Mentally Ill, was backgrounded by a very low number of mental disorder people (Orang Dengan Gangguan Jiwa-ODGJ) at 0.18%, even though the reality there were many mental disorder people in Tongas health clinic area, who have not yet handled properly, caused by unidentified ODGJ, the lack of health worker's competency and tend to directly refer to the psychiatric hospital, lack of community awareness and the community stigma that ODGJ could not be healed medically and just through the shaman.*

*After trained by the District Health Office in 2014, regarding to Indonesia Free Pasung Program, the head of Puskesmas Tongas started to change their performance system, from the ODGJ patients who were just handled in health clinic (Puskesmas) to the medical treatment at 8 villages by involving the community in order providing a close access to the health services,*



masyarakat untuk mendekatkan masyarakat ke pelayanan kesehatan.

Berbagai tantangan dihadapi petugas kesehatan, ada keluarga yang menolak pengobatan ODGJ, bahkan ada pula yang mengancam, dan hendak memukul petugas karena mereka merasa terusik dan malu.

Titik awal Ngrumpi sehat ini adalah saat ada ODGJ yang sembuh setelah ditangani secara medis menceritakan kesembuhannya kepada tetangga disekitarnya. Pembicaraan *gethok tular* (informasi dari mulut ke mulut) melalui "Ngrumpi" yang biasanya dilakukan dipertemuan-pertemuan masyarakat (di pasar, pengajian, posyandu, arisan) ini menimbulkan ide Kepala Puskesmas Tongas bahwa Ngrumpi tersebut harus mempunyai Forum agar lebih terarah dan dilembagakan.

*There were various challenges faced by the health workers, there were some ODGJ family rejected, and others even threated and will bit the health workers because they felt disturbed and shame.*

*The starting point of Health Spreading Rumors (Ngrumpi Sehat) was: when a healed ODGJ after being handled medically told his healing to his surrounding neighbors. This from one to another conversations (gethok tular), namely Ngrumpi, that usually conducted at the community informal meetings (at the market, religious meetings, health clinic), raising the idea of the head of Puskesmas Tongas, that Ngrumpi should have a forum in order to more focus and institutionalized.*



## OASE SAHABAT HATI, “ONLINE ANYWHERE SERVICE, SATU HARI BANYAK TEMPAT, HARAPAN TERPENUHI”

### *OASE FRIENDS HEART, “ONLINE ANYWHERE SERVICE, ONE DAY MANY PLACES, EXPECTATIONS FULFILLED”*

60

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

*Department of Population and Civil Registration, Tanah Datar Regency*

1 Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, terletak persis ditengah tengah provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan 7 kabupaten/kota, mempunyai luas wilayah 1.336 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 365.040 jiwa, terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari/desa dan 395 jorong/dusun dimana sebahagian besar penduduk bergerak pada sektor pertanian.

Kabupaten Tanah Datar juga disebut sebagai *luhak nan tuo* (negeri tua) karena adanya suatu keyakinan bagi masyarakat Minang Kabau bahwa Tanah datar merupakan daerah tempat asal usul orang Minang Kabau yang dikenal kuat memegang adat dan agama, merupakan salah satu daerah kunjungan wisata di Sumatera Barat dengan lebih kurang 150 objek wisata yang terdiri dari wisata budaya dan sejarah, wisata alam, serta atraksi seni tradisional.

Mengingat luas wilayah dan topografi daerah yang bergelombang dan berbukit bukit serta masyarakat yang cenderung bermukim berkelompok kelompok dengan orbitasi terluar yang cukup jauh ke ibu kota kabupaten (yang tidak sesuai dengan nama kabupatennya

2 *Tanah Datar regency is one of 19 regencies / cities in West Sumatra, located exactly in the middle of West Sumatera province bordering 7 districts / municipalities, has an area of 1,336 KM<sup>2</sup> with a population of 365,040 people, consisting of 14 districts, 75 nagari / Villages and 395 jorong / hamlets where most of the population is engaged in the agricultural sector.*

*Tanah Datar regency is also referred to as *luhak nan tuo* (old country) because of a belief for Minang Kabau people that flat Land is the area where the origin of Minang Kabau people who are known to hold strong customs and religion, is one of the tourist visiting areas in West Sumatra with Approximately 150 tourist objects consisting of cultural and historical tourism, nature tourism, as well as traditional art attractions.*

*Given the area and the topography of the undulating and hilly terrain and the people who tend to settle in groups with far-reaching outer orbital to the district capital (which is not in accordance with the name of the district “Tanah Datar”), this condition is very encouraging to be the main trigger for childbirth New ideas, keativitas and innovations that must be done*



"Tanah Datar"), kondisi ini sangat mendorong menjadi pemicu utama untuk melahirkan ide ide baru, keaktivitas dan inovasi yang harus dilakukan dalam melakukan percepatan percepatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat agar dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

"OASE SAHABAT HATI" (*Online Anywhere Service-Satu hari Banyak Tempat-Harapan Terpenuhi*) merupakan slogan yang di usung sebagai inovasi yang dilaksanakan melalui pelayanan keliling langsung di lapangan ke masing masing Nagari/ desa dan jorong/dusun atau ditempat tempat keramaian tertentu di tengah tengah masyarakat.

Melalui inovasi yang dilakukan saat ini "OASE SAHABAT HATI", (*online anywhere service-satu hari banyak tempat-harapan terpenuhi*), pelayanan keliling online yang dilakukan dapat dilaksanakan dimana saja, di banyak tempat dan sesuai dengan harapan masyarakat dimana dokumen kependudukan dan catatan sipil bisa langsung dicetak sekaligus dilapangan dan dokumen ini bisa langsung diterima serta dapat langsung dibawa pulang oleh masyarakat.

*in accelerating acceleration in the service of population administration and civil registration to the public to be fulfilled in accordance with the expectations and goals as predetermined.*

*"Online Anywhere Service" is a slogan in the stretcher as an innovation that is carried out through direct mobile service in the field to each Nagari / village and jorong / hamlet or place a certain crowded place in the middle in the community.*

*Through the current innovation of "OASE SAHABAT HATI", (online anywhere service-one day many places-hope fulfilled), online travel services can be performed anywhere, in many places and in accordance with the expectations of the community where documents of population and civil records Can be directly printed at once in the field and this document can be directly accepted and can be directly taken home by the community.*



## **OPUNG SARI BASAH BANG: MEWUJUDKAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN DELI SERDANG BERSERI (BERSIH, RAPI, SEJUK, RINDANG, INDAH)**

### ***OPUNG SARI WET BANG: REALIZING ENVIRONMENTAL SCHOOL AND DELI SERDANG BERSERI (CLEAN, NEAT, COOL, UMBRAGEOUS, BEAUTIFUL)***

Dinas Pendidikan,  
Pemerintah Kabupaten  
Deli Serdang

Agency of Education, Deli  
Serdang Regency

61

**I** OPUNG SARI BASAH BANG merupakan model pengelolaan sekolah, untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan Deli Serdang BERSERI (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, dan Indah) di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. OPUNG SARI BASAH BANG merupakan akronim dari : Operasi Pungut Sampah Setiap Hari, Bank Sampah Sekolah, dan Pembinaan Berjenjang.

Sebelum dilaksanakan OPUNG SARI BASAH BANG sebagian besar sekolah di Kabupaten Deli Serdang, gersang dan tandus. Pohon pelindung dan taman hampir tidak ada. Sampah yang dihasilkan warga sekolah tidak pernah terselesaikan dengan baik. Biasanya ditumpuk di depan sekolah (diangkut petugas) atau dibakar. Warga sekolah, khususnya siswa tidak peduli kebersihan sekolah dan lingkungan. Kantin sekolah belum jadi tempat jajanan yang aman bagi siswa.

Untuk melaksanakan program ini, di setiap sekolah harus dibentuk Komunitas OPUNG SARI dan Bank Sampah Sekolah. Komunitas OPUNG SARI yang terbagi beberapa kelompok kecil, memungut sampah yang ada

**B** *OPUNG SARI BASAH BANG is a model of school management intended to realize the environmental based schools and Deli Serdang BERSERI (Bersih -Clean, Rapi -Neat, Sejuk-Cool, Rindang - Shady, dan Indah- Beautiful) in Deli Serdang Regency, North Sumatera Province. OPUNG SARI BASAH BANG is derived from Operasi Pungut Sampah Setiap Hari, Bank Sampah Sekolah, dan Pembinaan Berjenjang ( Daily Rubbish Picking Program, School Rubbish Bank, and Multi Level Coaching).*

*Before impementing OPUNG SARI BASAH BANG, most schools in Deli Serdang Regency had dry environment. They had few shady trees and plants. The rubbish produced by schools society was not well organized. They used to place the rubbish in front of the school gate as the temporal disposal place or burnt it. The school society, especially students, did not care about the school cleanliness and the school environment. The school canteens did not sell healthy food to be consumed by students.*

*For implementing this program, each school should make OPUNG SARI community and School Rubbish Bank. OPUNG SARI Community*



di sekolah, membersihkannya, menjualnya kepada Bank Sampah dan menerima buku tabungan. Petugas Bank Sampah, memilah, mengelompokkan, menyimpan di Bank Sampah Sekolah atau menjualnya kepada Bank Sampah yang ada di masyarakat. Sedangkan Pembinaan berjenjang, merupakan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan yang mengadopsi prinsip Multi level Marketing.

Dengan dilaksanakan OPUNG SARI BASAH BANG terjadi perubahan performan sekolah di Kabupaten Deli Serdang. Lingkungan sekolah berubah menjadi lebih hijau, bersih, sejuk, rapi, rindang, dan indah. Di samping itu terjadi penambahan jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang signifikan di Kabupaten Deli Serdang, dari sejumlah 114 sekolah (8,69%) pada tahun 2013, menjadi 507 sekolah (37,27 % pada tahun 2016. Pada tahun 2016, sebanyak 6 sekolah dari Kabupaten Deli Serdang memperoleh Adiwiyata Mandiri dari Presiden Republik Indonesia.

*is divided into some small teams. They are rubbish picking team, rubbish cleaning and sorting team, and rubbish selling team and they get savings book. The officer of school rubbish bank places the rubbish that has been sorted in different gunny sacks . When the bank has got much rubbish from the school society, the officer then sells it to one of the big rubbish banks near the school. Multi Level Coaching means the coaching by environmental based school to the school that will be an environmental based school. This is done by adopting Multi Level Net.*

*By implementing OPUNG SARI BASAH BANG, the performance of the schools in Deli Serdang becomes better. The school environment looks green and becomes cleaner, neater, cooler, more shady and more beautiful. Besides, the environmental based schools are increasing in number significantly in Deli Serdang Regency, from 114 schools (8.69%) in 2013 becomes 507 schools (37.27 %) in 2016. In 2016, there are 6 schools in Deli Serdang Regency get Independent Adiwiyata Awards from the President of the Republic of Indonesia.*



## PAHA SYLPI BANGKITKAN GAIRAH PETERNAK PINGGIR HUTAN

### *SYLPI'S THIGHS AWAKEN THE PASSION OF FOREST-EDGE BREEDERS*

62

Dinas Peternakan dan  
Perikanan, Pemerintah  
Kabupaten Bojonegoro

*Department of Animal Husbandry  
and Fisheries, Bojonegoro Regency*

1 Desa Setren Kecamatan Ngasem merupakan salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah kawasan hutan. Sebagian besar masyarakat Desa Setren merupakan petani yang juga berprofesi sebagai peternak dan penggarap hutan. Masih luasnya lahan kritis akibat pembalakan liar di kawasan hutan Desa Setren yang berimbas pada rusaknya ekosistem hutan dan penurunan produksi kayu yang mana hal ini dibuktikan dengan kesaksian warga disekitar bahwa tanaman jati pengganti yang ditanam di bekas pembalakan liar tidak menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Selain itu masih sederhananya manajemen budidaya ternak sapi oleh masyarakat juga berpengaruh pada rendahnya pendapatan masyarakat peternak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra Perhutani.

Untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dengan dukungan Puslitbang Perhutani dan beberapa instansi terkait menerapkan sistem Pengelolaan Hutan Sylvopastura Sapi (PAHA SYLPI) yang

2 *Setren Village Ngasem District is one of the villages in Bojonegoro Regency which most of its area is forest. Most of people in Setren Village are farmers who also work as ranchers and forest tenants. The extent of critical land due to illegal logging in Setren's forest area has affected the destruction of forest ecosystems and the decline of timber production which is evidenced by the local residents' testimony that the teak replacement that planted in the former illegal logging area does not show satisfactory progress. In addition, the simple management of cattle farming by the community also has affected on the low income of breeder community who are members of Forest Village Community Institution / Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) as Perhutani (Indonesian State Forestry Enterprise) partners.*

*To overcome the problems described above, Department of Animal Husbandry and Fisheries Bojonegoro District with the support of Puslitbang Perhutani and some related agencies apply the Sylvopastura Sapi (PAHA SYLPI) forest management system which is a system of integration between cattleman as a manure producer potentially as manure for teak*



merupakan sistem integrasi antara ternak sapi sebagai penghasil kotoran yang berpotensi sebagai pupuk kandang untuk tanaman jati dengan kawasan hutan sebagai lahan untuk penanaman rumput maupun hijauan unggul yang ditanam di sela - sela tanaman jati maupun untuk pagar lokasi penanaman jati. Program ini lebih dikenal dengan nama Sylvopastura yang dititikberatkan pada penanaman jati dengan menggunakan model kenongan yang memungkinkan sapi masuk dalam hutan dan budidaya sapi potong yang terintegrasi dengan kawasan hutan.

Sebagai pemeran utama program ini maka komitmen dan niat yang kuat dari anggota kelompok telah terbentuk yang dibuktikan dengan berdirinya kandang sapi yang merupakan hasil gotong royong secara swadaya dari anggota kelompok.

*plants with forest areas as the land for grass planting either superior forage planted on the sidelines of teak plants as well as for the fence of teak planting location. This program is better known as Sylvopastura which is focused on the planting of teak using kenongan (soil bump) model that allows the cows into the forest and the cattle cultivation that is integrated with the forest area.*

*As the main cast of this program, the strong commitment and intention of the group members has been established as evidenced by the establishment of the cowshed which is the result of mutual assistance from the members of the group.*



## PANTASI MART (PUSAT PENGADAAN FASILITAS SANITASI MASYARAKAT)

### ***PARTNERS MART (COMMUNITY SANITATION FACILITIES PROCUREMENT CENTER)***

63

Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang

*Division of Water Supply and Environmental Sanitation, Regional Planning and Development Agency, Sumedang Regency*

**I** Diperlukan sebuah wadah terpusat sebagai pusat informasi, koordinasi dan penyediaan segala macam kebutuhan masyarakat akan sarana sanitasi. **PANTASI MART** (Pusat pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat) Unit Pengelola Sanitasi (UPS) Minimarket sanitasi POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan) menjadi satu solusi penyediaan segala macam kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang terkait sanitasi dan dapat diakses oleh semua kalangan dengan model pembayaran sesuai dengan kemampuan masyarakat dengan berprinsip dari sanitasi, untuk sanitasi itu sendiri sebagai upaya keterjangkauan masyarakat akan sanitasi yang murah, mudah dan sehat .

Sampai tahun 2005 cakupan (jumlah masyarakat yang memiliki sarana) jamban keluarga masih dibawah 50% dari jumlah penduduk sekitar 1 juta orang. Akses ( keterjangkauan masyarakat akan sarana) jamban masih dibawah 50% sehingga hampir setiap tahun sampai dengan tahun 2009 selalu saja masih terjadi kejadian luar biasa (KLB) diare dan diare selalu masuk ke dalam sepuluh

**E** *We need a place as an information center, coordination and provider of all kind sanitation facilities for community. **PANTASI MART** (Pusat pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat) Unit Pengelola Sanitasi (UPS) Minimarket sanitasi POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan) become one of a solution to provide all kind community's sanitation needs, especially in Sumedang regency. Which is accessible by all people with variety payment method that in accordance with the their ability. With principle, "from sanitation, to it's sanitation" as an effort to provide community's affordability for cheap, easy and healthy sanitation.*

*Until 2005, number of people that has latrines facilities is still below 50% from all the Indonesia population. Until 2009, there was always an extraordinary incident (KLB) of Diarrhea. Reported from all Sumedang regency's Community Health Centre (Puskesmas), Diarrhea is one of top ten disease outbreaks in Sumedang. Infant and under-five mortality due to diarrhea is also high.*



# Pantasi Mart

Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat

besar pola penyakit yang ada di Kabupaten Sumedang (laporan dari semua Puskesmas) juga kematian bayi dan balita akibat diare yang cukup tinggi.

Sebelum Inovasi masyarakat kesulitan mencari opsi pilihan sarana sanitasi baik dari model maupun cara pembayaran sehingga air dan sanitasi bukan menjadi sebuah kebutuhan mendasar yang dianggap penting sehingga cakupan dan akses air dan sanitasi masih belum memenuhi standar dan beresiko menimbulkan KLB penyakit menular yang menyebabkan kejadian penyakit maupun resiko kematian bayi dan balita cukup tinggi.

Setelah inovasi, masyarakat dipicu menjadikan air dan sanitasi sebagai sebuah kebutuhan mendasar yang sangat penting dan dapat dijangkau baik dari akses dan model pembiayaan sehingga resiko KLB penyakit menular dan kejadian penyakit serta resiko kematian bayi balita akibat diare dapat dikendalikan serta berpeluang ekonomi kreatif sehingga besar harapan masyarakat dapat sehat sejahtera secara mandiri melalui sanitasi.

*Before the innovation, community was difficult to find options for sanitation, both facilities type and payment method. So community still think that water and sanitation is not an essential need. That is so important that coverage and access to water and sanitation still do not meet the standards and are at risk of causing disease outbreaks or risks Infant and under-five mortality is quite high.*

*After the innovation, the community is triggered to make water and sanitation very important, accessible and variety payment method so that the risk of outbreaks of infectious diseases and the incidence of illness and the risk of infant mortality due to diarrhea can be controlled. And have a creative economic opportunity so that the public expectation can prosper independently through sanitation.*



## “PATUH SELAM” (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KELURAHAN SELAT DALAM)

### “PATUH SELAM” (INTEGRATED ADMINISTRATION SERVICES FOR URBAN VILLAGE, SELAT DALAM)

64

Kelurahan Selat Dalam,  
Kabupaten Kapuas

Selat Dalam Urban Village,  
Kapuas Regency

1 Kelurahan Selat Dalam merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berada di pusat kota dan sentra bisnis dengan karakteristik kelompok sosial masyarakat yang beraneka ragam strata sosial dengan jumlah penduduk sebanyak lebih dari 11 ribu jiwa.

Belum adanya pelayanan terpadu satu pintu, alur pelayanan yang tidak jelas, prosedur layanan yang masih bersifat konvensional dan manual, minimnya informasi mengenai jenis layanan dan persyaratan serta ketiadaan fasilitas layanan pengaduan.

PATUH SELAM merupakan kegiatan layanan publik di tingkat kelurahan dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen / surat yang dilakukan di satu tempat (meja/loket pelayanan) secara terpadu. Inovasi ini dibuat secara lebih terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat, transparan dan akuntabel yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

2 *Selat Dalam Urban Village is one of seventeen urban villages in Kapuas District, Central Kalimantan Province. Located in the central business area of the city, it has the characteristics of social groups of various social strata with a population of more than eleven thousand.*

*The absence of one – stop integrated services, unclear and outdated procedures (conventional and manual), inadequate information on the types of services and requirements, and the absence of grievance service facilities.*

*PATUH SELAM is a public service activity at the Urban Village level starting from the stage of application to the publication of documents/ letters performed in one place (desk/ counter service) in an integrated manner. This innovation is designed to improve the quality of public services, by making them faster, easier, more accurate, transparent, and accountable. This will provide direct benefits to the community.*

*The innovation strategy begins with the Implementation of problem identification, the Preparation of the legal and operational basis, the Interior design of the service room, the Design of*

Strategi inovasi dimulai dengan melaksanakan Identifikasi masalah, Penyusunan landasan hukum dan operasional, Desain interior ruang pelayanan, Rancang bangun sistem dan aplikasi SIMPATUH, *Try out* dan sosialisasi, Implementasi Program PATUH SELAM, *Launching / Peresmian* Program PATUH SELAM, Monitoring dan Evaluasi.

Sebelum inovasi, pelayanan tidak terpadu pada satu pintu. Setelah inovasi, layanan dilakukan pada satu tempat secara terpadu, waktu layanan lebih singkat serta tersedianya fasilitas informasi pelayanan dan pengaduan.

Keluaran dari Inovasi PATUH SELAM yaitu terbentuknya sistem pelayanan administrasi terpadu, ditetapkannya SK Lurah tentang PATUH, terciptanya aplikasi SIMPATUH dan tersedianya media informasi pelayanan dan pengaduan.

Meningkatnya kepuasan masyarakat, kemudahan akses informasi mengenai jenis dan persyaratan pelayanan, efisiensi dan efektivitas waktu layanan dan meningkatnya jumlah layanan publik serta meningkatnya investasi dan pertumbuhan dunia usaha.

*Amun tau jeleng ela mampahali* (kalau bisa dipercepat jangan diperlambat) adalah prinsip dan filosofis daerah mengenai perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih cepat, lebih mudah, responsif, efektif dan efisien.

*the system and the application of SIMPATUH, Try Out and socialization, Implementation of PATUH SELAM, Launching/ Inauguration of PATUH SELAM Program, Monitoring and Evaluation.*

*Before innovation, service is not integrated in one place. After innovation, services including service and complaints information facilities, are conducted in one place in an integrated manner, resulting in shorter service times.*

*Output from innovation PATUH SELAM is the formation of an integrated system of administrative services, Lurah decree on PATUH, the creation of SIMPATUH application, and the availability of media information services and complaints.*

*Increased public satisfaction, easy access to information on the type and terms of service, efficiency and effectiveness of service time and increased number of public services as well as increased investment and business growth.*

*Amun Tau Jeleng Ela Mampahali (Do not over complicate what can be simple) is the region's principle and philosophy on improving public services to the community to make them faster, easier, responsive, effective, and efficient.*



## **“PRO MASTER GO SEHATI” (PROGRAM RUMAH SEJAHTERA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF)**

### **“PRO MASTER GO SEHATI” (PROSPEROUS HOME PROGRAM TOWARDS A PROSPEROUS, RELIGIOUS AND PRODUCTIVE SOCIETY)**

Dinas Sosial Pemerintah  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Social Department of Hulu  
Sungai Selatan Regency

65

**I** Data Tahun 2013 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 15.233 jiwa orang miskin dan menempati 5.052 rumah tidak layak huni, dengan kondisi yang tidak memenuhi syarat fisik, keamanan, kesehatan dan sosial, dengan kondisi : tidak permanen dan atau rusak, dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Sosial mengembangkan inovasi PRO MASTER GO SEHATI (Program Rumah Sejahtera Menuju Masyarakat Sejahtera Agamis dan Produktif), dengan cara : merehabilitasi / membangun “istana bagi keluarga miskin”. Rumah sebagai target intervensi karena a) merupakan barang mahal yang hampir sebagian besar keluarga miskin tidak dapat memenuhi/ membangunnya, b) sebagian besar waktu keluarga miskin dihabiskan di dalam rumah yang difungsikan sebagai sarana perlindungan dan keamanan keluarga, media edukasi dan pemeliharaan kesehatan keluarga, perlindungan bagi lanjut usia dan penyandang cacat serta sebagai tempat berusaha bagi keluarga miskin.

**B** *Data of 2013 in Hulu Sungai Selatan Regency is 15,233 poor people and occupies 5,052 uninhabitable homes, with conditions that do not meet physical, safety, health and social requirements, with conditions: not permanent and or damaged, walls and roofs made of materials Which is easily damaged / obsolete.*

*Based on these conditions, the Government of Hulu Sungai Selatan Regency through the Social Service develops innovation PRO MASTER GO SEHATI (Prosperous House Program Towards Prosperous Communities and Productive), by: rehabilitating / building “palace for poor families”. The house as an intervention target because a) is an expensive item that most of the poor families can not meet / build, b) most of the time poor families are spent in homes that function as a means of family protection and security, education and family health care, For the elderly and people with disabilities and as a place of business for poor families.*

*Pro Masters Strategy Go Sehati with stages: data collection, regulation issuance (perda RPJMD 2014-2018, Perbup No. 25 Year 2015, Perbup No. 32 Year 2016, Juklak Rumah Prosperous*



Strategi Pro Master Go Sehati dengan tahapan : pendataan, penerbitan regulasi (perda RPJMD 2014-2018, Perbup No. 25 Tahun 2015, Perbup No. 32 Tahun 2016, Juklak Program Rumah Sejahtera), verifikasi/validasi, sosialisasi, penyerahan dana bantuan, pembangunan/rehabilitasi, monitoring dan evaluasi.

Hasil setelah inovasi: a) sejahteranya keluarga miskin, yang secara kuantitatif dilihat dengan: 1) kepemilikan rumah layak huni, sebelum inovasi dilaksanakan pada tahun 2013 terdapat 5.052 rumah tidak layak huni (terdapat 876 rumah yang tidak dilakukan intervensi dan dikeluarkan dari basis data awal karena meninggal dunia, pindah dan berkategori mampu), setelah inovasi tahun 2014-2016 sudah dibangun 3.151 rumah layak huni (75,45%) yang memenuhi syarat fisik, keamanan, kesehatan dan sosial.

*Program), verification / validation, socialization, donation, / Rehabilitation, monitoring and evaluation.*

*Results after innovation: a) the prosperity of poor families, quantitatively seen by: 1) ownership of habitable homes, before innovation in 2013 there were 5,552 uninhabitable homes (876 homes that were not intervened and excluded from the initial database because Died, moved and categorized capable), after the innovation of 2014-2016 has been built 3,151 habitable homes (75,45%) that meet the physical, safety, health and social requirements.*



## RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) BAHARI

### *BIRTH WAITING HOUSE (RTK) BAHARI*

66

Dinas Kesehatan  
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Agency of Health  
Sinjai Regency

**I** Target SDGs, Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 70/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Neonatus (AKN) 17/1.000 KH. Berdasarkan hasil Suvey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan Angka Kematian Neonatus (AKN) 19/ 1.000 KH.

Kondisi geografis yang tidak semuanya datar dengan akses jalan yang baik menyebabkan beberapa kasus keterlambatan ibu bersalin datang ke pelayanan kesehatan. Konsep Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, disediakan untuk ibu bersalin dan ibu hamil dengan resiko tinggi.

Kecamatan Pulau Sembilan merupakan kecamatan di Kabupaten Sinjai yang terpisah dari daratan Sinjai dan berupa kepulauan. Kecamatan ini terdiri dari sembilan pulau dengan luas wilayah yaitu 7,55 km<sup>2</sup> dan terletak sekitar 12 mil dari ibukota kabupaten. Untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas PONED dan RS PONEK terdekat harus ditempuh dengan transportasi

**II** Target SDGs, Maternal Mortality Rate (MMR) of 70 / 100,000 Live Births (KH) and Neonatal Death Rate (NDR) 17 / 1,000 KH. Based on the results of Indonesia Health Demographic Survey (SDKI) in 2012, the maternal mortality rate in Indonesia is still high at 359 per 100,000 live births while the Neonatal Death Rate (NDR) 19 / 1,000 KH.

Geographical conditions that are not all flat causes some cases of delay in delivering maternity to health services. The concept of Birth Home Waiting (RTK) developed by the Ministry of Health, is provided for maternity and pregnant women with high risk.

Pulau Sembilan is a subdistrict in Sinjai District which is separated from Sinjai mainland and is an archipelago. This subdistrict consists of nine islands with an area of 7.55 km<sup>2</sup> and is located about 12 miles from the district capital. To reach the health service facility, the Community Health Center of Basic Essential Neonatus Obstetrics Service ( Puskesmas PONED) and the nearest Comprehensive Neonatal Emergency Obstetric Services (PONEK) hospital must be reached by sea transportation with an average duration of 2



laut dengan lama tempuh rata-rata 2 - 3 jam. Menyadari kondisi tersebut pemerintah bersama masyarakat kecamatan Pulau Sembilan berinisiatif menyediakan RTK yang berlokasi di sekitar dermaga penyeberangan Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. Bangunan rumah tersebut merupakan rumah salah seorang warga kelurahan Lappa yang secara sukeraia menyediakan sebagian rumahnya beserta fasilitas untuk dijadikan RTK bagi masyarakat kecamatan Pulau Sembilan.

Setelah RTK beroperasi selama 3 tahun, warga Kecamatan Pulau Sembilan mulai menyadari pentingnya mengedepankan keselamatan ibu melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya jumlah kematian ibu.

*- 3 hours. Realizing the condition, the government together with the community of Pulau Sembilan district took the initiative to provide RTK located around the ferry crossing of Lappa Sub-district, North Sinjai District. The building of the house is the home of one of Lappa urban villagers who succesfully provided part of their house along with facilities to be made RTK for the community of Pulau Sembilan*

*After the RTK has been in operation for 3 years, the people of Pulau Sembilan began to realize the importance of prioritizing maternal safety with the help of health workers in Puskesmas and Hospital. This can be seen from the decreasing number of maternal deaths.*

## SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK)

### JEMPOL SAKERA (BE AWARE OF THE VIOLENCE OF WOMEN AND CHILDREN)

67

Dinas Keluarga Berencana dan  
Pemberdayaan Perempuan,  
Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Family Planning Service  
and Women Empowerment,  
Pasuruan Regency

**I** Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren peningkatan bahkan juga menjadi pemberitaan nasional. Berdasarkan data dari Tim PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) terdapat pengaduan kasus kekerasan anak & perempuan 29 kasus pada tahun 2014, meningkat menjadi 53 kasus pada tahun 2015.

Terungkapnya kasus tersebut umumnya pada "populasi kunci" yaitu masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan masyarakat dengan keluarga potensial kekerasan (keluarga dengan *broken home*, keluarga dengan konflik).

Berdasarkan hal di atas Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas KBPP memberikan solusi aplikatif dengan program inovatif "SAKERA JEMPOL" (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Adapun program inovasi Sakera Jempol adalah:

1. *Fanspage Plus* MOLIN (mobil perlindungan perempuan dan anak) sebagai upaya sosialisasi dan promotif melalui media

**E** *Cases of violence against women and children in Pasuruan showed an upward trend and even became national news. Based on data from the PPT-PPA Team (Integrated Service Center for the Protection of Women and Children) there were complaints of cases of violence against women and children, 29 cases in 2014, increased to 53 cases in 2015. The cases revealed generally in the "key population" of societies with low socioeconomic conditions and communities with potential families of violence (families with broken home, families with conflict).*

*Based on factors above, the government of Pasuruan Regency through the Office of KBPP (Family Planning And Women's Empowerment Services) provides an applicative solution with innovative program "SAKERA JEMPOL" (Recognizing Violence Against Women And Children With proactive Service).*

*The "Sakera Jempol" innovation program is:*

1. *Fanspage program and MOLIN program. The first is social media (fanspage) as socialization and promotive protection efforts for women and children, and the later is car for people protection in rural area and*

sosial (*fans page*) dan mobil perlindungan anak bagi masyarakat di pedesaan dan yang tidak familiar dengan media sosial

2. *Hotline Jempol* (*Hotline Jemput Bola*) sebagai upaya preventif dengan membagikan kartu kepada populasi kunci, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa untuk segera melaporkan apabila terjadi tanda-tanda tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di masyarakat
3. *Four Fast* (4 Cepat: cepat terdeteksi, cepat terlapor, cepat tertangani, dan cepat terehabilitasi) dalam waktu 1 hari.
4. *Ada Jempol* (Advokasi Jemput Bola) merupakan kelanjutan proses rehabilitasi sehingga korban siap dan mampu beradaptasi kembali ke masyarakat.

Setelah dilakukan program inovasi selama 1 tahun memberikan hasil dan dampak yang signifikan di antaranya seperti gambar di bawah ini :

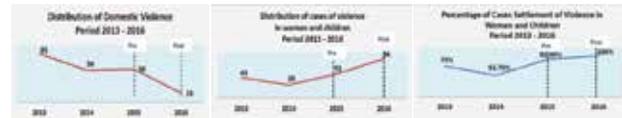


Inovasi "Sakera Jempol" merupakan sistem yang sederhana, unik namun komprehensif dan aplikatif mulai dari upaya *promotif*, *preventif*, *curative* dan *rehabilitatif* dari korban kekerasan perempuan dan anak yang mampu menjawab permasalahan terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Hal ini terbukti dari tiga indikator yaitu penurunan KDRT, Peningkatan laporan kasus yang mengindikasikan bahwa kesadaran dan pemahaman akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan menjadi lebih baik, dan peningkatan persentase terselesaikannya kasus memberikan perubahan yang signifikan.

*who are unfamiliar with social media.*

2. *Hotline Jempol* (*Hotline With proactive Service*) as a preventive effort by distributing cards to the population key persons, leaders in community, religion leaders and country government apparatus persons.
3. *Four Fast* (4 Fast: quickly detected, quickly reported, quickly handled, and quickly rehabilitated in 1 day service) as a curative and rehabilitative efforts.
4. *Ada Jempol* (advocacy by proactive services) which is a rehabilitative continue efforts so that victims will be ready and able to adapt when comeback to the community.

*After this program runs for 1 year, it gives significant results and impacts such as the picture below:*



*"Sakera Jempol" innovation program is a simple, unique yet comprehensive and applicative system ranging from promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts for victims of violence against women and children, that can face issues related to violence against women and children. This showed by 3 indicators ; the reduction of domestic violence, the increasing case reporting that indicates that awareness and understanding of cases reporting importance of violence become better and last is the increasing percentage of cases completion that provides significant changes.*



## SELEMPANG MERA

### SELEMPANG MERA

68

UPTD Puskesmas Omben  
Dinas Kesehatan Pemerintah  
Kabupaten Sampang

*UPTD Community Health Center of  
Omben, Agency of Health  
Sampang Regency*

**I** Selama ini pelayanan Kesehatan Jiwa masyarakat di Puskesmas Omben belum optimal disebabkan kurangnya pendampingan petugas terhadap pasien jiwa dan keluarganya, akses pelayanan Jiwa jauh dan tidak merata, petugas belum kapabel dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, belum terbentuk tim Pelayanan Kesehatan Jiwa yang efektif, dan kurangnya sosialisasi tentang penanganan pasien dengan Gangguan Jiwa.

Sebelum adanya inovasi, Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Puskesmas Omben tahun 2013 sebanyak 45 orang dengan kategori berat, sedangkan jumlah Pasung sebanyak 28 orang. Pada tahun 2014, Gangguan Jiwa dengan kategori Berat sebanyak 57 orang, sedangkan jumlah Pasung sebanyak 30 orang.

Pengusulan inovasi diawali dari tokoh agama yang memiliki kepedulian kepada pasien yang mengalami Gangguan Jiwa terutama yang dipasung, kemudian dibahas dalam rapat FMPP (Forum Masyarakat Peduli Puskesmas) bersama MUSPIKA, Tokoh Masyarakat, Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab

**E** *So far, the community mental health service at Omben Community Health Center has not been optimal due to the lack of mentoring to the patient and the family, the access of the soul service is far and uneven, the officers are not capable in providing the mental health service of the community, there is no effective Mental Health Service team, Socialization about the handling of patients with mental disorders.*

*Prior to the innovation, Number of People With Mental Disorders (ODGJ) at Omben Community Health Center in 2013 as many as 45 people with weight category, while the number of Pasung (being chained) as many as 28 people. In 2014, mental disorders with weight category as many as 57 people, while the number of Pasung as many as 30 people.*

*Innovation proposal was began with religious leaders who have concern for patients who have mental disorders especially in chained, then discussed in meetings FMPP (Community Care Forum Puskesmas) with MUSPIKA, Community Leaders, Head of Community Health Center and Person in charge of Omben Puskesmas Program. The Essence of Innovation is the Em-*

Program Jiwa Puskesmas Omben. Esensi Inovasi adalah Empowering Tim dengan cara pembentukan dan penguatan peran tim melalui Tim Samurai (Pasukan Pemutus Rantai) ODGJ yang melibatkan lintas Program (Dokter, Perawat, Promkes, Ahli Gizi, Analis Kesehatan, Transportasi/Rujukan), Home Visite Terpadu dengan melibatkan secara aktif keluarga, masyarakat sekitar, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam perawatan dan penanganan ODGJ serta Family Gathering sebagai sarana pemberdayaan ODGJ pasca lepas pasung dan bentuk terapi komprehensif BioPsikoSosial. Inovasi ini baru pertama dilaksanakan di Kabupaten Sampang dan satu-satunya di Madura.

Tim Samurai ODGJ bersama Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor melakukan MONEV terpadu untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik. Sumber dana kegiatan ini berasal dari sumber dana BOK, sumber dana JKN, dinas kesehatan, dan dinas sosial.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari inovasi ini di antaranya mengetahui dan memahami penanganan ODGJ dengan tepat, pelaporan dan informasi pasien ODGJ di masyarakat menjadi lebih cepat, para ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, meningkatkan derajat kesehatan ODGJ secara komprehensif baik bio, psiko, sosio, dan spiritual, meminimalkan angka kekambuhan serta mengurangi kecacatan atau kelumpuhan akibat pasung.

*powering Team by establishing and strengthening the team's role through the Samurai Team (ODGJ Trouble) which involves crossing the Program (Doctor, Nurse, Promkes, Nutritionist, Health Analyst, Transportation / Referral), Home Visit Integrated by actively involved Families, communities, Religious Leaders and Community Leaders in the care and handling of ODGJ and Family Gathering as a means of empowering ODGJ post-release and comprehensive form of Bio-Psyco-Social therapy. This new innovation was first implemented in Sampang Regency and the only one in Madura.*

*The ODGJ Samurai Team with Puskesmas, Health and Cross-Sector Offices are conducting integrated MONEV to monitor progress and evaluate the innovation of public services. A source of funding of this activity comes from sources of funds BOK, sources of funds JKN, health offices, and social services.*

*Benefits felt by the community from this innovation include knowing and understanding ODGJ's proper handling, ODGJ patient reporting and information in the community becomes faster, ODGJs get proper health care, improving the health of ODGJ comprehensively both bio, psycho, socio, And spiritual, minimize the number of recurrences and reduce disability or paralysis caused by the necklace.*



## SI JEMPOL (SISTEM INFORMASI JARINGAN ELEKTRONIK MEDIK PASIEN ONLINE)

### *THE THUMB (ELECTRONIC PATIENT MEDICAL NETWORK INFORMATION SYSTEM)*

RSUD Balaraja, Pemerintah Kabupaten Tangerang

RSUD Balaraja  
Tangerang Regency

69

**I** Penerapan aplikasi "Si Jempol" adalah inovasi dan kreativitas original yang belum diterapkan pada RSUD manapun di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah, *pertama*, pendekatan kelembagaan dengan membentuk Tim Kerja melalui Surat Keputusan Direktur sebagai landasan dalam pembuatan rencana aksi dan anggaran program.

*Kedua*, pendekatan sistem. "Si Jempol" adalah aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan keunikan *Easy Use, Two Ways Communication, Self Choice, Bed Information Service* serta *Less Paper*. Sebelumnya, pasien umum dan BPJS menunggu lama untuk mendapatkan layanan di rumah sakit akibat proses registrasi lama dan bertahap.

Dengan Si Jempol, pasien dapat mengakses informasi dan reservasi secara *online* serta melakukan registrasi secara mandiri. Bahkan, klaim BPJS menjadi lebih cepat sehingga jasa pelayanan menjadi tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Aplikasi "Si Jempol" terhubung dengan Pemda Kabupaten Tangerang, BPJS, Disdukcapil,

**E** *The implementation of the "Si Jempol" application is an innovation and original creativity that has not been applied to any hospitals in Indonesia. The approach taken is, first, the institutional approach by forming the Working Team through the Decree of the Director as the foundation in making the action plan and program budget.*

*Second, the system approach. "Si Jempol" is an Information Technology (IT) based application with the uniqueness of Easy Use, Two Ways Communication, Self-Choice, Bed Information Service and Less Paper. Previously, the general patients and BPJS waited a long time to get proper service in the hospital due to the old and gradual registration process.*

*But after the "Si Jempol" implementation, it can be ascertained based on data or field surveys, patients get easy, fast, and participatory services. Whereas before to obtain information and availability of beds difficult to obtain. Now it can be ascertained, the general patient / BPJS can access information directly / online.*

*With Si Jempol, patients can also access information and reservations online and*

SPGDT dan *stakeholders* lainnya. Untuk menjamin mutu layanan dan akreditasi Rumah Sakit, masing-masing layanan sudah dibuat Standar Prosedur Operasional (SPO).

Kelebihan lain "Si Jempol" merupakan gabungan dari beberapa inovasi pelayanan yaitu: (1) Si Respon (Sistem Reservasi Pasien Online), yakni inovasi layanan publik dengan fitur reservasi pasien *online* melalui *mobile apps* yang dapat di-install pada *smartphone* pasien; (2) Infoton (Informasi Tempat Tidur OnLine), sistem yang digunakan untuk memberikan informasi ketersediaan tempat tidur secara *real time*, dapat diakses terbuka melalui *website* RSUD Balaraja; (3) Autoprama (Anjungan Pendaftaran Pasien Mandiri / *Auto Reservation Machine*), sistem yang berfungsi untuk memangkas antrean pada loket pendaftaran poliklinik; (4) Sihakmas (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Melalui SMS), layanan pengiriman informasi hasil laboratorium kepada pasien secara langsung melalui SMS dan terintegrasi dengan Sistem Informasi RS; (5) e-Resep (Sistem penulisan dan pemrosesan resep terintegrasi), sistem informasi dalam penulisan resep melalui sistem elektronik terintegrasi dengan SIMRS; (6) e-Brojol (Bayi Lahir pulang bawa Akte), pelayanan akta kelahiran bayi baru lahir online di RSUD Balaraja. Pelayanan ini merupakan hasil kerjasama dengan Dinas DUKCAPIL Kab. Tangerang.

Inovasi "Si Jempol" dapat pula dipadukan dengan Inovasi layanan masyarakat lainnya ke depan Si Jempol akan direplikasi oleh RSU Tangerang dan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka asesmen replikasi tersebut.

*register independently. In fact, BPJS claims become faster so that services become timely, transparent, and accountable.*

*"Si Jempol" application connects with the Tangerang District Government, BPJS, Disdukcapil, SPGDT and other stakeholders. To ensure the quality of hospital services and accreditation, each service has been made Standard Operating Procedures (SPO).*

*Another advantage of "Si Jempol" is a combination of several service innovations: (1) The Response (Online Patient Reservation System), ie public service innovation with online patient reservation feature via mobile apps that can be installed on patient smartphones; (2) Infoton (OnLine Bed Information), a system used to provide real-time bed availability information, is open accessible through the Balaraja RSUD website; (3) Autoprama (Auto Reservation Machine), a system that serves to trim the queue at the clinic registration counters; (4) Sihakmas (Information System of Result of Inspection Through SMS), service delivery information of laboratory result to patient directly by SMS and integrated with RS Information System; (5) e-Recipes (integrated prescription writing and processing systems), information systems in prescribing prescriptions through electronic systems integrated with SIMRS; (6) e-Brojol (Baby Born home with certificate), birth certificate service online at RSUD Balaraja. This service is the result of cooperation with Dinas DUKCAPIL Kab. Tangerang.*

*Innovation "The Thumb" can also be combined with other community service innovations in the future The Thumbs will be replicated by RSU Tangerang and have done several meetings in the framework of the replication assessment.*



## SIGAP SRATUS 369 PLUS (AKSI TANGGAP PADA SAPI MADURA BUNTING DAN PARTUS)

### SIGAP SRATUS 369 PLUS (ACTION RESPONSE TO MADURA PREGNANT AND PARTUS CATTLE)

# 70

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Agency of Food Security and Livestock, Pamekasan Regency

**I** Sapi madura merupakan plasma nutfah unggul asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan kontribusi populasi sapi potong sebesar ± 30% di Jawa Timur. Populasi sapi potong di Kabupaten Pamekasan 156.706 ekor dengan jumlah sapi betina produktif 61.115 ekor dengan jumlah peternak ± 30.000 orang (Data Dinas Peternakan tahun 2016).

**E** *Madurese cow is a superior genetic germ plasma of Indonesia that has been established by the Government with the contribution of beef cattle population about ± 30% in East Java. The population of beef cattle in Pamekasan regency is about 156,706 with 61,115 productive cows with breeder about ± 30,000 (Based on Data of Livestock Department in 2016).*

Fakta lapangan : Banyak pemeliharaan sapi betina tanpa menjalankan kaidah *Good Practical Management* / peternak dalam memelihara sapi betina cenderung sama baik tidak bunting, bunting, partus dan pasca partus, jarak beranak yang panjang dan status kesehatan pedet yang dilahirkan jelek, dan rendahnya nilai jual ternak (tidak menguntungkan)

*The facts: The maintenance of female cows without using Good Practical Management rules / breeder in raising female cows tends to be the same for pregnant and not pregnant, partus and pasca partus condition, The long calving interval and bad health status of calves and low sale value of livestock (not profitable)*

Terkait permasalahan dan fakta diatas, untuk mengantisipasi sekaligus solusi pencerahaan permasalahan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan mencetuskan gerakan pelayanan SIGAP SRATUS 369 Plus.

*Related to the problems and facts above, to anticipate and solve the problem, the Food Security and Livestock Department of Pamekasan Regency launch public innovation of SIGAP SRATUS 369 Plus.*

SIGAP SRATUS 369 Plus merupakan gerakan pelayanan pada sapi betina bunting hingga

*SIGAP SRATUS 369 Plus is a service movement in pregnant cow to partus (childbirth).*

*The implementation of SIGAP SRATUS 369 plus innovation, are:*

partus (melahirkan).

Pelaksanaan inovasi SIGAP SRATUS 369 plus, yakni:

- ✓ Angka 3 : Strategi pelayanan aksi tanggap pada umur kebuntingan 3 bulan
- ✓ Angka 6 : Strategi pelayanan aksi tanggap pada umur kebuntingan 6 bulan
- ✓ Angka 9 : Strategi pelayanan aksi tanggap pada umur kebuntingan 9 bulan
- ✓ Plus : Strategi pelayanan aksi tanggap pada induk *melahirkan* yang dilanjutkan dengan pelayanan *pasca melahirkan* pada periode satu bulan dan periode dua bulan.

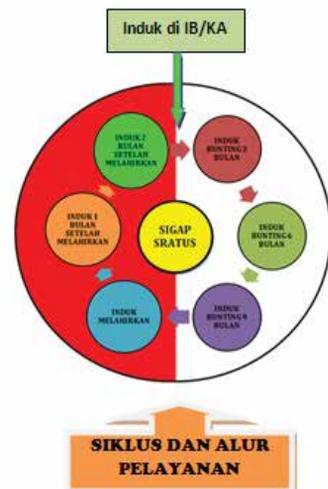
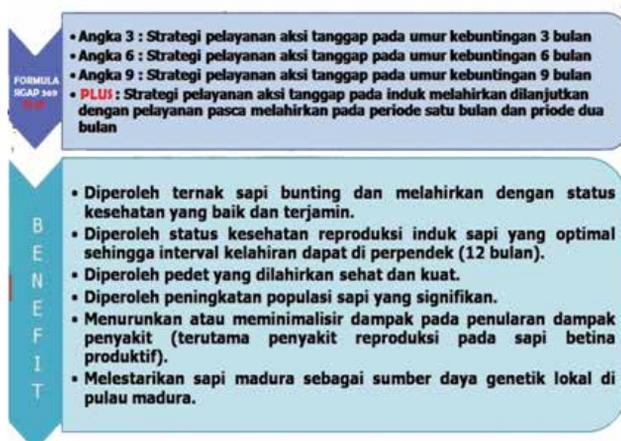
Setelah penerapan inovasi SIGAP SRATUS 369 Plus maka diperoleh hasil :

1. Status Kesehatan ternak sapi bunting dan melahirkan baik dan terjamin;
2. Status kesehatan reproduksi induk sapi optimal sehingga interval kelahiran dapat diperpendek (12 bulan);
3. Pedet yang dilahirkan sehat dan kuat;
4. Kerugian ekonomi akibat peternak memelihara sapi betina majir/ steril (mandul) dapat diatasi atau dihindari.
5. Prosentase keuntungan memelihara sapi betina bisa mencapai 3,2% / bulan.

- ✓ *Number 3: Responsive action service strategy at 3 months of pregnancy*
- ✓ *Number 6: Responsive action service strategy at 6 months of pregnancy*
- ✓ *Number 9: Responsive action service strategy at 9 months of pregnancy*
- ✓ *Plus : Responsive action service strategy for giving birth cow followed by postpartum services at one month and two month period.*

*After the implementation of SIGAP SRATUS 369 Plus innovation, the result are:*

1. *The good and guaranteed of pregnant and giving birth beef cattle health status ;*
2. *Optimized Reproductive health status of cow so that the calving interval can be shortened (12 months);*
3. *The calves are healthy and strong;*
4. *Economic losses due to breeder raising sterile cow (barren) can be handled or avoided.*
5. *Profit percentage of raising cows can reach about 3.2% / month.*





# SIPEKAT: SISTEM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT

## SIPEKAT: ADVANCEMENT MANAGEMENT SYSTEM

# 71

Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Regional Personnel Agency, Sidoarjo Regency

❶ Dalam proses pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam setahun diberikan pada 2 periode waktu yaitu 1 April dan 1 Oktober dengan jumlah ± 1000 orang setiap periodenya, dengan jumlah berkas yang harus dihimpun adalah 2000 x 13 (dokumen) x 3 (rangkap) = 78.000 berkas.

Proses pengajuan kenaikan pangkat dengan metode manual (*hard copy*) terdapat beberapa kelemahan, di antaranya:

1. Kurang efisiensi waktu, tenaga dan biaya, karena setiap PNS harus menyiapkan fotocopy berkas yang dipersyaratkan;
2. Sering terjadi kesalahan maupun kekurangan persyaratan yang mengharuskan OPD mengirimkan kembali;
3. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip berkas akibat besarnya jumlah berkas yang harus disimpan setiap periode kenaikan pangkat.

SIPEKAT merupakan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh semua OPD, berfungsi sebagai alat komunikasi antara BKD dan OPD dalam proses pengurusan Kenaikan Pangkat. Melalui SIPEKAT ini terbangun

❷ *In Government Employees Management System, there are two periods of grade promotion, that is 1st April and 1st October. There are 2.000 Sidoarjo's government employees are promoted each year. The conventional process of grade promotion requires a lot of document, at least 13 sheets per person and each of them must be copied three copies. Sidoarjo Employment Agency (BKD Kabupaten Sidoarjo) receives about 78.000 sheets for grade promotion every year.*

*The submission process of grade promotion by manual method has several disadvantages, including :*

1. *not efficient (time, process and cost);*
2. *frequent errors and lack of requirements, the unit of local government organizations should resend;*
3. *limited archive storage, due to the large number of files.*

*SIPEKAT is employment information system that can be accessed by all of local government organization, serves as a communication tool between Employment Agency (BKD) and the other unit of Sidoarjo's local government organiza-*

un sebuah mekanisme komunikasi kolaborasi, dan pertukaran informasi dalam proses Kenaikan Pangkat serta mempermudah dalam pengiriman berkas-berkas dengan cara *online*. Begitu juga ketika ada kekurangan persyaratan / berkas yang diupload, admin BKD akan menginformasikannya lewat aplikasi ini, dan admin OPD merespon melalui aplikasi tersebut.

Dampak inovasi SIPEKAT antara lain :

1. Berkas persyaratan kenaikan pangkat dikirim (melalui aplikasi) berupa *soft copy*;
2. Mengurangi resiko terjadinya kerusakan dan kehilangan berkas pengajuan karena file telah tersimpan dalam sistem;
3. Proses kenaikan pangkat menjadi transparan dan terbuka;
4. Efisiensi waktu, biaya, tenaga, tempat, dan aman;
5. Mendorong kompetensi sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi;
6. Aplikasi sederhana dan mudah dioperasionalkan.

Inovasi SIPEKAT ini dapat direplikasi oleh BKD Provinsi, Kabupaten/Kota dan unit-unit lainnya untuk mendorong implementasi kebijakan e-Government.

Sebagai bentuk apresiasi Bupati Sidoarjo dalam mendukung inovasi SIPEKAT adalah proses penyerahan SK Kenaikan Pangkat secara langsung, sekaligus memberikan arahan kepada para pegawai yang diundang pada acara tersebut agar para PNS yang telah menerima SK Kenaikan Pangkat diharapkan dapat mengimbangnya dengan tekad dan usaha meningkatkan kualitas dan prestasi kerja serta memperteguh komitmen pengabdian kepada Bangsa dan Negara dalam melayani masyarakat.

*tion, in the process of grade promotion. SIPEKAT builds a collaborative communication mechanism and online file-transmission in the grade promotion process, and make it easier. In the case of lack of requirements, The admin of Employment Agency (BKD) will inform through this application and the others unit respond through this application too.*

*The Impact of SIPEKAT :*

1. *The requirements files of grade promotion sent through the application;*
2. *Can be reduce the risk of damage and loss of file, because the uploaded file is stored in the system;*
3. *The promotion process becomes more transparent;*
4. *More efficient (time, cost, process and storage);*
5. *Encouraging the employee's competence, especially ICT (Information and Communication Technology) skill;*
6. *Simple application and easy to use.*

*As the appreciation, the final output of SIPEKAT, namely "SK Kenaikan Pangkat" be conveyed by The Regent of Sidoarjo in the ceremony (Apel PNS), which is also used to upgrade the motivation and reinforce the commitment of Government Employee in serving the citizen. SIPEKAT can be replicated by Employment Agency (BKD) of provinces or the other city, and the others governmental organization to encourage the implementation of e-government policy.*



## SISWA ASUH SEBAYA (SAS)

### SISWA ASUH SEBAYA (SAS)

72

Dinas Pendidikan,  
Pemerintah Kabupaten  
Banyuwangi

Agency of Education,  
Banyuwangi Regency

1 Program pemerintah pengentas kemiskinan pada tahun 2010 yaitu Bantuan Siswa Miskin, pencairannya tergantung dengan ketentuan yang mengikat dan keterbatasan alokasi yang tidak bisa menjangkau seluruh siswa miskin. Sehingga tidak ada jaminan siswa miskin bisa memenuhi kebutuhan personalnya. Untuk mengatasi hal tersebut Pemda Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah membuat terobosan memberdayakan sumber daya siswa untuk menuntaskan dan memutus angka putus sekolah dengan Program Siswa Asuh Sebaya. Program ini berprinsip : Dari siswa oleh siswa dan untuk siswa.

Program Siswa Asuh Sebaya : Program yang kreatif dan inovatif : 1. Melibatkan siswa, 2. Prosedur penyaluran sederhana, 3. Penggunaan IT, 4. Mengembangkan karakter siswa, 5. Non APBD

Pelaksanaan program SAS didukung oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 188/3152/KEP/429.101/2011 tentang Tim Manajemen Siswa Asuh Sebaya Kabupaten Banyuwangi dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya.

2 *The government's poverty alleviation program in 2010 is the assistance of poor students, the disbursement depends on the binding provisions and limitations of allocations that no guarantee of poor students can meet their personal needs. To overcome this problem Banyuwangi district government through Education office along with Education board and school committee, making breakthrough empowering student resources to complete and break the dropout rate with. This program is principled: from students by students and for students.*

*Peer foster students programs: creative and innovative programs:*

*1. Involving students, 2. Simple delivery procedures, 3. Using IT, 4. Developing the character of students, 5. Non budgeting APBD*

*The implementation of the SAS program is supported by the decree of the head of the education office number: 188/3152 / kep / 429.101 / 2011 about the management team of peer foster students district Banyuwangi and regent's decree no: 188/182 / kep / 429.011 / 2014 about the peer foster students education program.*



Sejak tahun 2013 jumlah dana diperoleh dan jumlah penerima manfaat wajib dilaporkan on line pada : [www.pendidikan.banyuwangikab.go.id](http://www.pendidikan.banyuwangikab.go.id) Sehingga program ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Program Siswa Asuh Sebaya tidak mengandalkan APBN, maupun APBD. Pemenuhan kebutuhan personal siswa yang tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah yaitu siswa itu sendiri.

Manfaat yang didapat : turunnya angka putus sekolah, naiknya angka partisipasi sekolah. Angka putus sekolah tahun 2010 : SD:0,04%, SMP:0,44% SMA/SMK:1,07% pada tahun 2016 : SD:0,035%,SMP:0,25% SMA/SMK:0,38%. Dana siswa asuh sebaya yang terkumpul sejak 2011 sampai tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp. 12.615.065.543,-dengan jumlah sasaran 339.580 siswa /rata-rata 66 ribu siswa pada setiap tahun. Menjadi tujuan studi banding dari daerah lain, sehingga memungkinkan bisa diadopsi oleh daerah lain.

*Since 2013, the amount of funding is obtained and the number of beneficiaries must be reported online at: [www.pendidikan.banyuwangikab.go.id](http://www.pendidikan.banyuwangikab.go.id) so that the process of this program can be accessed anywhere and anytime.*

*Peer foster students education programs do not rely on the state budget, or APBD. Fulfillment of personal needs of students who are not able to optimize the resources that exist around the school is the student itself.*

*The benefits that can be got : decreasing dropout rates, rising enrollment rates. Drop out rate in primary school: 0.04%, junior high: 0.44%, senior high school / vocational school: 1.07% in 2016: primary school : 0.035%, junior high: 0.25% senior high school / vocational : 0.38%. Peer foster students' fund collected since 2011 until April 25th, 2017 is RP. 12,615,065,543, - with a target number of 339,580 students / an average of 66 thousand students per year. It became the purpose of comparative study from other regions, so that it can be adopted by other regions.*



## SUNMOR SEMBADA MINGGU PAHINGAN “SEKALI KAYUH, DUA TIGA PERMASALAHAN SLEMAN TERATASI”

### *SUNMOR SEMBADA MINGGU PAHINGAN “ONCE PADDLED, TWO THREE SLEMAN PROBLEMS RESOLVED”*

# 73

Kecamatan Sleman,  
Pemerintah Kabupaten  
Sleman

*Sleman District,  
Sleman Regency*

**I** Pemerintah Kecamatan Sleman dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Sleman menemukan sejumlah potensi dan permasalahan di wilayah Kecamatan Sleman, antara lain di bidang sosial ekonomi dari total penduduk berjumlah 68.434 jiwa terdapat warga miskin sebanyak 15,43%, sedangkan warga miskin ini sebagian merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Di bidang seni dan budaya, terdapat 86 kelompok seni dan sejumlah sekolah yang memiliki potensi dan kegiatan pengembangan kesenian. kemudian di bidang pendidikan, terdapat kecenderungan warga masyarakat kurang berminat berkunjung ke perpustakaan.

Permasalahan tersebut ditanggapi dengan mengadakan even gelar promosi dan pemasaran produk UMKM, sekaligus pementasan kesenian dan budaya di panggung terbuka, dan mendorong minat masyarakat berkunjung ke Perpustakaan Daerah. Even ini diselenggarakan setiap hari Minggu Pahing (35 hari sekali) berlokasi di area parkir Taman Denggung, dekat kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Sleman dan bersebelahan dengan Perpustakaan Daerah.

**B** *Sleman district Government and community information group found a number of potentials and problems of the Sleman sub district among others in the social economic field of the total population of 68.434 people, there are poor people as much as 15.34%, while some of needy are small and medium enterprises. In the field of art and culture, there are 86 art groups and art development activities. Then in the field of education, there is a tendency of citizens less interested in visiting the library.*

*The problems was responded by holding event of promotion and marketing degree of UMKM product, as well as performances of art and culture on open stage, and encourage public interest to visit local library.*

*This event is held every Sunday Morning Pahing (35 days) located in the parking area of the park Denggung, near the comolex office of Sleman district government and opposite the library.*

*This public service innovation is integred with the term “Sunmor (Sunday Morning) Sembada Pahings Sunday” once pedaling, some of Slemans problems resolved, which is promotion and*



Inovasi pelayanan publik yang bersifat terpadu ini disebut "Sunmor (*Sunday Morning*) Sembada Minggu Pahingan", *Sekali Kayuh, Dua Tiga Permasalahan Sleman Teratasi*, yaitu penyelenggaraan even untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM warga miskin, pengenalan dan pelestarian seni budaya lokal, serta peningkatan minat baca masyarakat.

Kegiatan "Sunmor Sembada Minggu Pahingan" menghasilkan dampak antara lain UMKM peserta Sunmor meningkat 140%, dari 50 UMKM pada bulan Januari 2016 menjadi 120 UMKM pada bulan April 2017, omzet penjualan UMKM meningkat 60%, telah tampil 22 kelompok seni/sekolah di panggung seni budaya, dan meningkatnya kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah.

Inovasi ini berkelanjutan karena peran aktif pengelola Sunmor, terjadwal secara rutin di lokasi yang tetap, dan pembiayaan telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Sleman.

Replikasi kegiatan "Sunmor Sembada Minggu Pahingan" dapat dilakukan instansi pemerintah lain. Pemerintah Kecamatan Depok dan Pemerintah Desa Triharjo Kabupaten Sleman telah melakukan replikasi inovasi ini.

*marketing of UMKM product of the needy, the introduction and preservation of local culture art, as well as increased interest in reading the community.*

*The activities of "SunMor Sembada Pahings Sunday" resulted in the impact of among other UMKM sunmor participants increased 140% of 50 UMKM in Januari 2016 to 120 UMKM in April 2017, sales turn over UMKM increased 60%, has appeared 22 arts/school groups on the arts and cultural stage, and increasing community visits to regional libraries.*

*This innovation is sustainable because of the active role of sunmor Manager regularly scheduled in fixed locations and financing has been budgeted in the DPA of sleman sub district.*

*Depok district goverment and village goverment of Triharjo Sleman district have replicated this innovation. Replica of activities "Sunday Morning Sembada Pahing Sunday" can be done by other goverment agencies.*



## **SURYA MAS JELITA (SEHAT UNTUK BERKARYA, MANDIRI BERSAMA KELOMPOK JELANG ELIMINASI KUSTA)**

### ***SURYA MAS JELITA (HEALTHY TO WORK, INDEPENDENT WITH LATE LEPROSY ELIMINATION GROUP)***

74

UPTD Puskesmas  
Grati Dinas Kesehatan,  
Pemerintah Kabupaten  
Pasuruan

UPTD Community Health  
Center of Grati,  
Agency of Health  
Pasuruan Regency

**I** Penyakit kusta adalah penyakit yang menjadi momok di masyarakat Indonesia. Banyak hal yang mendasari sehingga penyakit kusta ini tidak segera terselesaikan permasalahannya. Dari stigma yang negatif, pengetahuan tentang penyakit kusta yang kurang, ditemukan kasus anak dan kecacatan, pola hidup bersih yang kurang standar, pendekatan yang dilakukan kurang tepat sehingga timbul kegagalan dalam eliminasi.

Di Puskesmas Grati penyakit kusta merupakan penyakit yang bercitra negatif dan mendapat diskriminasi di masyarakat sehingga penderita kusta merasa malu tidak mau berobat dan tidak berdayaguna. Berdasarkan permasalahan yang ada Puskesmas Grati memunculkan inovasi SURYA MAS JELITA (Sehat Untuk Berkarya Mandiri Bersama Kelompok Jelang Eliminasi Kusta). Di dalam SURYA MAS JELITA pendekatan strategi yang dilakukan bisa diterima dan membuat semua pihak ikut merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi kusta.

Pendekatan personal yang manusiawi, adanya komitmen bersama dan kesungguhan semua

**E** *Leprosy is a kind of disease that becomes a scourge in Indonesian society. There are many things underlie it so the problem of leprosy disease is not immediately resolved. The failure in eliminating the disease is caused by the negative stigma and less knowledge about this disease, the existence of leprosy cases in children and disability, less standard of clean lifestyle, and less precise of the approaches taken.*

*In Puskesmas Grati, leprosy is a disease that gets negative image and discrimination in society so that leprosy patient feel ashamed, do not want to get treatment and empowered. Based on the existing problems, Puskesmas Grati raises an innovation, a program namely SURYA MAS JELITA (Sehat Untuk Berkarya Mandiri Bersama Kelompok Jelang Eliminasi Kusta). The strategy approach in SURYA MAS JELITA is acceptable and makes all parties feel to have and take responsibility in the implementation of leprosy elimination activities.*

*A humanized personal approach, a shared commitment and the sincerity of all parties to the successful implementation of the program, a patient's cure, and an effective empowerment*

pihak untuk keberhasilan pelaksanaan program, kesembuhan pasien dan pemberdayaan yang efektif membuat SURYA MAS JELITA memberikan hasil yang memuaskan sampai detik ini.

Sebelum inovasi SURYA MAS JELITA, penemuan kasus kusta baru tahun 2008 sejumlah 16 orang namun setelah adanya SURYA MAS JELITA terjadi peningkatan jumlah penemuan kasus kusta baru mulai tahun 2009-2016 sejumlah 288 orang. Salah satu bukti keberhasilan dari 76 orang yang pernah mendapatkan pembinaan di program inovasi ini hingga saat ini dari 50 orang yang sudah sembuh, 30 orang yang sudah bisa berkarya dan mempunyai penghasilan, sisanya masih dalam perawatan dan pembinaan. dan 12 orang ( 3 terlatih) diantara mereka bersedia menjadi kader kusta

Program SURYA MAS JELITA ternyata juga menarik perhatian dari seluruh elemen termasuk dari perusahaan swasta sehingga semakin bisa memberikan manfaat pada penderita kusta agar menjadi pribadi yang mandiri dan lebih bermartabat. Kerjasama yang solid dari semua pihak, dukungan dana yang cukup, evaluasi yang berkelanjutan, semangat yang tidak pernah padam sehingga menjadikan SURYA MAS JELITA membuahkan hasil yang menggembirakan.

Saat ini SURYAMASJELITA telah dikembangkan di Puskesmas Lain di Kabupaten Pasuruan dan juga di jadikan studi banding di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Semoga SURYA MAS JELITA semakin berhasil dan bermanfaat serta dapat menjadi contoh sehingga penderita kusta menjadi sehat, mandiri, berkarya, berguna bagi keluarga dan masyarakat.

*make SURYA MAS JELITA deliver satisfactory results until this moment.*

*Before the innovation of SURYA MAS JELITA, the discovery of new cases of leprosy in 2008 was about 16 people, but after the SURYA MAS JELITA was raised, there was an increase in the number of new cases of leprosy from 2009-2016, that is about 288 people. One proof of the success of this innovation program is that of the 76 patients who have received coaching in this innovation program, 50 of them have recovered. Of those 50 who have recovered, 30 of them have been able to work and have income, and 12 of them (3 trained) are willing to become leprosy cadres, and the rest are still in care and coaching.*

*The SURYA MAS JELITA program also attracts the attention of all elements, including private companies, so that it can provide benefits to leprosy patients to become independent and more dignified individuals. The solid cooperation from all parties, the adequate funding support, the sustainable evaluation, and a never-ending spirit make SURYA MAS JELITA give an encouraging result.*

*Currently, SURYAMASJELITA has been developed at Other Puskesmas in Pasuruan Regency and is made as a reference for comparative study not only in Indonesia but also abroad. Hopefully, SURYA MAS JELITA become more successful and useful, and can be an excellent example so that lepers become healthy, independent, able to work, and useful for family and society.*



## “TAX SHOPPING” BELANJA PUAS PAJAK LUNAS

### “TAX SHOPPING” SHOPPING AND PAYING THE TAX AT THE SAME TIME

# 75

Badan Pendapatan Daerah,  
Pemerintah Kabupaten  
Tangerang

Regional Revenue Board,  
Tangerang Regency

1 Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah Kabupaten Tangerang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai pengalihan kebijakan Pemerintah Pusat.

Perda tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yakni terbatasnya tempat layanan pembayaran hanya 20 unit dan 5 unit mobil keliling; masih kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak; besarnya piutang sebesar Rp581.126.668.439; besarnya jumlah WP sebanyak 900.525 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan sebaran 246 desa dan 28 kelurahan.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Tangerang meluncurkan inovasi yang disebut “Tax Shopping” atau “belanja pajak” artinya berbelanja sambil membayar pajak. Inovasi ini merupakan prinsip administrasi pajak dan tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan pajak. Tujuan yang ingin dicapai adalah

2 Since January 1, 2014, the Government of Tangerang District has collected Land and Rural Land and Urban Tax (PBB-P2) taxes under Regional Regulation No. 18 of 2014 on the Second Amendment to Regional Regulation No. 10/2010 on Regional Taxes as a diversion of Central Government policy.

The regulation is motivated by several conditions, namely the limited payment service of only 20 units and 5 units of mobile cars; Still less complacent people in paying taxes; Amount of receivables amounting to Rp581.126.668.439; The amount of WP as much as 900.525 Tax Return Notice (SPPT) with the distribution of 246 villages and 28 urban villages.

Under these conditions, Tangerang District Government launched an innovation called “Tax Shopping” or “tax expenditure” means shopping while paying taxes. This innovation is the principle of tax administration and governance in tax management. Objectives to be achieved are voluntary compliance tax (voluntary compliance) so that paying taxes becomes a necessity.

kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) sehingga membayar pajak menjadi suatu kebutuhan.

Program "Tax Shopping" merupakan perluasan *delivery channel* dalam melakukan pembayaran PBB-P2 melalui pemanfaatan gerai-gerai minimarket yang tersebar sebanyak 750 gerai di Kabupaten Tangerang dan sebanyak 20.000 lebih minimarket di seluruh Indonesia, sehingga dengan adanya "Tax Shopping" kepatuhan wajib pajak meningkat secara sukarela.

Keunikan "Tax Shopping" yaitu bersinerginya peran dan fungsi perbankan (Bank BJB) dan non-perbankan (gerai minimarket/Alfamart/Indomart) dalam ekspansi dan berperan meningkatkan layanan masyarakat dengan puluhan ribu titik tempat pembayaran, bebas waktu (24/7), tanpa libur (*non-stop*), ongkos murah (*low cost*), tanpa membebani APBD dan bersinergi dengan pihak swasta dalam peningkatan layanan jasa.

Adapun unsur kreatif dan inovatif dari pengembangan "Tax Shopping" adalah *pertama*, kemitraan antara perbankan dengan gerai-gerai minimarket dalam mengakselerasi fungsi pemerintah daerah dalam pelayanan kebutuhan konsumen baik barang atau jasa (pembayaran PBB-P2); *kedua*, efektif dalam waktu dan tempat pembayaran yang dekat dan terjangkau; *ketiga*, efisiensi tanpa harus menyiapkan sarana prasarana tempat pembayaran; *keempat*, keamanan dalam melakukan pembayaran; *kelima*, kenyamanan dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak, bebas dari antrean dan bebas kejenuhan dan diberikan layanan yang santun.

*The "Tax Shopping" program is an extension of the delivery channel in making PBB-P2 payments through the utilization of minimarket outlets spread over 750 outlets in Tangerang District and as many as 20,000 more minimarkets throughout Indonesia, so that with the "Tax Shopping" taxpayer compliance increases voluntarily.*

*The uniqueness of "Tax Shopping" is the continuity of the role and function of banking (Bank BJB) and non-banking (minimarkets / Alfamart / Indomart) in the expansion and role of improving public service with tens of thousands of points of payment, free time (24/7), non-stop, low cost, without burdening the APBD and synergize with the private sector in improving service to the community.*

*The creative and innovative elements of the development of "Tax Shopping" is the first, a partnership between banking with minimarket outlets in accelerating the function of local government in the service needs of consumers either goods or services (payment PBB-P2); Second, effective in time and place of payment that is close and affordable; Third, efficiency without having to prepare infrastructure facilities for payment, network, without recruiting and hiring employees; Fourth, security in making payments because it is close to the settlements; Fifth, convenience is done directly by the Taxpayer, free of queue and free of saturation and given a polite service.*

*"Tax Shopping" is a Sustainability Program that can be replicated by the government, provincial, district / city, state-owned enterprises, BUMDs throughout Indonesia or by other agencies against tax payment, levy, insurance and other opportunities.*



## TELAT BERKEMAS (TETAP LESTARI BERDAYAKAN KELOMPOK MASYARAKAT)

### TELAT BERKEMAS (STAYING SUSTAINABLE COMMUNITY EMPOWERMENT)

76

Dinas Perikanan Pemerintah  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Agency of Fisheries,  
Hulu Sungai Selatan Regency

**I** Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang memiliki kawasan perairan rawa dan sungai yang termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Amandit dan Sub DAS Nagara. Kondisi wilayah ini memiliki keunikan dan karakteristik yang beragam. Potensi perairan umum yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar 80.790 Ha (44,76%) meliputi perairan rawa 60.697 Ha dan perairan sungai 20.093 Ha dari jumlah luasan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 180.494 Ha. Dengan kawasan reservat Danau Bangkayu seluas 615 Ha. Potensi yang cukup besar ini dapat terus dikembangkan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan regulasi yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perlindungan sumberdaya perikanan yang memberdayakan masyarakat dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu pengawasan perikanan. Namun pola pengawasannya yang belum terkoordinir, akibatnya masih banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi dan banyak pelaku yang tidak tertangkap. Sehingga Dinas Perikanan membuat inovasi

**E** *South Hulu Sungai Regency located in South Kalimantan Province is a region that has a region of swamp and river waters which are included in Amandit Sub Watershed (DAS) and Nagara Sub DAS. The condition of this region has uniqueness and various characteristics. The potential of public waters owned by Regency of Hulu Sungai Selatan is 80,790 Ha (44,76%) covering 60,697 Ha and 20,093 Ha of swamp water from total area of Hulu Sungai Selatan Regency 180,494 Ha. With the reservat area of Lake Bangkayu area of 615 Ha. Potensi large enough this can continue to be developed in the future.*

*Based on regulations issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hulu Sungai Selatan Regency on the protection of fishery resources that empower communities in the Community Monitoring Group (Pokmaswas) to assist fishery control. But the pattern of supervision that has not been coordinated, consequently there are many cases of illegal fishing that occurred and many perpetrators who are not caught. So the Department of Fisheries make innovation TELAT BERKEMAS (Permanent Sustainable Empower Community group). To overcome the high number of illegal*



TELAT BERKEMAS (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok masyarakat). Untuk mengatasi tingginya kasus *illegal fishing*, keterbatasan jumlah petugas pengawas yang tidak sebanding dengan luasan perairan umum dan Pokmaswas yang belum terkoordinir pada tahun 2010 Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil sebuah inisiatif membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

Dengan adanya inovasi tersebut, terjadinya penurunan *illegal fishing* dari 80 kasus pada periode tahun 2003-2009 menjadi 40 kasus pada periode 2010-2016. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun. Tahun 2010 produksi perikanan tangkap sebesar 7.225,2 ton, tahun 2011 sebesar 7.350,35 ton, tahun 2012 sebesar 7.200,5 ton tahun 2013 sebesar 7.313,69, tahun 2014 sebesar 7.501,20 ton dan tahun 2015 sebesar 7.964,64 ton serta tahun 2016 sebesar 8.225,4 ton. Munculnya kesadaran masyarakat, hal ini ditandai dari pembiayaan operasional Pokmaswas yang dulunya Pemerintah Daerah lebih dominan seiring waktu pembiayaan tersebut bergeser kepada masyarakat.

*fishing cases, the limited number of supervisors who are not comparable with the extent of public waters and uncoordinated Pokmaswas in 2010 The Department of Fisheries of Hulu Sungai Selatan District took an initiative to establish a Coordination Team for the Control and Handling of Criminal Acts in the Field of Fisheries.*

*With the innovation, the decrease of illegal fishing from 80 cases in the period of 2003-2009 to 40 cases in the period 2010-2016. Increased production of capture fisheries from year to year. In 2010, the production of capture fisheries amounted to 7,225.2 tons, in 2011 of 7,350.35 tons, in 2012 of 7200.5 tons in 2013 of 7,313.69, in 2014 of 7,501.20 tons and in 2015 by 7,964.64 tons and the year 2016 of 8,225.4 tons. The emergence of public awareness, this is marked from the operational funding Pokmaswas formerly more dominant Regional Government over time the financing is shifted to the community.*



## TOKO MODERN DATANG, TOMIRA SOLUSINYA

### **MODERN STORES COMING, TOMIRA THE SOLUTION**

77

Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah, Pemerintah  
Kabupaten Kulonprogo

*Agency of Cooperatives, Small  
and Medium Enterprises,  
Kulonprogo Regency*

- I** Maraknya Toko Modern berjejaring dan dekat pasar tradisional, memicu keresahan dan prokontra, melihat hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan peraturan berupa Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang didalamnya memuat bahwa Toko modern yang berstatus jejaring dan waralaba serta berjarak kurang dari 1000 m dengan pasar tradisional harus dilakukan sanksi berupa penutupan, terhadap 18 Toko modern yaitu dari Alfamart dan Indomaret yang melanggar perda. Akan tetapi Pemda Kulon Progo mencari solusi alternatif dan diharapkan juga Alfamart maupun Indomart bisa mendukung dan berpihak pada ekonomi kerakyatan sehingga bisa bekerja sama dengan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dan mengimplementasikan Program "Bela dan Beli Kulon Progo". Akhirnya muncul kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program Toko Milik Rakyat (ToMiRa)
- E** *The networked modern stores who run near the traditional market have triggered social desolation and difference argument which is pro and contra, based on this situation the Kulon Progo Regency Local Government declare the rule Number 11 Year of 2011 regarding The Protection and Traditional market Empowerment and Center of Business and Modern Stores Setting, therefore the modern store which its shape is franchise and network and operate in less than 1000 m distance with traditional market must be given a punishment in form of obstruction so there are 18 modern stores which are Indomart and Alfamart are crashing the local government rule. But the Kulon Progo's Regency Government seek the alternative solution so that Alfamart and Indomart willing to courage, supportive and line up with community based economics empowerment so they can work mutually with Microfinance board in Kulon Progo Regency and they are willing to implement the Bela dan Beli Kulon Progo Program (Defend Kulon Progo and Buy Kulon Progo). Latterly born the agreement about collaborative work in developing community based economic empowerment which has companionship mode with Microfinance board, Micro Business, Small*



dengan menggandeng Koperasi dan UMKM.

Keunikan dan model pembaharuan ToMiRa yaitu sudah tidak lagi Monopsoni didalam pengelolaan pabrikan artinya sudah ada pemasok lain, dimana sudah tidak ada lagi yang dinamakan pembayaran Royalty, selain itu penggunaan Sistem Operasional manajemen toko, manajemen rantai pasokan dan barang dagangan tidak ada biaya atau Manajemen fee. Selain dari pasokan barang pabrikan juga ada pasokan dan penjualan produk-produk lokal UMKM Kabupaten Kulon Progo minimal 20% dari barang toko dan status pemasok dari produk lokal setara dengan perusahaan pabrikan yaitu sama-sama sebagai pemasok. dengan adanya sistem yang disejajarkan harapannya adalah terbentuknya produk-produk lokal yang bermutu dan layak jual di dalam pangsa pasar Modern.

*Business and Middle Scope Business through the program named Toko Milik Rakyat (ToMiRa).*

*The unique innovation model of ToMiRa is it can stop the monopsony pattern in distribution of manufactory goods management that mean other supplier possibly enter in where there is no royalty payment anymore. furthermore the implementation of store management system, chain sourcing management and merchandise management can make fee less or it can clear the management fee. It also urge that beside manufactory goods supply there must at least 20 % of stores stock are Kulon Progo Regency local Small Bussiness and Middle scope Business (UMKM) products and the status of Local products Suppliers are in one level with manufactory product Suppliers by this way the local government hope that will rise many good quality local products and marketable products are existing at modern market segment.*



## TUA KELADI (SANTUN LANSIA, KESEHATANNYA LAYAK DIPERHATIKAN)

### TUA KELADI (ELDERLY, HEALTH CARE WORTHY OF ATTENTION)

78

UPTD Puskesmas Gamping I  
Dinas Kesehatan, Pemerintah  
Kabupaten Sleman

UPTD Community Health Center  
of Gamping I, Agency of Health  
Sleman Regency

1 Pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya lansia (lanjut usia) di Puskesmas Gamping I Kabupaten Sleman seringkali menjumpai keluhan, antara lain lamanya waktu tunggu pelayanan, tidak ada perlakuan khusus, dan tidak tersedia sarana prasarana khusus bagi lansia, sehingga lansia maupun keluarga yang menemani lansia (*caregiver*) cenderung tidak sabar dan akhirnya malas untuk periksa secara rutin.

Mulai tahun 2012 dilakukan upaya perubahan atau inovasi "TUA KELADI, SanTUn Lansia KEsehatannya LAYak Diperhatikan". Inovasi ini memberikan perhatian khusus terhadap lansia. Dilakukan perubahan berupa penyediaan ruang tunggu khusus lansia yang lebih nyaman, penyediaan toilet khusus pasien lansia, penyediaan alat bantu bagi lansia seperti kursi roda, *tripot*, *walker*, pelaksanaan tes intelegensia lansia, dan pelayanan konseling bagi lansia penderita penyakit kronis yang juga dapat mengakses informasi melalui SMS Gateway dengan nomor +628986014747 dan *e-counseling* (<http://pkmgamping1.slemankab.go.id/hubungi-kami/e-konseling/>). Pelayanan terhadap lansia dilakukan secara

2 Health services for vulnerable groups, especially lansia (elderly) in Public Health (Puskesmas) of Gamping I Sleman District often encounter complaints, such as length of service waiting time, no special treatment, and no special infrastructure facilities for elderly, so elderly and families who accompany elderly (*Caregiver*) tend to be impatient and finally lazy to check regularly.

Starting in 2012 carried out efforts to change or innovation "TUA KELADI, SanTUn Lansia kesehatannya Layak Diperhatikan" (Elderly manner, their health deserves be noticed). This innovation pays special attention to the elderly. Changes in the form of providing elderly special waiting room that is more comfortable, provision of special toilet elderly patients, the provision of tools for elderly such as wheelchairs, *tripot*, *walker*, the implementation of elderly intelligence tests, and counseling services for those suffering from chronic diseases can access information via SMS Gateway With number +628986014747 and *e-counseling* (<http://pkmgamping1.slemankab.go.id/help-kami/e-konseling/>). Service to elderly is done by **one stop service**, patient checked and



one stop service, pasien diperiksa dan dilayani di poli lansia termasuk kebutuhan obat dan pemeriksaan laboratorium. Puskesmas juga melakukan pelayanan luar gedung atau di pemukiman penduduk, dengan membentuk posyandu dan posbindu lansia, menggerakkan kader kesehatan lansia untuk membantu melayani lansia, mengadakan senam lansia secara rutin dan senam vitalisasi otak, menyelenggarakan terapi bagi lansia penderita demensia (kepikunan) untuk mengurangi dampak kepikunan lansia, serta melakukan kunjungan rumah bagi lansia yang tidak mampu berkunjung ke Puskesmas.

Dampak positif inovasi ini antara lain terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien lansia, yaitu pada tahun 2012 jumlah pasien 375 orang, meningkat menjadi 3.971 pada tahun 2016. IKM meningkat dari nilai 79,66 pada tahun 2012, menjadi 81,40 pada tahun 2016. Selain itu berdasarkan hasil penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, setelah lansia mengikuti terapi yang dilakukan oleh kader lansia yang telah dilatih oleh petugas Puskesmas, dapat menurunkan tingkat kepikunan pada lansia dari tingkat kepikunan sedang (65,6%) menjadi tingkat kepikunan normal-ringan (62,5%).

*served in elderly poly including requirement of drug and laboratory examination. Public Health also perform services outside the building or in the settlement of the population, by establishing posyandu and posbindu for elderly, mobilizing elderly health cadres to help the elderly serve, regular elderly gymnastics and brain vitality gymnastics, conducting therapy for elderly people with dementia, to reduce the impact Senility of elderly, as well as home visits for the elderly who are unable to visit the health center.*

*The positive effects of this innovation include an increase in the number of visits of elderly patients, ie in 2012 the number of patients 375 people increased to 3971. In 2016, IKM increased from 79.66 in 2012 to 81.40 in 2016. In addition, based on research results Health Polytechnic of Health Ministry Yogyakarta, after the elderly to follow therapy performed by elderly cadres who have been trained Public Health officers, can reduce the level Senility in the elderly, from the level of mild senility (65.6%) to the level of normal-light senility (62.5%).*



## COMMAND CENTER 112 KOTA SURABAYA

### COMMAND CENTER 112 CITY OF SURABAYA

79

Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Surabaya

Agency of Communications and Informatics, Surabaya City

**I** Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta. Permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat kota antara lain kebakaran, kecelakaan lalu-lintas, konflik sosial, bangunan runtuh, orang tenggelam, papan reklame roboh, pohon tumbang, kemacetan, dan permasalahan lainnya. Masyarakat Kota Surabaya sering mengalami kebingungan dalam menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya, karena banyaknya nomor dari beberapa instansi yang menangani masalah tersebut.

Permasalahan tersebut menggerakkan Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya untuk membentuk suatu pelayanan publik terpadu guna menangani berbagai keluhan/laporan/pengaduan atau permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat baik yang bersifat kegawatdaruratan maupun tidak. Untuk lebih mempermudah dalam mengakses pelayanan publik, masyarakat Surabaya cukup menghubungi satu nomor yang mudah diingat dan bebas biaya serta dapat diakses selama 24 jam penuh tanpa libur. Inovasi pelayanan publik tersebut adalah *Command Center 112*.

**E** *Surabaya is the second biggest city in Indonesia with the population of more than 3 million people. There are many social issues in this city, such as fire, traffic accidents, social conflicts, collapsed buildings, uprooted trees, traffic jams, and other problems. The Surabaya's citizens often got confused when they want to report for those problems, because of many numbers of many departments who handled those issues.*

*It moved the Mayor of Surabaya, Tri Rismaharini, to create an integrated public service to handle those reports at the time, whether it is emergency matter or some other reports. To make it easier, people only need to call one memorable number, free of charge, and can be accessed in 24 hours in a week. It is called as Command Center 112.*

*This integrated public service involves all work units in the Surabaya City Government who have the authorities in handling the problems. Moreover, the City Government also involves the Surabaya Police Department, State Electricity Enterprise, Water Supply Company, Indonesia Red Cross, Telecommunication Company, and also all cellular providers as the one who give*



Layanan publik terpadu tersebut melibatkan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu Pemerintah Kota juga melibatkan Polrestabes Surabaya, PLN, PDAM, PMI dan Telkom serta semua Operator Telekomunikasi selaku pemberi pelayanan publik lainnya.

Adapun tujuan utama dari pelayanan publik terpadu ini adalah memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk menyampaikan pengaduan atau permasalahan lainnya. Pemerintah Kota Surabaya juga dapat segera menindaklanjuti dan menangani segala pengaduan atau permasalahan lainnya secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Pelayanan publik ini diberikan tanpa persyaratan dan tanpa biaya. Inovasi pelayanan publik ini bersifat unik dan kreatif karena dapat mensinergikan antara OPD di lingkungan Pemkot dengan instansi di luar Pemkot dalam memecahkan masalah.

*the public service towards all people.*

*The purpose of this integrated public service is to give the ease for all people in Surabaya to file their reports, complaints, or other problems. The Surabaya City Government also can follow up and handle the filed reports in fast, proper, effective, and efficient way. This public service is given for free. This innovation is unique and creative, because it can put all parties in synergy, both in the internal of the Surabaya City Government and other parties.*



# BCL (BISNIS CAKEP LALU LINTAS LANCAR) PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS MELALUI SMARTPHONE

## *BCL (BUSINESS GOOD CURRENT TRAFFIC) ARRANGEMENT AND CONTROL OF TRAFFIC THROUGH SMARTPHONES*

Dinas Perhubungan,  
Pemerintah Kota Pontianak

*Agency of Transportation,  
Pontianak City*

80

1 Kota Pontianak merupakan kota dengan aktivitas utama di bidang perdagangan dan jasa. Aktivitas tersebut terpusat pada kawasan CBD (*Central Business District*) yang berada di sekitar Jl. Tanjungpura, Jl. Diponegoro, dan Jl. H. Agus Salim.

Aktivitas lalu lintas di kawasan CBD sangat padat dan dilewati oleh berbagai jenis moda angkutan. Selama ini kondisi lalu lintas sering mengalami hambatan dan cenderung semrawut karena adanya : 1) Aktivitas parkir di badan jalan yang bercampur antara kendaraan roda dua dan roda empat serta menggunakan separuh badan jalan; 2) Aktivitas naik turun penumpang di sembarang tempat; 3) Aktivitas bongkar muat barang disepanjang kawasan; dan 4) Terbatasnya jumlah petugas untuk mengawasi kawasan tersebut sepanjang waktu.

Upaya untuk mengatasi permasalahan lalu lintas pada kawasan CBD merupakan upaya yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh sehingga langkah yang dilakukan akan berjalan efektif dan sampai pada sasaran yang diharapkan.

2 *Pontianak city is a city with main activities in trading and services. The activities are centered on CBD (Central Business District) area located on Jl. Tanjungpura, Jl. Diponegoro, and Jl. H. Agus Salim.*

*Traffic activities in the CBD area are very crowded and passed by various types of transportation mode. During this time traffic conditions often experience obstacles and tend to be chaotic because of : 1) Parking activities on the roads are mixed between two-wheeled and four wheels vehicles and use half of the road; 2) Up and down passenger activity in any place; 3) Loading and unloading activities throughout the area; and 4) Limited number of officers to supervise the area at all times.*

*Efforts to solve the traffic problems in the CBD area are an effort that is done in an integrated and comprehensive so that the steps taken will run effectively and reach the expected target.*

*The approach taken is a combination of conventional approaches in addressing traffic problems and utilizing information technology through applications in a smartphone.*

## KONDISI SEBELUM INOVASI

BCL

Aktivitas perdagangan baik berupa barang maupun jasa, maupun sektor lain terus berkembang. Untuk mendukung pertumbuhan kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan peningkatan sistem manajemen lalu lintas di area CBD Kawasan Business District.



## KONDISI SETELAH PENGATURAN



Pendekatan yang diambil merupakan gabungan dari pendekatan konvensional dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi yang terdapat pada *smartphone*.

Melalui aplikasi *smartphone* yang terhubung dengan kamera pengawas (CCTV) yang dipasang pada titik tertentu dan dilengkapi dengan pengeras suara, personel Dinas Perhubungan dapat memantau, mengawasi, menyampaikan informasi, arahan, perintah maupun peringatan secara langsung kepada pengguna jalan agar mengikuti ketentuan berlalu lintas. Apabila tidak diindahkan, petugas yang sedang berpatroli dapat langsung digerakan karena keberadaannya terpantau melalui GPS (*Global Positioning system*) dan dapat dihubungi dengan mudah melalui radio panggil (HT).

Kondisi tersebut telah mengurangi intensitas kehadiran petugas, sehingga petugas dapat lebih diberdayakan dan jangkauan pelayanannya menjadi semakin luas.

*Through a smartphone application connected to a surveillance camera (CCTV) installed at a certain point and equipped with a loudspeaker, the Department of Transportation officers can monitor, watch, convey information, directions, orders or warnings directly to road users to follow traffic rules. If not adhered to, officers who are on the patrol can be directly mobilized because of its presence is monitored via GPS (Global Positioning system) and can be reached easily by Handy Talky (HT).*

*These conditions have reduced the intensity of the presence of officers so that officers can be more empowered and the range of services becomes more widespread.*



## CETEK (CUKUP E-KTP SERTAKAN KARTU KELUARGA)

### CETEK (SIMPLY E-ID CARD SUBMIT A FAMILY CARD)

81

RSUD Al Mulk, Pemerintah Kota Sukabumi

RSUD Al Mulk  
Sukabumi City

**I** UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang didirikan secara resmi pada tanggal 15 Januari 2015 sebagai rumah sakit tipe D Pratama. Tujuan utama dibangunnya UPT RSUD Al-Mulk adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam memberikan kemudahan terhadap warga Kota Sukabumi tanpa memandang status sosial dan ekonomi dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi yang Sehat dan Mandiri.

Permasalahan pelayanan kesehatan rujukan di Kota Sukabumi diantaranya adalah: Kota Sukabumi hanya memiliki 1 RSUD sehingga sering terjadi penumpukan pasien terutama di kelas III, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, prosedur yang rumit serta ketidakpastian mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan secara gratis serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi yang relatif kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membiayai premi asuransi penduduk Kota Sukabumi yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Untuk memecahkan masalah pelayanan

**E** *Technical Executor Unit of Al-Mulk of Sukabumi City is part of Sukabumi City's Health Agency that was officially build on January, 15, 2015 as a public hospital with class of D Basic. The main objective of UPT RSUD Al-Mulk is to increase health services especially in providing an ease for Sukabumi City's citizens regardless their economical and social status in order to realize Sukabumi City as a Healthy and Independent City.*

*Referral health service problems in Sukabumi City are : Sukabumi City has only one local government hospital, and as a result there has been a pile of many patient queues especially in class III, many people who do not have health assurance, complicated procedures, uncertainty in having a free referral health as well as the local net income of Sukabumi City is relatively low so it is impossible to cover insurance premium for citizens of Sukabumi City who do not have health insurance.*

*To solve the problem of free referral health service and because of low net income of Sukabumi City, in order to realize certainty in service for Kota Sukabumi's citizens, hence The Mayor and*

kesehatan rujukan serta mengingat kecilnya PAD Kota Sukabumi, sehingga terwujudnya kepastian pelayanan bagi warga Kota Sukabumi, maka Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi berinisiatif membangun sebuah Rumah Sakit Umum Daerah yaitu UPT RSUD AL-Mulk dibawah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan inovasi program CETEK (Cukup E-KTP sertakan Kartu Keluarga) dapat mengakses pelayanan kesehatan gratis di UPT RSUD AL-MULK Kota Sukabumi.

Manfaat yang dirasakan setelah inovasi ini di antaranya bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kota Sukabumi, adanya kepastian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, serta masyarakat Kota Sukabumi yang mengakses pelayanan kesehatan di UPT RSUD AL-Mulk dibebaskan dari segala biaya tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Masyarakat di luar Kota Sukabumi yang tidak memiliki akses kesehatan yang baik di daerahnya dapat merasakan manfaat keberadaan RSUD AL-Mulk meskipun dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum adanya Inovasi, RSUD R. Syamsudin, SH sebagai satu-satunya RSUD di Kota Sukabumi memiliki angka hunian tempat tidur (BOR) untuk kelas III yang sangat tinggi dan melebihi angka normal, setelah inovasi BOR mengalami penurunan sebanyak 37%. Pengajuan SKTM Kesehatan di Kota Sukabumi sudah tidak ada lagi pada tahun 2016 dari 4.067 pengajuan pada tahun 2014. Dan angka kunjungan RSUD AL-Mulk mengalami peningkatan setiap tahunnya.

*The Vice Mayor of Sukabumi City initiated to build a local government's public hospital that is UPT RSUD AL-Mulk under The Health Agency of Sukabumi City with a program innovation of CETEK (Enough with E-Citizen Card and Family Card), so Sukabumi City's citizen are able to access free services at UPT RSUD AL-Mulk.*

*The benefits of implementation this innovation are an increase of referral health service facilities in Kota Sukabumi City, there is a certainty in having health services, and Sukabumi City's society who access health service at UPT RSUD AL-Mulk is freed from any fee regardless their social and economical condition. Society from out of Sukabumi City who do not have good health access in their area can take benefit from the local government public hospital of AL-Mulk, although they have to pay service fee as to act as.*

*Before the innovation, RSUD R. Syamsudin, SH as the only one local government hospital has a higher number and more than a normal rate of bed dwelling rate (BOR) of class III, after the innovation the BOR number drops by 37 %. Submission of health SKTM in Sukabumi City has been stopped since 2016 from 4.067 in 2014 and the number of medical visit to RSUD AL-Mulk has been increased every year.*



## DIREKAM DI SEKOLAHKU, SWEET SEVENTEEN, KTP-EL KU DATANG

### *RECORDED IN MY SCHOOL, SWEET SEVENTEEN, MY KTP-EL IS COMING*

82

Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil,  
Pemerintah Kota Surakarta

*Agency of Population and  
Civil Registration,  
Surakarta City*

1 Sejak Kebijakan KTP EL diluncurkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2011, teknis proses kepemilikan KTP Elektronik lebih kompleks daripada KTP reguler, karena warga harus datang sendiri direkam (difoto, direkam Pusat, teknis proses pembuatan KTP Elektronik lebih kompleks daripada KTP seluruh sidik jari, iris mata tandatangan secara elektronik), data harus terkirim secara online ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses penunggalan baru bisa dicetak. Artinya bahwa untuk cetak KTP Elektronik melalui prosedur yang lebih panjang.

Apalagi di usia pelajar, masih banyak yang belum sadar akan arti pentingnya memiliki KTP EL. Mereka lebih senang memiliki Kartu Pelajar. Oleh sebab kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kepada pelajar tentang akan arti pentingnya KTP EL bagi pelajar yang sudah berusia 17 Tahun. Sehingga sekaligus bisa memberikan praktek pendidikan kewarganegaraan. Penduduk termasuk pelajar usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban warga Negara.

2 *Since the Electronic Identity Card policy was launched by the Government in 2011, the technical process to claim Electronic Identity Card was more complex than the conventional one. Residents had to come in person in order to be recorded (Photograph, the whole fingerprints, iris, as well as electronic signature), the data must be submitted online to the Ministry of the Home Affairs for labeling single identity. New Electronic Identity Card can be printed only if pass this process. This means, it would take longer procedure to print an Electronic Identity Card.*

*Especially for high school students, many of them are not fully aware of the importance of having an Electronic Identity Card. They prefer to have a Student Card. Thus, this innovation began with socialization activities to students who are 17 years old which aimed to explain about the importance of Electronic Identity Card for students. In consequences, this provided civic education practice. Residents, including 17-year-old students, are required to have Identity Card. This policy deals with the rights and obligations of citizens.*

Program ini merekam seluruh sekolah Tingkat Atas, termasuk sekolah-sekolah anak yang berkebutuhan khusus. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus/sakit keras sampai usia 17 tahun belum direkam maka akan didatangi ke rumah/panti masing-masing dengan memberikan informasi terlebih dahulu ke Dispendukcapil.

Program Jemput bola ini akan mempermudah pelayanan sehingga siswa tidak perlu meninggalkan sekolah. Selain efektif waktu juga efisien dalam biaya, karena dapat mengurangi biaya operasional siswa.

Setelah rekam E-KTP mulai tahun 2015 apakah berhasil atau tidak dapat mengecek lewat online di <http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/>. Hanya memasukan Nomor Induk Kependudukan. Hal ini juga mendidik siswa untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi.

Dampak dari pelaksanaan inovasi ini diantaranya pada tahun 2016 jumlah penduduk yang wajib KTP sebesar 426.663 jiwa, sudah 409.636 jiwa atau sebesar 96,01 % yang melakukan perekaman KTP elektronik. Artinya ada kenaikan 27,22 % sejak tahun 2012. Sedangkan cakupan penduduk usia wajib KTP pemula (17 tahun) yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik meningkat. Tahun 2016 wajib KTP pemula yang sudah melakukan perekaman sebanyak 8.110 jiwa dari total wajib KTP pemula sebanyak 8.664 jiwa, atau sebesar 98,22 %. Artinya ada kenaikan 89,04% sejak tahun 2012.

*The program records all students of the high Schools, including schools of children's with particularneeds. For children with particular needs or severe illness until the age of 17 years oldwho has not been recorded,Population And Civil Registration Office Surakarta will visit homes or shelters in order to record after information was given by schools or shelters.*

*This so called "Proactive" program will facilitate the service so that students do not have to leave school. In addition, not only beneficial for being effective in time and efficient in cost, but it can also reduce student operating costs.*

*After recording data for Electronic IdentityCard, starting in 2015 students can check whether their record was successful or not by online at <http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/> by submitting the Population Identity Number on the column provided in the site. This activity also educates students to be able to utilize information technology.*

*The impact of implementation of this innovation is that in 2016 from the number of residents who are obliged for Electronic IdentityCard of 426.663 people, as many as 409.636 people or 96.01% have already recorded the data of Electronic Identity Card. This means, an increase of amount 27.22% since 2012. While the coverage of the compulsory age of Electronic IdentityCard (17 years old) who have committed the Electronic IdentityCard recording is increasing. In 2016 compulsory Electronic IdentityCard that has been recorded was 8,110 people from the total compulsory Electronic IdentityCard which cover 8,664 people, or 98.22%. That means, there is an increase of 89.04% since 2012.*



## DONGKEL WITH MOBILE LIBRARY

### *DONGKEL WITH MOBILE LIBRARY*

83

Dinas Perpustakaan,  
Pemerintah Kota Makassar

*Library Service,  
Makassar City*

1 Selama ini layanan perpustakaan keliling di Kota Makassar kurang maksimal dan belum menarik di mata masyarakat sehingga tingkat kunjungan di setiap titik layanan perpustakaan hanya berkisar 20-50 orang dan didominasi oleh pengunjung dewasa yang sudah tahu membaca. Selain itu jumlah inisiatif permintaan perpustakaan dari instansi/sekolah/komunitas rata-rata hanya 1 kali permintaan sebulan. Angka budaya baca di Kota Makassar berdasarkan survey Tri Tunggal Sejaya tahun 2015 masih di angka 28,34 %.

Di satu sisi kota Makassar telah memiliki beberapa pendongeng dari alumni juara lomba mendongeng yang belum diberdayakan dan ada satu komunitas dongeng yang sudah dibentuk tetapi tidak berjalan dengan baik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka pada awal tahun 2016 tepatnya tanggal 18 Januari 2016, perpustakaan keliling kota Makassar melakukan inovasi dengan berkolaborasi bersama pendongeng yang diberi nama program Dongeng Keliling bersama Perpustakaan Keliling (Dongkel with Mobile Library). Program Inovasi Dongkel with

2 *Previously, mobile library service in Makassar City was less and not interested for public with the rate of visit of visitors at any point of services was only about 20 to 50 people and was dominated by adult visitors. In addition, the number of requests from agencies/schools/communities for being visited by mobile library service was only once in a month. Based on the Tri Tunggal Sejaya's survey result in 2015, the reading culture of Makassar inhabitants was 28,34%.*

*On the other hand, Makassar has storytellers that were resulted from storytelling events or championships who have not been empowered, and there was a group of storyteller that has been formed but were inactive as well.*

*In terms of answering this problem, in early 2016, precisely on January 18, Makassar city mobile library started an innovation by involving storytellers in the program named 'Dongeng Keliling bersama Perpustakaan Keliling' (Dongkel With Mobile Library). This program has been running for a year and it has 4 (four) uniqueness. Firstly, this innovation has been just implemented only on mobile library service.*



*Mobile Library* yang sudah berjalan setahun ini memiliki 4 keunikan. Pertama, inovasi ini baru dilaksanakan di layanan perpustakaan keliling. kedua, inovasi ini memotivasi masyarakat untuk gemar membaca. Ketiga, inovasi ini memberdayakan profesi pendongeng dan menjadi wadah bagi mereka. Keempat, inovasi ini dapat melestarikan budaya mendongeng dan melestarikan cerita rakyat di daerah.

Setelah berjalan setahun, inovasi Dongkel with *Mobile Library* akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan di Perpustakaan Keliling. Pada tahun 2016, Pengunjung naik rata-rata 100 orang/ kunjungan/ hari khususnya anak-anak. Permintaan layanan perpustakaan dari instansi/ sekolah/ komunitas tiap bulan bertambah antara 5 – 10 permintaan. Kemudian angka budaya baca tahun 2016 tumbuh menjadi 39,49 % atau naik 11,15 %. Sebanyak 16 orang pendongeng yang diberdayakan di awal program ini akhirnya bertambah menjadi 20 orang pendongeng dan komunitas dongeng tumbuh menjadi 3 komunitas.

*Secondly, it motivates people to put their attention to love reading further. Thirdly, this innovation empowers storytellers and facilitates them to become their home. Fourthly, it familiarizes storytelling into culture and folklore.*

*After being implemented within a year, this innovation can eventually increase the number of visit of the mobile library services. By 2016, the number of visitors has increased to an average of 100 people per visit each day, especially it is dominated by children visitors. The request from agencies/ schools/ communities has increased between 5 to 10 requests each month. A reading culture result in 2016 has increased into 39.49% or has increased by 11.15%. At the beginning, only 16 storytellers were involved in this program, then it has increased to 20 storytellers and it included also to the storyteller group that grew into 3 (three) groups.*



## GEMA MADANI SIMPATI

### GEMA MADANI SYMPATHY

84

Bagian Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat  
Daerah, Pemerintah Kota  
Tasikmalaya

*The People's Welfare Division  
of the Regional Secretariat,  
Tasikmalaya City*

1 Kota Tasikmalaya yang kini terdiri atas 10 kecamatan, 69 kelurahan, 782 RW, dan 3.292 RT lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, terutama keterbatasan anggaran, Kota Tasikmalaya bermimpi ingin menjadi kekuatan ekonomi baru termaju di Jawa Barat.

Pada saat lahir, masyarakat menyadari bahwa kondisi infrastruktur yang buruk, tingkat kehidupan sosial-ekonomi yang rendah, dan lambatnya layanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, merupakan problem dasar dan tuntutan paling mendesak untuk segera diatasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu upaya sungguh-sungguh dan inovasi yang berkelanjutan. Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif sebagai Model Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (GEMA MADANI SIMPATI) diharapkan menjadi solusi.

Krisis kepercayaan sebagai akibat tidak berjalannya demokrasi, transparansi, dan

2 *Tasikmalaya City which now consists of 10 sub-districts, 69 urban villages, 782 RW, and 3,292 RT was born based on Law Number 10 Year 2001 on the Establishment of Tasikmalaya City. With all the limitations, especially the budget constraints, the City of Tasikmalaya dreamed of becoming the newest economic power in West Java.*

*At the time of birth, people are aware that poor infrastructure conditions, low levels of socio-economic life, and the slow service of basic community needs, such as education and health, are the basic problems and the most urgent demands to be addressed.*

*To solve the problem requires serious efforts and continuous innovation. The Mandiri, Competitive, and Innovative Community Movement Program as a Community-Based Development Model (GEMA MADANI SIMPATI) is expected to be a solution.*

*The crisis of trust as a result of the ineffectiveness of democracy, transparency, and participation, led to apathetic and pragmatic societies. It was as if all the problems that had happened were the responsibility of the government. Community*

partisipasi, menyebabkan masyarakat apatis dan pragmatis. Seakan-akan semua permasalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta masyarakat, sifat tolong-menolong, dan gotong royong dalam kehidupan sosial yang menjadi akar budaya masyarakat nyaris punah.

Dengan kondisi masyarakat yang demikian, Program GEMA MADANI SIMPATI pada tahun 2016 selain melanjutkan tiga bidang pokoknya, melakukan inovasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang ekonomi dan sosial: inovasi diarahkan pada penatausahaan dan pembenahan manajemen koperasi melalui pelatihan sistem penatabukuan guna-memperkuat keterampilan penatausahaan pengurus koperasi.
- b. Bidang infrastruktur: inovasidiarahkan untuk mengatasi kelangkaan air bersih dan menambah serapan air pada jalan dan lahan lingkungan melalui upaya pavingblokisasi dan sistem biopori.

Dampak langsung yang dirasakan oleh semua pihak adalah tumbuhnya semangat gotong royong, tolong-menolong, kerja sama antar anggota masyarakat, dan timbulnya kesadaran dan tanggung jawab bersama membangun dan mensejahterakan masyarakat, serta rasa memiliki dan menjaga hasil-hasilnya.

Dilihat dari sejarah dimulainya program, sejak *Block Grant* 2003 - 2009), P2KK (2010 - 2015), dan GEMA MADANI (2016 - 2017) jelas bahwa program ini telah dilakukan secara berkelanjutan. Tiga periode walikota bukan hanya mempertahankannya, tetapi juga melakukan sejumlah inovasi dan meningkatkan alokasi dananya.

*participation, the nature of help-helping, and mutual assistance in social life that became the cultural root of society almost extinct.*

*Under these conditions, the GEMA MADANI SIMPATI Program in 2016 besides continuing its three core areas, innovates on the following:*

- a. *Economic and Social Sector: Innovation is directed at the administration and improvement of cooperative management through training of bookkeeping system to strengthen the skill of administration of cooperative management.*
- b. *Infrastructure sector: innovation is intended to address water scarcity and increase water uptake on roads and environmental lands through pavingblocking and biopore systems.*

*The immediate impact felt by all parties is the growing spirit of mutual cooperation, help-helping, cooperation between community members, and the emergence of awareness and responsibility together to build and prosper the community, and the sense of ownership and preservation of the results.*

*Seen from the history of the program, since Block Grant 2003 - 2009), P2KK (2010 - 2015), and GEMA MADANI (2016 - 2017) it is clear that this program has been carried out continuously. Three mayor periods not only defend it, but also do some innovation and increase the allocation of funds.*



## IJUS MELON (IJIN USAHA MIKRO MELALUI ONLINE)

### *IJUS MELON (MICRO BUSINESS LICENSE THROUGH ONLINE)*

85

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kota Semarang

*Agency of Cooperatives and Micro Enterprises, Semarang City*

**I** IJUS MELON (Ijin Usaha Mikro melalui Online) merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro. Aplikasi ini dibuat berdasarkan tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Tujuan inovasi ini adalah dengan memberikan kemudahan bagi para Pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengurus Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sehingga harapannya semua pelaku usaha mikro di kota semarang dapat mengakses fasilitas pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pembiayaan kredit usaha.

Pelaksanaannya didahului dengan penerapan Sistem Informasi Ijin Usaha Mikro Kecil melalui online atau disingkat iJUS MELON. Dengan iJUS MELON akan diperoleh data konkrit mengenai keberadaan usaha dan detail profil usaha para Pelaku Usaha Mikro Kecil tersebut.

**E** *IJUS MELON (Micro Business License through Online) is an application that provides ease of service for people who have micro business. This application is made based on the demands of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 98 of 2014 concerning licensing for micro and small enterprises and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2014 concerning Guidelines for the Granting of Micro and Small Business Licenses.*

*The purpose of this innovation is to make it easier for the Micro Small Business Actors to take care of Micro Small Business License (IUMK) so that the hope of all micro business actors in Semarang city can access the facilities of coaching, training, development and business credit financing.*

*Implementation is preceded by the implementation of Small Micro Business License Information System through online or it called iJUS MELON. With iJUS MELON will get database about the existence of the business and detail the business profile of the Micro Small Business Actors. Knowing the legality, existence and business profile of Micro Small Business*

Mengetahui legalitas, keberadaan, dan profil usaha Pelaku Usaha Mikro Kecil tentu sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka memetakan potensi UMKM di Kota Semarang dan juga untuk meminimalisir resiko bagi UMKM yang telah mengakses kredit dari pemerintah kota Semarang.

Sebelum diberlakukannya iJUS MELON, pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya rata-rata hanya sebesar 772 UMKM pertahun (2011-2015). Namun setelah menggunakan aplikasi iJUS MELON, UMKM yang terdaftar naik menjadi lebih dari 1000% atau 8,748 pelaku usaha mikro yang terdaftar dalam waktu 1 tahun.

*Actor is certainly very important and needed in order to mapping the potential of SMEs in Semarang City and also to minimize the risk for SMEs who have accessed credit from the city government Semarang.*

*Prior to the enactment of iJUS MELON, business actors who register their business on average only 772 SMEs per year (2011-2015). But after using iJUS MELON application, registered UMKM increased to more than 1000% or 8,748 registered micro business actors within 1 year.*



## “KELUAR BERSAMA” DAFTAR 1 DAPAT 5: SEBUAH MODEL PELAYANAN TERPADU DOKUMEN ANAK

### “OUT TOGETHER” LIST 1 GET 5: AN INTEGRATED SERVICE MODEL OF CHILD DOCUMENTS

86

Kecamatan Danurejan,  
Pemerintah Kota  
Yogyakarta

District of Danurejan,  
Yogyakarta City

❶ Di Kecamatan Danurejan angka kepemilikan Akta Kelahiran masih kurang dari 53,92 % di Tahun 2014 dan mencapai 83,74% di Tahun 2015 (masih kurang optimal karena di bawah target angka nasional 85%). Dan bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) lokal, diketahui bahwa kepemilikan dokumen anak yang lain yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Danurejan pada Tahun 2014 sebanyak 15,01% dan 31,55% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Kecamatan Danurejan belum mempunyai KIA.

Selanjutnya apabila dibandingkan antara angka kepemilikan akta kelahiran (53,92 % di Tahun 2014; 83,74% di Tahun 2015) dengan kepemilikan KIA (15,01% di tahun 2014 dan 31,55% di tahun 2015) nampak adanya ketimpangan; dimana selisih angkanya masing-masing tahun cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap pengajuan permohonan akta kelahiran sekaligus diikuti dengan permohonan/penerbitan KIA. Disimpulkan bahwa kepengurusan dokumen anak masih dilakukan secara partial, dalam artian terpisah-pisah satu sama lain baik dalam

❷ *In Danurejan sub-district the number of Birth Certificate ownership is less than 53,92% in 2014 and reaches 83,74% in 2015 (still less than optimal since the national target is 85%). Sourced from the Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Lokal-SIAK Lokal (Information System of Local Population Administration), it is known that the other child document which is Kartu Identitas Anak-KIA (Children Identity Card) ownership in Danurejan sub-district in 2014 is 15,01% and 31,55% in 2015. This indicates that most children in Danurejan sub- district have no Kartu Identitas Anak-KIA (Children Identity Card).*

*Furthermore, the number of birth certificate ownership (53,92% in 2014, 83,74% in 2015) compare to KIA ownership (15,01% in 2014 and 31,55% in 2015), there appears to be an imbalance; Where the difference in the figures of each year is quite high. This indicates that not every application of a birth certificate is directly accompanied by a KIA application / issuance. It is concluded that the management of children's documents is still partially done, in the sense of being separated from each other, both in the context of the timing of the application for the handling and the service still being performed*



konteks timing permohonan pengurusan maupun pelayanannya yang masih dilakukan hanya per satuan produk dokumen anak.

Inovasi "Keluar Bersama" Daftar 1 Dapat 5 merupakan inovasi yang satu- satunya dilakukan oleh Kecamatan Danurejan baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun di Indonesia. Keunikan lainnya adalah bahwa cakupan Inovasi Kecamatan Danurejan ini merupakan inovasi yang mengintegrasikan pelayanan untuk pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan (NIK, Kartu Keluarga/KK, Kartu Identitas Anak/KIA, Akta Kelahiran).

Beberapa dampak positif dari implementasi inovasi "Keluar Bersama" Daftar 1 Dapat 5 seperti Service time yang semula untuk pengurusan dokumen anak (NIK, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak) membutuhkan waktu  $\pm$  1 bulan, dengan adanya inovasi sekarang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 minggu sejak permohonan diajukan,

*only per unit of the child's document product.*

*Innovation program of "KELUAR BERSAMA" DAFTAR 1 DAPAT 5 is the only program conducted by office of Danurejan sub-district in Yogyakarta municipality and in Indonesia. This innovation program integrates the services for children right to get some citizen documents, which are Buku Kesehatan Ibu dan Anak-BKIA (mother and child health book), Nomor Induk Kependudukan-NIK (citizen identity number), Kartu Keluarga-KK (family card), Kartu Identitas Anak-KIA (children identity card), and Akta Kelahiran (birth certificate).*

*Innovation program of "KELUAR BERSAMA" DAFTAR 1 DAPAT 5 has been implemented since early 2016 and the effect could be measured from some indicators as follows shortening the service time average for children documents processes (1 month before implementation of the innovation, become 2 weeks after program implementation)*



## KLINIK BERHENTI MEROKOK

### STOP SMOKING CLINIC

87

UPTD Puskesmas Padang Karambia  
Dinas Kesehatan,  
Pemerintah Kota Payakumbuh

UPTD Community Health  
Center of Padang Karambia,  
Agency of Health  
Payakumbuh City

**I** Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 127.857 jiwa dan luas wilayah sebesar 80.43 km<sup>2</sup>. Kota Payakumbuh adalah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat yang warganya dilayani oleh 8 (delapan) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Roda perekonomian di daerah ini terutama dari sektor pertanian dan perkebunan.

Dari laporan perilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan bahwa 80% masyarakat khususnya laki-laki masih memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih sedikit dari kaum laki-laki yang ingin berhenti merokok karena menganggap bahwa merokok dapat memperluas pergaulan dan identik dengan budaya masyarakat minang *duduak di lapau*.

Berdasarkan hasil survei Puskesmas Padang Karambia terhadap murid Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tahun 2017 terhadap 304 responden, didapatkan hasil bahwa 28% anak sekolah sudah merokok.

**II** *The Payakumbuh city is one of the city in West Sumatra province with population about 127.857 people, and total area about 80.43 km<sup>2</sup>. The Payakumbuh also, is one of 19 districts / municipalities in West Sumatera Province whose the people are served by 8 (eight) Public Health Centers (Puskesmas). The wheels of the economy in this area are mainly from agriculture and plantation sectors.*

*Based on report of The behaviour clean of live and healthy programs (PHBS) explain that 80% of people, especially men still have a habit smoking inside of the house. The data also explain that only a few of the men who want to stop smoking, because they have idea that smoking can expand relationship and also parallels with the minang culture "duduak di Lapau".*

*Based on the results of Public Health Center Padang Karambia surveys in 2017 about 304 respondents in elementary school, junior school and senior High Schools, it found that more than 28% of students had smoked.*

Merokok merupakan salah satu faktor pencetus resiko dari Penyakit Tidak Menular (PTM). Dampak yang ditimbulkan dari PTM dapat berupa kecatatan bahkan kematian. Faktor kecatatan dan beban biaya yang ditimbulkan dari PTM merupakan ancaman kepada individu, masyarakat, dan pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Nomor 15 tahun 2011) tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. Setelah keluar Perda ini berdirilah Klinik Berhenti Merokok di Puskesmas Padang Karambia pada tahun 2012. Dari data Puskesmas Padang Karambia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sudah dilakukan terapi berhenti merokok kepada 110 orang dan sebanyak 89% pasien telah berhasil berhenti merokok.

Strategi kedepan untuk mendukung program ini adalah dengan mereplikasikan pada Puskesmas lain se-Kota Payakumbuh. Sehingga cakupan Klinik Berhenti Merokok ini meluas dan Puskesmas se-Kota Payakumbuh mampu melayani semua pasien yang ingin berhenti merokok. Dengan demikian komitmen daerah untuk mengurangi pecandu rokok dapat diwujudkan.

*Smoking is one of the risk factors of non-communicable diseases (PTM). The impact of PTM can be disable and death. The disable factor and the hight cost to get better of PTM, it can be threat to individuals, communities, and local government Payakumbuh.*

*In 2011, Payakumbuh Government launched a Local decree Number 15 year 2011 about No smoking in public facilities. After that, we launched the "Stop Smoking Clinic" at Padang Karambia Public Health Center in 2012. Based on the data from the cilnic in periods 2012 to 2016, we found about 110 patient and 89% of patients have successfully to stop smoking.*

*In the long run, The next strategy to support this program, we would be replicated to the other Public Health Center in Payakumbuh. So that, the coverage of Stop Smoking Clinic is wide spread to all Public Health Center (Puskesmas) in Payakumbuh. and they can able to serve all patients who want to stop smoking. Finnaly , the purposed of the local government to reduce cigarette addicts can be realized.*



## LAPO BRA (LAYANAN POJOK BRAILLE)

### LAPO BRA (BRAILLE CORNER SERVICE)

Dinas Perpustakaan  
Umum dan Arsip Daerah,  
Pemerintah Kota Malang

Agency of Public Library and  
Regional Archives,  
Malang City

1 Pemenuhan kebutuhan disabilitas utamanya pelayanan publik adalah masalah sosial yang harus dipecahkan bersama dengan rasa empati yang tinggi. Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan, ketersediaan fasilitas dan sarana ramah disabilitas ternyata juga belum banyak tersedia. Dalam hal kepustakaan tersedia buku *Braille* yang dapat memenuhi kebutuhan literatur disabilitas netra, tetapi ketersediaannya tidak mudah didapat. Proses alih media sangat sulit karena sarannya mahal. Dari hasil studi pustakawan Perpustakaan Umum Kota Malang di mana potensi pelayanan untuk disabilitas netra di Kota Malang sejumlah 1.138 orang dari 881.794 orang penduduk Kota Malang, muncul inovasi pelayanan untuk disabilitas netra yang disebut **Lapo BRA** (Layanan Pojok Braille).

Lapo Bra menyediakan variasi buku *Braille* yang dapat meningkatkan kualitas hidup disabilitas netra. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Lapo BRA juga menyediakan layanan internet bagi disabilitas Netra dengan teknologi *screen reader* pada komputer yang sudah *on line*. Disabilitas netra dapat menggunakan media sosial seperti *facebook* atau *twitter*. Dengan

2 *Providing public service that caters the need of the disabled is one of the social problems that needs to be solved with empathy. Although there are many regulations regarding the disabled, the availability of disabled-friendly facilities and means is quite rare. In literary world, there are books on Braille for the visually impaired, but they are not easy to find. The process of transferring from Roman alphabet into Braille is difficult because the equipment is quite expensive. According to studies by librarians of Malang City Public Library, there are approximately 1.138 visually impaired people out of 881.794 Malang citizen whose need has to be met. It triggers a service innovation for the visually impaired, called Lapo BRA (Layanan Pojok Braille).*

*Lapo BRA provides a large collection of books on Braille that are able to increase the visually impaired quality of life. Using information Technology, Lapo BRA also provides internet services for the visually impaired using screenreader Technology on Online Computer. The visually impaired can use social media such as Facebook or Twitter. With MP3 technology, talking book service becomes very interesting for the visually impaired that are not familiar with*



teknologi MP3, layanan *talking book* sangat menarik bagi disabilitas netra yang belum memahami huruf *braille* dimana mereka dapat mendengarkan buku teks yang diceritakan.

Keberadaan Lapo BRA didukung banyak pihak, antara lain dengan Yayasan Mitra Netra Jakarta Selatan sebagai pendukung teknologi informasi disabilitas netra, Balai Penerbitan Braille Indonesia Yayasan Abiyoso Cimahi sebagai mentor pelayanan disabilitas netra dan distributor buku braille, UPT Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang sebagai Mentor lokal dan pemanfaat fasilitas Lapo BRA. didukung dengan anggaran Pemerintah Kota Malang. Pelayanan Lapo BRA berkembang dengan memfasilitasi kegiatan pembudayaan minat baca. Bukan hanya itu, dengan konsep perpustakaan inklusif, penempatan ruang layanan berada satu lantai di ruang baca umum dapat memunculkan empati dari masyarakat dan menumbuhkan percaya diri disabilitas netra.

Lapo BRA berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan literatur dan informasi bagi disabilitas netra.

*Braille, with which they can listen to the text.*

*Lapo BRA is supported by many parties, such as Yayasan Mitra Netra as supporter of visually impaired information Technology, Balai Penerbitan Braille Indonesia Yayasan Abiyoso as mentor for the visually impaired services and Braille books distributor, UPT Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Rehabilitasi Sosial Bina Netra in Malang as local mentor and user of Lapo BRA facilities, and funding by Malang City Government.*

*Lapo BRA services expand in facilitating Activities on cultivating reading interest. Furthermore, using inclusive library concept, reading rooms that are located on the same floor with general reading room promote public empathy and increase self-confidence among the visually impaired.*

*Lapo BRA using information Technology is expected to cater for the visually impaired's literary and information need.*



## LONGSET (LORONG SEHAT)

### LONGSET (HEALTHY ALLEY)

89

Dinas Kesehatan,  
Pemerintah Kota Makassar

Agency of Health,  
Makassar City

**I** Gerakan revolusi kebersihan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam rangka peluncuran program "Makassar'Ta Tidak Rantasa" (MTR). "Makassar'Ta Tidak Rantasa" (MTR) merupakan program baru yang mengukuhkan suatu perubahan mendasar dalam menangani persoalan kota Makassar dalam hal persampahan. Selain itu menjadi program prioritas dalam pencapaian kota Adipura dan Kota Sehat.

**E** *Movement of urban hygiene revolution by Government of Makassar under the main program from Mayor and Deputy Mayor of Makassar in order to launch the program "Makassar'Ta Tidak Rantasa" (MTR). "Makassar'Ta Tidak Rantasa" (MTR) is a new program that establishes a fundamental change in handling Makassar municipal issues in the case of solid waste. In addition to being a priority program in the achievement of Adipura and Kota Sehat.*

Oleh karena itu, dibentuk Lorong Sehat (Longset) yang merupakan salah satu inovasi kota Makassar yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di lorong serta pembinaan kesadaran dan usaha kesehatan melalui manajemen monitoring yang terpadu melalui pendekatan ruang (Longset) dengan basis inisiasi dan partisipasi. Longset ini lahir karena selama ini perilaku dan pola pikir masyarakat masalah kesehatan masih susah untuk berubah. Hal ini kemudian mendasari lahirnya program Lorong Sehat (Longset).

*Therefore, it was formed to Lorong Sehat (Longset) which is one of the new innovations of Makassar city, proposed by Makassar City Health Office Department which focuses on community empowerment in alley and awareness building and health effort through integrated monitoring management through space approach (Longset) with Bases of initiation and participation. Longset is created because during this period, there are a behavior and mindset of society health problems which is still difficult to change. Thus then underlies the starting of the Lorong Sehat (Longset) program.*

Dampak program Lorong Sehat (Longset),

*The impact of the Lorong Sehat (Longset)*

# INNOVATIONS LONGSET (Lorong Sehat)

DATE : NOVEMBER 2015  
CLIENT : DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR



yaitu adanya peningkatan cakupan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), Partisipasi masyarakat sebagai kunci utama keberhasilan program Lorong Sehat dan SDM tenaga kesehatan yang terlibat langsung dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Lorong Sehat untuk menurunnya angka kesakitan dan angka kematian.

Manfaat besar dan signifikan telah diperoleh dari keberadaan program Lorong Sehat ini di Kota Makassar semenjak di canangkan di awal tahun 2015 yaitu:

1. Masyarakat mampu mengupayakan dan menjaga lingkungan,
2. mampu mencegah dan menanggulangi masalah – masalah kesehatan,
3. Masyarakat mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) seperti posyandu, posbindu dan KGM,
4. Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian di lingkungan masyarakat,
5. Masyarakat secara sadar mau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

*program, are to increase in the coverage of PHBS (Clean and Healthy Behavior), Community Participation is the key to the success of the Lorong Sehat program, and human resources of the health personnel directly involved and the community in implementing the Healthy Lorong/ Alley Program and decrease the number of morbidity and Death rate.*

*The major and significant benefits have been gained from the existence of this Healthy Lorong program in Makassar City since it was launched in early 2015, such as:*

1. *The community is able to strive and maintain the environment,*
2. *Able to prevent and overcome health problems,*
3. *The community develops health efforts Sourced community (UKBM) such as posyandu, posbindu and KGM,*
4. *Reduce morbidity and mortality rate in the community,*
5. *Society consciously want to utilize existing health services.*



## SAMPAH MENJADI GAS, BERKAH BAGI WARGA

### *RUBBISH INTO GAS, BLESSING FOR THE PEOPLE*

90

Dinas Lingkungan Hidup,  
Kebersihan dan Keindahan  
Kota, Pemerintah Kota  
Banda Aceh

*Agency of Environment,  
Hygiene and Beauty City,  
Banda Aceh City*

1 Beberapa masalah utama yang menjadi faktor pendorong Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh untuk menerapkan program pemanfaatan gas metan kepada warga di sekitar lokasi TPA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: (1) Indonesia termasuk ke dalam 10 negara penghasil Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar. (2) Gas metan yang dihasilkan di lahan urug TPA Kota Banda Aceh apabila tidak di-flare (dinyalakan) atau di-vent (dilepaskan) ke udara bebas akan menyebabkan ketidakstabilan struktur tumpukan lahan urug dan resiko kebakaran yang tinggi. (3) DLHK3 menyalurkan gas metan sebagai pengganti bahan bakar LPG kepada masyarakat di sekitar TPA secara gratis sebagai bentuk kepedulian sosial untuk mengurangi gejala sosial dari dampak negatif keberadaan TPA.

Adapun target dari program ini adalah masyarakat pesisir Gampong Jawa yang sebagian besar masih berpenghasilan menengah kebawah dan tinggal dalam radius 1-2 km dari TPA Kota Banda Aceh.

2 *Some of the key issues that are the driving factors for the Department of Environment, Cleanliness and Beautification (DLHK3) Banda Aceh to implement the methane gas utilization program for residents in the surrounding of the Banda Aceh City landfill site are as follows: (1) Indonesia is one of top ten Greenhouse Gases emitters (GRK). (2) Methane gas produced in landfill site, if it is not flared or vented will cause landfill structure instability and possess high risk of fire. (3) DLHK3 delivers methane gas as a substitute for LPG fuel to communities around the landfill site for free as a mean to reduce social unrest from the negative impacts of landfill.*

*The targets of this program are coastal communities of Gampong Jawa, most of whom are still middle-income and live within a 1-2 km radius of TPA Kota Banda Aceh.*

*Until now in Indonesia, landfill sites that have utilized methane gas as a source of energy is limited. One exception is landfill site of Banda Aceh located in Gampong Jawa village, Kutaraja Sub-district. Since it was rebuilt after the tsunami and operated as sanitary landfill in early 2009, the Government of Banda Aceh continues to*



Sampai saat ini belum banyak TPA di Indonesia yang sudah memanfaatkan gas metan yang dihasilkan sebagai sumber energi, salah satunya pengecualiannya adalah TPA Kota Banda Aceh yang berlokasi di Gampong Jawa, Kec. Kutaraja. Sejak dibangun kembali pasca tsunami dan dioperasional dengan sistem *sanitary landfill* pada awal tahun 2009, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya melengkapi fasilitas yang ada di TPA agar benar-benar layak disebut sebagai TPA dengan sistem pengopearasian *sanitary landfill*.

Program ini memberikan dampak positif bagi lingkungan yaitu: (1) berkurangnya GRK yang terlepas ke atmosfir kawasan perkotaan Banda Aceh. (2) Manfaat program ini juga dirasakan TPA Kota Banda Aceh yaitu mengurangi resiko kebakaran lahan urug TPA. (3) Dampak positif paling besar dirasakan langsung 48 rumah tangga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA Kota Banda Aceh yaitu mendapat gas metan TPA secara gratis sebagai pengganti gas LPG.

*equip Banda Aceh Landfill Site with others waste processing and management facilities in order to operate as ideal sanitary landfill.*

*The program has positive impacts on the environment, namely: (1) reduced GHG emissions released into the urban atmosphere of Banda Aceh. (2) The benefit of this program is also felt by Landfill site that is reducing the risk of landfill fire. (3) The greatest positive impact is felt directly by 48 households which are living around the landfill for the free gas delivered to their houses.*



## “SI INOL AJA” (SISTEM INOVASI LAYANAN ARISAN/ANGSURAN JAMBAN) KIKIS PERILAKU BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN)

### “SI INOL AJA” (SYSTEM OF SERVICE INNOVATION REGULAR SOCIAL GATHERING/ WATER CLOSET INSTALATION) REDUCING BEHAVIOR BABS (DEFECATE INDISCRIMINATELY)

UPTD Puskesmas Wonoasih Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Probolinggo

UPTD Community Health Center of Wonoasih, Agency of Health, Probolinggo City

1 Masih banyak masyarakat Kota Probolinggo berperilaku Buang Air Besar (BAB)-nya di sembarang tempat yaitu sebesar 33,67% atau sebesar 16.121 KK, untuk masyarakat Kecamatan Wonoasih sebesar 58,11% atau 4.431 KK, artinya hampir separuh masyarakat di Wonoasih BAB-nya di sembarang tempat. BABS ini disebabkan : masyarakat tidak mempunyai jamban, informasi membuat jamban itu mahal, berkisar Rp.4-5 juta, kemampuan membuat jamban sangat terbatas, masih berharap menunggu bantuan dari pemerintah dan masyarakat sudah turun-temurun BAB tidak di jamban.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka lahirlah “Si Inol Aja” (Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban) yang bertujuan mengurangi dan mengikis kebiasaan/perilaku masyarakat yang masih BABS.

Mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang dan Strategi “Si Inol Aja” adalah : Penggalangan komitmen dengan stakeholder terkait yaitu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dunia usaha; Pemicuan; Penggunaan Teknologi Tepat Guna

2 The fact in Probolinggo says that 33,6% or about 16.121 families have defecating (BABS) behaviour in improper places. In Wonoasih district, about 58,11% or 4.431 families or it means almost a half of the total number of people in this district defecate in improper places. This fact is caused by the families not having proper toilets or lavatories, the expensive price for making a toilet about 4-5 million rupiahs, the limited abilities for making toilets, the expectation of the government grants for making toilets and the families habit for not having toilets.

For answering the problems “Si Inol aja” (as the service innovation system for toilet installment) is intended to decrease the defecating habit in improper places.

Changing the society behaviour needs longer time and strategies. “Si Inol Aja” strategy is establishing commitment with the related stakeholders such as government, society leaders, religion leaders and business doers. The triggerring efforts are to use appropriate technology, the direct\* cast cement\* and patroned fiberglass septic tank, the lotteries application and installment.



yaitu *system cor langsung di tempat* yang menggunakan *cetakan septic tank fiberglass*; Strategi pendanaan dengan Aplikasi Arisan dan Angsuran.

"Si Inol Aja" dimulai tahun 2012, telah tercapai sesuatu yang luar biasa : Peningkatan akses masyarakat ke jamban sehat dari 41,89% menjadi 55,19%. Penurunan BABs dari 58,11% menjadi 44,81%; Masyarakat dapat membangun jamban sehat secara swadaya; Tumbuhnya kesadaran bahwa masyarakat dan dunia usaha dapat turut berpartisipasi dalam program pembangunan sanitasi; Lahirnya teknologi tepat guna berbasis kondisi lokal ; pola pendanaan yang ringan; Muncul ide ekonomi kreatif sebagai wirausaha sanitasi; munculnya inisiator, inovator dan fasilitator sanitasi serta tumbuhnya mindset bahwa lingkungan bersih adalah pintunya sehat dan sehat adalah pintu menuju hidup sejahtera.

*"Si Inol Aja" has been started since 2012 and the achievements for this strategy are: the increasing society access to healthy toilets 41,89% to 55,19%. The decreasing number of defecating habit from 58,11% to 44,81%. The society capability to build toilets independently, establishing awareness the society and the business doers to participate in building sanitation program, the establishing appropriate technology based on local condition, appearing the creative economy ideas in entrepreneuring sanitation, the role of initiators, the sanitation innovators, facilitators and establishing the society mindset. Healthy environment is as the door for being healthy. Being healthy is the door for wealthy life.*



## “SODA MOLEK” K. 5 - 1

### “SODA MOLEK” K.5 - 1

92

Kelurahan Naikoten II,  
Pemerintah Kota Kupang

Kelurahan Naikoten II,  
Kupang City

1 Sebagai praktik dari paradigma *Good Governance, E-Government, Open Governance*, komitmen NAWACITA, Reformasi Birokrasi Indonesia, dan Visi Pemerintah Kota Kupang sebagai Kota Modern, maka Kelurahan Naikoten II menginisiasi suatu program inovasi bernama *SODA MOLEK*. *SODA MOLEK* adalah sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa daerah NTT (Rote) yang berarti Salam Sejahtera. Sebagai seni menghadirkan *self and full time public service* di Kelurahan Naikoten II Kota Kupang yang mengatasi 5 (lima) masalah dalam pelayanan publik.

Masalah-masalah yang ada sebelum diterapkannya inovasi ini adalah budaya kerja aparatur yang belum bisa memberikan pelayanan yang baik, basis data kependudukan yang belum tertata, tingginya mobilitas penduduk perkotaan, rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan data diri dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

*SODA MOLEK* menjadi unik karena merupakan inisiatif murni dari Pemerintah Kelurahan Naikoten II yang memiliki layanan mandiri seperti ATM selama 24 sehari dan 7 hari

2 *Plays a role as paradigm practice of Good Governance, E-Government, Open Governance, Commitment of NAWACITA, Indonesian Bureaucracy Reformation, and vision of Kupang City Government as Modern City, therefore Naikoten II village initiated an innovative programme which known as SODA MOLEK. The terminology comes from Roti Language in East Nusa Tenggara Province, and it functions as a special greeting of Rotenese. SODA MOLEK means Kinds Regards. It also becomes an art in representing self and full-time public service in Naikoten II Village, Kupang City which solves five basic public services.*

*There were some problems before applying this innovative program. Civil servants could not perform their best service, unmanaged population data system, high mobility of civilization, lack of people's participation in completing their basic identities, and unable to settle Land and Building Tax (PBB).*

*SODA MOLEK becomes a unique innovative program, because it purely initiated by Naikoten II Village. The process is similar to ATM self service machine 24/7, that built together by*



seminggu, dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan didukung oleh STIKOM Artha Buana, memiliki 3 (tiga) orang Konsultan IT dan 2 (dua) orang Konsultan Pemerintahan berkapasitas Doktor secara gratis. Biaya perawatan dan operasionalnya ditanggung oleh pihak swasta (Hotel Cahaya Bapa) di Kelurahan Naikoten II. Selain itu, SODA MOLEK juga memiliki 2 (dua) sisi pelayanan yaitu sebagai Data Dasar Keluarga dan sebagai Basis Data pelayanan publik.

Dampak yang terjadi setelah penerapan inovasi ini adalah meningkatnya kinerja aparatur yang kemudian membuat pemerintah tidak lagi berjalan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Basis data kependudukan tertata dengan baik yang membuat pelayanan semakin efektif dan efisien. Tersedianya layanan 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Meningkatnya cakupan kepemilikan data diri (dari 2871 tersisa 71 orang yang belum mengurus administrasi kependudukan).

*Naikoten II people and voluntarily supported by STIKOM Artha Buana, three IT consultants, and two government consultants with Doctoral degree. Maintenance budget is guaranteed by private side (Cahaya Bapa Hotel) in Naikoten II village. Besides, SODA MOLEK also has two sides of services such as first, Family Basic Data, and the other one is Public Service Basic Data.*

*The effect of applying this program is the government is not standing alone in operating public and government services whereas there is increasing in civil servants' performances. Society basic data is well-arranged that caused public services become effective and efficient. Availability of service in 24 hours and 7 days. An increasing in ownership of self identity (only 71 left from 2871 for who are not complete their self identities yet).*



## TAMAN ANAK CERDAS: PAPAN SARANA WASIS BOCAHE, WARAS RAGANE LAN MAPAN BUDI PEKERTINE

### SMART CHILD PARK: BOCAHE WASIS FACILITY BOARD, WARAS RAGANE LAN MAPAN BUDI PEKERTINE

93

Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
dan Pemberdayaan Masyarakat,  
Pemerintah Kota Surakarta

Agency of Women Empowerment,  
Child Protection, and Community  
Empowerment,  
Surakarta City

1 Tahun 2006 Kota Surakarta ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu pilot proyek Pengembangan Model Kota Layak Anak, bersama Gorontalo, Jambi, Sidoarjo, Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2008-2017 Kota Surakarta telah mengembangkan Kota Layak Anak di Kelurahan dan Kecamatan. Tahun 2018 diharapkan Kota Surakarta benar-benar menjadi kota yang layak untuk anak (Kota Layak Anak). Konsep dari Kota Layak Anak adalah Kota yang Ramah Anak dengan terpenuhinya hak-hak anak yaitu Hak Hidup, hak tumbuh & berkembang, hak mendapat perlindungan, dan hak ikut berpartisipasi.

Untuk pemecahan masalah sebagai Kota yang mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), Kota Surakarta senantiasa berupaya memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air, terutama bagi anak dari keluarga miskin/tidak mampu untuk mendapatkan sarana prasarana yang layak bagi anak. Hal tersebut diwujudkan melalui Taman Cerdas yang merupakan Taman Terbuka Ramah Anak dan menjadi bagian

2 In 2006 the city of Surakarta was chosen by the Ministry of Women Empowerment as one of the pilots of the Urban Model Development Project for Children, along with Gorontalo, Jambi, Sidoarjo, Kutai Kartanegara. In the Year 2008-2017 Kota Surakarta has developed Kota Layak Anak in Kelurahan and Kecamatan. 2018 is expected to be a decent city for children (Kota Layak Anak). The concept of KLA who fulfill the rights of the child, namely Right to Life, right to grow & develop, right to protection, and the right to participate.

For the purpose of the City which is developing KLA, Surakarta City always has the right to fulfill the right of the child for the realization of healthy, intelligent, cheerful, noble and love the country, for one from poor family to get facility that decent for children. It is realized through the Taman Cerdas which is a Child Friendly Open Park and an integral part of the efforts to develop KLA.

Taman Anak Cerdas is an educative playground, developing talent, creations, art, skills, socializing, and introduction of Information Technology.



integral dari upaya pengembangan Kota Layak Anak.

Taman Anak Cerdas memberikan fasilitas berupa taman bermain yang edukatif, mengembangkan bakat, kreasi, seni, ketrampilan, bersosialisasi, dan pengenalan Teknologi Informasi

*Sasaran Lingkungan masyarakat yang kurang mampu, padat dan kumuh di sekitar lokasi taman anak cerdas khususnya untuk anak-anak yang membutuhkan sarana dan prasarana bermain yang edukatif serta ramah lingkungan.*

*Taman Anak Cerdas dibangun di fasilitas umum milik Pemerintah (tempat yang slam atau kumuh, tanah kuburan, ruang publik). Pengelolaan taman anak cerdas di kelola oleh masyarakat, yang dibiayai oleh APBD melalui anggaran kelurahan.*

*With the target is the environment of the less fortunate, densely and slums around the location of children's intelligent park especially for children who need facilities and infrastructure of play that is educative and environmentally friendly.*

*The Smart Child Park is built in public facilities owned by the Government (slums, cemetery, public spaces) and management of smart children's parks managed by the community, funded by APBD through kelurahan budgets.*



## SAHABAT LATANRO - SEJAHTERA BERKAT LAYANAN TASPEN PERSERO

### SAHABAT LATANRO - PROSPEROUS THANKS TO TASPEN PERSERO SERVICE

94

Divisi Layanan dan Manfaat,  
PT TASPEN (PERSERO).

*Service and Benefit Division,  
PT TASPEN (PERSERO).*

1 PT TASPEN (PERSERO), selanjutnya disebut TASPEN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang terdiri dari Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ASN dan Pejabat Negara baik pada masa aktif maupun pensiun.

Dalam pengurusan manfaat pensiun dan THT, masalah yang sering dihadapi ASN adalah ketidakpastian waktu pemrosesan, lamanya waktu pencairan, serta birokrasi yang panjang. Hal ini memicu tekad TASPEN untuk menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan pelayanan melebihi harapan peserta (*delighted customer service*) sehingga melahirkan konsep layanan yang dinamakan SAHABAT LATANRO (Sejahtera Berkat Layanan Taspem Persero).

SAHABAT LATANRO disokong oleh 3 instrumen layanan yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI), Layanan

2 *PT TASPEN (PERSERO), hereafter refers as TASPEN is a State Owned Enterprise which is mandated by the government to manage social insurance program for Indonesian civil servants (also called as ASN) and State Officials. The program consist of Pension Program, Old Age Saving Program, Work Accident Security Program and Death Security Program. All of these programs are designed to improve the prosperity of Indonesian civil servants and State Officials at their working period as well as their old age.*

*There were some problems in processing their rights, for example the uncertainty of processing time, length of disbursement time, and the long bureaucracy. These were the triggers for TASPEN to show a sincerity in realizing a delighted customer service and finally creating a service concept named SAHABAT LATANRO, which in Bahasa is the abbreviation of Prosperous With Services of Taspem Persero.*

*SAHABAT LATANRO is supported by three pillars of service instruments namely SIMGAJI Application (application of information system for salary management), Automatic Claim Services and One Hour Service (OHS). This is an*



Klaim Otomatis (LKO) dan One Hour Service (OHS). Ini merupakan peran aktif TASPEN yang terintegrasi dengan instansi terkait untuk memastikan akurasi data, kecepatan pelayanan, dan kepastian waktu dalam penyelesaian klaim. Seluruh terobosan ini dapat terlaksana karena adanya sinergi dengan instansi lain, seperti Badan Kepegawaian Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan hingga Pemerintah Daerah.

SAHABAT LATANRO merupakan kombinasi inovasi dari TASPEN yang melayani baik ASN aktif maupun pensiunan ASN, sekaligus mempengaruhi kesejahteraan keluarga mereka yang ikut menikmati kemudahan yang diberikan. Dengan inovasi ini, TASPEN menjamin keamanan peserta karena uang pensiun ditansfer ke rekening sehingga peserta terhindar dari risiko yang mungkin terjadi pada saat pengurusan klaim seperti risiko perjalanan, risiko tindak kriminal, dan risiko kelalaian.

*active role from TASPEN, integrated with related agencies to make sure data accuracy, speed of the service, and time certainty for customers in accepting their rights. All these breakthroughs can be accomplished because of synergy with other agencies, such as The National Civil Service Agency (BKN), State Treasury Service Office (KPPN), Ministry of Finance as well as local government offices.*

*SAHABAT LATANRO is a combination of innovations from TASPEN, providing services both for active civil servants and pensioners, also affecting the prosperity of their family members. Implementation of SAHABAT LATANRO has been proved to have positive impact especially toward the safety and comfort of Indonesian civil servants, breaking the chain of corruption and synergy among agencies in providing services. Through thus innovation, TASPEN guarantees safety of the pensioners. Pension money is directly transferred into their account, therefore they can avoid risks which may occur during the claim processing such as travel, crime, and negligence risk.*



## SIMGAJI ASN

### SIMGAJI ASN

Divisi Kepesertaan,  
PT Taspem (Persero)

*Division of Membership,  
PT Taspem (Persero)*

# 95

1 Sebagai BUMN yang mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, PT TASPEN (PERSERO) selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi pesertanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan akurasi data melalui SIMGAJI ASN.

Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) adalah aplikasi untuk mengelola gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemprov/Pemkot/Pemkab dengan menggunakan teknologi yang mudah diakses dan terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan BPKP untuk menghasilkan data yang akurat, tepat, dan *up to date*.

Sebelum adanya SIMGAJI ASN ditemukan berbagai permasalahan di PEMDA seperti proses data gaji Pemda masih manual, penulisan nip tidak sesuai BKN (aplikasi pemda belum mengakomodir perubahan nip dari 9 menjadi 18), terdapat NIP *double*, gaji pokok tidak ada di tabel gaji pokok yang berlaku, dan lain sebagainya.

2 *As the only state owned company focusing in managing social insurance for civil servants in Indonesia, PT TASPEN (PERSERO) has always been giving the best effort to serve customer needs. The ways to satisfy customer can be vary and one of them is by improving data accuracy with SIMGAJI ASN to support service excellences.*

*Payroll Management and Information System (SIMGAJI ASN) is an application for handling and managing civil servants payroll administration and mainly used by Government Representative in Province/City/Region, this application is easy to access and can be integrated with others such as SIMDA Keuangan BPKP in order to achieve high data accuracy and up to date.*

*Before using SIMGAJI ASN to process payroll administration, there were some difficulties/problems faced by Government Representatives for example, manual administration process, incorrect civil servants' id number, double id number, incorrect basic payroll etc.*

*Understanding the said problems, TASPEN finally build an innovation in 2011 called SIMGAJI*



Guna mengatasi permasalahan tersebut maka TASPEN berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi SIMGAJI ASN yang telah terbukti membantu Pemda dalam berbagai hal seperti pengelolaan daftar gaji secara digital menggunakan SIMGAJI, aplikasi SIMGAJI terintegrasi dengan BPKP dan DJPK, NIP telah tervalidasi dengan data BKN (*single NIP*), gaji pokok sesuai standar yang berlaku, mengurangi kesalahan pembayaran gaji untuk peserta-peserta yang sudah BUP dikarenakan aplikasi ini sudah mengakomodir BUP stop otomatis.

Keunikan dari inovasi ini adalah aplikasi bersifat gratis, data sudah digitalisasi dan terintegrasi sehingga menghasilkan data yang valid dan akurat, proses mutasi data ASN dapat dilakukan secara otomatis (mutasi finansial dan non finansial) serta jaminan pemeliharaan aplikasi dan data terproteksi oleh TASPEN.

Dampak positif dari adanya inovasi ini di antaranya efisiensi penggunaan anggaran di Pemda, peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi ASN Daerah Otonom terkait hal pelaporan pajak SPT PPh Pasal 21.

*ASN which helps them managing civil servants payroll administration in better ways such as moving the process from manual to digitalization, providing an integrated application with BPKP and DJPK, id number validation with BKN (single id number), providing the correct basic payroll standard, reducing error administration in payroll.*

*SIMGAJI ASN is unique because it is very powerful and free. No charge fees for its installment, maintenance and full data protection is guaranteed by TASPEN. Besides, this application can be integrated with other applications in order to get a valid an accurate data. It also provides an automated data mutation (financial and non financial) which can be useful for managing data.*

*The positive impacts of SIMGAJI ASN are it supports budgeting efficiency, improves tax collection of civil servants in accordance with the tax regulation (PPH pasal 21).*



## AIR DISUNTIK, RESAH PUN TEROBATI

### *WATER INJECTED, RESTLESS TREATED*

96

Perusahaan Air Minum (PAM)  
Tirta Mangkaluku Daerah Kota  
Palopo, Pemerintah Kota Palopo

*Local water company of Tirta  
Mangkaluku, Palopo City*

1 Pada saat terjadi kemacetan air akibat menurunnya produksi air sebagai dampak gangguan air baku maka PDAM secara umum mendistribusikan air gratis melalui truk tangki dengan pola antre dan *door to door*. Pola ini telah menimbulkan kerugian immateril pelanggan berupa ketidakpuasan dan ketidaknyamanan, kehilangan potensi pendapatan PDAM dan masalah sosial lainnya seperti ketidakadilan dalam memperoleh air serta gangguan kenyamanan berlalu lintas.

Mencermati dan mengantisipasi berkembangnya permasalahan ini maka tercetuslah inovasi di internal PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, yakni menerapkan pola Penyuntikan Air. Pola ini cukup sederhana dimana air dari Slang Truk Tangki disuntik ke Pipa Distribusi Tertier Terdampak Macet melalui *Stopkran* hingga menjangkau Pipa Persil Pelanggan dan berdampak pada normalisasi distribusi air melalui kran pelanggan. Dengan demikian maka pelanggan tidak merasakan adanya kemacetan air dan PAM tidak kehilangan pendapatan karena air tersuntik tetap melalui meter air.

2 *In the event of water congestion due to declining water production as the raw water disturbance impact, PDAM generally distributes free water through the tank truck with pattern as line up and the door to door. This pattern has led to customers lose of immateril in the form of dissatisfaction and discomfort, PDAM losses of potential earnings, other social issues such as injustice in getting water as well as the convenience of traffic disruption.*

*Observe and anticipate the increasing of these problems then found an innovation in internal PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, what applying the pattern of Injecting Water. This pattern is quite simple where the water from a tank truck is injected into the tertier distribution pipe is crashed through the stopkran to reach customers pipeline as a result, it gives a good impact to the normalization of the water distribution through the customers tap. Thereby, customers do not feel any water congestion and PAM doesn't lose revenue due to the water injected through customers meter of water.*

*This innovation is able to change the difficulty of the customer in activity such as lining up*



Inovasi ini mampu mengubah kerumitan pelanggan dalam kegiatan mengantre dan *door to door* menjadi kemudahan dalam memperoleh air dengan hanya mengoperasikan kran di rumah masing-masing selayaknya kondisi normal. Selain itu, inovasi ini telah menambah nilai *stopkran* yang semula hanya sebagai penguras (*washout*) endapan partikel dalam pipa untuk menjamin kualitas air tetap baik, difungsikan juga sebagai akses air suntikan dari slang truk tangki ke pipa distribusi. Inovasi ini belum pernah diterapkan pada PDAM lainnya.

Dalam inovasi yang telah diterapkan sejak tahun 2010 ini, manajemen PAM tetap berkomitmen untuk menjamin keberlanjutannya melalui dukungan regulasi dengan menjadikannya sebagai tugas pokok dan fungsi pada Sub Divisi Distribusi dan Perawatan, menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti truk tangki dan kelengkapannya, menetapkan dana operasional dalam setiap tahun anggaran serta mendorong penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.

*and the door to door become the ease in obtaining water by simply operating the taps in every single house, as in normal conditions. In addition, this innovation has extended the value of stopkran that originally only as reducing (washout) deposition of particles in the pipe to ensure the water quality remains good, also it is functioned as access of water injection from the tank truck's hose to the tertier distribution pipe. This innovation has never been applied by other PDAM.*

*In this innovation that has been implemented since 2010, PAM's management remains committed to ensure it's sustainability through the support of regulation by making it as basic tasks and functions in the sub division of distribution and maintenance, provides a variety of needed resources such as truck tank and trimmings, assign the operational fund in annual fiscal year as well as encourage the accountable report.*



## KUE LUMPUR DARI AETRA

### MUD PASTRY FROM AETRA

97

PT Aetra Air Jakarta  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

PT Aetra Air Jakarta  
Special Region of Jakarta Province

**I** PT Aetra Air Jakarta (Aetra) adalah mitra dari PAM Jaya dalam hal mengelola, mengoperasikan serta memelihara sistem suplai air bersih. Aetra dahulu dikenal sebagai Thames Pam Jaya, yang dimiliki oleh Thames Water (1998-2007). Area operasi adalah sisi Timur dari Kali Ciliwung (sebagian besar Jakarta Utara, sebagian kecil Jakarta Pusat dan seluruh Jakarta Timur). Periode kerja sama 1 Februari 1998 sampai 1 Februari 2023. Pemangku kepentingan yakni Acuatico Pte.Ltd (95%) dan PT Alberta Utilities (5%).

PT Aetra memiliki kapasitas produksi 10.000 lps. Pelayanan pelanggan melalui 2 Strategic Business Units (Utara dan Selatan), 13 Area Business Units, melayani lebih dari 435.777 pelanggan (per Desember 2016). Aetra memiliki 2 Instalasi pengolahan air bersih, yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran, dengan kapasitas pengolahan saat ini 6000 lps dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulogadung, dengan kapasitas pengolahan saat ini 4300 lps.

Pengolahan air bersih adalah proses memisahkan lumpur dan polutan dari air baku, namun limbah lumpur dari hasil

**II** *PT Aetra Air Jakarta (Aetra) is a partner of PAM Jaya in managing, operating and maintaining a clean water supply system. Aetra was formerly known as Thames Pam Jaya, owned by Thames Water (1998-2007). The area of operation is the East side of Ciliwung River (most of North Jakarta, a small part of Central Jakarta and all of East Jakarta). Period of cooperation is from 1 February 1998 to 1 February 2023. Stakeholders are Acuatico Pte.Ltd (95%) and PT Alberta Utilities (5%).*

*PT Aetra has a production capacity of 10,000 lps. The customers service through 2 Strategic Business Units (North and South), 13 Business Units Area, serving more than 435,777 customers (as of December 2016). Aetra has 2 water treatment plants, namely Buaran Water Treatment Plant (IPA), with a current processing capacity of 6000 lps and Pulogadung Water Treatment Plant (IPA), with a current processing capacity of 4300 lps.*

*Clean water treatment is the process of separating sludge and pollutants from raw water, but mud waste from processing results in some problems because most of it is thrown*

pengolahan menimbulkan beberapa masalah karena sebagian besar dibuang ke dalam kali setempat. Masalah yang timbul antara lain pendangkalan kali setempat yang berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan, komplain dari masyarakat sekitar, teguran dari BPLHD, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengerukan kali setiap tahunnya.

Dampak terhadap pelayanan publik antara lain lahan yang dipakai tidak terlalu luas dapat dipergunakan sisa lahan yang ada tanpa menambah biaya pembebasan lahan, tidak adanya komplain dari masyarakat sekitar akibat pembuangan lumpur ke badan air setempat yang menyebabkan pendangkalan, tidak adanya teguran dari BPLHD, dan mendapat tambahan air baku dengan biaya operasi rendah.

Selain itu kue lumpur dapat dijadikan timbunan atau bahan baku pembuat batu bata dan dapat direplikasi, dibuktikan dengan banyaknya industri dan instansi yang datang untuk belajar. Regulasi yang mendukung inovasi ini yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 220/2010 tentang Perijinan Pembuangan Air Limbah dan UU RI no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbeda dari sistem sebelumnya unit pengolahan ini menggunakan unit pengolah limbah lumpur dengan teknologi yang lebih maju dengan pembubuhan bahan kimia kemudian dipisahkan air dan lumpurnya secara "paksa" dengan menggunakan spiral. Dibandingkan sebelumnya hanya dengan menjemur lumpur di lahan penjemuran dan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk mengeruk dan memindahkan lumpur.

*into local times. Problems arising include the local siltation which is potentially flooding during the rainy season, complaints from surrounding communities, reprimands from BPLHD, and the high cost of dredging each year.*

*Impacts on public services such as land that is used not too wide can be used for the remaining land without increasing the cost of land acquisition, the absence of complaints from surrounding communities due to the disposal of mud to local water bodies that cause siltation, lack of reprimands from BPLHD, and get additional Raw water with low operating costs.*

*The siltation of the river. In addition, "mud cakes" can be used as embankments or raw materials for brick makers and can be replicated, as evidenced by the many industries and institutions that have come to learn. The regulation that supports this innovation is the Jakarta Governor Regulation no. 220/2010 on Waste Disposal Permits and RI Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management.*

*Different from the previous system, this processing unit uses a sludge treatment unit with more advanced technology by affixing chemicals and then separating water and mud by force by means of a spiral. Compared earlier with just drying the mud on the drying field and needing enough manpower to dredge and move the mud.*



## MEDIA WHATSAPP DAN SMS SEBAGAI SOLUSI PELANGGAN TIDAK BISA DIAKSES

### WHATSAPP MEDIA AND SMS AS AN INACCESSIBLE CUSTOMER SOLUTION

98

Perusahaan Daerah Air Minum  
Jaya & PALYJA, Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta

PDAM JAYA & PALYJA,  
Special Region of Jakarta  
Province

**I** PALYJA adalah perusahaan penyediaan air bersih untuk wilayah Jakarta sisi barat kali Ciliwung. Saat ini melayani 400.371 pelanggan standard dan 3052 pelanggan utama. PALYJA melakukan proses pembacaan meter air yang berada di lokasi pelanggan setiap bulan untuk mengetahui konsumsi air yang digunakan untuk proses penagihan.

Hasil pembacaan meter tidak dapat dibaca dengan akurat karena berbagai alasan yang berada dilokasi pelanggan, seperti; Kondisi tidak bisa di akses karena Rumah Dikunci (RDK) yang jumlahnya mencapai 1.358 (kondisi berulang sampai dengan 3 bulan) atau 0,34 % dari total pelanggan 401.456 (September 2015). Dengan kondisi seperti ini maka PALYJA melakukan perhitungan pemakaian air pelanggan dengan memberikan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir. (PERDA 11 tahun 1993).

Inilah yang melatar belakang kami dari Meter Reading & Billing Collection Departemen PT PALYJA untuk mencari solusi keunikan/kebaruan agar pelanggan tersebut dapat dilakukan pembacaan meternya. Setelah

**II** PALYJA is a water supply company for the Jakarta area west side of Ciliwung. It currently serves 400,371 standard customers and 3052 key customers. PALYJA performs water meter reading process at customer's location every month to know the water consumption used for billing process.

*The meter reading results can not be accurately read for various reasons located in the customer's location, such as conditions can not be accessed due to Locked House (RDK) which amounted to 1,358 (recurring conditions up to 3 months) or 0.34% of total customer 401,456 (September 2015). Under these conditions, PALYJA calculates the customer's water usage by giving the average of the last three months. (Regional Regulation 11 of 1993).*

*This is the background of our Meter Reading & Billing Collection Department of PT PALYJA to find a solution uniqueness so that customers can be done meter reading. After a strategic approach is proposed to create leaflets distributed to customers locked home. Where in the leaflet occurs two-way communication so that consumers report the meter meter*



dilakukan pendekatan strategis maka diusulkan untuk membuat leaflet yang didistribusikan kepada pelanggan rumah dikunci. Dimana di dalam leaflet terjadi komunikasi dua arah agar konsumen melaporkan indeks meter pelanggan via WA ataupun SMS ke PALYJA (BACA METER MANDIRI).

Adapun dampak dari inovasi yang dilakukan PALYJA ini adalah berkurangnya jumlah pelanggan rumah dikunci, dimana target dari proyek inovasi ini ditetapkan adalah berkurang sebesar 50%, dan ternyata hasilnya melebihi target yaitu 84%. Manfaat lain dari inovasi ini adalah adanya edukasi pelanggan dengan melakukan "Baca Meter Mandiri", kemudahan komunikasi antara PALYJA dengan pelanggan, quality control dua arah antara pihak PALYJA dan pencatat meter, pembacaan meter lebih akurat dan kepuasan pelanggan meningkat.

*customers via WA or SMS to PALYJA (BACA METER MANDIRI).*

*The impact of PALYJA's innovation is the reduction in the number of locked house customers, where the target of this innovation project is set to decrease by 50%, and the result exceeds the target of 84%. Another benefit of this innovation is the customer education by doing "Baca Meter Mandiri", the ease of communication between PALYJA with customers, quality control in both directions between the PALYJA and recording meter, the meter readings are more accurate and increased customer satisfaction.*



## SISTEM AUTODEBET RETRIBUSI PKL: NO BOCOR, NO PUNGLI, NO JUAL BELI LAPAK

### **AUTODEBET SYSTEM PKL RETRIBUTION: NO LEAK, NO ILLEGAL CHARGES, NO SALE AND PURCHASE STALL**

Bank DKI – Grup Pengembangan  
Dana dan Jasa, BUMD -  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

*Bank DKI – Fund and Service  
Development Division, BUMD –  
Special Region of Jakarta Province*

99

1 Gubernur DKI Jakarta dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapannya bahwa PKL di Provinsi DKI Jakarta harus dikelola dengan baik melalui pendataan PKL yang rapi sehingga memberi kepastian ijin tempat usaha, memiliki akses pinjaman modal dari Bank, tidak dikenai pungli serta pemungutan retribusi dilakukan secara non-tunai untuk mencegah terjadinya kebocoran.

Tiga permasalahan utama yang dihadapi saat itu adalah (1) identifikasi data PKL untuk memastikan bahwa PKL tersebut adalah benar-benar pemakai tempat usaha, bukan oknum atau preman; (2) kebocoran penerimaan retribusi dan adanya pungutan liar; (3) belum adanya laporan penerimaan retribusi dan pencatatan piutang kewajiban tunggakan retribusi yang update dan rinci.

Solusi yang ditawarkan Bank DKI (berkoordinasi dengan Dinas KUMKMP Provinsi DKI Jakarta) adalah dengan mengembangkan Sistem Autodebet Retribusi PKL yaitu sistem penerimaan retribusi daerah dari para PKL atas pemakaian tempat usaha milik Pemprov DKI Jakarta dengan cara mendebet rekening

2 *Jakarta governor Djarot Saiful Hidayat has conveyed his hopes in many events that street vendors (PKL) in the province must be managed well through an orderly vendor registration. With a well structured registration process, street vendors may have a certainty on their business locations and get a wider access to capital loans from banks. They also will be better protected from any illegal levies because under this registration process, the Jakarta administration will implement a non-cash fee payment system that will be effective to prevent fund leakage as well.*

*Three challenges are currently facing the Jakarta administration in handling street vendors in the province. The first problem it has long dealt with is in identifying data of street vendors. Data identification is crucial to ensure that the registered street vendors are real users, not thugs, brokers or middlemen. Second, fund leakage and illegal levies have grown rampant in the province. Third, there is an absence of an up-to-date and detailed report on fee revenues and delinquent fee payments.*

tabungan milik PKL di Bank DKI berdasarkan *standing instruction* (surat kuasa Autodebet) dan hasil penerimaan retribusi tersebut dapat dimonitor oleh Dinas/Sudin KUMKMP secara realtime-online melalui fasilitas *Cash Management*. Keunikan dari inovasi ini adalah penggunaan *Smart Card* (yaitu Kartu ATM JakCard Combo Bank DKI yang multifungsi antara lain sebagai Kartu ATM, Kartu Debit, prepaid e-money sekaligus dapat berfungsi sebagai Kartu ID PKL Provinsi DKI Jakarta), *Autodebet (Account Based) System* serta *Cash Management System (CMS)* yang dilengkapi fitur cetak laporan untuk menyajikan laporan rincian transaksi baik realisasi pembayaran retribusi maupun piutang retribusi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi.



Sistem Autodebet Retribusi PKL yang secara resmi diluncurkan dan implementasikan pada tanggal 29 Januari 2015 telah memberikan dampak atau manfaat seperti data PKL yang terekam dengan baik berbasis rekening bank memudahkan pengelolaan dan pembinaan PKL, menghindari penguasaan tempat usaha oleh oknum atau preman dan mencegah jual beli lapak oleh oknum.

*To solve the problem, Jakarta administration-owned lender Bank DKI, in coordination with the administration's Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises and Trade Agency (KUMKMP), has initiated the development of a fee auto-debit system for street vendors. This system aims to record fees paid by street vendors who use business locations owned by the Jakarta administration. Authorities collect PKL fees by debiting an amount of money in their Bank DKI accounts based on standing instruction. The KUMKMP can monitor collected fees online and in real time via a Cash Management facility.*

*The uniqueness of this fee auto-debit innovation is the use of three elements, namely Smart Card, Autodebit (Account Based) System, and Cash Management System (CMS). Smart Card is a JakCard Combo Automatic Teller Machine (ATM) card issued by Bank DKI that can function as an ATM card, a debit card, a prepaid e-money card, and an ID card for Jakarta street vendors. Meanwhile, the CMS prepared for the e-fee payment has been equipped with a feature, which provides a detailed report of all transactions, including realized fee payments and delinquent fee payments, as part of the Jakarta administration's monitoring and evaluation activities.*

*Officially launched and implemented on Jan.29, 2015, the PKL Fee Auto-debit System has brought many great benefits, including a well-recorded PKL data, which is based on bank accounts and has made it easier for the Jakarta administration to manage street vendors in the province. This system has also effectively prevented brokers or thugs from illegally occupying PKL business places and avoided illicit kiosk handovers by third parties.*

# TOP 99

INOVASI  
PELAYANAN  
PUBLIK  
TAHUN 2017  
*PUBLIC SERVICE  
INNOVATION 2017*

KOMENTAR DARI KEMENTERIAN, PROVINSI,  
KABUPATEN, KOTA, DAN TIM EVALUASI

---

*COMMENTS FROM THE MINISTRY, PROVINCIAL,  
REGENCY, CITY, AND EVALUATION TEAM*



## Menteri Sosial Republik Indonesia **Khofifah Indar Parawansa**

Saya sangat mengapresiasi kompetisi inovasi layanan publik yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, sebagai salah satu cara memberikan dorongan kepada Kementerian/Lembaga untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dalam rangka pemenuhan hak (*rights based*) dan aksesibilitas pada pelayanan sosial, Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi mengembangkan model layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi

Gelandangan Pengemis berbasis Masyarakat atau disebut **RISOL GEPENG MAS**. Model ini merupakan alternatif jawaban yang relevan dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis, melalui penjangkauan (*outreach*) ke wilayah kantong-kantong gelandangan dan pengemis. Model ini mengembangkan metode partisipatif dengan melibatkan semua unsur, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga tanggungjawab untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan secara lebih optimal.

*I deeply appreciate the Innovation Competition for Public Service, conducted by the Ministry of PAN and RB, as a way to giving encouragement for the Ministry/ Institution in provide the best service to the community. In the framework of rights-based and accessibility to social services, the Ministry of Social Affairs, Directorate General for Social Rehabilitation through the Social Institution of Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, developed a model of Social Rehabilitation for homeless and beggar on community based approach or we called RISOL GEPENG MAS. This model is an alternative answer which is relevant in dealing with homeless and beggar problems. The activity is done through outreach to the main area of high population of homeless and beggar involving of local government and communities. This model develops participatory methods, involving all elements, both local government and community, therefore the responsibility in handling the problems of homeless and beggars can be done more optimally.*



## Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI **Yasonna Hamonangan Laoly, SH., MSc., Ph.D**

Aplikasi Sidbankum sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan RPJP Nasional, RPJM termasuk di dalamnya Nawacita Presiden, Khususnya point 4 yaitu menghadirkan negara untuk penegakan hukum yang bermartabat. Salah satunya

dengan penguatan dan perluasan akses keadilan melalui Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sehingga negara dapat mewujudkan prinsip *equality before the law*. Dengan Aplikasi ini memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan untuk layanan bantuan hukum, mulai dari data OBH hingga sebarannya serta jenis perkara yang dibantu. Aplikasi Sidbankum online ini memudahkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Pengembangan sistem ini harus terus selalu dilakukan seiring dengan komitmen dunia dalam mewujudkan SDG'S bahwa *no one left behind* pada tahun 2030. Pada Tujuan 16 dari SDGs yang berkaitan dengan akses keadilan menuntut pengembangan dan inovasi aplikasi ini. Pengembangan sistem ini semakin dirasakan karena terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang ada di instansi lain yang terkait salah satunya dengan database TNP2K, Mahkamah Agung RI serta Pos Bantuan Hukum yang ada di Rutan melalui Posbankum Rutan Online.

*Sidbankum Online Application is very important in terms of Long Term and Mid Term Development Plan, including in President Vision of Nawacita, especially point 4 which is Reject weak state by reforming the system and law enforcement corruption-free, dignified, and reliable. One of the action is through strengtening and enhancing access to justice through legal aid so that State can fulfill the principle of equality before the law. With this application, public can access any information on legal aid implementation, from legal aid provider data until the type of cases. This online application simplifies Legal Aid administration with the core principles of the Ministry: Professional, Accountable, Sinergy, Transparent and Innovative (PASTI). The development of the system is carried in line with world commitment in SDGs that no one left behind in 2030. SDGs point 16.3 demands the development and innovation of this application. The development is integrated with other applications such as database of National Team for The Acceleation of Poverty Reduction (TNP2K), Supreme Court and Directorate Genereal of Correction through Online Detention House Legal Aid Post.*



Menteri Kesehatan RI,  
**Nila Farid Moeloek**

SINOVIK memacu upaya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Kementerian Kesehatan terus berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya "Indonesia Sehat".

*The existence of SINOVIK encourages appearance of new innovations to improve public services in Indonesia. Ministry of Health always commit to give an excellent service in order to create "Healthy Indonesian Community".*



## Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **Siti Nurbaya**

"Inovasi pelayanan publik melalui SIPUHH merupakan wujud nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dari sebelumnya *official assessment* secara manual menjadi *self assessment* berbasis teknologi informasi. SIPUHH menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem yang komprehensif memfasilitasi pelayanan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan hasil hutan kayu; konkritnya : mudah, murah, cepat dan menghindari transaksi apalagi pungli. Juga dapat diakses secara *realtime* sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inovasi SIPUHH akan menjadi contoh untuk direplikasi dalam pengelolaan sumber daya hutan lainnya."

*"Public service innovation through SIPUHH is a realization of bureaucratic reform in the implementation of forest product administration from the previous official assessment to manual self-assessment based on information technology. SIPUHH brings together all stakeholders in a comprehensive system to facilitate logging, documentation and reporting of timber forest products; Concrete: easy, cheap, fast and avoid the transaction moreover pungli (illegal Levies). Also can be accessed in realtime according to their respective duties and functions. The innovation of SIPUHH will be an example to be replicated in the management of other forest resources.*



## Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc.**

Dalam rangka mengantisipasi globalisasi dan masifnya pembangunan infrastruktur saat ini, kebutuhan tenaga konstruksi yang kompeten masih banyak diperlukan. Kementerian PUPR sebagai pembina konstruksi nasional berupaya mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama mempersiapkan sumber daya manusia bidang konstruksi yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya.

Layanan SIBIMA KONSTRUKSI (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi) merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk menghadirkan media

pembelajaran bidang konstruksi yang inklusif, mandiri, mudah diakses, murah, cepat dan berkualitas yang diperuntukkan bagi masyarakat jasa konstruksi di seluruh pelosok nusantara.

Semoga kehadiran layanan SIBIMA KONSTRUKSI dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat jasa konstruksi, sehingga pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI kedepan akan semakin berkualitas.

*In order to anticipate the globalization and massive development of infrastructure today, the need for competent construction personnel is still much needed. Ministry of PUPR as a national construction coach seeks to encourage local governments to jointly prepare human resources in the field of construction of quality and have high competence in the field. SIBIMA KONSTRUKSI (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi - Self Management Learning Intensive Information System) is a breakthrough by the Ministry of PUPR to present an inclusive, self-accessible, accessible, cheap, fast and quality construction learning media for construction service communities throughout the archipelago. Hopefully the presence of SIBIMA CONSTRUCTION service can be utilized as much as possible by the society of construction services, so that infrastructure development in the whole of NKRI in the future will be more qualified.*



## Menteri Perindustrian **Airlangga Hartarto**

Saya memberikan apresiasi kepada kementerian PAN & RB yang telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Setiap tahun Kementerian Perindustrian berpartisipasi dalam kompetisi ini dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kami terus berupaya memberikan motivasi dan menginstruksikan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian baik di pusat maupun daerah untuk memunculkan inovasi-inovasi. Diharapkan inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai dan memberikan manfaat kepada pengguna jasa sektor industri sehingga dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

*I appreciate the PAN & RB ministry that has organized the Public Service Innovation Competition. Every year the Ministry of Industry participates in this competition and in 2017 has increased quite rapidly. We continually strive to motivate and instruct the work units within the Ministry of Industry both at the central and regional levels to bring about innovations. It is expected that these innovations can improve employee performance and provide benefits to service users of the industrial sector so that it can play a role in improving the Indonesian economy.*



## Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional **Sofyan A. Djajil**

"Saya merasa bangga atas terpilihnya inovasi "INTI" di Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang dan inovasi "KAKAP" di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Tahun 2017. Semoga penghargaan ini dapat menjadi contoh sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."

*"I feel proud of the election of "INTI" innovation at the Land Office of Pematang Regency and the innovation of "KAKAP" in the Land Office of Gresik Regency as TOP 99 Public Service Innovation Competition (SINOVIK) Year 2017. Hopefully this award can be an example as well as an additional motivation for all Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency to continuously improve the quality of services to the community."*



## Kepala LKPP **Agus Prabowo**

E-Lelang Cepat adalah "terobosan" LKPP berupa inovasi people, process, technology untuk mempercepat dan mempermudah praktek pengadaan dengan tetap menjaga akuntabilitasnya!

Tetapi urusan belum selesai...! Karena ekosistem pengadaan selalu dinamis dan berkembang cepat. Oleh karena itu perlu dukungan berbagai pihak terutama K/L seperti Kemenkeu,

Kemendagri... Juga para Penyedia!

Sinovik 2017 OK banget! Sejiwa dengan LKPP! Ini adalah ajang untuk memacu Kreatifitas dan inovasi yang melibatkan people, process, dan technology menuju e-governance yang semakin Kredibel.

*Fast e-auction is a breakthrough from LKPP which is consist of innovation from people, process and technology that accelerate and make the procurement practices more easier but still keep accountable. But the mission is not over yet...! Because the ecosystem of procurement keep moving*

*dynamic and growing fast, so we need support from others, especially from the other Ministry and Institution like Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs ... and also from all providers. Sinovik 2017 is awesome! That's describing a soul of LKPP! This is the event that we need to increase our creativity and innovation, that implicate people, process and technology to make the e-governance more credible*

---



## Gubernur Jawa Timur **Dr. H. Soekarwo**

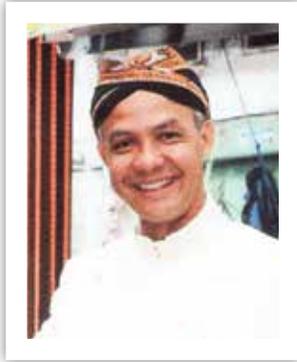
Dalam rangka menghadirkan pemerintah ditengah masyarakat, telah banyak dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Tujuannya adalah agar pelayanan dapat dinikmati secara lebih merata dan adil, lebih cepat dan lebih baik, lebih sederhana dan lebih murah serta lebih terjamin penyediaannya, terutama bagi golongan masyarakat tidak mampu, marginal dan rentan. Pemerintah sebagai dinamisor

harus mampu mewujudkan keinginan tersebut.

Cara-cara konvensional ada kalanya sudah harus ditinggalkan diganti dengan cara baru yang lebih cepat dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan tersebut. Disinilah pemerintah dituntut untuk dapat melakukan berbagai terobosan dan inovasi sebagai solusi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Melalui kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya berharap praktek-praktek baik pelayanan publik yang telah diciptakan tidak hanya sekedar dikompertisikan tetapi didorong agar sebanyak mungkin direplikasikan serta dapat diterapkan secara berkelanjutan.

*The quality of public services reflects government existence. This is why in East Java, so many efforts have been taken to improve public services that can be accessed by all citizen, especially for the poor and vulnerable. Government should take all necessary actions in order to make public services more effective, efficient, and always present all the time. The old-fashioned ways in serving people have to be replaced with the new ones that respond citizens' needs faster and appropriately.*

*Therefore, innovation is the key in serving people recently. I put high appreciation to and fully support the Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform that conducts public service innovation competition annually in order to boost public service quality across the nation. Beyond the competition, I am hoping that some winning innovations from this competition can be replicated to other places and sustainable*



## Gubernur Jawa Tengah **H. Ganjar Pranowo**

Inovasi pelayanan publik adalah tekad melakukan percepatan perubahan yang lebih baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan terjangkau. Gerakan satu unit pelayanan publik satu inovasi, merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi. Inovasi tiada berhenti dalam batas reformasi birokrasi, namun yang lebih penting semangat kita untuk berbagi kemudahan terhadap

sesama. Maju terus Pelayanan Publik Indonesia.

*Public service innovation is a determination to accelerate change better, to meet the needs of community services that are easy, cheap, fast and affordable. The movement of one unit of public service is an innovation, a concrete manifestation of bureaucratic reform. Innovation does not stop within the bureaucracy reformation, but more importantly our spirit to share the convenience of each other. Keep on moving the Indonesian Public Service!*



## Gubernur Bali **Made Mangku Pastika**

Miskin adalah dosa, membiarkan orang menjadi miskin dosanya lebih besar, membuat orang menjadi miskin dosanya sangat besar, pemimpin yang membiarkan semua itu terjadi dosanya maha besar. Pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk mengentaskan kemiskinan. Jangan pernah berhenti untuk menciptakan akses bagi anak miskin, karena orang miskin

juga memiliki potensi yang tak terbatas, yang perlu digali, dikembangkan, difasilitasi melalui pendidikan berkualitas sehingga bisa menjadi generasi emas, yaitu generasi yang mampu bersaing dengan berbagai kecerdasan yang dimilikinya.

*Being poor is a sin, letting people to be poor causes greater sin, causing others to be poor is such a horrible sin, and the leader who lets all of those things happen has the greatest sin. Education is the essential element to alleviate poverty. Never stop generating breakthrough for the underprivileged students as they own the unlimited potentials, which need to be explored, developed, and facilitated through high quality education, so they can shine as the golden generation, being able to compete with others using their multiple intelligences and skills.*



## Gubernur Kalimantan Barat **Cornelis M.H**

Inovasi "Bang Elis Hadir, kampung kami jadi terang" merupakan penyediaan fasilitas listrik bagi masyarakat di daerah pedalaman melalui pembangunan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) Terpusat/Komunal yang menggunakan teknologi tepat guna melalui energi baru terbarukan.

Fasilitas listrik ini telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat desa, terutama untuk kepentingan siswa sekolah belajar pada malam hari, menggerakkan industri kecil di desa, meningkatkan kesejahteraan agar tidak tertinggal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

*"Brother Elis Arrive, our village becomes bright" innovation is the provision of electricity facilities for people in remote areas/hinterland through the development of centralized/communal solar power plant using appropriate technology through renewable energy.*

*This electricity facility to be utilized as well as possible by the villagers, especially for students studying at night, mobilizing small industries in the village, improving the welfare so as not to become lagging village, so the benefits can really be felt by the villagers.*



## Gubernur Sulawesi Selatan **Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.Si, M.H**

Kompetisi inovasi pelayanan publik oleh KEMENPAN dan RB RI menginisiasi lahirnya berbagai inovasi di daerah. Inovasi di daerah telah menghadirkan kedekatan pemerintah dalam pelayanan, sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk membantu rakyat secara sederhana, mudah, cepat, tidak distorsi, dan tidak ada pungli didalamnya, namun dapat dilakukan dengan baik.

*The public service innovation competition by KEMENPAN and RB RI initiates the invention of various innovations in the region. The Innovations has presented government closeness in service. It is also become government commitment to helping the society simply, easily, fast, no distortion, and extortion in it, and can be done well.*



## Gubernur Sulawesi Tenggara **Nur Alam**

Saya sangat bangga dengan prestasi yang dicapai oleh BKD Prov Sultra, sistem semacam ini sangat dibutuhkan oleh stakeholder provinsi Sulawesi Tenggara dimana aplikasi atau sistem ini bersifat sistematis ilmiah mudah dipahami dan update, dimana melalui sistem tersebut akan membentuk transparansi dan akuntabilitas publik dan saya menitipkan hasil karya besar ini kepada penerus pelanjut pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara

*I am very proud of the achievements made by BKD Province of Sultra (Southeast Sulawesi), such a system is needed by the stakeholders of Southeast Sulawesi province where the application or system is systematic scientific easy to understand and update, through which the system will form transparency and public accountability and I entrust the work To the successor of the government in the province of Southeast Sulawesi*



## Gubernur DKI Jakarta **Basuki Tjahaja Purnama**

Kami sangat terimakasih, inovasi ini melengkapi SmartCity kami. kami juga akan mengembangkan sistem ini lebih jauh hingga ke tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), sehingga penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

*We are very grateful, this innovation complements our Smart-City. We will also develop this system further down to the neighborhood level (RT) and community units (RW), so that flood prevention can be done quickly and effectively.*



## Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara **H.M Saleh Lasata**

Saya bahagia dengan pencapaian Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultra yang telah berinisiasi dengan memunculkan sistem informasi kepegawaian yang berbasis IT. Banyak sekali permasalahan data kepegawaian yang sering ada diantaranya data yang tidak akurat, tidak update, mendapatkan data yang terlalu lama. Tapi dengan adanya sistem ini harapan kita masalah tersebut bisa teratasi, saya sangat menghargai kerja dan kinerja semua tim dan saya berharap semua tim untuk terus bekerja keras memelihara menjaga sistem ini karena ini adalah terobosan baru dan inovasi yang sangat kreatif dengan adanya sistem ini merupakan indikator efisiensi dan efektifitas birokrasi yang menunjukkan pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik.

*I am happy with the achievement of the Regional Personnel Board of Prov. Southeast Sulawesi that has initiated by bringing up an IT-based staffing information system. Lots of problems of personnel data that often exist among the data are not accurate, not update, and get data that is taking too long time. But with the existence of this system our hope the problem can be resolved. I really appreciate the work and performance of all the team and I hope all the team to continue to work hard to maintain the system because this is a new breakthrough and innovation is very creative with the existence of this system is an indicator of efficiency And the effectiveness of bureaucracy that shows the implementation of governance in Southeast Sulawesi run well.*



## Bupati Bojonegoro **Drs. Suyoto, M.Si**

Mengubah ancaman menjadi peluang untuk menghapus kemiskinan.  
Dengan Paha Sylpi, bangkitkan gairah peternak pinggir hutan.

*Turn a threat into opportunity to eliminate poverty.  
With Paha Sylpi excites breeders of the forest edge.*



## Bupati Banyuwangi **Abdullah Azwar Anas**

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar Kementerian PANRB ini menjadi penyemangat tersendiri bagi daerah untuk meningkatkan kualitas inovasi. Tanpa inovasi, pelayanan publik tidak akan bisa menjawab tuntutan publik terhadap birokrasi yang semakin tinggi. Inovasi adalah kunci bagi terciptanya pelayanan publik yang cepat, pasti, dan berorientasi warga.

*Public Service Innovation Competition that was held by Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform became a special encouragement for the region to improve the quality of innovation. Without innovation, public service will not be able to answer the public demand for an increasingly high bureaucracy. Innovation is the key to create the fast service, definite, and citizen-oriented public services.*



## Bupati Probolinggo **Hj. P. Tantriana Sari, SE**

Kami senantiasa seiring sejalan mendukung gerakan "One Agency One Innovation", Satu Instansi Satu Inovasi, yang diinisiasi oleh Kemenpan RB. Tahun ini, kami meluncurkan inovasi pemberdayaan masyarakat menuju Kabupaten Probolinggo Bebas Pasung dengan tagline "Ngrumpi Sehat Berkarya Bersama Saudaraku".

Intinya, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat disembuhkan dengan pengobatan medis. ODGJ tidak harus dikucilkan, apalagi dipasung. Sinergitas kelompok masyarakat, Pemerintah Desa dan tenaga kesehatan ternyata dapat dikelola dengan inovatif menjadi berkah manfaat bagi ODGJ dan keseluruhan kesehatan masyarakat.

*We are in line to support "One Agency One Innovation" movement that have been initiated by Kemenpan RB. In this year, we launch an innovation of community empowerment towards Kabupaten Probolinggo Free Pasung with the tagline "Spreading Good Rumors to Drive A More Productive Mentally Ill" Basically, mental disorder people could be healed medically. This people should not be ostracized, even be chained or pasung. The synergy among community forum, village government and health workers could be innovative managed to be the benefit for mental disorder people and overall public health.*



## Bupati Pemalang **H. Junaedi, SH, MH**

"Apresiasi kami untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Semangat memudahkan masyarakat melalui inovasi Terintegrasi (INTI) kian hari semakin cepat, mudah dan transparan, hal ini Karena penyajian layanan di pertanahan menggunakan sms yang mudah digunakan oleh masyarakat yang berupa layanan informasi dan penggaduan, layanan informasi spasial, layanan antar jemput, layanan sertifikasi tanah wakaf dan layanan STAR yang melibatkan ihak bank merupakan barometer keseriusan

kantor pertanahan kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya inovasi terintegrasi ini sangat memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan pertanahan dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan serta pembangunan kabupaten Pemalang."

*"We appreciate Pemalang Local Land Office for its program, INTI (Intergrated Innovation), in providing fast, easy and transparent services in land administration. The innovation offers report service, general information service via SMS, internet-based spatial analyzationservice, LAJU, and Ayo Wakaf as well as STAR, which involves bank's contribution in its role. It shows that the institution is sincere in providing excellent service for Pemalang community. The intergrated innovation enhances community's access to benefit from the land administration service. Pemalang Local Land Office and its programs have always been efficacious for Pemalang development."*



## Bupati Pinrang, **H. A. Aslam Patonangi**

Dengan adanya Edotel dan Travel sangat memudahkan akses informasi terhadap destinasi wisata maupun hunian sehingga sangat layak untuk dikembangkan.

*With the Edotel and Travel greatly facilitate access to information on tourist destinations and residential so it is feasible to be developed.*



## Bupati Aceh Barat **T. Alaidinsyah**

CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang terintegrasi telah memberikan energi baru dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat berupa penambahan anggaran pembangunan. Konsep padu serasi program dan kegiatan yang dijalankan perusahaan melalui usulan musrenbang akan menjadikan pembangunan semakin baik dan berkualitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat"

*Integrated CSR (Corporate Social Responsibility) has provided new energy in the management of governance in West Aceh district in the form of additional development budget. The concepts of a harmonious program and the activities undertaken by the company through the musrenbang proposal will make the better development and quality in realizing the welfare of society.*



## Bupati Kulonprogo **Hasto Wardoyo**

Kami sebagai kabupaten miskin jelas tidak bisa membuat produk teknologi. Kami tidak bisa membikin handphone, sepeda motor, bahkan jarum suntik saja tidak bisa. Sebab itu, kami berinovasi dengan apa yang ada dengan bekal ideologi untuk kemandirian ekonomi. Tomira merupakan salah satu inovasi kemandirian ekonomi kami, dengan menggandeng pengusaha besar untuk peduli pada ekonomi kerakyatan dan masyarakat kecil. Kami mengharuskan kepada pengusaha besar yang bekerjasama

dengan kami setiap membangun ToMiRa di Kulonprogo harus bermitra dengan Koperasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi serta kapasitas anggota koperasi yang didalamnya termasuk banyak UMKM dan masyarakat miskin.

*We as poor districts clearly cannot make technology products. We cannot make mobile phones, motorcycles, even syringes just cannot. Therefore, we innovate with what we have with ideological supplies for economic independence. Tomira is one of the innovations of our economic independence, by holding big businessmen to care for the people's economy and the small community. We require large entrepreneurs who cooperate with us each to build ToMiRa in Kulon Progo to partner with cooperatives so as to improve the quality and quantity of cooperatives and the capacity of cooperative members which includes many UMKM (MSMEs) and the poor.*



## Bupati Kapuas **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT**

Terima kasih atas dukungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Inovasi PATUH SELAM (Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Selat Dalam) sehingga masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Kabupaten Kapuas akan terus memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

*I would like to thank the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform for their ongoing support for PATUH SELAM (Integrated Administration Services for Urban Village Selat Dalam) innovation which enabled it to be in the TOP 99 of Public Service Innovation of 2017. Kapuas District will always strive to improve the quality of its public services to help its people move towards prosperity and independence.*



## Bupati Kudus, **H. Musthofa, SE, MM**

Inovasi Pelayanan Publik adalah semangat perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah dan lebih terukur.

Maka berinovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kudus adalah harga mati karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri dan mengabdikan kepada masyarakat bagi kami lebih berarti daripada membanggakan diri.

*The innovation of public services are the spirit of change in improving the quality of services to the society to be better, faster, easier and more measurable.*

*So that, making innovation for Kudus Government is a must (fixed price) because nothing is endless except the change itself and serving the community is more powerful and valuable for us than just a self-pride.*



## Bupati Deli Serdang **H. Ashari Tambunan**

Kompetisi Inovasi pelayanan publik telah memotivasi dan menginspirasi penyelenggara negara untuk menggali kreativitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kompetisi ini menjadi tempat pembelajaran yang baik sekaligus berbagi pengalaman tentang hal-hal yang hebat yang pernah dilakukan, yang akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur menjadi lebih baik. Inovasi Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang OPUNG SARI BASAH BANG : Mewujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Deli Serdang BERSERI, berhasil meningkatkan performan sekolah menjadi lebih Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang dan Indah. Kegiatan ini akan menjadi ajang yang akan ditunggu-tunggu oleh berbagai inovator untuk berbagi praktik yang baik yang telah mereka lakukan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi dengan baik, kegiatan yang dilakukan oleh Menpan RB ini.

*The competition of the innovation of public service has motivated and inspired the government institutions in order to explore the creativity in giving the best service to society. The competition becomes a good media for learning and sharing experience about great things that have been implemented. The competition is expected to have an impact on the improvement of the performance of civil servants. The innovation of the government of Deli Serdang Regency, OPUNG SARI BASAH BANG: Realizing Environmental Based Schools and Deli Serdang BERSERI, successfully improved the performance of the schools to be cleaner, neater, cooler, more shady and more beautiful schools. The competition will be a program expected by inovators to share good practice that have been implemented. The government of Deli Serdang Regency gives great appreciation to the competition held by Menpan RB.*



## Bupati Gresik **Sambari Halim Radianto**

"Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah meridhoi usaha kita sekalian, sehingga inovasi Kadaster Lengkap (KAKAP) yang digagas Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan kabupaten Gresik tercatat dalam buku Top 99 inovasi oleh kementerian PAN/RB. Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gresik saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap inovasi dalam pelayanan

di bidang pertanahan itu, karena tidak hanya memberi kemudahan dan mempercepat proses permohonan hak atas tanah tetapi juga digunakan untuk menumbuhkan wajib pajak Bumi dan Bangunan baru serta memudahkan dalam pelayanan penetapan retribusi BPHTB. Dengan dibuatkannya peta bidang tanah pada serial jengkal lahan milik masyarakat maka potensi konflik yang biasa terjadi dlm masyarakat dapat dihindari karena telah dimilikinya bukti yuridis dan bukti fisik atas bidang tanah masyarakat. Kiranya inovasi KAKAP ini dapat dijadikan sebagai problem solving dalam mencegah berbagai masalah di bidang pertanahan di negara kita ini. Demikian terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb."

*"Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

*Praise and gratitude we pray to the presence of Allah SWT who has blessed our efforts, so that the innovation Kadaster Complete (KAKAP) initiated by the Ministry of ATR / BPN especially the Land Office of Gresik regency was recorded in the Top 99 innovation book by PAN / RB ministry. On behalf of the people and the Government of Gresik Regency I give high appreciation and appreciation to the innovation in the service in the field of land, because it not only provide convenience and speed up the process of land rights application but also used to grow the taxpayers Earth and new buildings and facilitate in service Determination of BPHTB levy. By making a map of the plot of land on a series of spaces owned by the community, the potential for common conflicts within the community can be avoided because it has juridical evidence and physical evidence on the plots of community land. This innovation KAKAP can be used as problem solving in preventing various problems in the field of land in our country. Thank you so much. Wassalamu'alaikum wr. wb."*



## Bupati Hulu Sungai Selatan **Drs. H. Achmad Fikry, M. AP**

Kompetisi Inovasi Layanan Publik (SINOVIK) terbukti memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Kepala Daerah terdorong untuk semakin fokus pada pemenuhan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai ide dan gagasan yang diterapkan berdampak positif dalam berbagai aspek layanan publik. Kami, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sangat mendukung keberlangsungan

kegiatan SINOVIK. Bravo KemenPAN RB!

*Competition for Public Service Innovations (SINOVIK) proved to motivate all local governments to improve the quality of public services. Head of Local Government compelled to increasingly focus on the public fulfillment of satisfaction and prosperity. Various ideas that have been applied bring positive impacts espceially in particular in various aspects of public services. We, the Government of Hulu Sungai Selatan, strongly supports the continuity of Sinovik.Bravo KemenPANRB!*



## Bupati Pamekasan H. Achmad Syafii

Inovasi Sigap Sratu 369 Plus merupakan gerakan pelayanan pada sapi betina bunting hingga partus (melahirkan) yang akan mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi peternak dan menjadi solusi permasalahan dan tantangan dalam pemenuhan gizi hewani khususnya daging sapi.

Kompetisi inovas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB merupakan salah satu terobosan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menciptakan Pelayanan Publik yang berkualitas. Hal tersebut menjadi daya dorong bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk mewajibkan seluruh SKPD agar memiliki minimal 1 (satu) program inovasi dan 1 (satu) program unggulan dalam rangka meningkatkan semangat kerja agar lebih baik dalam melayani masyarakat.

*Innovation of Sigap Sratu 369 Plus is a service movement for pregnant cow to partus (birthing) that will be able to provide enormous benefits for breeders and be a solution to the problems and challenges in the fulfillment of animal nutrition, especially beef.*

*The public service innovation competition organized by the PANRB Ministry is one of the breakthroughs in order to accelerate the implementation of Bureaucracy Reform, has become the motivation for Pamekasan District Government in creating a Quality Public Service. This becomes the impetus for the Regional Government of Pamekasan Regency to require all SKPD to have at least 1 (one) innovation program and 1 (one) superior program in order to improve morale to better serve the community.*



## Bupati Sinjai H. Sabirin Yahya, S. Sos

Kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu "terwujudnya masyarakat sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik".

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sinjai mengapresiasi pelaksanaan kompetisi ini dan senantiasa memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melahirkan inovasi yang dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga keikutsertaan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kompetisi inovasi ini. Tahun 2015 masuk dalam Top 99 untuk inovasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu "sipetik (sistem informasi pemetaan pendidikan)", dan tahun ini dari 3 (tiga) inovasi yang diajukan, inovasi Dinas Kesehatan yaitu "Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Bahari", Alhamdulillah masuk Top 99 dan akan mengikuti penilaian ke tahap Top 40.

Semoga ke depan akan lahir inovasi-inovasi lainnya yang bukan hanya menang dalam kompetisi, tetapi yang lebih utama memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan dapat di replikasi oleh opd atau pemerintah daerah lainnya.

*Public service innovation competition Implemented by the ministry of public service apparatus in accordance with the government vision of the Sinjai District "Materialized of sinjai community in unite of prosperous, superior in the quality of life, foremost in public service"*

*Government of Sinjai District appreciate this competition and organization of regional devices (OPD) are motivated to give birth innovation that can more increase public service quality.*

*At 2017 is the third year of government of Sinjai District join this competition. In 2015 enter in top 99 for innovation of department of education, youth and sports "SIPETIK (Sistem Informasi Pemetaan Pendidikan)", and this year, from three (3) innovations subjected, department of healthy innovation "Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Bahari", alhamdulillah enter top 99 and will follow evaluation to top 40.*

*Hopefully, years of the following year its will be born other innovations not just win in competition but more provide the biggest benefits to the community in the improvement of public services quality and may be replicated by others organization of regional devices (OPD) and local governments.*



## Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar

Kabupaten Tangerang untuk inovasi pelayanan public Tahun 2017 mengusulkan 3 (tiga) inovasi, setelah diverifikasi oleh Kementerian PAN & RB 2 (dua) .Inovasi berhasil masuk yaitu Inovasi Sistem Jaringan Elektronik Medik Pasien Online (SiJempol) dan Tax Shopping (BelanjaPajak). Kedua inovasi tersebut masuk dalam Top 99 inovasi pelayanan public tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tanggal 12 April 2017 Tentang Penetapan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

Inovasi Sistem jaringan Elektronik Medik Pasien Online (Si Jempol) dan Inovasi Tax Shopping adalah inovasi – inovasi pelayanan public di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang terkait dengan layanan kesehatan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua inovasi tersebut pelaksanaannya telah dimulai sejak Tahun 2015.

Sistem jaringan Elektronik Medik Pasien Online (Si Jempol) adalah aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pasien dan tata kelola rumah sakit. Aplikasi ini meliputi SIRESPON (Sistem Reservasi Online), AUTOPRAMA (Anjungan Pendaftaran Pasien Mandiri), E –RESEP( Penulisan dan Pemrosesan Resep Elektronik dan Terintegrasi ), SIHAKMAS ( Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Melalui SMS ), INFOTON ( Informasi Tempat Tidur Online), dan E-BROJOL ( Bayi Lahir Pulang Bawa Akte ). Manfaat dari aplikasi ini memudahkan masyarakat menerima pelayanan kesehatan secara mudah, cepat, dan partisipatif sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat karena mendapat kepastian jam layanan, meminimalisir kesalahan (Patien Safety), pengurangan penumpukan antrian pasien, transparansi ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap dan kemudahan pengurusan akte kelahiran. Hal ini, terlihat dari meningkatnya tingkat kepuasan pasien pada Tahun 2015 73,50% menjadi 80,43% pada Tahun 2016.

Tax Shopping merupakan perluasan jaringan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang bekerjasama dengan Perbankan (PT. BJB) dan Non Perbankan (Gerai Mini market/ Alfamart/Indomart) yang jumlah nilai ketetapanannya dari Rp. 0,- s.d Rp. 1.000.000,-dengan hanya membawa Nomor Objek Pajak (NOP) ke Minimarket masyarakat menjadi mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran PBB. Hal ini berdampak pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector PBB untuk pembangunan di Kabupaten Tangerang yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan dapat mengurangi piutang pajak Kabupaten Tangerang. Hal ini, terlihat dari realisasi PBB-P2 dari Tahun 2014 sebesar Rp. 279.750.319,- Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 354.410.622.045,-. Inovasi ini juga menimbulkan efisiensi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyediaan

sarana prasarana penagihan dan petugas layanan PBB.

Inovasi layanan Sistem Jaringan Elektronik Medik Pasien Online (Si Jempol) dan Tax Shopping senantiasa akan ditingkatkan dan dievaluasi untuk menyempurnakan pelayanannya dan menjadi stimulant munculnya inovasi – inovasi lain diberbagai bidang untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang.

*Tangerang Regency for public service innovation in 2017 proposed 3 innovations, after verified by the ministries of PAN and RB, we successfully entered 2 (two) innovations, Electronic Medical Network Information Systems Patients On Line (Si Jempol) and Tax Shopping. Both innovations are included in the top 99 innovations of public service in 2017 accordance with the Decree of the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform No. 20 dated April 12, 2017 Concerning the Stipulation of the Top 99 Public Services Innovations of 2017.*

*Electronic Medical Network Information Systems Patients On Line (Si Jempol) and Innovation of Tax Shopping are innovations of public services in Tangerang Local Government related to health services and land and building tax (PBB) according to society requirement. Both innovations have been implemented since 2015.*

*Innovation of Electronic Medical Network Systems Patients On line (Si Jempol) is an innovative application of information technology in patient care and clinical governance. This application includes SIRESPON (Online Patient Reservation System), AUTOPRAMA (independent patient registration pavilion), e-Prescription (electronic and integrated prescription writing and processing), SIHAKMAS (Information System Results Through Short Message Service), INFOTON (online patient beds information), and e-Brojol (New Born Baby Come Home With Excerpt Of Birth Certificate). The benefits of this application make it easier for people to receive health services easily, quickly and partisipation so that the impact on increasing public confidence due to get the certainty of service hours, minimize mistakes, reduction of queuing patient, transparency of inpatient bed availability for hospitalization and ease of birth certificate handling. This is evident from the increase in patient satisfaction rate in 2015 by 73.50% to 80.43% in 2016.*

*Tax shopping is an extension of payments network of land and building tax (PBB) in cooperation with banking (PT.BJB) and non banking (mini market outlets / alfamart / indomart) the amount of value of provision from Rp. 0, - to Rp.1.000.000, - with only bring the number of tax object (NOP) to minimarket society becomes easy and comfortable in doing land and building tax. This has an impact on increasing public compliance in paying land and building tax so that it can increase the local revenue of the land and building tax sector for development in Tangerang Regency whose benefits can be felt by the community and can reduce tax receipts in Tangerang Regency.*

*This is evident from the realization of PBB-P2 from 2014 of RP279.750.432.319, - in 2016 increased to RP.354.410.622.045,- This innovation also raises efficiency for Tangerang district government in*

*preparing billing infrastructure and earth and building tax service personnel.*

*Innovation of application Medical Network Systems Patients On line (Si Jempol) and Tax Shopping will always be improved and evaluated to improve their service and become stimulant of other innovations in various fields to create Future Brilliant Tangerang Regency.*



## Walikota Sukabumi **H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.**

Saya menyambut baik metode Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik karena akan mendorong para Pimpinan Daerah mewujudkan pelayanan publik terbaiknya untuk masyarakat.

Banyak masyarakat menengah ke bawah yang menderita sakit karena awalnya tidak punya dana atau kartu kesehatan untuk berobat. Sebab itulah saya membuat terobosan untuk membangun RSUD Al-Mulk agar seluruh warga Kota Sukabumi tanpa melihat status sosial dan ekonominya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, cukup dengan menunjukkan e-KTP dan kartu keluarga (CETEK), dimanabiaya pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Sukabumi. Namun demikian, pelayanan kesehatan promotif dan preventif tetap menjadi prioritas program dalam pembangunan kesehatan terutama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pendekatan keluarga.

*I reply a good response to the method of Public Service Innovation Competition due to it pushes the Local Government Leaders to realize their best public services for society.*

*Many medium to low level society are sick because of they initially do not have money or health card to take medicine. Hence, I make a breakthrough to build a Local Government's hospital of Al-Mulk in order to all citizen of Sukabumi City regardless their social and economical status having a free health services, only with showing their e-KTP (citizen card) and family card (CETEK), which all health services are covered by local government's budget of Sukabumi City. However, promotive and preventive health service are remain to be a program priority in health development especially the Movement of Healthy Live Society (GERMAS) by family approach.*



## Walikota Probolinggo **Hj. Rukmini SH, Msi**

Si INOL Aja merupakan inovasi pelayanan publik dibidang pembangunan sanitasi yang mampu menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi tepat guna, sistem aplikasi arisan /angsuran dan pelibatan tokoh masyarakat/tokoh agama serta dunia usaha. Inovasi ini telah terbukti mampu mengikis perilaku Buang Air Besar sembarangan (BABs). Program ini juga cukup mudah untuk direplikasi ke wilayah lainnya. Inovasi pembangunan sanitasi ini ternyata juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan selanjutnya dapat merubah mindset masyarakat bahwa lingkungan bersih adalah pintunya sehat dan sehat adalah pintu kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

*SI INOL AJA as the service innovation system for toilet insallment increase the self reliance of people. Appropriate technology based on local conditions. Using the lotteries application and establishing awareness of society, religions leader and bussiness, this innovation evidently decrease the open defecation. This program is simple to replicated to another areas. Sanitation innovation prove to increasing the local economics growth and at least chage the people mindset that Healty environment is as the door for being healthy and being healthy is the door for wealthy life.*



## Walikota Payakumbuh **Riza Falepi, ST, MT**

"Merokok merupakan salah satu faktor pencetus resiko dari PTM (Penyakit Tidak menular) seperti Hypertensi, Stroke, Kolesterol Tinggi, dll. Faktor kecacatan dan beban biaya yang ditimbulkan oleh PTM merupakan ancaman kepada individu, masyarakat, dan pemerintah kota. Untuk mengurangi faktor resiko tersebut, Saya sebagai Walikota Payakumbuh menyatakan perang terhadap rokok dengan penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang KTR (Kawasan tanpa Rokok) secara kaffah. Salah satu implementasi dari Perda tersebut adalah inovasi program Puskesmas Padang Karambia Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh melalui program "Klinik Berhenti Merokok" . Insy Allah selama lebih kurang 5 tahun inovasi program ini dapat membuahkan hasil. Harapan kita tentunya penurunan kasus PTM akan dapat kita wujudkan kedepan. Saya berharap, TOP Ninety (90) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, tentunya akan memberikan gairah baru bagi Kami untuk berinovasi selanjutnya

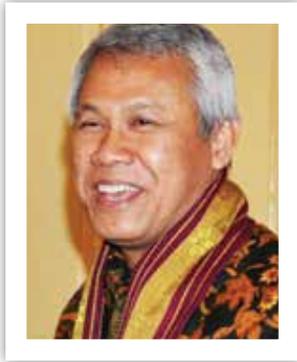
*"Smoking is one of the risk-triggering factors of PTM (Non-communicable Diseases) such as Hypertension, Stroke, High Cholesterol, etc. Disability factors and costs incurred by PTM are a threat to individuals, communities, and municipalities. To reduce these risk factors, I as the Mayor of Payakumbuh declared war on cigarettes with the implementation of Local Regulation No. 15 of 2011 on KTR (Regions without Cigarettes) kaffah. One of the implementation of the regulation is the innovation of Padang Karambia Puskesmas program of Payakumbuh Health Office through "Stop Smoking Clinic" program. Insha Allah for more or less 5 years of innovation this program can produce results. Our hope of course the decrease of PTM case will be able to realize the future. I hope, TOP Ninety (90) Public Service Innovation Year 2017, will certainly provide a new passion for us to innovate further*



## Walikota Tasikmalaya **Drs. H. Budi Budiman**

Saya menyambut baik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dapat memotivasi untuk senantiasa melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdayaa Saing, Dan Inovatif – Sebagai Model Pembangunan Berbasis Partisipasi) merupakan Model Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat yang sangat bagus dan bermanfaat bagi masyarakat dan sangat membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk terus melanjutkannya.

*I welcome the Public Service Innovation Competition implemented by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy Reform, which can motivate to always innovate in providing the best service to the community. GEMA MADANI SIMPATI PROGRAM (Independent Community Movement, Competitive, and Innovative - Participatory Development Model) is a Community-Based Development Model that is very good and beneficial to the community and very helpful to the Tasikmalaya City Government. Therefore, I am committed to continue it*



Walikota Yogyakarta  
**Drs. SULISTIYO, SH., CN., M.Si.**

Inovasi "Keluar Bersama" Daftar 1 Dapat 5 merupakan langkah terobosan pelayanan publik yang mengintegrasikan pelayanan berbagai dokumen anak, sehingga memberikan kemudahan dan memperpendek alur pelayanan dokumen anak pasca melahirkan (NIK, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Buku Kesehatan Ibu dan Anak). Selain itu dengan inovasi ini tersusun database ibu hamil serta pelayanan edukasi kesehatan ibu hamil melalui Sistem SMS Gateway.

Sebelum dicanangkan inovasi, proses pengurusan lima dokumen tersebut dilakukan secara parsial, namun saat ini dengan adanya "Keluar Bersama", pengurusan dokumen sudah terintegrasi sehingga dengan dokumen terwujud efisiensi dan efektivitas pelayanan, akselerasi kepemilikan dokumen anak serta sinergisitas aspek kependudukan dan kesehatan. Selain itu, inovasi ini juga memberikan manfaat terhadap kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang semakin meningkat.

Inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Danurejan ini merupakan bentuk keberhasilan pelimpahan kewenangan yang diterapkan di Pemerintah Kota Yogyakarta di mana wilayah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang ada serta melakukan perencanaan dan pembangunan sendiri guna menjawab ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akurat.

Harapan kami, terpilihnya inovasi ini ke dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2017 mudah-mudahan mampu memotivasi daerah lain untuk mereplikasi sekaligus menginisiasi tumbuhnya inovasi lain baik dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun daerah lain demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

*"Keluar Bersama" Daftar 1 Dapat 5 innovation is a breakthrough measure on public service integrating the provision of several parentage documents that offers the convenience and shortens the service-flow of post-natal parentage documents (National Identity Number (NIK), Family Card, Child Identity Card (KIA), Birth Certificate, and Maternal-and-Child Health Book). Moreover, through this innovation the database of pregnant mothers will be easily compiled and subsequent health education service designated to pregnant mothers will be easily broadcasted via SMS Gateway.*

*Prior to this innovation inaugurated, the steps to be completed for administering those five documents were done partially one to another. However, through the commencement of "Keluar Bersama", the acquiring process for obtaining those documents now have been completely integrated, thereby*

*service for the citizens is more efficient and effective, the ownership of parentage documents is improving and there exists the synergy between population improvement and health aspects of the development. Furthermore, this innovation also benefits on increasing numbers of Birth Certificate and Child Identity Card ownership throughout the population.*

*This innovation initiated by Danurejan Sub District is a successful implementation of the authority delegation conducted by the Yogyakarta City Government, in which the local Sub District authorities are given the mandate to cope with their areas' problems and administering their own planning and development to fulfill the community's expectation for professional, prompt, and accurate public services.*

*We certainly wish through the nomination of this innovation into TOP 99 Indonesian Public Service Innovations 2017, it will motivate other working units to do the replication or the improvement, even it will also trigger for other emerging innovations within Yogyakarta City Government in achieving for the enhancement of public service quality.*



## Walikota Semarang, **Hendrar Prihadi**

Beberapa tahun ini kami di Pemerintah Kota Semarang berusaha keras untuk mengubah pola pembangunan dari yang tadinya bersifat 'instruktif' menjadi 'partisipatif'. Untuk itu ada dua hal yang kami jalankan sesuai dengan apa yang diupayakan oleh Presiden Republik Indonesia, bapak Joko Widodo. Dua hal tersebut adalah 'Revolusi Mental' dan 'Reformasi Birokrasi'. Salah satu implementasi dua hal besar tersebut kami implementasikan dalam inovasi "Ijus Melon" atau kepanjangannya adalah "Ijin Usaha Mikro Melalui Online".

Melalui "Ijus Melon" kami ingin mendorong "Revolusi Mental" di masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memajukan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Yang tentu saja hal tersebut dapat dilakukan dengan komitmen untuk menjadi seorang wirausaha.

Dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah kota Semarang hadir dengan memberikan berbagai dukungan masyarakat untuk bisa berwirausaha, yang antara lain memberi kemudahan dalam perijinan usaha mikro untuk dapat lebih mudah mengakses hal-hal pendukung lainnya seperti permodalan.

Kemudahan perijinan tersebut kami wujudkan sebagai bagian dari "Reformasi Birokrasi" dengan mengaplikasi sistem Smart City untuk memangkas birokrasi. Sehingga saat ini masyarakat di Kota Semarang dapat mengurus perijinan hanya dengan melalui ponsel pintar.

Dan besar harapan kami, inovasi kami tersebut dapat menginspirasi Indonesia untuk mewujudkan salah satu Nawacita bapak Presiden Joko Widodo yaitu, "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya."

Untuk itu kami berterima kasih kepada Kemenpan-RB yang terus memberikan pendampingan kami di Pemerintah Kota Semarang. Besar harapan saya, bersama Kemenpan RB, Pemerintah Kota Semarang dapat terus menghasilkan inovasi untuk mewujudkan Indonesia Hebat.

*In recent years we in Semarang City Government have been trying hard to change the pattern of development from what was 'instructive' to 'participative'. For that there are two things that we run in accordance with what is endeavored by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo. Two points are the 'Mental Revolution' and 'Bureaucratic Reform'. One of the implementation of the two great things that we implement in innovation "Ijus Melon" or stands is "Micro Business License Through Online".*

*Through "Ijus Melon" we want to encourage the "Mental Revolution" in society to be able to participate in advancing the economy and opening employment field. Which of course it can be done with komitmem to become an entrepreneur.*

*And the government, in this Semarang City Government comes with a variety of community support for entrepreneurship, which among others provide convenience in licensing micro businesses to be able to more easily access other supporting things such as capital.*

*Ease of licensing that we realize as part of the "Bureaucratic Reform" by applying the Smart City system to cut the bureaucracy. So now people in the city of Semarang can take care of licensing only through smart phones.*

*And our great hope, our innovation can inspire Indonesia to realize one of Nawacita Mr. President Joko Widodo that is, "Improving people's productivity and competitiveness in the international market so that the nation of Indonesia can go forward and rise with other Asian nations.*

*For that we thank the Kemenpan-RB who continue to provide our assistance in Semarang City Government. My hope, together with Kemenpan RB, Semarang City Government can continue to produce innovation to realize Great Indonesia.*



## Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB DKI **Sutopo Purwo Nugroho**

Ini adalah platform pertama di dunia di mana pemantauan bencana menggunakan media sosial secara realtime. Sebelumnya sudah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dan sukses besar. Artinya apa? Begitu cepat laporan dari masyarakat dengan menggunakan Twitter dan lainnya, sehingga BPBD DKI dan BNPB bisa melaporkan kepada publik cepat sekali. Di mana genangnya? Berapa ketinggian? Berapa pengungsi?

*This is the first platform in the world where disaster monitoring uses social media in real-time. Previously, it has already applied in DKI Jakarta Province and great success. What does it mean? So quickly reports from the public using Twitter and others, so that BPBD DKI and BNPB can report to the public very quickly. Where the puddle is, how much the height is, and how many the refugees are.*

---



## Kepala Kantor Cabang BANK BRI Kabupaten Pemalang **Budi Prabowo**

"Layanan dari BPN yang terkait dengan BRI diantaranya "STAR@BRI" sangat signifikan dalam percepatan membantu nasabah pinjaman salah satu persyaratan teknis yaitu pemenuhan agunan, dimanalayanan STAR@BRI ini mempercepat dan memberikan kepastian legalitas agunan (dari letter C menjadi SHM/SHGB) BRI mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama ini

dan semoga tetap berlanjut."

*"Pemalang Local Land Service initiated STAR-BRI as an integrated part of INTI (Intergrated Innovation). This program is significant in accelerating community's wealth by providing speed and ease in fulfilling one of the requirements in personal loan application. The loan's collateral accelerates the legality of personal loan (from Letter C to SHM/SHGB) by the strategy of STAR-BRI program. It has been an honor to cooperate with Pemalang Local Land Office. Hopefully this collaboration holds in continuity."*



Kaprodi Budidaya Politeknik  
Pertanian Negeri Pangkep  
**Rimal Hamal**

Penataan ruangan interior kamar sangat nyaman dengan lingkungan yang tenang jauh dari keramaian. Menikmati istirahat di sini sangatlah menyenangkan.

*The interior room layout is very comfortable with a quiet environment away from the crowd. Enjoying a break here is very enjoyable.*



Direktur PT. AKR Land  
**Widijanto**

"Dengan inovasi KAKAP oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mulai tahun 2015 sangat membantu kami selaku investor untuk memperoleh informasi bidang tanah, tata ruang, zonasi nilai tanah dalam hitungan menit. Ini merupakan terobosan luar biasa, kami merasa nyaman dan mudah dalam berinvestasi. Dalam waktu singkat kami sudah bisa membuat rencana investasi dan perkiraan besaran dana investasi yang dibutuhkan dalam perencanaan, perijinan, pembebasan lahan. Semoga KAKAP bisa diterapkan diseluruh wilayah Gresik dan Indonesia umumnya, sehingga bisa menjadi katalisator perekonomian dan investasi bagi dunia usaha."

*"With KAKAP innovation by Gresik District Office starting in 2015 is very helpful for us as investors to obtain information on land, spatial, zonation of land value in minutes. This is a great breakthrough, we feel comfortable and easy to invest. In a short time we can make investment plans and estimates of the amount of investment funds needed in planning, licensing, land acquisition. Hopefully KAKAP can be applied throughout Gresik and Indonesia generally, so it can be catalyst of economy and investment for business world."*



Koordinator Tim Evaluasi Kompetisi  
Inovasi Pelayanan Publik 2017  
**Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.  
M.Hum.**

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan publik merupakan salah satu wujud dari amanat itu.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan cara cepat untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kuantitas dan kualitas peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 merupakan gambaran bahwa pelayanan publik yang cepat, murah dan berkualitas merupakan tekad penyelenggara Pemerintahan Negara.

*Paragraph IV The Preamble of the 1945 Constitution concedes that the objective of the formation of the State Government is to protect the entire nation and the whole of Indonesia's blood sphere, to promote the common prosperity and intellectual life of the nation. Public service is one manifestation of the message. The Public Service Innovation Competition is a quick way to expand and improve the quality of service for all Indonesians. Increasing the quantity and quality of participants of the 2017 Public Service Innovation Competition is a determination of the fast, cheap and quality public service of the State Administration Organizer.*



Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik 2017  
**Prof. Dr. Niartiningsih, M.Si.**

Saya sangat berterima kasih kepada Kementerian PANRB yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terlibat sebagai tim evaluator dalam Program Sinovik 2017. Dari program ini saya memperoleh banyak pengalaman baik ketika mengevaluasi proposal yang begitu beragam inovasi dan bidangnya maupun ketika turun ke lapangan untuk verifikasi dan validasi. Di

lapangan saya menemukan bahwa ternyata program ini telah berhasil membangkitkan semangat sekaligus menyadarkan masyarakat akan arti penting dari pelayanan, yang akhirnya berdampak terhadap tumbuh dan lahirnya inovasi baru yang kesemuanya bermuara pada kesadaran untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, sehingga konsumen puas, lebih percaya, merasa

lebih diperhatikan dan dipentingkan sebagai manusia yang berhak memperoleh pelayanan prima. Semoga program ini terus berlanjut untuk terus melahirkan inovasi baru dalam pelayanan publik di Indonesia.

*I am very grateful to Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform who has given me the confidence to be involved as a team of evaluators in Synovic program 2017. From this program I gain a lot of experience, when evaluating proposals that are so diverse innovations as well as when it goes down to the field for verification and validation. In the field I found out that this program has succeeded in raising the spirit as well as awaken the public to the importance of the service, which ultimately affects the growth and birth of new innovations which all boils down to the awareness to provide high quality service, so that consumers are satisfied, more confident, more attention and importance as a human being entitled to excellent service. Hopefully this program continues to create new innovations in public service in Indonesia.*



## Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 **Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.**

Tata kelola yang efektif dan efisien merupakan kata kunci bagi layanan publik yang didambakan masyarakat. Ini hanya dapat diwujudkan bila ada komitmen penuh dari pimpinan untuk melakukan perubahan. Layanan prima tentu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara instan. Tantangan dari berbagai arah jamak mewarnai dinamika perubahan itu. Pemimpin yang inovatiflah yang mampu mengatasinya.

Program Sinovik yang digagas Kementerian PANRB ini membuktikan bahwa sudah banyak unit layanan yang sukses mengembangkan berbagai inovasi, tidak hanya di perkotaan tetapi sampai ke pedesaan. Motor dari inovasi tersebut lahir dari berbagai kelompok masyarakat dan lapisan kepemimpinan. Semua ini membuktikan bahwa inovasi tidak harus mahal, tidak harus menunggu perangkat yang canggih dan anggaran khusus. Inovasi harus datang dari hati untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Selamat kepada satuan kerja yang berhasil memenangi Penghargaan Sinovik.

*Effective and efficient governance is the key word for public services that people covet. This can only be realized if there is full commitment from the leaders to make changes. Excellent service is certainly not something that can be achieved instantly. Challenges from multiple directions are*

*coloring the dynamics of change. Innovative leaders are able to cope.*

*The SINOVIK program initiated by Ministry of PANRB proves that many successful service units have developed innovations, not only in urban areas but also in rural areas. Motor of the innovation was born from various community groups and leadership layers. All of it proves that innovation does not have to be expensive, does not have to wait for a sophisticated device and a special budget. Innovation must come from the heart to provide convenience and comfort for the community.*

*Congratulations to the successful work unit winning the Sinovik Prize.*



Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik 2017  
**Prof. Dr. Augusty Tae Ferdinand, Ph.D.**

Sungguh terkejut dan kagum melihat demikian banyak inovasi yang tidak sekadar inovasi, tetapi inovasi yang memberi energi lebih dan terus mengenergi masyarakat untuk membangkitkan kebanggaan Indonesia. Me-*review* sekitar 200 kegiatan inovasi dan melihat sendiri di lapangan, memberikan impresi kagum, inovasi yang memiliki *community based autonomous*

*sustainability* yang tinggi. Semoga pelayanan sektor publik akan semakin mengenergi masyarakat Indonesia. Terima kasih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

*I was shocked and amazed to see so many innovations that are not just innovations but innovations that give more energy, and continue to energize the community to evoke the pride of Indonesia ... reviewing about 200 innovation activities and seeing on the field gives amazing impression. Innovations with high community based autonomous. Hopefully the public sector services will further energize the people of Indonesia. Thank you to the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia.*



Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik 2017  
**Prof. Dr. Drs. Jusuf Irianto, M.Com.**

"Kebutuhan masyarakat terus berkembang seiring perubahan zaman. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tentu saja membutuhkan layanan publik yang inovatif dan relevan dengan tuntutan. Dalam konteks demikian inilah, Kementerian PANRB mengambil langkah yang sangat tepat dan objektif yakni menyelenggarakan Lomba Inovasi Layanan Publik berskala nasional untuk mendorong sektor publik di Indonesia semakin kompetitif hingga level internasional dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat".

*"The needs of society continue to evolve with the changing times. Fulfilling the needs of the community, of course, requires innovative and relevant public services to the demands. In this regards, the Ministry of PANRB took a very precise and objective step, to hold a nationwide Public Service Innovation Competition to encourage public sector In Indonesia increasingly competitive to the international level in providing the best service for the community".*



Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik 2017  
**Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si.**

"*Small Action, Big Impact*", itulah hakekat inovasi yang sesungguhnya. Inovasi menjadi kunci bagi legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karenanya, pemerintah dituntut untuk mengubah cara berpikir dan cara kerja serba konvensional dengan terobosan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan harapan publik.

*"Small Action, Big Impact", that's the essence of true innovation. Innovation is the key to government legitimacy in the public eye. Therefore, the government is required to change the way conventional thinking and how to work with a breakthrough in line with the development of the times and public expectations.*



## Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 **Susi Dwi Harijanti, S.H. LLM. Ph.D.**

Ditinjau dari hubungan antara rakyat dan negara, salah satu fungsi mendasar negara modern adalah memberikan pelayanan (*the service state*). Pelayanan merupakan salah satu bentuk pekerjaan konkret pemerintah terhadap rakyat. Bahkan lebih fundamental, pelayanan dipertalikan dengan kesejahteraan umum, bukan sekadar sebutan *the service state*.

Pelayanan dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah mengetahui secara pasti kebutuhan rakyat yang dilayaninya. Selain itu, rakyat juga menyadari hak-hak yang dimilikinya sehingga apabila merasa tidak puas atas pelayanan yang diterima mereka dapat "menuntut" negara. Hal ini sejalan dengan kewajiban konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 'Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak'. Dalam tataran internasional Pasal 21 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya. Dalam konteks inilah, inovasi pelayanan publik menjadi penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Indonesia secara merata.

*Reviewing from the relationship between society and the state, one of the fundamental functions of the modern state is to provide services (the service state). Services are form of real work of the government towards the people. Even more fundamentally, services associated with general welfare, not merely the service state.*

*Services can be well implemented if the government knows exactly the needs of the society they serve. In addition, the society are also aware of their rights so that if they feel dissatisfied with the services they receive they can 'demand' the state. This is in line with the constitutional obligations of the state as defined in Article 34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which states 'The State is responsible for the provision of health service facilities and decent public service facilities'. At the international level Article 21 paragraph (2) of the 1948 Declaration of Human Rights affirms that everyone is entitled to equal access to public services in his/her country. In this context, the innovation of public service becomes important in order to improve the service quality in Indonesia evenly.*



Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik 2017  
**Dr. Zakaria Wahab, MBA.**

Saya salut dengan inovasi yang diciptakan rekan-rekan dari berbagai daerah serta komitmen yang ditunjukkan SDM dalam mendukung inovasi tersebut meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas. Semuanya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

*I applaud the innovations created by fellow colleagues from various regions as well as the commitment shown by the human resources in support of the innovation with all the limited facilities. Everything in order to provide excellent service to the community.*



Anggota Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik 2017  
**Prof. Dr. E.S. Margianti, MM.**

Sungguh sebuah pengalaman yang sangat unik dan berharga terlibat secara aktif dalam tim evaluasi Sinovik 2017. "Sebuah program yang sangat baik dalam merangkul, mendorong dan memotivasi peningkatan bidang Pelayanan Publik di Indonesia. Heterogenitas proposal yang diusulkan juga memberikan gambaran dan pengayaan wawasan yang luar biasa bagi para evaluator di samping juga sangat berguna sebagai contoh "praktik baik" bagi para pemangku bidang pelayanan publik di Indonesia"

*It is truly a very unique and valuable experience to be actively involved in the 2017 Sinovik evaluation team. "An excellent program for engaging, encouraging and motivating improvements of Public Service in Indonesia. The heterogeneity of the proposal also provides an enormous insight and enriching experience for The evaluators are also very useful as an example of "good practice" for public service stakeholders in Indonesia.*





# TOP 99

INOVASI  
PELAYANAN  
PUBLIK  
TAHUN 2017

